



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA



RPJMD

RENCANA
PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH
DAERAH

PULAU PUNJUNG 2021



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021 – 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
7. tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 56);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
dan
BUPATI DHARMASRAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021-2026.

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Dharmasraya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Dharmasraya.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.

9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah kabupaten untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Dharmasraya untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
15. Strategi adalah langkah berisikan Program-program sebagai prioritas Pembangunan daerah/Perangkat daerah untuk mencapai sasaran.
16. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 2

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKPD.

Pasal 3

RPJMD merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta Program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 4

Pengaturan RPJMD bertujuan untuk:

- a. sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD dan Renstra-PD; dan
- b. sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu Tahun 2021-2026

Pasal 5

(1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : Pendahuluan;
- b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- c. BAB III : Gambaran Keuangan Daerah;
- d. BAB IV : Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;
- e. BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
- f. BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah;
- g. BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
- h. BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- i. BAB IX : Penutup

(2) Penjabaran RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Daerah.

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan;
 - c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.
- (3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan dalam hal :
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.

(2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Pasal 9

Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 25 Agustus 2021

BUPATI DHARMASRAYA,

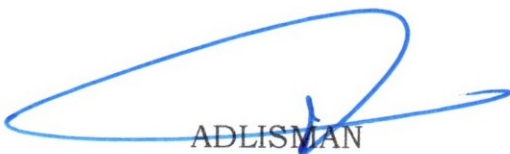


SUTAN RISKA

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 2021

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN DHARMASRAYA



ADLISMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2021 NOMOR 2
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT : (2/57/2021)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR...TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021–2026

I. UMUM

Pada hakikatnya perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional dengan arah, tujuan, kebijakan, sasaran dan prioritasnya sebagaimana ditetapkan dalam RPJPN. Kebijakan tersebut selanjutnya dituangkan dalam RPJMN dengan tujuan untuk memberikan gambaran mengenai wujud masa depan yang diinginkan dalam kurun waktu lima tahun. Perencanaan pembangunan daerah disusun atas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdiri atas RPJPD, RPJMD, dan RKPD. RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN, RPJPD Provinsi dan rencana tata ruang wilayah. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati/Walikota terpilih harus menyusun RPJMD sebagai penjabaran dari visi dan misinya. Bahkan dalam ketentuan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Peraturan Daerah tentang RPJMD wajib ditetapkan

paling lama 6 (enam) bulan setelah Bupati terpilih dilantik. Penyusunan RPJMD ini berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dilakukan dengan menggunakan lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*). Selanjutnya RPJMD nantinya akan digunakan sebagai pedoman penyusunan Renstra-PD dan pedoman penyusunan RKPD pada setiap tahun anggaran. Selain itu juga dijadikan acuan bagi penyusunan perencanaan pembangunan lainnya serta acuan penyusunan RAPBD Kabupaten.

Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: penjabaran RPJMD yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah, dan perubahan RPJMD yang tata caranya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pemangku Kepentingan” adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan, Akademisi, representasi Partai Politik, Lembaga

Swadaya Masyarakat/Organisasi Masyarakat, tokoh masyarakat di Daerah dan kabupaten/kota serta Nagari/Desa/Kelurahan, pengusaha/investor, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Sistematika RPJMD merujuk pada ketentuan Pasal 47 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

DAFTAR ISI

BAB 1. PENDAHULUAN.....	1-1
1.1. Latar Belakang.....	1-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	1-4
1.3. Hubungan Antar Dokumen.....	1-6
1.4. Maksud Dan Tujuan	1-9
1.5. Sistematika Penulisan.....	1-9
BAB 2. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....	2-1
2.1. Aspek Geografi Dan Demografi.....	2-1
2.1.1. Karakteristik Wilayah.....	2-1
2.1.2. Kerawanan Bencana Alam.....	2-21
2.1.3. Kondisi Demografi	2-28
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	2-32
2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	2-32
2.2.2. Laju Pertumbuhan PDRB.....	2-34
2.2.3. PDRB Perkapita (pendapatan perkapita).....	2-36
2.2.4. Indeks Gini (Ketimpangan pendapatan)	2-37
2.2.5. Tingkat Kemiskinan	2-38
2.2.6. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2-39
2.3. Aspek Pelayanan Umum.....	2-40
2.3.1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar.....	2-40
2.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar.....	2-68
2.3.3. Urusan Pemerintahan Pilihan.....	2-93
2.3.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	2-100
2.3.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	2-103
2.3.6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan.....	2-106
2.3.7. Unsur Pemerintahan Umum.....	2-107
2.4. Standar Pelayanan Minimal (SPM)	2-108
2.4.1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	2-109
2.4.2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan.....	2-110
2.4.3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	2-113
2.4.4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ..	2-113
2.4.5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	2-113
2.4.6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial.....	2-114
2.5. Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Dharmasraya	2-115
2.6. Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan (DDDTLH)	2-119
2.6.1. Supply dan Demand (DDDTLH Ril).....	2-119
2.6.2. Analisis DDDTLH: Jasa Ekosistem	2-124
BAB 3. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH.....	3-1

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu	3-1
3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD	3-3
3.1.2. Neraca Daerah	3-30
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	3-36
3.2.1. Kebijakan pendapatan daerah.	3-36
3.2.2. Kebijakan Belanja Daerah.....	3-37
3.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	3-41
3.3. Kerangka Pendanaan	3-44
3.3.1. Kebijakan Pengelolaan Keuangan	3-44
3.3.2. Proyeksi Pendapatan dan Belanja	3-46
3.3.3. Penghitungan Kerangka Pendanaan.....	3-50
BAB 4. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH.....	4-1
4.1. Permasalahan Pembangunan	4-1
4.1.1. Permasalahan pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup (infrastruktur)	4-1
4.1.2. Permasalahan pembangunan sumber daya manusia	4-2
4.1.3. Permasalahan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat	4-2
4.1.4. Permasalahan birokrasi pemerintahan daerah (birokrasi).....	4-2
4.2. Isu strategis berdasarkan KLHS :	4-3
4.3. Isu Strategis Daerah	4-4
4.3.1. Dampak pandemi Covid-19.....	4-4
4.3.2. Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)	4-5
4.4. Penelaahan Dokumen Perencanaan Lainnya	4-11
4.4.1. RPJPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005-2025	4-11
4.4.2. RPJM Nasional Tahun 2020-2024	4-14
4.4.3. RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.....	4-15
4.4.4. Hubungan Dokumen Perencanaan Dan Dokumen Penataan Ruang	4-16
BAB 5. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	5-1
5.1. Visi RPJMD 2021-2026	5-2
5.2. Misi RPJMD 2021-2026	5-3
5.3. Tujuan Dan Sasaran	5-3
5.4. Prioritas Pembangunan.....	5-9
BAB 6. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH.....	6-1
BAB 7. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT	
DAERAH.....	7-1
BAB 8. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	8-1
8.1. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah (IKU Daerah).....	8-2
8.2. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU PD)	8-4
BAB 9. PENUTUP	9-1
9.1. Kaidah Pelaksanaan	9-1
9.2. Pedoman Transisi	9-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2-1 Luas Wilayah, Banyaknya Nagari dan Jorong.....	2-2
Tabel 2-2 Tingkat Kelerengan Lahan Kabupaten Dharmasraya	2-4
Tabel 2-3 Nama, Lokasi dan Kondisi Fisik Sungai	2-7
Tabel 2-4 Jenis Tanah di Kabupaten Dharmasraya (koreksi data oleh pak sek).....	2-9
Tabel 2-5 Penyebaran Jenis Tanah.....	2-9
Tabel 2-6 Formasi Dan Litologi Peta Geologi Kabupaten Dharmasraya	2-15
Tabel 2-7 Luas Tutupan Lahan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017.....	2-18
Tabel 2-8 Peruntukan Lahan Berdasarkan Status Lahan	2-20
Tabel 2-9 Ijin Usaha (IUP) Pertambangan	2-20
Tabel 2-10 Ijin Usaha (IUP) Pertambangan	2-20
Tabel 2-11 Gerakan Tanah Wilayah Kabupaten Dharmasraya	2-23
Tabel 2-12 Luas Daerah Rawan Longsor Berdasarkan Tingkat Kerawananan	2-25
Tabel 2-13 Kondisi Kualitas Air Sungai di Kabupaten Dharmasraya	2-27
Tabel 2-14 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Dharmasraya Tahun 2016-2020.....	2-28
Tabel 2-15 Kepadatan Penduduk Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020	2-29
Tabel 2-16 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020	2-30
Tabel 2-17 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020	2-31
Tabel 2-18 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016-2020	2-33
Tabel 2-19 Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga konstan dan Atas Harga berlaku Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019-2020	2-36
Tabel 2-20 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020	2-40
Tabel 2-21 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/ sederajat Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020	2-41
Tabel 2-22 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ Sederajat Tahun 2016-2020	2-41
Tabel 2-23 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ Mi Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020	2-42
Tabel 2-24 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020.....	2-43
Tabel 2-25 Angka Harapan Hidup Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020	2-43
Tabel 2-26 Angka kematian bayi Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020.....	2-44
Tabel 2-27 Angka Kematian Ibu melahirkan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020	2-44
Tabel 2-28 Prevalensi Malnutrisi Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020.....	2-45
Tabel 2-29 Persentase Rumah Tangga PHBS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020	2-46
Tabel 2-30 Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020.....	2-46
Tabel 2-31 Persentase KLB yang ditangani ≤ 24 jam Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020	2-47
Tabel 2-32 Cakupan pencegahan dan pengendalian penyakit menular Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020	2-47
Tabel 2-33 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit Tidak Menular Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020	2-48
Tabel 2-34 Visit rate Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020.....	2-49
Tabel 2-35 Persentase Puskesmas Terakreditasi Utama Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020	2-49

Tabel 2-36 Rincian Akreditasi Puskesmas	2-50
Tabel 2-37 Persentase UPT RSUD Terakreditasi Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020.....	2-51
Tabel 2-38 Ruas Jalan Nasional di Kabupaten Dharmasraya	2-51
Tabel 2-39 Ruas Jalan Provinsi di Kabupaten Dharmasraya.....	2-51
Tabel 2-40 Updating Panjang Ruas Jalan Di Kabupaten Dharmasraya.....	2-52
Tabel 2-41 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Dharmasraya.....	2-52
Tabel 2-42 Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Dharmasraya.....	2-53
Tabel 2-43 Jumlah Ruas per Kecamatan dan Kondisinya, 2019	2-53
Tabel 2-44 Kondisi Ruas Jalan di Kabupaten Dharmasraya.....	2-54
Tabel 2-45 Jenis Jembatan	2-55
Tabel 2-46 Kondisi Lantai Jembatan.....	2-56
Tabel 2-47 Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik Tahun 2016-2020	2-56
Tabel 2-48 Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik Tahun 2016-2020	2-57
Tabel 2-49 Persentase Penduduk yang Terlayani Jaringan Pipa Air Minum di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020.....	2-58
Tabel 2-50 Sebaran Jumlah Rumah di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020	2-58
Tabel 2-51 Cakupan Permukiman Layak Huni Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020.....	2-60
Tabel 2-52 Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020	2-61
Tabel 2-53 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Berdasarkan Rumah Tangga di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020	2-61
Tabel 2-54 Persentase Kawasan Permukiman Kumuh di bawah 10 hektar yang ditangani Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020	2-63
Tabel 2-55 Cakupan Lingkungan Permukiman Sehat dan Aman Didukung dengan PSU Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020	2-64
Tabel 2-56 Cakupan rumah layak huni yang terjangkau Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020	2-64
Tabel 2-57 Persentase Penyelesaian Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2016- 2020.....	2-65
Tabel 2-58 Persentase Penegakan Perda dan Perkada yang memuat sanksi Tahun 2016-2020	2-65
Tabel 2-59 Persentase Respon time 15 menit pada Lokasi Kebakaran Tahun 2016-2020	2-66
Tabel 2-60 Indikator Kebencanaan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020.....	2-66
Tabel 2-61 Data Bencana di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020.....	2-67
Tabel 2-62 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran	2-67
Tabel 2-63 Persentase PPKS Yang Tertangani Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020.....	2-68
Tabel 2-64 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020	2-68
Tabel 2-65 Persentase keaktifan Focalpoint Perangkat Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020.....	2-69
Tabel 2-66 Persentase Organisasi Perempuan yang aktif Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020	2-70
Tabel 2-67 Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020	2-70
Tabel 2-68 Rasio perempuan korban kekerasan yang tertangani Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016- 2020.....	2-71
Tabel 2-69 Rasio kekerasan dalam rumah tangga Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020	2-71
Tabel 2-70 Persentase cadangan pangan terhadap kebutuhan pangan daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020.....	2-72

Tabel 2-71 Ketersediaan Kalori dan Protein Perkapita/hari Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020	2-73
Tabel 2-72 Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020.....	2-73
Tabel 2-73 Persentase tanah Pemerintah daerah yang bersertifikat Tahun 2016-2020	2-74
Tabel 2-74 Persentase Penyelesaian / Fasilitas Kasus Tanah Pemerintah Tahun 2016-2020.....	2-75
Tabel 2-75 Indeks Kualitas Air Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020	2-75
Tabel 2-76 Indeks Kualitas Udara Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020.....	2-75
Tabel 2-77 Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020.....	2-76
Tabel 2-78 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020.....	2-76
Tabel 2-79 Cakupan Sumber Daya Alam yang Terlindungi di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020	2-77
Tabel 2-80 Meningkatnya Luas Tutupan Lahan/Menurunnya Lahan Kritis Tahun 2016-2020.....	2-77
Tabel 2-81 Cakupan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020.....	2-78
Tabel 2-82 Cakupan Ketaatan Usaha dan/atau Kegiatan Dalam Pengelolaan Limbah B3 di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020	2-78
Tabel 2-83 Persentase kepemilikan KTP-elektronik Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020.....	2-79
Tabel 2-84 Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020	2-79
Tabel 2-85 Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran pada Penduduk Usia 0-17 Tahun Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020	2-80
Tabel 2-86 Persentase Cakupan Akta Kematian dari Peristiwa Kematian yang dilaporkan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020	2-80
Tabel 2-87 Persentase Nagari Tertinggal dan Sangat Tertinggal Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020	2-81
Tabel 2-88 Angka kelahiran total Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020	2-81
Tabel 2-89 Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (CPR) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020	2-82
Tabel 2-90 Persentase kebutuhan ber-KB (unmet-Need) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020	2-82
Tabel 2-91 Persentase kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) aktif Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020	2-83
Tabel 2-92 Persentase kelompok tribina yang aktif Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020	2-83
Tabel 2-93 Banyaknya Kendaraan Bermotor Wajib Uji Tahun 2020	2-84
Tabel 2-94 Capaian Urusan Bidang Perhubungan Tahun 2016-2020.....	2-84
Tabel 2-95 Persentase Sarana Pemerintah Daerah yang Memiliki Telekomunikasi Terintegrasi di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020	2-85
Tabel 2-96 Jumlah Sistem Informasi dan Aplikasi Dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020	2-85
Tabel 2-97 Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020	2-87
Tabel 2-98 Jumlah Koperasi Sehat Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020.....	2-87
Tabel 2-99 Persentase IKM dengan Peningkatan Omzet Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020	2-88
Tabel 2-100 Jumlah pelaku usaha mikro naik kelas Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020.....	2-88
Tabel 2-101 Nilai realisasi Investasi Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020	2-89
Tabel 2-102 Jumlah cabang olahraga yang aktif Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020	2-89
Tabel 2-103 Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral Tahun 2016-2020	2-89
Tabel 2-104 Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Sertifikat Digital Tahun 2016-2020.....	2-90
Tabel 2-105 Indikator Kinerja Bidang Kebudayaan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020.....	2-91
Tabel 2-106 Jumlah pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan Tahun 2016-2020.....	2-91

Tabel 2-107 Persentase perpustakaan yang melaksanakan manajemen perpustakaan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020	2-91
Tabel 2-108 Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020	2-92
Tabel 2-109 Persentase Nagari yang mengelola arsip secara baku Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020	2-92
Tabel 2-110 Produksi Perikanan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020	2-93
Tabel 2-111 Jumlah kunjungan wisatawan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020	2-94
Tabel 2-112 Jumlah kunjungan wisatawan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020	2-95
Tabel 2-113 Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020	2-98
Tabel 2-114 Produksi Komoditi Unggulan Bidang Pertanian Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020	2-98
Tabel 2-115 Indikator Kinerja Bidang Pedagangan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020	2-99
Tabel 2-116 Indikator kinerja Bidang Perindustrian Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020	2-100
Tabel 2-117 Nilai LPPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020	2-100
Tabel 2-118 Komponen Penilaian Evaluasi Atas Implementasi SAKIP	2-101
Tabel 2-119 Nilai Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020	2-101
Tabel 2-120 Indikator Kinerja Sekretariat daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020	2-102
Tabel 2-121 Indikator Kinerja DPRD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020	2-102
Tabel 2-122 Indikator Kinerja Perencanaan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020	2-103
Tabel 2-123 Indikator Kinerja Keuangan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020	2-103
Tabel 2-124 Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2016- 2020	2-104
Tabel 2-125 Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan kompetensi Tahun 2016 s/d 2020	2-104
Tabel 2-126 Persentase ASN yang menyusun SKP tepat waktu Tahun 2016 s/d 2020	2-105
Tabel 2-127 Persentase penempatan ASN sesuai kompetensi Tahun 2016 s/d 2020	2-105
Tabel 2-128 Persentase kasus ASN yang tertangani Tahun 2016 s/d 2020	2-106
Tabel 2-129 Realisasi Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah	2-106
Tabel 2-130 Kinerja Kesatuan Bangsa dan politik	2-107
Tabel 2-131 Realisasi SPM SD / MI, SMP/MTS	2-109
Tabel 2-132 Realisasi SPM Pendidikan Kesetaraan	2-109
Tabel 2-133 Realisasi SPM PAUD	2-110
Tabel 2-134 Realisasi SPM Bidang Kesehatan	2-110
Tabel 2-135 Realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	2-113
Tabel 2-136 Realisasi SPM Bidang Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman	2-113
Tabel 2-137 Realisasi SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	2-114
Tabel 2-138 Realisasi SPM Bidang Sosial	2-114
Tabel 2-139 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) yang Bukan Kewenangan (BK) Kabupaten Dharmasraya	2-116
Tabel 2-140 Capaian Indikator TPB/SDGs Kabupaten Dharmasraya	2-116
Tabel 2-141 Capaian Indikator TPB/SDGs Kabupaten Dharmasraya Berdasarkan Pilar	2-117
Tabel 2-142 Capaian Indikator TPB/SDGs Provinsi Kabupaten Dharmasraya	2-118
Tabel 2-143 Kondisi Eksisting Daya Dukung Pangan Kabupaten Dharmasraya	2-120

Tabel 2-144 Proyeksi Produksi Pangan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2030	2-120
Tabel 2-145 Proyeksi Kebutuhan Air Kabupaten Dharmasraya Tahun 2030	2-121
Tabel 2-146 Potensi Ketersediaan Sumber Air Kabupaten Dharmasraya	2-122
Tabel 2-147 Proyeksi Luas Lahan dengan Fungsi Lindung Kabupaten Dharmasraya	2-123
Tabel 2-148 DDDTLH Jasa Ekosistem Kabupaten Dharmasraya	2-125
Tabel 3-1 Realisasi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 (Rp Juta)	3-2
Tabel 3-2 Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 (Rp juta)	3-22
Tabel 3-3 Rasio Pendapatan Daerah Per Kapita Menurut Pemerintah Kabupaten di Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (Rp juta)	3-23
Tabel 3-4 Rasio Kemandirian Daerah Menurut Kabupaten di Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (%)	3-24
Tabel 3-5 Rasio Ruang Fiskal Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 (%)	3-25
Tabel 3-6 Rasio Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PDRB Menurut Kabupaten di Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (%)	3-27
Tabel 3-7 Rasio Kemampuan Mendanai Belanja Daerah Menurut Kabupaten di Sumatera Barat Tahun 2017 dan 2019 (%)	3-28
Tabel 3-8 Rasio Belanja Modal Menurut Kabupaten di Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (%)	3-29
Tabel 3-9 Proporsi Belanja Pegawai Tidak Langsung Menurut Kabupaten di Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (%)	3-30
Tabel 3-10 Perkembangan Jumlah Pos-Pos Neraca Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dan Tingkat Pertumbuhan Rata-Rata Tahun 2016-2020 (Rp juta)	3-32
Tabel 3-11 Rasio Keuangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 (%)	3-36
Tabel 3-12 Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	3-38
Tabel 3-13 Realisasi Belanja Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 –2020	3-39
Tabel 3-14 Prediksi Belanja Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 –2026	3-40
Tabel 3-15 Realisasi Defisit Riil dan Silpa Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 s/d 2020 (Rp juta)	3-42
Tabel 3-16 Penyebab Terjadinya Defisit Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 (Rp juta)	3-43
Tabel 3-17 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 - 2026 (Rp juta)	3-47
Tabel 3-18 Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 - 2026 (Rp juta)	3-48
Tabel 3-19 Proyeksi Pembiayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 - 2026 (Rp juta)	3-49
Tabel 3-20 Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tahun 2021– 2026 (Rp juta)	3-51
Tabel 4-1 Isu Prioritas Kabupaten Dharmasraya	4-3
Tabel 5-1 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Dharmasraya 2021-2026	5-4
Tabel 6-1 Strategi, dan Arah Kebijakan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021	6-2
Tabel 7-1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026	7-2
Tabel 8-1 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah (IKU Daerah) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026	8-2
Tabel 8-2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU PD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026	8-4

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1-1 Keterkaitan antar dokumen perencanaan	1-6
Gambar 2-1 Peta Administrasi Kabupaten Dharmasraya.....	2-2
Gambar 2-2 Peta Administrasi Kecamatan Kabupaten Dharmasraya.....	2-3
Gambar 2-3 Peta Administrasi Nagari Kabupaten Dharmasraya.....	2-3
Gambar 2-4 Peta Topografi Kabupaten Dharmasraya	2-4
Gambar 2-5 Peta Kelerengan Kabupaten Dharmasraya.....	2-5
Gambar 2-6 Peta Geomorfologi Kabupaten Dharmasraya	2-6
Gambar 2-7 Peta Jenis Tanah Kabupaten Dharmasraya	2-12
Gambar 2-8 Peta Geologi Kabupaten Dharmasraya.....	2-14
Gambar 2-9 Peta Hidrogeologi Kabupaten Dharmasraya.....	2-17
Gambar 2-10 Peta Tutupan Lahan Kabupaten Dharmasraya.....	2-18
Gambar 2-11 Peta Status Lahan Kabupaten Dharmasraya.....	2-21
Gambar 2-12 Peta Rawan Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Dharmasraya.....	2-23
Gambar 2-13 Peta Rawan Bencana Banjir di Kabupaten Dharmasraya	2-24
Gambar 2-14 Peta Jumlah dan Distribusi Penduduk Kabupaten Dharmasraya per Kecamatan	2-29
Gambar 2-15 Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Dharmasraya per Kecamatan.....	2-30
Gambar 2-16 Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Dharmasraya per Kecamatan.....	2-31
Gambar 2-17 Piramida Penduduk Kabupaten Dharmasraya Berdasarkan Jenis Kelamin	2-32
Gambar 2-18 IPM Dharmasraya, Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016-2020	2-34
Gambar 2-19 Laju Pertumbuhan PDRB (ADHK 2010) Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016-2020 (persen).....	2-35
Gambar 2-20 Laju Pertumbuhan PDRB (ADHK 2010) Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016-2020 (Rupiah).....	2-37
Gambar 2-21 Indeks Gini Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016- 2020.....	2-38
Gambar 2-22 Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016-2020.....	2-39
Gambar 2-23 Tingkat pengangguran Terbuka di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016-2020	2-39
Gambar 2-24 Perbandingan APK PAUD, APK SD/MI dan APK SMP/MTs.....	2-42
Gambar 2-25 Prosentase Jenis Permukaan Jalan	2-53
Gambar 2-26 Kondisi Ruas Jalan Kabupaten Dharmasraya per-Kecamatan	2-54
Gambar 2-27 Prosentasi Kondisi Ruas Jalan Kabupaten Dharmasraya	2-54
Gambar 2-28 Prosentase Jenis Jembatan	2-55
Gambar 2-29 Prosentase Kondisi Lantai Jembatan.....	2-56
Gambar 2-30 Perbandingan IPG Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional.....	2-69
Gambar 2-31 Jumlah Indikator Menjadi Kewenangan Kabupaten Dharmasraya Berdasarkan Pilar Pembangunan.....	2-115
Gambar 2-32 Persentase Capaian Jumlah Indikator TPB/SDGs Terhadap Target Nasional	2-117
Gambar 2-33 Capaian TPB/SDGs Berdasarkan SPM	2-118

Gambar 2-34 Daya Dukung Pangan dengan Metode Supply dan Demand.....	2-121
Gambar 2-35 Daya Dukung Air Permukaan dengan Metode Supply dan Demand	2-122
Gambar 2-36 Daya Dukung Fungsi Lindung Kabupaten Dharmasraya	2-123
Gambar 3-1 Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 (Rp juta)	3-4
Gambar 3-2 Kontribusi Sumber Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016- 2020 (%)	3-5
Gambar 3-3 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 (Rp juta)	3-7
Gambar 3-4 Kontribusi Sumber Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 (%).....	3-8
Gambar 3-5 Efektifitas Penerimaan PAD Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020.....	3-8
Gambar 3-6 Realisasi Pendapatan Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016- 2020 (Rp juta).....	3-10
Gambar 3-7 Kontribusi Sumber Pendapatan Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 (%).....	3-11
Gambar 3-8 Efektifitas Penerimaan Dana Perimbangan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020.....	3-12
Gambar 3-9 Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 (Rp juta).....	3-14
Gambar 3-10 Efektifitas Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020.....	3-14
Gambar 3-11 Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 (Rp juta).....	3-16
Gambar 3-12 Proporsi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 (%)	3-16
Gambar 3-13 Realisasi Belanja Tidak Langsung Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 (Rp juta)	3-17
Gambar 3-14 Proporsi Belanja Tidak Langsung Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 (%)	3-18
Gambar 3-15 Efektifitas Pengeluaran Belanja Tidak Langsung Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 (%).....	3-19
Gambar 3-16 Realisasi Belanja Langsung Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 (Rp juta).....	3-19
Gambar 3-17 Proporsi Belanja Langsung Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 (%)	3-21
Gambar 3-18 Efektifitas Pengeluaran Belanja Langsung Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020.....	3-21
Gambar 4-1 Tema/Agenda Tahapan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005- 2025.....	4-12
Gambar 5-1 Skematik Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Arah Kebijakan dan Program / Kegiatan	5-2

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Perencanaan pembangunan yang disusun oleh pemerintah daerah merupakan salah satu bagian dari perencanaan pembangunan nasional. Adapun dokumen rencana pembangunan bagi pemerintah daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk periode 20 tahun yang memuat visi daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5 tahun atau selama masa kepemimpinan kepala daerah, serta dokumen tahunan yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD).

Dengan telah diselenggarakannya Pemilihan Kepala Daerah serentak (Pilkada serentak) pada tanggal 09 Desember 2020, dan dilantiknya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih pada tanggal 26 Februari 2021 yaitu pasangan Bupati Sutan Riska Tuanku Kerajaan, SE dengan Wakil Bupati Drs. DP Datuk Labuan, Maka kewajiban pemerintah daerah adalah menjabarkan Visi, Misi dan Program prioritas pembangunan kepala daerah terpilih ke dalam bentuk dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sesuai dengan Surat Edaran Mendagri Nomor 640/16/SJ tanggal 4 Januari 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, maka penentuan perodesasi RPJMD ditentukan berdasarkan masa jabatan kepala daerah yaitu tahun 2021-2026, dan bukan berdasarkan waktu menjabat Tahun 2021-2024. Sehingga dokumen RPJMD Kabupaten Dharmasraya perodesasinya dihitung Tahun 2021-2026

RPJMD merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. RPJMD memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif yang disusun dengan berpedoman pada Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031 dan Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, serta Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Selanjutnya RPJMD ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan akan dijabarkan secara tahunan kedalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Penyusunan RPJMD memperhatikan kewenangan yang dimiliki sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, dimana kewenangan tersebut terdiri dari 32 urusan, yaitu 6 (enam) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, 18 (delapan belas) Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, 8 (delapan) Urusan Pemerintahan Pilihan, serta adanya 4 (empat) pembagian fungsi penunjang urusan pemerintahan yang terdiri dari unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawasan urusan pemerintahan, unsur kewilayahan, dan unsur pemerintahan umum. Dimana urusan pemerintahan wajib dan pilihan dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam bentuk dinas, unsur pendukung dilaksanakan oleh

sekretariat daerah dan sekretariat DPRD, unsur penunjang dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam bentuk badan, unsur pengawasan dilaksanakan oleh inspektorat daerah, unsur kewilayahan dilaksanakan oleh kecamatan, sedangkan unsur pemerintahan umum dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol.

Adapun tahapan yang dilaksanakan dalam penyusunan RPJMD ini terdiri dari 6 (enam) tahapan, diantaranya dapat dijelaskan di bawah ini :

1. Tahap Persiapan

Adapun agenda yang dilakukan pada tahapan ini adalah dimulai dengan pembentukan Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor: 188.45/40/KPTS-BUP/2021 tentang Pembentukan Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2016 tanggal 25 Januari 2021, dilanjutkan dengan orientasi tim terhadap penyusunan dokumen RPJMD pada tanggal 18 Januari 2021 hingga tanggal 3 Pebruari 2021, penyiapan data perencanaan serta penyempurnaan terhadap rancangan teknokratik RPJMD. Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD sudah dilakukan sejak Bulan Desember 2020 hingga bulan 25 Februari 2021 sebelum pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagai langkah percepatan dalam penyusunan RPJMD.

2. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD

Tahapan rancangan awal ini dimulai sejak dilantikanya Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Rancangan awal ini dilakukan berbarengan dengan penyusunan KLHS RPJMD serta dilanjutkan dengan forum konsultasi publik pada tanggal 8 April 2021, penyampaian Rancangan RPJMD ke DPRD di tanggal 12 April 2021 serta ditindaklanjuti daam bentuk Penanda tangan nota kesepakatan antara ketua DPRD dengan Bupati Dharmasraya pada tanggal 19 April 2021. Dokumen rancangan awal yang disepakati ini dilanjutkan dengan konsultasi ke gubernur untuk mendapatkan saran dan masukan dari Provinsi, serta proses selanjutnya penyempurnaan Rancangan awal berdasarkan setelah saran Provinsi ini diakomodir maka disampaikan ke perangkat daerah melalui Surat edaran Bupati tentang Penyusunan rancangan Renstra PD.

3. Penyusunan Rancangan RPJMD

Rancangan RPJMD merupakan penyempurnaan yang telah didasarkan pada penyempurnaan rancangan awal RPJMD serta rancangan Renstra PD yang telah disampaikan ke Bappeda diverifikasi oleh Tim Penyusun RPJMD.

4. Pelaksanaan Musrenbang RPJMD

Musrenbang RPJMD bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan Daerah. Musrenbang dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 2021 dihadiri oleh pemangku kepentingan, dan hasil dari Musrenbang ini dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang RPJMD

5. Perumusan Rancangan Akhir RPJMD

Perumusan rancangan akhir RPJMD merupakan proses penyempurnaan rancangan RPJMD menjadi rancangan akhir RPJMD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD

6. Penetapan RPJMD

Penetapan RPJMD harus sudah dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan setelah bupati dan wakil bupati terpilih dilantik. Dimana penetapan ini dilakukan setelah dievaluasi oleh gubernur menjadi Peraturan Daerah kabupaten tentang RPJMD kabupaten.

Guna menghasilkan dokumen yang berkualitas dan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai target pembangunan yang ditargetkan, maka penyusunan Dokumen RPJMD dilakukan dengan beberapa pendekatan sesuai dengan peraturan yang berlaku, pendekatan yang diterapkan adalah:

1. **Pendekatan teknokratik**, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.
2. **Pendekatan partisipatif**, hal ini dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, selain pemerintah daerah sendiri, maka pemangku kepentingan yang dilibatkan adalah instansi vertikal, pemerintahan nagari, perwakilan masyarakat, serta pihak swasta yang berada di Kabupaten Dharmasraya
3. **Pendekatan politis**, sebagai salah satu muatan utama dalam penyusunan RPJMD, dimana RPJMD menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.
4. **Pendekatan atas-bawah**. Dalam pelaksanaannya, biasanya pendekatan ini dilakukan melalui Musrenbang, mulai dari tingkat desa/nagari kecamatan, kabupaten, provinsi hingga hasil Musrenbang nasional.

Penyusunan dokumen RPJMD ini juga memperhatikan pemenuhan pendekatan substansi pada proses perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi, yang mencakup:

1. Pendekatan perencanaan holistik-tematik, integratif, dan spasial;
 - a. Pendekatan holistik-tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur atau bagian atau kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan, dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
 - b. Pendekatan integratif: dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.
 - c. Pendekatan spasial: dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.
2. Menerapkan kebijakan anggaran belanja yang diprioritaskan untuk program dan kegiatan strategis dengan menerapkan prinsip *money follow programe*.

Selanjutnya RPJMD yang telah disusun akan dijabarkan ke dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) yang merupakan perencanaan tahunan dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah. RPJMD menjadi dokumen yang sangat strategis, hal ini dikarenakan RPJMD merupakan:

1. Media untuk mengimplementasikan janji Bupati dan Wakil Bupati yang disampaikan pada saat kampanye kepada seluruh masyarakat;
2. Penjabaran pelaksanaan RPJPD 2005-2025 untuk tahap keempat; yang merupakan tahap terakhir dalam upaya pencapaian visi misi RPJPD 2005-2025
3. Perwujudan dari Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah tahun 2011-2031;
4. Pedoman utama dalam penyempurnaan Renstra Perangkat Daerah;
5. Pedoman penyusunan perencanaan dan penganggaran tahunan daerah;
6. Instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja Bupati dan kinerja kepala Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun; dan
7. Instrumen pengendalian bagi Satuan Pengawas Internal (SPI) dan Bappeda.

Sejalan dengan komitmen Pemerintah Indonesia dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang tertuang pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan yang memberikan mandat untuk mengintegrasikan TPB kedalam agenda pembangunan. Maka dalam penyusunan dokumen RPJMD ini juga memperhatikan upaya pencapaian indikator TPB. Dengan demikian, akan tercipta keselarasan antara RPJMD dengan upaya pencapaian indikator TPB serta perencanaan strategis di RPJMD dengan perencanaan strategis dan perencanaan operasional oleh Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah kepala daerah terpilih, sekaligus sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam koridor pembangunan berkelanjutan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang memuat ketentuan secara langsung mengenai penyusunan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat Barat;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Laporan dan Evaluasi Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025.

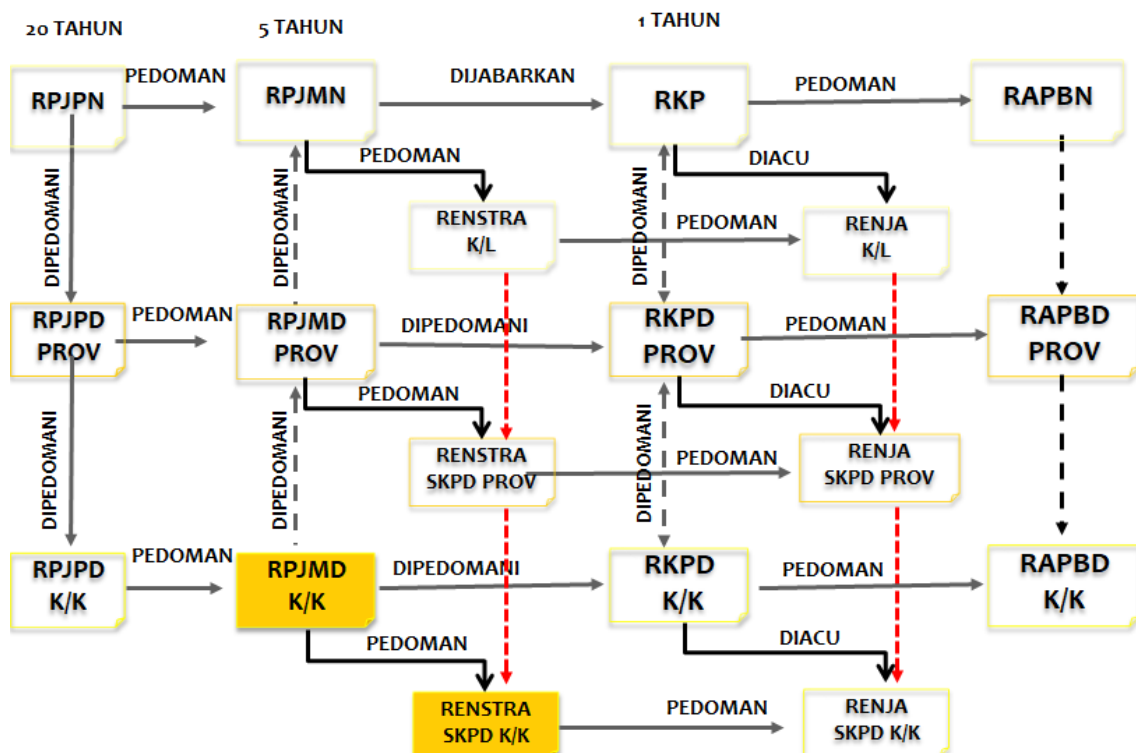
1.3. Hubungan Antar Dokumen

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, RPJMD merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Sehingga RPJMD harus sinkron dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang, dan antar fungsi pemerintah serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

Dalam menjelaskan keterkaitan antar dokumen perencanaan, maka penyusunan RPJMD harus mengacu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dimana dalam pasal 5 ayat (2) dinyatakan bahwa penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional. Hal serupa juga terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam pasal 263 ayat (3) yang menyatakan bahwa penyusunan RPJMD berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Sehubungan dengan hal tersebut sebagaimana dijelaskan lebih rinci pada permendagri 86 Tahun 2017, maka skema keterkaitan antar dokumen perencanaan dapat dilihat pada gambar Gambar 1-1 :

Gambar 1-1 Keterkaitan antar dokumen perencanaan



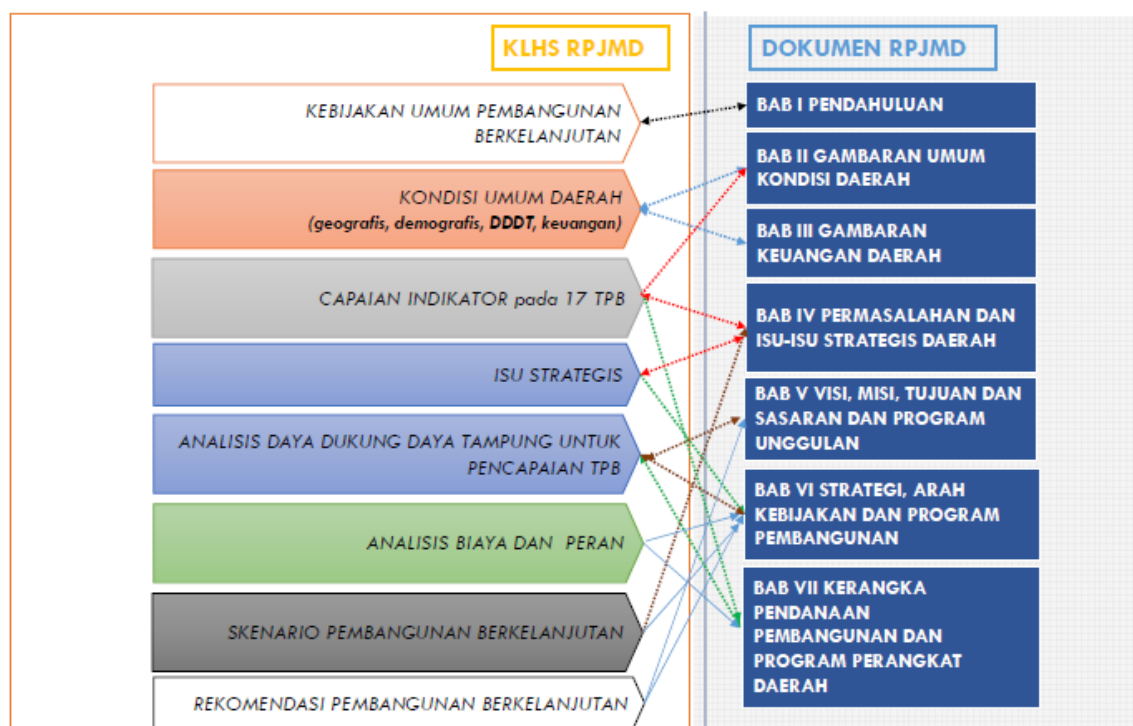
Dari Gambar 1-1 dapat dilihat bahwa penyusunan RPJMD Kabupaten Dharmasraya harus mempedomani 3 (tiga) dokumen yang memiliki keterkaitan langsung yaitu : RPJPD Kabupaten Dharmasraya tahun 2005-2025, RPJM Nasional tahun 2020-2024, dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026. Kemudian setelah dokumen RPJMD ini ditetapkan, maka fungsi RPJMD Kabupaten Dharmasraya ini juga akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra PD dan RKPD Kabupaten Dharmasraya.

Peran penting dalam melakukan kajian mengenai keterkaitan antar dokumen tersebut adalah untuk menjamin adanya sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan antara Kabupaten Dharmasraya dengan Provinsi Sumatera Barat dan nasional untuk mencapai target pembangunan. Dengan kata lain, selain daerah memiliki karakteristik yang berbeda sesuai dengan potensi dan karanter daerah yang berbeda-beda sesuai yang dimuat dalam dokumen RPJPD, Kabupaten Dharmasraya maupun Provinsi Sumatera Barat juga memiliki peran untuk mendukung tercapainya target pembangunan nasional.

Selain mempedomani dokumen RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat, dokumen yang juga ditelaah adalah dokumen Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Dharmasraya dengan melakukan penyelarasan terhadap tujuan, kebijakan, serta rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah. Sehingga diharapkan kebijakan yang terdapat di dalam dokumen RPJMD ini dapat mengisi pembangunan sesuai kebijakan yang terdapat dalam RTRW.

Selanjutnya Dokumen lainnya yang juga disusun secara simultan dan saling terintegrasi dengan penyusunan RPJMD adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dimana dokumen ini bertujuan agar pembangunan dapat terlaksana dengan tetap memperhatikan keberlangsungan sumber daya dan menjamin keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, mutu hidup generasi masa kini serta generasi masa depan dengan memperhatikan prinsip dan tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Gambar 1-2 Keterkaitan RPJMD dan KLHS RPJMD



Sehingga dengan demikian RPJMD diharapkan dapat selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) yaitu pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu:

1. Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun (Tanpa Kemiskinan);
2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan (Tanpa Kelaparan);
3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia (Kehidupan Sehat dan Sejahtera);
4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua (Pendidikan Berkualitas);
5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan (Kesetaraan Gender);
6. Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan (Air Bersih dan Sanitasi Layak);
7. Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua (Energi Bersih dan Terjangkau);
8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi);
9. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi (Industri, Inovasi dan Infrastruktur);
10. Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antar-negara (Berkurangnya Kesenjangan);
11. Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan);
12. Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab);
13. Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya (Penanganan Perubahan Iklim);
14. Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan (Ekosistem Lautan);
15. Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati (Ekosistem Daratan);
16. Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan (Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh);
17. Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan).

Merujuk pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, maka upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

1.4. Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 adalah untuk penyempurnaan dalam menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih ke dalam bentuk dokumen RPJMD secara utuh. RPJMD ini memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 adalah:

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
2. Mendukung keselarasan, sinerginitas dan sinkronisasi kebijakan nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Dharmasraya sebagai satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)
3. Sebagai bahan dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah secara tahunan dan lima tahunan/ akhir periode RPJMD.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 terdiri dari 9 (sembilan) bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan substansi umum dalam penyusunan RPJMD, yang meliputi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, sistematika penulisan/ penyajian dokumen RPJMD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menjelaskan data disertai dengan analisis yang meliputi aspek geografis dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum yang disusun berdasarkan bidang urusan pemerintahan daerah, serta aspek daya saing daerah.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan dan kerangka pendanaan daerah. Bab ini meliputi kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dan kerangka pendanaan yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini menjelaskan permasalahan pembangunan serta analisis isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan selama periode Bupati dan Wakil Bupati, penyajiannya permasalahan pembangunan disajikan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah disepakati dan untuk dilaksanakan selama tahun rencana (2021-2026).

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu diberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bagian ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan

BAB VIII KINERJA PENYELENGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian ini memuat indikator kinerja daerah yang telah ditetapkan yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang disusun berdasarkan urusan pemerintahan daerah serta ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) dari tahun 2021 sampai 2026.

BAB IX PENUTUP

Bab ini menjelaskan hal yang perlu mendapatkan perhatian, terutama pelaksanaan prioritas pembangunan lima tahunan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan sesuai dengan strategi dan arah kebijakan yang terdapat dalam dokumen RPJMD ini. Selain itu juga menjelaskan kaidah-kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan diantaranya penetapan Renstra Perangkat daerah dan sebagai pedoman RKPD yang akan disusun di tahun berikutnya.

BAB 2. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi Dan Demografi

2.1.1. Karakteristik Wilayah

2.1.1.1. Letak, Batas dan Luas Wilayah

Kabupaten Dharmasraya merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat dengan Ibukota Pulau Punjung dan terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat.

Kabupaten Dharmasraya merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dan diresmikan pada tanggal 7 Januari 2004 yang ditandai sebagai hari jadi Kabupaten Dharmasraya yang dikenal juga dengan sebutan Ranah Cati Nan Tigo.

Kabupaten Dharmasraya terletak pada posisi 00°48'25,367"- 1°41'40,269" LS dan 101°8'32,52"-101°53'30,166" BT, yang merupakan kabupaten di ujung tenggara Provinsi Sumatera Barat serta berada di perbatasan Propinsi Sumatera Barat dengan Propinsi Jambi dan Propinsi Riau serta dilintasi oleh jalur Jalan Lintas Tengah Sumatera.

Adapun batas wilayah administrasi Kabupaten Dharmasraya adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau.
- Sebelah selatan : Kabupaten Bungo dan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi.
- Sebelah timur : Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo Provinsi Jambi.
- Sebelah barat : Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan.

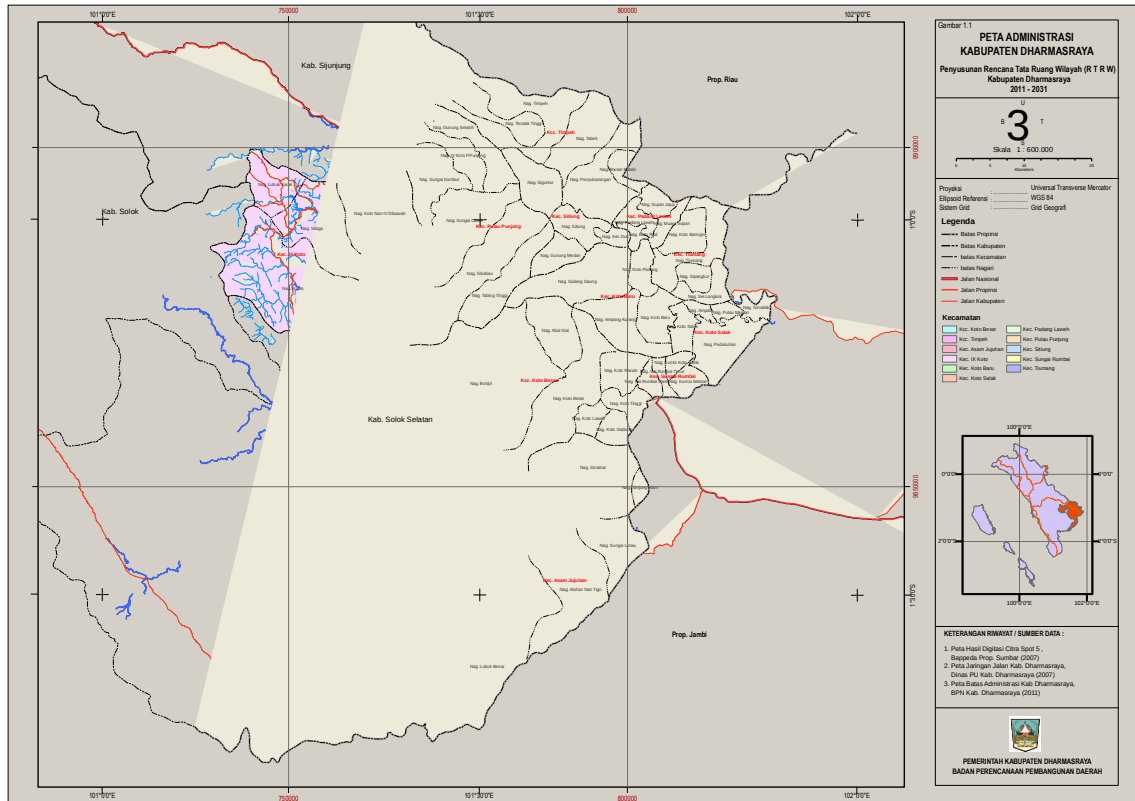
Wilayah Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 disebutkan bahwa Kabupaten Dharmasraya memiliki luas sebesar 2.961,13 Km² (296.113 Ha), sedangkan berdasarkan perhitungan pemetaan hasil interpretasi digitasi Citra Satellite Pleiades tercatat bahwa luas Kabupaten Dharmasraya adalah 301.645 Ha sebagai konsekuensi dari keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang penetapan batas daerah antara Kabupaten Dharmasraya dengan kabupaten dan provinsi tetangga seperti :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Provinsi Riau dengan Provinsi Sumatera Barat;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2018 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Tebo Provinsi Jambi;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2019 tentang Batas Daerah antara Kabupaten Sijunjung dengan Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat;

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penataan dan Pembentukan Kecamatan, secara administrasi pemerintahan Kabupaten Dharmasraya terdiri dari 11 Kecamatan dan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Penataan

Nagari terdiri dari 52 nagari dengan 461 jorong sebagaimana sebagaimana terlihat pada Gambar 2-1, Gambar 2-2, Gambar 2-3 dan Tabel 2-1.

Gambar 2-1 Peta Administrasi Kabupaten Dharmasraya



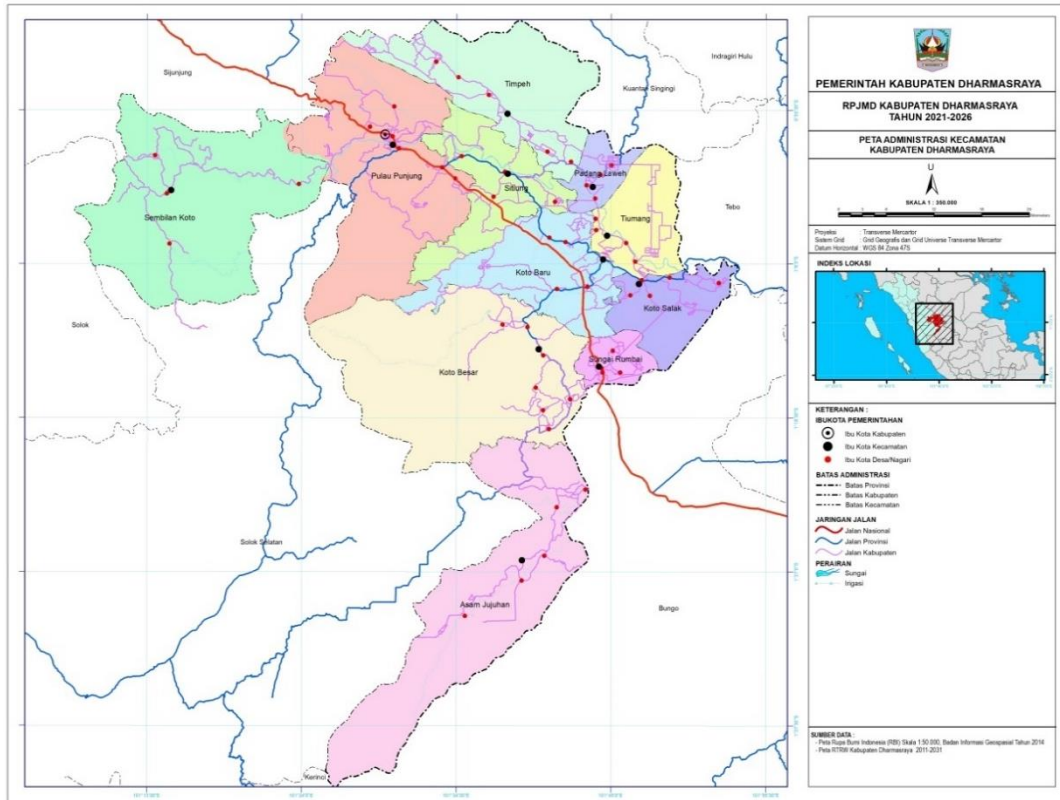
Sumber : RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031

Tabel 2-1 Luas Wilayah, Banyaknya Nagari dan Jorong

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Nagari	Jorong
1	Sungai Rumbai	5.109	4	43
2	Koto Besar	57.310	7	43
3	Asam Jujuhan	46.372	5	22
4	Koto Baru	21.747	4	73
5	Koto Salak	12.440	5	44
6	Tiumang	13.543	4	30
7	Padang Laweh	6.100	4	17
8	Sitiung	13.018	4	52
9	Timpeh	32.730	5	40
10	Pulau Punjung	44.750	6	62
11	Sembilan Koto	48.522	4	35
Kab. Dharmasraya		301.645	52	461

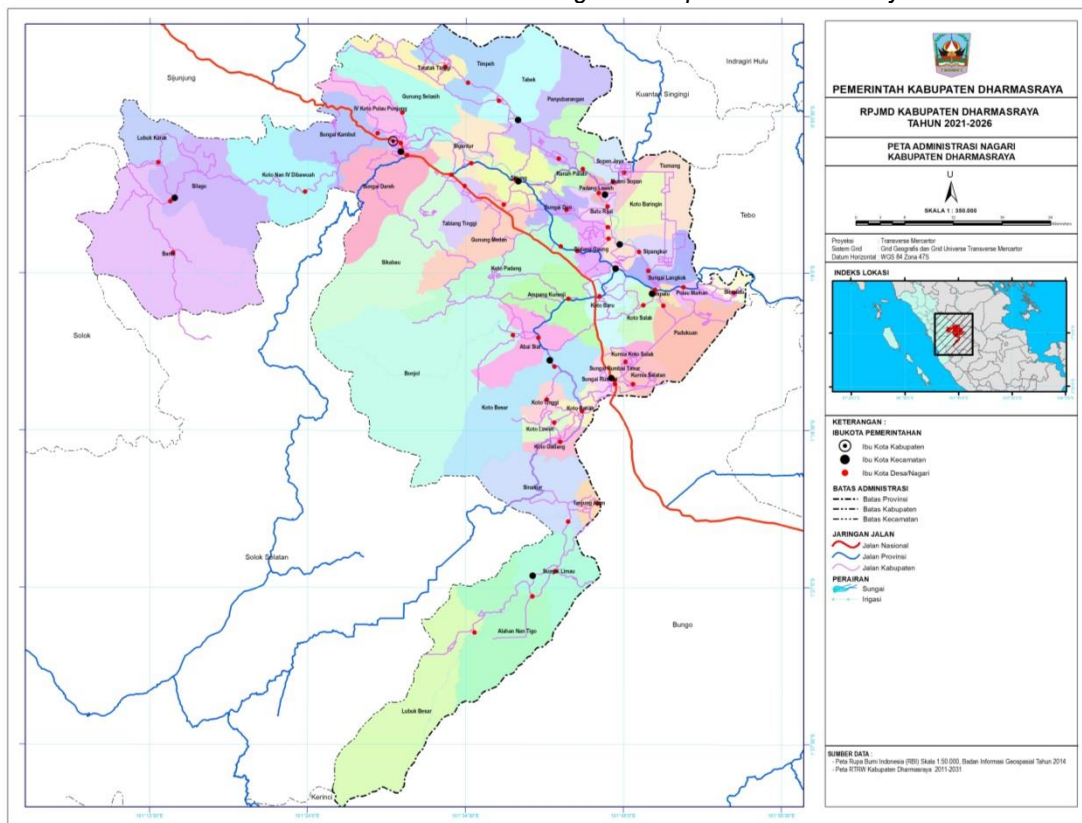
Sumber : Interpretasi Pemetaan Digitasi Citra Satellite Pleiades Tahun 2017

Gambar 2-2 Peta Administrasi Kecamatan Kabupaten Dharmasraya



Sumber : RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031

Gambar 2-3 Peta Administrasi Nagari Kabupaten Dharmasraya



Sumber : RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031

2.1.1.2. Topografi dan Kelerengan

Wilayah Kabupaten Dharmasraya secara umum merupakan wilayah perbukitan dan pergunungan dengan kondisi topografi berada pada ketinggian 100-2.600 meter diatas permukaan laut (mdpl). Wilayah dengan ketinggian mulai dari 100 mdpl berada pada bagian kawasan yang mengarah ke sebelah timur, sedangkan ketinggian 2.600 mdpl berada pada kawasan yang menjadi bagian dari gugusan Bukit Barisan di sebelah barat.

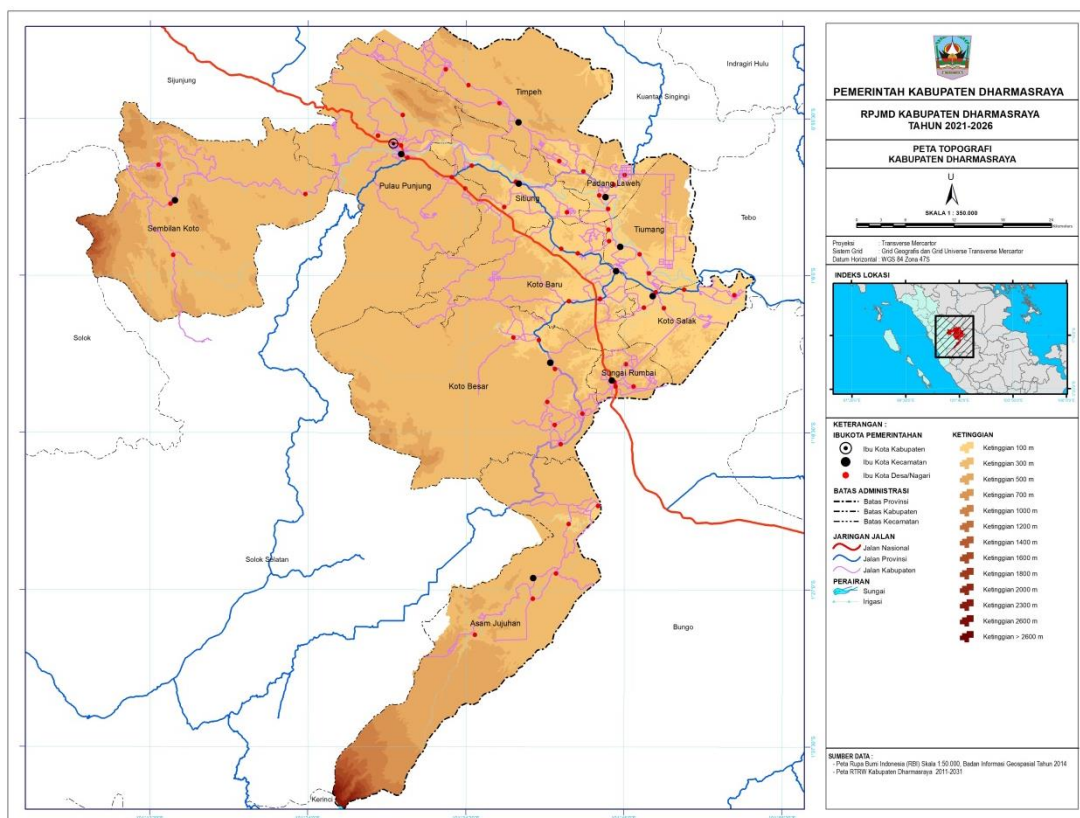
Kelerengan lahan bervariasi dari datar, landai sampai sangat curam. Berdasarkan hasil interpretasi dan analisis terhadap Pemetaan Digitasi Citra Satellite Pleiades Tahun 2017, diperoleh data kelerengan lahan seperti disajikan pada Tabel 2-2, Gambar 2-4 dan Gambar 2-5.

Tabel 2-2 Tingkat Kelerengan Lahan Kabupaten Dharmasraya

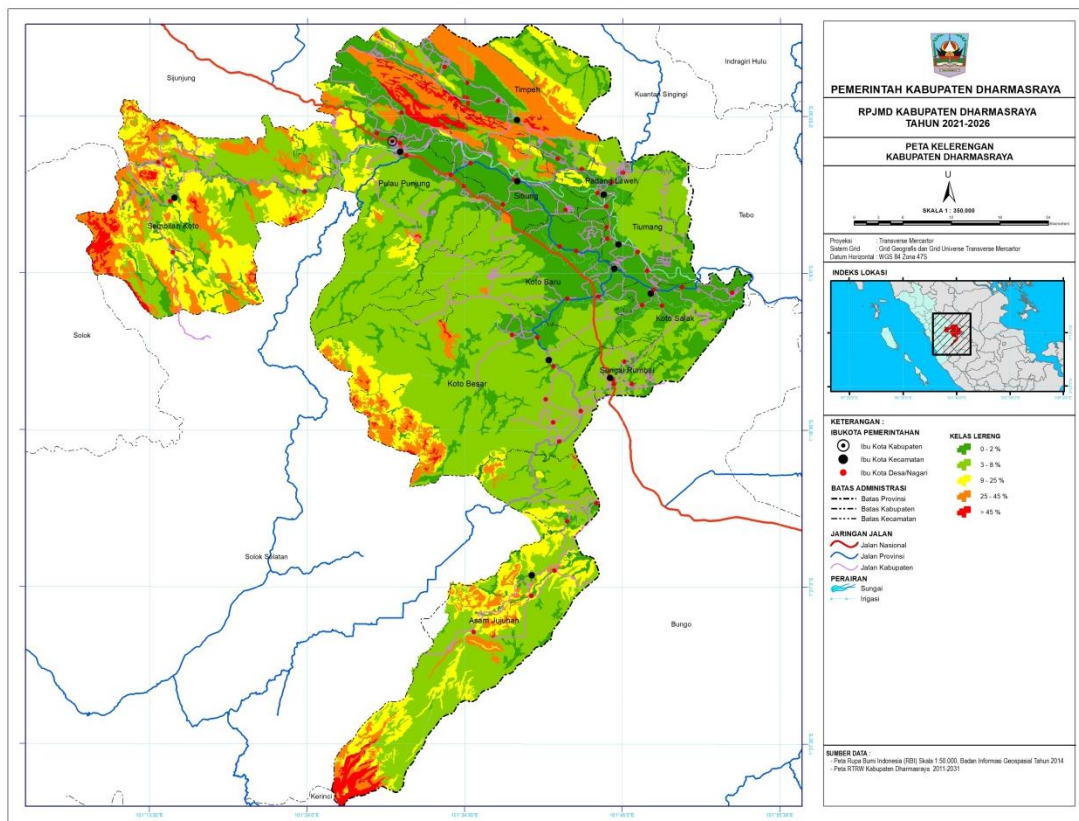
Klasifikasi Kelerengan Lahan	Lereng (%)	Luas	
		(Ha)	(%)
Datar	0-3	60.383	20
Agak Landai	3-8	150.994	50
Landai	8-15	39.434	13
Agak Curam	15-25	35.189	11,6
Curam	25-40	14.391	4,7
Sangat Curam	40-60	1.251	0,7
Jumlah	Luas	301.645	100

Sumber : Interpretasi Pemetaan Digitasi Citra Satellite Pleiades Tahun 2017

Gambar 2-4 Peta Topografi Kabupaten Dharmasraya



Gambar 2-5 Peta Kelerengan Kabupaten Dharmasraya



2.1.1.3. Geomorfologi

Terdapat 5 satuan morfologi di wilayah Kabupaten Dharmasraya yaitu:

1. Satuan aluvial

Jalur Aliran Sungai dengan topografi datar; daerah cekungan dengan topografi datar; dataran antar perbukitan dengan topografi agak landai.

2. Satuan dataran

- Teras sungai (teras sungai bawah dengan topografi datar; teras sungai tengah dengan topografi landai; teras sungai atas dengan topografi agak curam)
- Dataran (dataran berombak bergelombang, dataran bergelombang dan dataran perbukitan)

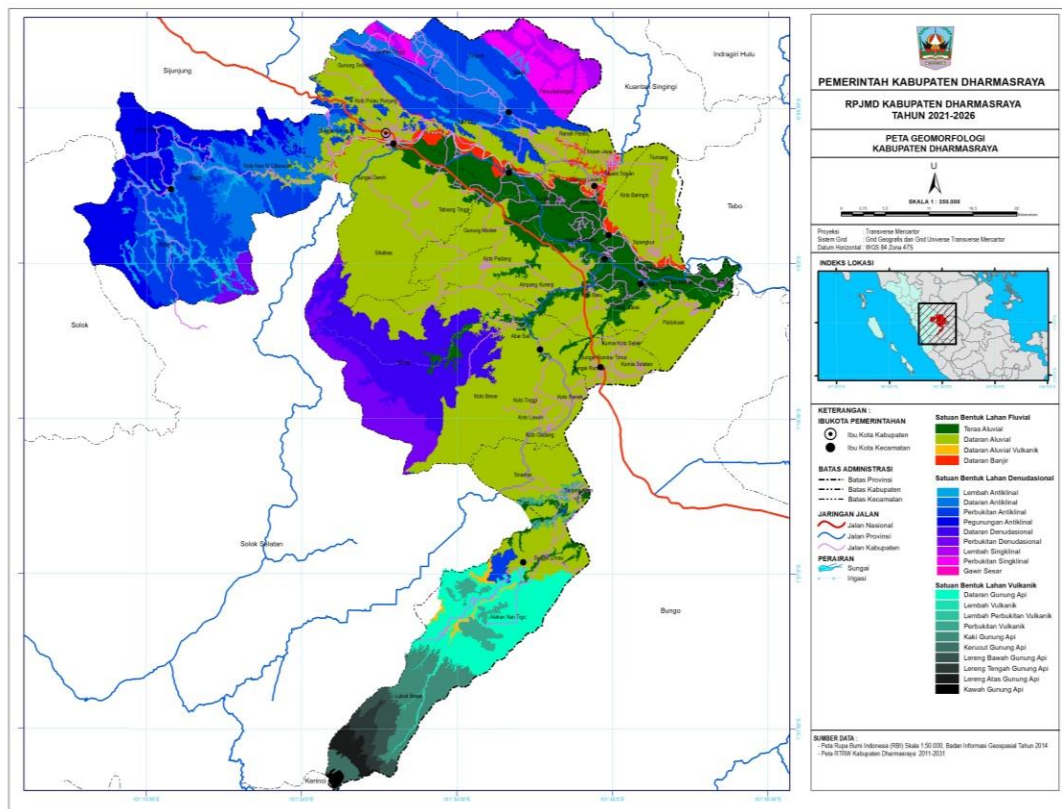
3. Satuan perbukitan

- Perbukitan terpisah;
- perbukitan bergelombang;
- perbukitan agak tertoreh dengan lereng datar sampai bergelombang;
- perbukitan tertoreh dengan lereng datar sampai bergelombang;
- perbukitan tertoreh dengan lereng bergelombang sampai curam;
- perbukitan sangat tertoreh dengan lereng bergelombang sampai curam;
- Perbukitan karst paralel tertoreh

4. Satuan Pergunungan
 - Pergunungan sangat tertoreh
5. Satuan vulkan
 - a. Lereng atas vulkan dengan topografi sangat curam
 - b. Lereng tengah vulkan dengan topografi curam
 - c. Lereng bawah vulkan dengan topografi agak curam
 - d. Dataran vulkan bergelombang dengan topografi landai

Untuk lebih jelasnya geomorfologi Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada Gambar 2-6.

Gambar 2-6 Peta Geomorfologi Kabupaten Dharmasraya



2.1.1.4. Hidrologi

Wilayah Kabupaten Dharmasraya terletak pada Sub Daerah Aliran Sungai (Sub DAS) Batanghari Hulu yang merupakan bagian dari DAS Batanghari. Wilayah Kabupaten Dharmasraya dialiri oleh banyak sungai/batang, dan salah satu sungai yang menjadi bagian dari sistem hidrologi Sumatera Barat dan Jambi adalah Sungai Batanghari. Sungai yang mengalir di Kabupaten Dharmasraya terlihat pada Tabel 2-3.

Tabel 2-3 Nama, Lokasi dan Kondisi Fisik Sungai

No	Nama Sungai	Kecamatan	Panjang (km)	Lebar (m)	Dalam (m)	Kecepatan (m/dt)	Keterangan
1	Batang Hari	Pulau Punjung	50,00	90,00	2,75	1,000	Untuk irigasi
2	Sungai Pauh	Pulau Punjung	3,00	4,00	0,50	1,250	
3	Batang Piruko	Pulau Punjung	18,00	20,00	1,00	0,450	Sumber air BPAM Koto Baru
4	Batang Mimp	Pulau Punjung	10,00	11,00	1,50	0,400	
5	Batang Pangian	Pulau Punjung	8,00	15,00	1,25	0,800	
6	Batang Neli	Pulau Punjung	8,00	6,00	0,80	0,650	Sumber air BPAM Pulau Punjung
7	Batang Lolo	Pulau Punjung	6,00	8,00	1,20	0,500	
8	Sungai Balit	Pulau Punjung	3,00	2,00	0,40	0,200	
9	Sei. Patapahan	Pulau Punjung	3,00	2,00	0,30	0,150	
10	Batang Asahan	Pulau Punjung	3,50	3,00	0,35	0,300	
11	Sungai Kamang	Pulau Punjung	5,50	2,50	0,30	0,250	
12	Batang Tandun	Pulau Punjung	6,00	8,00	0,70	0,600	
13	Sungai Lamak	Pulau Punjung	4,00	1,50	0,50	0,300	
14	Batang Palangko	Pulau Punjung	9,00	8,00	0,60	0,300	
15	Batang Nyunyo	Pulau Punjung	7,00	6,00	0,75	0,250	
16	Batang Momong	IX Koto	30,00	50,00	0,40	1,200	
17	Batang Siraho	IX Koto	12,00	6,00	1,20	0,800	
18	Batang Silago	IX Koto	9,00	12,00	0,65	1,500	
19	Batang Banai	IX Koto	2,00	2,00	0,60	0,450	
20	Batang Sabilah	IX Koto	2,50	2,50	0,30	1,750	
21	Batang Silikik	IX Koto	2,00	1,75	0,40	0,900	
22	Batang Rambah	IX Koto	3,00	5,00	0,50	0,750	
23	Batang Bakur	IX Koto	5,00	4,00	0,55	0,850	
24	Batang Bugah	IX Koto	16,00	8,00	0,75	0,600	
25	Batang Sipotar	IX Koto	16,00	25,00	0,80	0,700	
26	Batang Singolan	IX Koto	12,00	7,00	0,60	0,500	
27	Sungai Tonang	IX Koto	3,00	3,50	0,50	0,200	
28	Sei. Lubuk Agung	Sitiung	2,40	6,30	0,45	0,113	
29	Sei. Udang	Sitiung	3,75	4,30	0,50	0,225	
30	Sei. Tolu	Sitiung	1,75	2,30	0,45	0,117	
31	Sei. Durian	Sitiung	1,35	1,47	0,48	0,112	
32	Sei. Sariak	Sitiung	4,60	12,70	0,65	0,215	
33	Sei. Tempratur	Timpeh	3,25	10,50	0,55	0,437	
34	Sei. Pinang	Timpeh	1,85	8,50	1,40	0,475	
35	Batang Timpeh	Timpeh	16,00	30,00	1,80	0,535	
36	Air Gemuruh	Timpeh	3,50	3,50	0,60	0,534	
37	Batang Timpeh Usau	Timpeh	7,80	12,50	1,20	0,445	
38	Sei Garingging	Timpeh	6,40	8,70	0,65	0,425	
39	Sei Murai	Timpeh	2,70	2,40	0,55	0,225	

No	Nama Sungai	Kecamatan	Panjang (km)	Lebar (m)	Dalam (m)	Kecepatan (m/dt)	Keterangan
40	Ngalau	Timpeh	2,30	6,80	0,75	0,335	
41	Batang Lodan	Timpeh	0,75	6,50	0,60	0,325	
42	Sarana Baru	Timpeh	3,25	6,50	0,55	0,231	
43	Sei. Kambang Mani	Timpeh	4,25	3,35	0,52	0,117	
44	Sei. Palabi	Timpeh	9,35	6,45	0,48	0,120	
45	Batang Sialang	Koto Baru	3,00	2,50	0,50	0,770	
46	Batang Tarok	Koto Baru	5,00	4,00	1,00	0,500	
47	Sei. Ampang	Koto Baru	6,00	3,50	0,60	0,400	
48	Sei. Cantiang	Padang Laweh	3,50	3,00	0,55	0,320	
49	Sei. Aman	Koto Salak	4,00	3,00	0,75	0,400	
50	Sei. Muai	Koto Besar	5,00	3,00	0,50	0,270	
51	Batang Siat	Koto Besar	28,00	0,50	1,20	0,800	
52	Batang Mata Air	Koto Besar	28,00	3,50	0,38	0,200	
53	Sungai Asam	Koto Besar	3,00	7,50	0,83	0,430	
54	Sungai Jujuhan	Asam Jujuhan	17,00	60,00	2,00	0,653	
55	Sungai Pangian	Asam Jujuhan	5,00	8,50	1,20	0,115	
56	Sungai Batang	Asam Jujuhan	10,00	6,00	1,20	0,510	
57	Sinamar	Asam Jujuhan					
58	Sei. Jernih	Sungai Rumbai	4,00	3,50	0,40	0,250	
59	Sei Telaga	Sungai Rumbai	3,00	2,50	0,55	0,250	
60	Cahaya Murni	Sungai Rumbai	3,50	3,25	0,45	0,300	

Sumber : RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031

2.1.1.5. *Klimatologi*

Berdasarkan sistem klasifikasi iklim Schmidt dan Ferguson (1951) wilayah Kabupaten Dharmasraya termasuk ini tergolong pada tipe iklim A (sangat basah). Sementara menurut zona agroklimat L.R. Oldeman termasuk pada zona iklim B1 dengan bulan basah 7-9 bulan dan bulan kering berturut-turut kurang dari 2 bulan. Curah hujan sebagian wilayah Kabupaten Dharmasraya tergolong tinggi yaitu lebih dari 200 mm/bulan.

Suhu udara berkisar antara 210C hingga 330C, dengan tingkat kelembaban antara 70 hingga 80%. Curah hujan sebesar 14.684 mm/tahun dengan banyak hari hujan 361.

2.1.1.6. *Jenis Tanah*

Jenis tanah di Kabupaten Dharmasraya ini terdiri atas 8 jenis tanah yaitu Aluvial, Kambisol, Gleisol, Nitosol, Latosol, Podsolik, Andosol, dan Litosol. Kesetaraan kedelepan jenis tanah tersebut dirinci atas satuan peta tanah (SPT) berdasarkan karakteristik: kelerengan, satuan fisiografi/bentuk wilayah, dan bahan induk tanah seperti terlihat pada Tabel 2-4 dan Tabel 2-5 serta pada peta tanah (Gambar 2-7)

Tabel 2-4 Jenis Tanah di Kabupaten Dharmasraya
(koreksi data oleh pak sek)

No	Pusat Penelitian Tanah (1983)	Soil Taxonomy (USDA,1975)	FAO-UNESCO (1974)	Luas	
				Ha	(%)
1	Aluvial	Tropaquepst	Gleysols	22.993	7,60
2	Andosol	Dystrandepts	Andosols	10.574	3,49
3	Gleisol	Tropaquepts	Gleysols	8.313	2,75
4	Kambisol	Dystropepts	Cambisols	135.847	44,89
5	Latosol	Haplorthoxs	Ferralsols	18.134	5,99
6	Litosol	Troporthents	Lithosols	2.423	0,80
7	Nitosol	Paleudults	Nitosols	98.048	32,40
8	Podsolik	Tropudults	Acrisols	6.267	2,07
Total				302.599	100,00

Sumber : Peta Tanah Tinjau Daerah Sumatera Barat II Provinsi Sumatera Barat (Pusat Penelitian Tanah Bogor, 1983)
dalam RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031

Tabel 2-5 Penyebaran Jenis Tanah

No	Jenis Tanah	Lereng (%)	Satuan Fisiografi	Bahan Induk Tanah	SPT	Luas SPT (ha)	(%)
1	Aluvial	0-3	Jalur Aliran/Bekas Jalur Aliran Sungai	Endapan Liat, Pasir atau campurannya	1	22.993	7,60
2	Andosol	15-25	Lereng Bawah Volkan Agak Tertoreh	Abu Volkan dan Batuan Andesit	43	2.671	0,88
3	Andosol	25-40	Lereng Tengah Volkan Tertoreh	Tufa dan batu apung menutupi batuan andesit, breksi.	42	4.527	1,50
4	Andosol	>40	Lereng atas Volkan Agak tertoreh	Tufa dan batu apung menutupi batuan andesit, dan breksi.	41	3.375	1,12
5	Gleisol	3-8	Daerah Cekungan	Bahan Eluvio-Koluvium dari tufa masam	3	8.313	2,75
6	Kambisol	0-3	Teras Sungai Bagian Bawah	Bahan Endapan Aluvium (Liat)	10	20.063	6,63
7	Kambisol	3-8	Dataran antar perbukitan (Datar)	Bahan Aluvio-Koluvium (Liat)	2	10.087	3,33
8	Kambisol	3-8	Teras Sungai Bagian Bawah	Bahan Endapan Aluvium (Liat)	11	4.227	1,40
9	Kambisol	3-8	Perbukitan Sangat Tertoreh	Kompleks Batuan sedimen dan metamorf (batuan pasir, arkose, slate, dan slate berkapur)	35	1.528	0,50
10	Kambisol	8-15	Perbukitan Agak tertoreh	Batuan Granit	17	8.009	2,65
11	Kambisol	8-15	Perbukitan Agak tertoreh	Batua, sediment (batu liat, batu pasir, dan shale)	21	10.069	3,33
12	Kambisol	15-25	Perbukitan Agak tertoreh	Batuan Granit	18,19	10.755	3,55
13	Kambisol	15-25	Perbukitan Agak tertoreh	Batua, sediment (batu liat, batu pasir, dan shale)	22	3.668	1,21
14	Kambisol	15-25	Dataran Volkan (Bergelombang)	Tuf dan Batu Apung serta Batuan Andesit.	44	35.922	11,87
15	Kambisol	25-40	Perbukitan Agak tertoreh	Batuan Granit	20	5.791	1,91
16	Kambisol	25-40	Perbukitan Agak tertoreh	Batua, sediment (batu liat, batu pasir, dan shale)	23	2.871	0,95
17	Kambisol	25-40	Perbukitan Tertoreh	Kompleks Batuan, sedimen dan metamorf (batu liat, kwarsit, shale, dan slate)	28	1.248	0,41

No	Jenis Tanah	Lereng (%)	Satuan Fisiografi	Bahan Induk Tanah	SPT	Luas SPT (ha)	(%)
18	Kambisol	25-40	Perbukitan Tertoreh	Kompleks Batuan, sedimen dan metamorf (batu liat, kwarsit, shale, dan slate)	29	4.522	1,49
19	Kambisol	25-40	Perbukitan Tertoreh	Kompleks Batuan, sedimen dan metamorf (batu liat, kwarsit, shale, dan slate)	30	612	0,20
20	Kambisol	25-40	Perbukitan Sangat Tertoreh	Kompleks Batuan sedimen dan metamorf (batuan pasir, arkose, slate, dan slate berkapur)	36	4.034	1,33
21	Kambisol	>40	Perbukitan terpisah	Kompleks Batuan sedimen, metamorf (shale, slate) dan granit.	15	2.170	0,72
22	Kambisol	>40	Perbukitan Tertoreh	Kompleks Batuan, sedimen dan metamorf (batu liat, kwarsit, shale, dan slate)	31	4.661	1,54
23	Kambisol	>40	Perbukitan Sangat Tertoreh	Kompleks Batuan sedimen dan metamorf (batuan pasir, arkose, slate, dan slate berkapur)	37,38	5.610	1,85
24	Latosol	3-8	Teras Sungai Bagian Atas	Tufa Masam dan Bahan Aluvio dan Koluvium (Liat)	13	13.778	4,55
25	Latosol	15-25	Teras Sungai Bagian Atas	Tufa Masam dan Bahan Aluvio dan Koluvium (Liat)	14	4.355	1,44
26	Litosol	>40	Perbukitan Karst Paralel Tertoreh	Batu Kapur	47	2.422	0,80
27	Nitosol	3-8	Teras Sungai Bagian Tengah	Bahan Aluvio-Koluvium (Liat)	12	7.759	2,56
28	Nitosol	8-15	Dataran berombak bergelombang	Tufa Masam	4,5a,6a	23.360	7,72
29	Nitosol	8-15	Dataran Bergelombang	Tufa Masam	7,8	13.503	4,46
30	Nitosol	8-15	Dataran Perbukitan (Hillock)	Batuan Granit	9	2.687	0,89
31	Nitosol	15-25	Dataran berombak bergelombang	Tufa Masam	5b,6b	16.492	5,45
32	Nitosol	15-25	Perbukitan Bergelombang	Batuan Granit	16	5.490	1,81
33	Nitosol	15-25	Perbukitan Tertoreh	Batuan Granit	24,25,26	10.974	3,63
34	Nitosol	25-40	Perbukitan Tertoreh	Batuan Granit	27	4.879	1,61
35	Nitosol	25-40	Perbukitan Sangat Tertoreh	Kompleks Batuan, granit, batuan sedimen dan metamorf, (shale dan slate)	39	2.843	0,94
36	Nitosol	>40	Perbukitan Tertoreh	Batuan Granit	32	6.360	2,10
37	Nitosol	>40	Perbukitan Sangat Tertoreh	Batuan Granit	33	1.238	0,41
38	Nitosol	>40	Perbukitan Sangat Tertoreh	Kompleks Batuan, granit, batuan sedimen dan metamorf, (shale dan slate)	40	2.462	0,81
39	Podsolik	>40	Pergunungan Sangat Tertoreh	Batuan Granit	45,46	2.384	0,79
40	Podsolik	>40	Perbukitan Sangat Tertoreh	Batuan Metamorf (kwarsit, slate)	34	3.883	1,28
Luas Lahan						302.599	100,00

Sumber : Peta Tanah Tinjau Daerah Sumatera Barat II Provinsi Sumatera Barat (Pusat Penelitian Tanah Bogor, 1983); Peta Topografi Jantop TNI AD, 1984.

Dari data pada Tabel 2-4 terlihat bahwa tanah di Kabupaten Dharmasraya didominasi oleh jenis tanah yang telah mengalami pelapukan lanjut (tanah tua) dari jenis Kambisol (44,89%) dan Nitosol (32,40%). Tanah jenis ini telah mengalami pelapukan lanjut dan karena berada pada zona tipe iklim A (sangat basah) berdasarkan sistim klasifikasi iklim Schmidt Ferguson (1951) dan termasuk zona iklim B1 menurut zona agroklimat L.R.Oldeman sehingga telah mengalami proses leaching yang terus menerus.

Hal ini mengakibatkan kandungan hara menjadi rendah, KTK rendah, kandungan bahan organik rendah, ketersediaan Ca, Mg, Na, N, P dan K rendah, tinggi kandungan Aluminium (Al) dan Besi (Fe), dengan pH yang rendah (bereaksi masam). Solum tanah pada umumnya dalam sampai sangat dalam, pori mikro banyak, tekstur lempung liat berdebu, struktur remah dan konsistensi lekat.

Tanah jenis ini tersebar pada punggung torehan, perbukitan bergelombang, perbukitan agak tertoreh dengan lereng datar sampai bergelombang, perbukitan tertoreh dengan lereng datar sampai bergelombang, perbukitan tertoreh dengan lereng bergelombang sampai curam. Jenis tanah ini terutama pada lahan dengan kelerengan 15-45% sangat cocok untuk budidaya tanaman perkebunan (tanaman tahunan) seperti karet dengan sedikit treatment/masukan teknologi, Kelapa Sawit dengan pengapuran, coklat dengan pemberian bahan organik. Pemberian bahan organik akan berpengaruh terhadap sifat fisik, kimia dan biologi tanah secara simultan, pengaruhnya adalah memperbaiki aerasi tanah, meningkatkan kapasitas tukar kation, meningkatkan kapasitas menahan air, meningkatkan daya sanggah tanah, sebagai sumber unsur hara mikro dan sumber energi bagi mikro organisme tanah.

Tanah jenis ini juga cukup baik untuk pengembangan tanaman pangan (tanaman semusim) terutama pada lahan dengan slope yang datar sampai bergelombang dengan tingkat kemiringan 0-15% seperti padi sawah, padi ladang, jagung, kedele, kacang tanah, kacang hijau. Kecuali padi sawah semua tanaman pangan tersebut memerlukan pemupukan yang intensif untuk mengimbangi rendahnya kandungan hara makro alami pada tanah tersebut, pengapuran untuk meningkatkan pH tanah, pemberian bahan organik untuk meningkatkan Kapasitas Tukar Kation dan membantu menetralkan pH tanah serta sebagai sumber hara mikro dan memperbaiki aerasi dan drainase tanah.

Tanah jenis ini juga cukup baik untuk pengembangan tanaman hortikultura seperti cabe, bawang dataran rendah, kacang panjang, oyong, pare, mentimun, pisang, kangkung darat, bayam, semangka, dll. Agar tanaman memberikan produksi optimal perlu dilakukan pemupukan NPK dan pupuk kandang/organik. Untuk tanaman buah-buahan terutama pada lahan dengan kelerengan 15-45% cukup cocok untuk pengembangan tanaman rambutan, duku, durian, jeruk dan salak.

Jenis tanah lainnya dengan luasan yang cukup signifikan ditemui adalah dari jenis tanah Aluvial (22.993 Ha/7,60%) dan Andosol (10.574 Ha/3,49%) Tanah Aluvial dan Andosol ini merupakan tanah yang belum berkembang dan baru berkembang. Tanah Aluvial merupakan tanah endapan yang terbentuk dari lumpur dan pasir halus yang mengalami erosi tanah. Banyak terdapat di dataran rendah, di sekitar aliran sungai, river flood plain (daerah dataran banjir), rawa-rawa, lembah-lembah, maupun di kanan kiri aliran sungai besar. Tanah Alluvial atau Inceptisol ini merupakan tanah yang belum berkembang lebih lanjut, belum terbentuk horizon, dan umumnya bertekstur lempung berpasir dengan struktur lepas (remah) sehingga mudah diolah.

Di Kabupaten Dharmasraya tanah ini relatif cukup subur dengan kandungan bahan organik yang cukup tinggi (3-5%), Kapasitas Tukar Kation (KTK) cukup tinggi dan pH yang netral. Kandungan hara sedang hingga tinggi tergantung bahan induk, cukup baik dimanfaatkan untuk tanaman pangan (sawah dan palawija) tanaman semusim dan tahunan. Jenis tanah ini tersebar

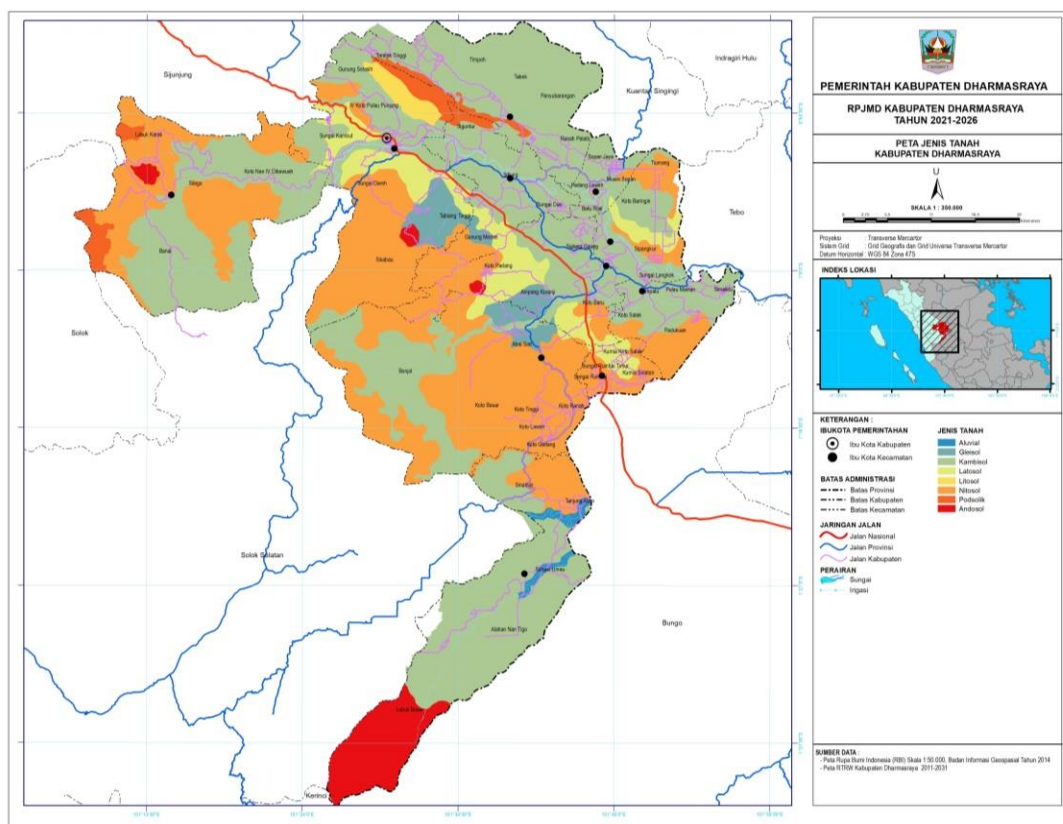
pada dataran banjir disepanjang aliran Batang Hari dan daerah cekungan akibat akumulasi endapan akibat erosi dengan luasan 22.993 Ha (7,60%)

Tanah jenis ini sangat cocok untuk pengembangan tanaman pangan seperti padi sawah, padi lading, palawija, hortikultura dan dapat diusahakan secara intensif.

Sedangkan tanah Andosol adalah salah satu jenis tanah berwarna hitam terutama pada horizon A yang berwarna hitam karena tingginya kandungan C-Organik pada lapisan humus, dengan struktur remah dan gembur sehingga mudah diolah. Menurut ilmu tanah, tanah dengan warna hitam adalah tanah vulkanis yang bahan induknya berasal dari gunung berapi berupa tufa vulkanis, batuan apung dan andesit yang mengalami pelapukan. Tanah andosol memiliki sifat memiliki ketersediaan air yang cukup banyak. Hal ini menyebabkan tanah andosol menjadi tanah yang subur dan cocok untuk ditanami sayur-sayuran.

Tanah jenis Gleisol dan Litosol merupakan tanah yang kurang produktif karena berbagai keterbatasan seperti solum yang dangkal dengan lereng yang curam pada jenis tanah Litosol dan adanya genangan (drainase yang jelek) pada tanah jenis tanah Gleisol. Untuk tanah Litosol (2.422 Ha/0,80%) direkomendasikan untuk jadi padang penggembalaan dengan ditanami rumput, sekaligus bisa mengurangi erosi karena lereng yang curam. Sedangkan untuk tanah jenis Gleisol (8.313 Ha/2,75%) yang umumnya terdapat pada daerah cekungan dengan factor penghambat drainase yang jelek dapat dikembangkan untuk budidaya perikanan air tawar.

Gambar 2-7 Peta Jenis Tanah Kabupaten Dharmasraya



2.1.1.7. Geologi

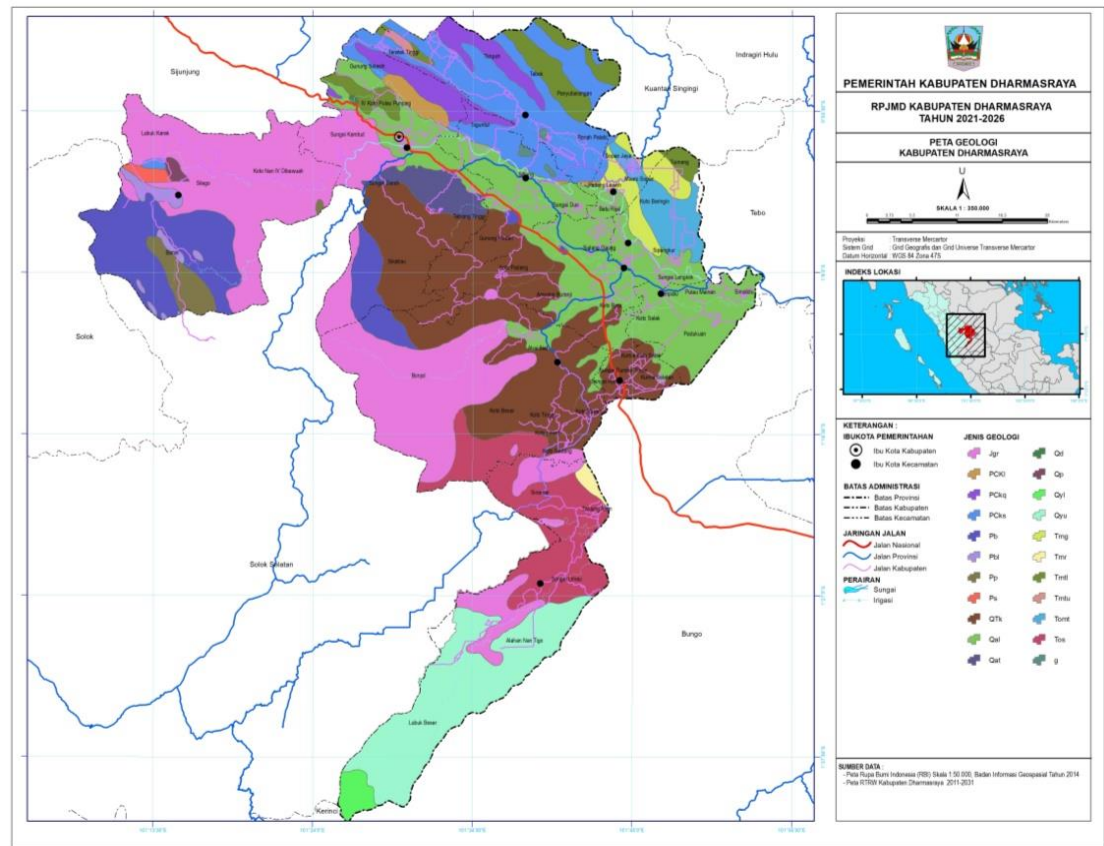
Berdasarkan data informasi Peta Geologi Kabupaten Dharmasraya secara geologi regional masuk dalam Peta Geologi Lembar Solok dan Lembar Painan dan Bagian Timur Laut Muara Siberut maka formasi dan litologi di wilayah Kabupaten Dharmasraya terdiri dari :

- | | |
|---|---|
| 1. Aluvium | 12. Porfir Kuarsa |
| 2. Endapan Undak | 13. Granodiorit |
| 3. Batuan Gunung Api yang tak terpisahkan | 14. Formasi Barisan, Anggota batugamping |
| 4. Lava | 15. Formasi Barisan |
| 5. Formasi Kasai | 16. Formasi Pelepat |
| 6. Formasi Rantaukil | 17. Diabas, Basal |
| 7. Formasi Telisa, Anggota bawah | 18. Formasi Silungkang |
| 8. Formasi Gumai | 19. Formasi Kuantan, Anggota Bawah |
| 9. Formasi Talang Akar | 20. Formasi Kuantan, Anggota Filit dan Serpih |
| 10. Formasi Sinamar | 21. Formasi Kuantan, Anggota Batugamping |
| 11. Granit | |

Untuk lebih jelasnya kondisi geologi Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada

Tabel 2-6 dan Gambar 2-8.

Gambar 2-8 Peta Geologi Kabupaten Dharmasraya



Tabel 2-6 Formasi Dan Litologi Peta Geologi Kabupaten Dharmasraya

No	Simbol	Umur	Formasi	Litologi
1	Qal	Holosen	Aluvium	Lanau, pasir dan kerikil
2	Qat	Holosen	Endapan Undak	Bongkah, kerikil dan pasir; setempat tingginya 30-40 m di atas permukaan sungai
3	Qyu / Qvkb	Kuarter	Batuan Gunung Api yang tak Terpisahkan	Breksi Gunungapi, lahar, breksi tuf, bersusunan basalt sampai andesit. Batuan berasal dari G. Kerinci dan G. Tujuh
4	Qvl	Kuarter	Lava	Susunan dan asalnya sama dengan Batuan Gunung Api yang tak Terpisahkan (Qyu). Aliran terdapat di sekitar lereng G. Kerinci dan G. Tujuh
5	Qtk	Plio-Plistosen	Formasi Kasai	Tuf batupung bersifat asal, batupasir tufan, dengan sisipan bentonit dan sedikit lignit. Kayu yang membatu biasa diketemukan, berumur Plio-Plistosen, tebal maksimal 700 m.
6	Tmr	Miosen	Formasi Rantaukil	Batupasir lempungan, batupasir tufan, batupasir gampingan, batulempung tufan, napal dan lensa tipis batugamping.
7	Tmtl	Miosen	Formasi Telisa, Anggota bawah	Napal lempungan dengan lensa-lensa rijang hitam, batupasir lignit, tuf dan breksi andesit dan batupasir glaukonit
8	Tmg	Miosen	Formasi Gumai	Serpih, batugamping napalan, lapisan tipis tuf andesitan dan mengandung foraminifera kecil, terutama Globigerinidae; tebal maksimum 800 m.
9	Tomt	Oligo-Miosen	Formasi Talang Akar	Napal dengan lensa rijang hitam, batupasir lignitan, tuf andesitan, breksi andesitan, dengan batupasir glaukonit; tebal maksimum 1.500 m.
10	Tos	Oligosen	Formasi Sinamar	Konglomerat, batupasir kuarsa berbutir kasar, batupasir kuarsa mengandung mika, batupasir arkosan, batulempung, napal, batulempung pasir, lapisan batubara dan batugamping koral.
11	Jgr	Yura Awal	Granit	Granit biotit hornblenda sampai granodiorit. Bintik-bintik mineral mafik, oligoklas, hornblenda telah mengalami kloritisasi, setempat apatit; sebagai stok; granodiorit lebih muda.
12	g	Trias	Granit	Leuko-granit sampai monzonit kuarsa, faneritik-porfiritik. Umumnya 112,24 juta tahun.
13	qp	Trias	Porfir Kuarsa	Fenokris-fenokris kuarsa dan feldspar dalam masadasar berbutir sedang, hamper besar dari mineral mafik.
14	gd	Trias	Granodiorit	Bertekstur porfirit-faneritik, berwarna abu-abu muda, bersusunan anderin-oligoklas, ortoklas, kuarsa, hornblenda, biotit dan magnetit ikutan.
15	Pbl	Perem	Formasi Barisan, Anggota batugamping	Batugamping. Terpualamkan, terhablur dan pejal.
16	Pb	Perem	Formasi Barisan	Filit, batusabak, batugamping, batutanduk dan grewake meta.
17	Pp	Perem	Formasi Pelepat	Terutama lava, tuf sela hablur dan tuf sela andesitik; terpropilitkan, pirit, tembaga dan molibden. Lava basaltik dan riolitik tersebar tidak beraturan.
18	d	Permo-Karbon	Diabas, Basal	Keras, retak-retak, berongga, abu-abu tua, bintik-bintik hitam. Bertekstur trakit, feldspar dan mineral mafik dalam masadasar mikrolitik; sisipan dalam filit dan kuarsit.
19	Ps	Permo-Karbon	Formasi Silungkang	Bagian bawah, andesit hornblenda dan augit, meta-andesit dengan sisipan tuf, batugamping, srph dan batupasir. Bagian atas batugamping pasir, batupasir gpab dan serpih lpan dengan sedikit tuf, agl, lava and augit dan basalt
20	PCKq	Karbon	Formasi Kuantan, Anggota Bawah	Kuarsit dan batupasir kuarsa dengan sisipan-sisipan filit, batusabak terkarsikan, serpih, batuan gunung api, tuf klorit, konglomerat dan rijang coklat.
21	PCKa	Karbon	Formasi Kuantan, Anggota Filit dan Serpih	Serpih dan filit kemerahan-coklat, sekisan, sisipan batusabak, qzt, blanau, rijang abu tua dan lava and basalt. Menjadi sekis, genes dan batutanduk pada ktk dengan batu intrusi.
22	PCKl	Karbon	Formasi Kuantan, Anggota Batugamping	Batugamping pejal berongga, berwarna putih, abu-abu dan kemerah-merahan. Mengandung sisipan-sisipan tipis batusabak, filit, serpih terkarsikan dan kuarsit.

Sumber : Peta Geologi Regional Lembar Solok dan Lembar Painan dan Bagian Timur Laut Muara Siberut

2.1.1.8. Hidrogeologi

Berdasarkan Peta Hidrogeologi, Peta Geologi dan Peta Pola Aliran Sungai Kabupaten Dhamasraya, kondisi hidrogeologi Kabupaten Dhamasraya terdiri dari :

A. Akifer dengan Aliran Melalui Ruang Antar Butir (*Aquifers in which flow is intergranular*)

- Akifer produktif dengan penyebaran luas (*extensive, productive aquifers*)
Akifer terutama pasir, dengan keterusan sedang. Kedudukan muka air tanah bebas umumnya dekat permukaan sampai 5 meter dari muka air tanah. Debit mata air umumnya kurang dari 50 liter/detik. Debit sumur diperkirakan mencapai 10 liter/detik.
- Akifer produktivitas sedang, dengan penyebaran luas (*extensive, moderately productive aquifers*)
Akifer terutama pasir, dengan keterusan sedang sampai rendah. Kedudukan muka air tanah bebas umumnya dekat permukaan sampai 14 meter dari muka air tanah setempat. Debit mata air umumnya kurang dari 25 liter/detik. Debit sumur diperkirakan mencapai 5 liter/detik.
- Setempat, akifer dengan produktivitas sedang (*locally, moderately productive aquifers*)
Akifer terutama pasir lempungan, tidak menerus, tipis dengan keterusan rendah. Kedudukan muka air tanah bebas umumnya dekat permukaan, kurang dari 10 meter dari muka tanah setempat. Debit mata air umumnya kurang dari 10 liter/detik. Debit sumur diperkirakan kurang dari 5 liter/detik.

B. Akifer dengan Aliran Melalui Celahan dan Ruang Antar Butir (*aquifers in which flow is both through fissures and interstices*)

- Akifer produktif dengan penyebaran luas (*extensive, productive aquifers*)
Akifer dengan keterusan dan kisaran kedalaman muka air tanah beragam. Debit mata air umumnya kurang dari 200 liter/detik. Debit sumur diperkirakan mencapai lebih dari 5 liter/detik.
- Akifer produktivitas sedang, dengan sebaran luas (*extensive, moderately productive*)
Akifer dengan keterusan sangat beragam, kedalaman muka air tanah bebas umumnya dalam. Debit mata air kurang dari 100 liter/detik. Debit sumur diperkirakan kurang dari 5 liter/detik.
- Setempat, akifer dengan produktivitas sedang (*locally, moderately productive aquifers*)
Akifer dengan keterusan sangat beragam, kedudukan muka air tanah bebasnya dalam. Debit mata air umumnya kurang dari 50 liter/detik.

C. Akifer Dengan Aliran Melalui Celahan, Rekahan dan Saluran (*aquifers in which flow is through fissures, fractures and channels*)

- Akifer produktif inggi sampai sedang (*highly to moderately productive aquifers*)
Aliran air tanah terbatas pada zona celahan, rekahan dan saluran pelarutan. Debit sumur dan mata air beragam dalam kisaran yang besar, debit mata air kurang dari 1 sampai 400 liter/detik

D. Akifer Bercelah atau Sarang Produktif Kecil dan Daerah Air Tanah Langka (aquifers fissured or porous of poor productivity and regions without exploitable groundwater)

- Akifer dengan produktivitas kecil, setempat (*poorly productive aquifers of local importance*)

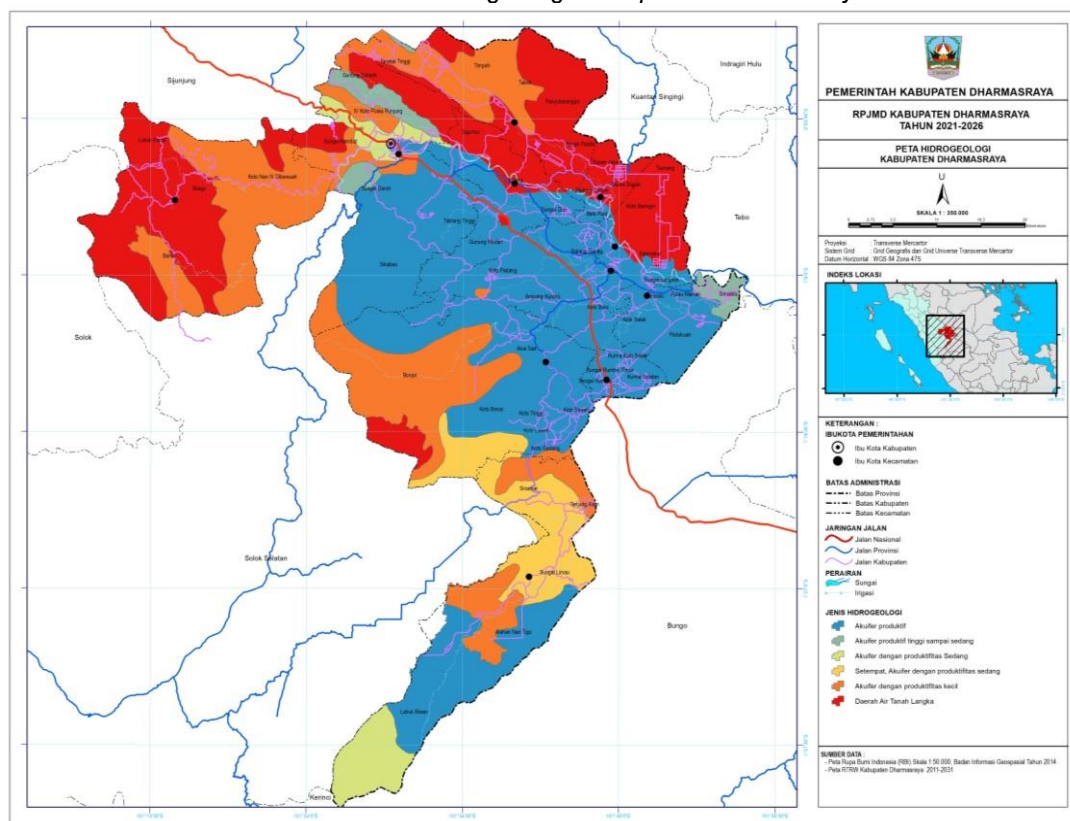
Berada pada zona pelapukan, air tanah dangkal dalam jumlah terbatas masih dapat diperoleh. Kedalaman muka air tanah bebas dekat permukaan sampai 11 meter dari muka tanah setempat. Pemunculan mata air di zona rekahan kurang dari 2 liter/detik.

- Daerah air tanah langka (*regions without exploitable groundwater*)

Ditinjau dari aspek hidrogeologi secara umum Kabupaten Dharmasraya dipengaruhi faktor air permukaan, curah hujan pada *cathment area* dan banyaknya sungai yang mengalir, sangat mempengaruhi *discharge* air di bawah permukaan. Secara hidrogeologi Dharmasraya sebagian wilayahnya tersusun oleh batuan vulkanik dan dataran rendah ditutupi oleh endapan alluvium dengan cadangan air yang melimpah terutama di daerah-daerah yang dilalui oleh dua sungai besar yang hulunya dari dataran tinggi/pegunungan. Daerah dengan batuan vulkanik (beku) mempunyai cadangan (aquifer) setempat dan pada rekahan (joint) umumnya cadangan air langka. Di daerah sedimen yang didominasi pasir lepas merupakan daerah yang mempunyai jenis aquifer dengan produktivitas tinggi dan penyebarannya luas.

Secara keseluruhan Kabupaten Dharmasraya mempunyai cadangan air yang relatif banyak. Khususnya di daerah lembah/dataran rendah merupakan daerah yang mempunyai cadangan (aquifer) yang tinggi, hal ini disebabkan arah aliran air dibawah permukaan mengalir dari dataran tinggi/pegunungan ke daerah yang rendah.

Gambar 2-9 Peta Hidrogeologi Kabupaten Dharmasraya



Sumber : Hasil analisa Bappeda, Tahun 2021

2.1.1.9. Tutupan Lahan

Berdasarkan pemetaan kembali tutupan lahan Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2018 berdasarkan citra terbaru tahun 2017 maka diperoleh hasil bahwa perubahan luas daerah dari 302.599 Ha menjadi 301.645 ha sebagai konsekuensi penataan batas daerah sebagaimana permendagri yang dikeluarkan pasca penyusunan RTRW, dimana tutupan lahan yang ada seperti berikut ini.

A. Lahan Pertanian

Luas lahan pertanian di Kabupaten Dharmasraya secara keseluruhan seluas 240.834 Ha (79,31% dari luas wilayah). Lahan pertanian yang dominan di Kabupaten Dharmasraya yaitu perkebunan sawit seluas 188.951 Ha dan karet seluas 29.946 Ha.

Lahan pertanian tanaman pangan lahan basah/persawahan seluas 4.296 Ha (1,41%). Lahan pertanian tanaman pangan lahan kering (ladang/tegalan dengan palawija) seluas 11.628 Ha (3,83%).

B. Hutan

Luas tutupan lahan hutan di Kabupaten Dharmasraya 53.580 Ha (17,65% dari luas wilayah).

C. Permukiman

Luas kawasan permukiman 2.467 Ha (0,82% dari luas wilayah). Kawasan permukiman dominan berkembang diarah timur dan tenggara wilayah yang meliputi Kecamatan Koto Salak, Koto Besar, Tiumang, Koto Baru, Sitiung, Padang Laweh, dan Timpeh. Sebagian perkembangan permukiman didorong oleh perkembangan permukiman transmigrasi yang sudah dimulai sejak tahun 1970-an. Selain itu terdapat tutupan lahan lain yaitu semak belukar dan perairan seluas 3.353 Ha (1,10%).

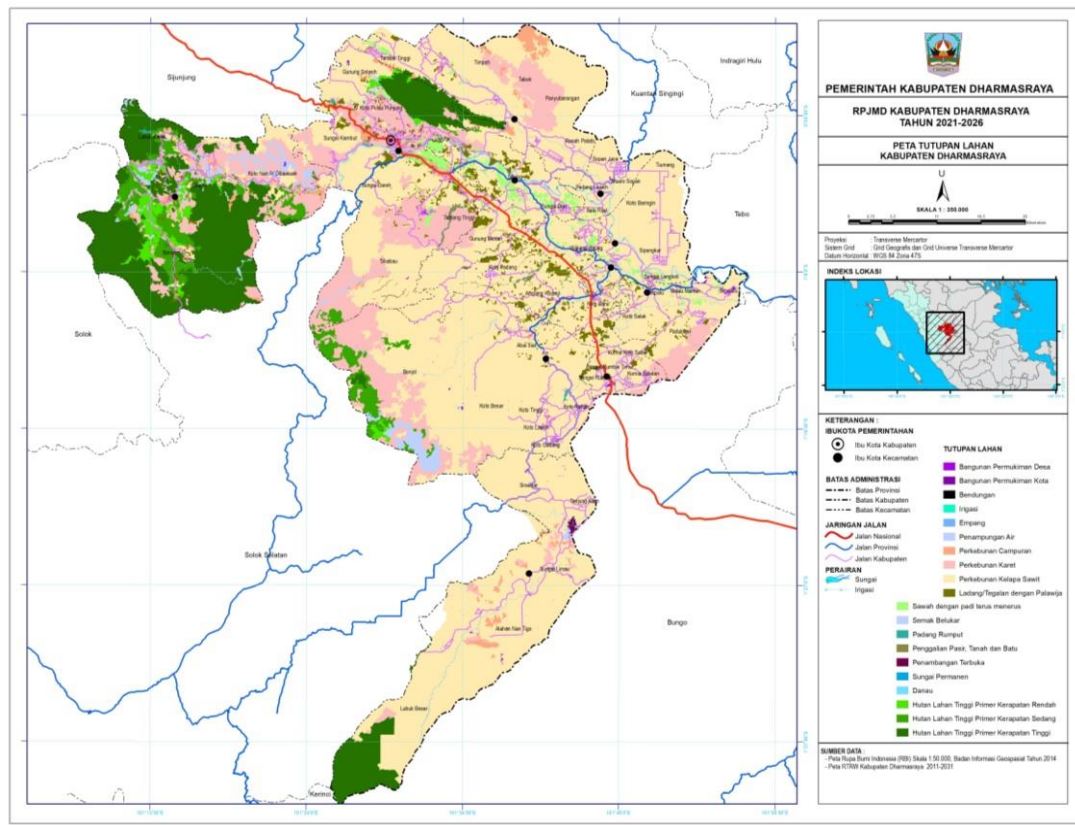
Untuk lebih jelasnya tutupan lahan kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada Tabel 2-7 dan Gambar 2-10.

Tabel 2-7 Luas Tutupan Lahan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas	
		Ha	%
1	Bangunan Permukiman Desa	1.845	0,61
2	Bangunan Permukiman Kota	622	0,21
3	Danau	36	0,01
4	Hutan Lahan Tinggi Primer Kerapatan Rendah	2.061	0,68
5	Hutan Lahan Tinggi Primer Kerapatan Sedang	6.643	2,19
6	Hutan Lahan Tinggi Primer Kerapatan Tinggi	44.876	14,78
7	Irigasi	148	0,05
8	Ladang/Tegalan dengan Palawija	11.628	3,83
9	Padang Rumput	357	0,12
10	Penambangan Terbuka	137	0,05
11	Penampungan Air	2,3	0,00
12	Penggalian Pasir, Tanah dan Batu	816	0,27
13	Perkebunan Campuran	6.013	1,98
14	Perkebunan Karet	29.946	9,86
15	Perkebunan Kelapa Sawit	188.951	62,23
16	Sawah dengan padi terus menerus	4.296	1,41
17	Semak Belukar	2.996	0,99
18	Sungai Permanen	2.260	0,74
Jumlah		301.645	100,00

Sumber : Interpretasi Pemetaan Digitasi Citra Satellite Pleiades Tahun 2017

Gambar 2-10 Peta Tutupan Lahan Kabupaten Dharmasraya



Sumber : Hasil analisa Bappedda, Tahun 2021

2.1.1.10. Pemanfaatan Lahan Berdasarkan Status

Berdasarkan status lahan yang merupakan penguasaan lahan oleh perusahaan atau pemerintah berdasarkan peraturan yang menunjukkan penguasaan lahan tergambar proporsi pemanfaatan lahan oleh masyarakat maupun daerah. Dari data status penguasaan lahan didapat gambaran sebagai berikut:

1. Luas lahan yang telah diperuntukan bagi berbagai pemanfaatan berdasarkan perijinan di Kabupaten Dharmasraya yaitu: kawasan hutan, perkebunan besar, kawasan pertambangan dan rencana pengembangan kawasan cadangan lahan oleh Departemen Transmigrasi seluas 143.767 Ha (47,66%)
2. Kawasan hutan seluas 90.212 Ha (29,9%) sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.35/Menhut-II/2013.
3. Perkebunan besar seluas 49.219 Ha (16,32%)
4. Kawasan pertambangan berdasarkan IUP seluas 3.573.62 Ha dimana di Kab. Dharmasraya terdapat 12 IUP (11 IUP OP dan 1 IUP Eksplorasi).
5. Luas kawasan untuk penggunaan lain diluar kawasan yang telah dikeluarkan ijin penguasaan pemanfaatan lahannya yaitu 157.878 Ha (52,34%).

Tabel 2-8 Peruntukan Lahan Berdasarkan Status Lahan

Peruntukkan Lahan Berdasarkan Status Lahan	Luas	
	(Ha)	%
Kawasan hutan	90.212	29,91%
- Hutan Lindung (HL)	11.406	3,78%
- Hutan Produksi (HP)	27.237	9,03%
- Hutan Produksi Konversi (HPK)	17.901	5,93%
- Hutan Produksi Terbatas (HPT)	28.296	9,38%
- Kaw. Suaka Alam/Pelestarian Alam (KSA/KPA)	5.372	1,78%
Perkebunan Besar	49.219	16,32%
Kawasan Cadangan Pertanian	903	0,30%
Kawasan Pertambangan (berdasarkan IUP operasi produksi)	3.573.62	1,18%
Luas lahan yang dikuasai perusahaan dan pemerintah berdasarkan peraturan perundangan	143.767	47,66%
Penggunaan lain oleh masyarakat dan Pemda	157.878	52,34%
Total Luas Kabupaten	301.645	100,00%

Sumber : Interpretasi Pemetaan Digitasi Citra Satellite Pleiades Tahun 2017

Tabel 2-9 Ijin Usaha (IUP) Pertambangan

No	Rincian	Luas (Ha)
1	WPR	1,420.00
2	WPN	6,698.00
3	WUP Mineral Bukan Logam dan Batuan	198,300.00
4	WUP Mineral Logam	44,520.00
5	WUP Batubara	44,950.00
6	WUP Radioaktiv	49.60
Total Luas Wilayah Pertambangan		295,937.60
Luas Wilayah Administrasi		301,645.00

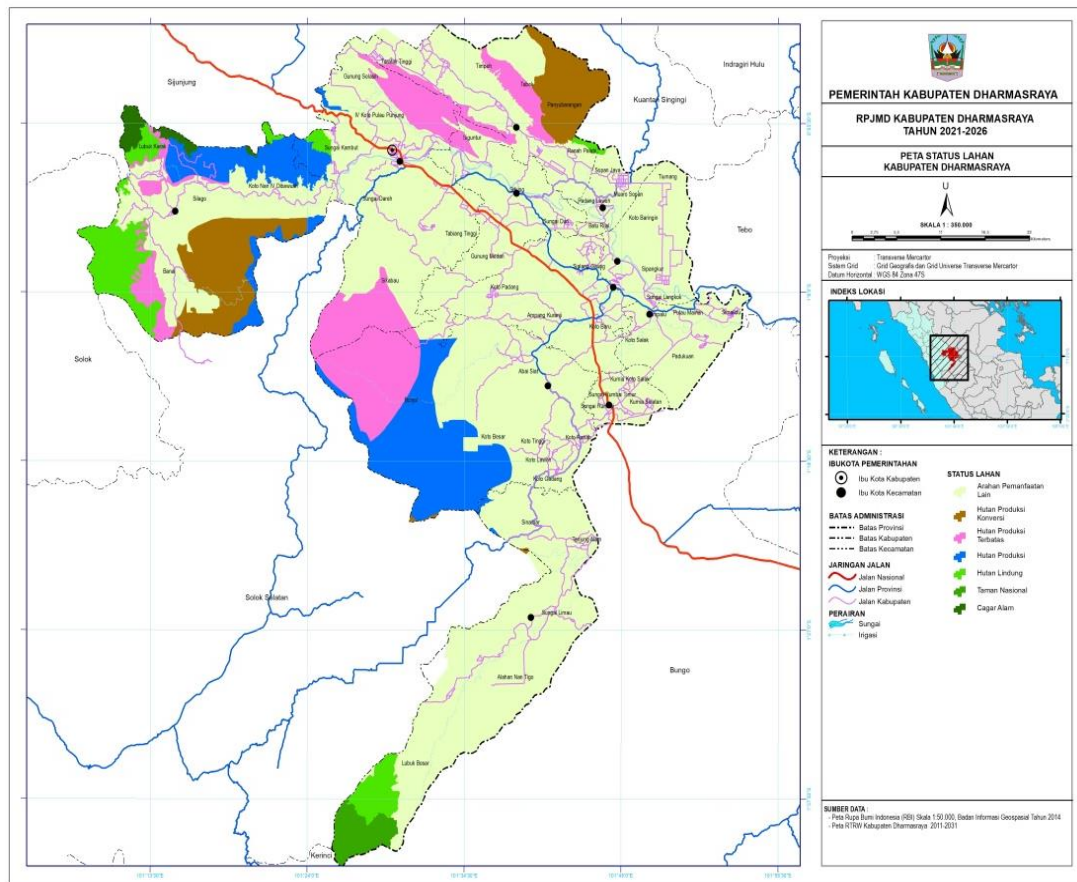
Sumber : Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat (Kepmen ESDM No. 3669K/30/MEM/2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Sumatera)

Tabel 2-10 Ijin Usaha (IUP) Pertambangan

Kategori	Luas (Ha)	Proporsi dari luas kabupaten (%)
IUP Pertambangan	3.573.62	1,18%
IUP Operasi Produksi Pertambangan	3.530,34	1,17
IUP Eksplorasi pertambangan	43,28	0,01

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat

Gambar 2-11 Peta Status Lahan Kabupaten Dharmasraya



Sumber : Hasil analisa Bappeda, Tahun 2021

2.1.2. Kerawanan Bencana Alam

Menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa rawan bencana alam adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Salah satu faktor terjadinya bencana dikarenakan lingkungan. Oleh karena itu, kondisi daerah rawan bencana harus dikenali dan dibuat rencana tata ruang daerah rawan bencana. Selanjutnya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), disebutkan bahwa kawasan bencana alam dibedakan menjadi kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan banjir.

Salah satu klasifikasi kawasan rawan bencana alam yang teridentifikasi di Kabupaten Dharmasraya adalah bencana tanah longsor yang dapat dilihat berdasarkan potensi gerakan tanah dan bencana banjir seperti uraian berikut:

2.1.2.1. Potensi Gerakan Tanah

Bencana Gerakan Tanah/longsor merupakan perpindahan tanah yang disebabkan karena gempa bumi, kelerengkan terjal maupun adanya kontak antar batuan yang mempunyai densitas berbeda. Gerakan tanah/longsor yang terjadi Kabupaten Dharmasraya

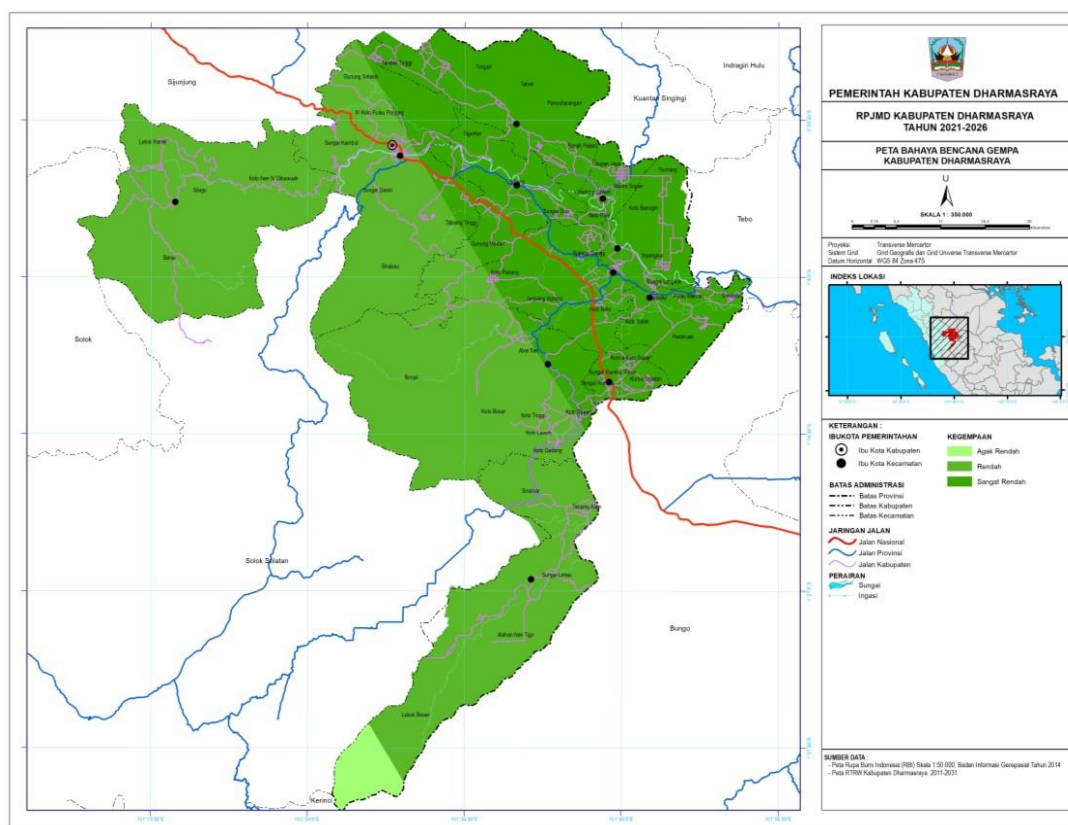
umumnya disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya kondisi geologi, morfologi, dan curah hujan. Daerah lokasi potensi tinggi longsor : Kecamatan Silago, Sialang Kecamatan Pulau Punjung, dan Kampung Surau Kecamatan Pulau Punjung.

Potensi gerakan tanah dijumpai pada daerah yang dibentuk oleh batuan Anggota Filit, Formasi Barisan (Pb) dan serpih Formasi kuantan (Pckl) dan batuan vulkanik (Qd) . Umumnya gerakan tanah berupa longsor bahan rombakan dan nendatan berdimensi panjang antara 1-2 m, lebar antara 0,5-1 m, terdapat pada kemiringan lereng antara 40-50 %. Sedangkan tipe gerakan tanah yang sering terjadi berupa longsor bahan rombakan dan batu.

Bencana gerakan tanah pernah terjadi di Sialang, Kampung Surau, Kecamatan Pulau Punjung dan Kecamatan Silago yang mengakibatkan rusaknya sarana–prasarana transportasi dan lahan pertanian di daerah tersebut. Karakteristik bencana gerakan tanah tersebut dicirikan oleh adanya pergerakan suatu masa tanah/batuan dan air yang terjadi secara tiba-tiba dan serentak dengan kecepatan tinggi.

Gerakan tanah di wilayah Kabupaten Dharmasraya dapat dikelompokkan berdasarkan dominasi sebaran batuan utamanya, sehingga sebaran batuan yang luasnya kecil dan mempunyai topografi hampir sama akan disatukan dengan dominasi batuan utamanya, sedangkan metode yang digunakan untuk menentukan tingkat kerentanan gerakan tanah digunakan metode kualitatif. Metode ini parameter yang digunakan untuk menentukan tingkat kerentanan gerakan tanah terdiri atas: bentuk muka tanah (morfologi), kondisi geologi, curah hujan, dan kegempaan. Dari analisis parameter-parameter tersebut secara umum di Kabupaten Dharmasraya dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, seperti pada Tabel 2-11.

Gambar 2-12 Peta Rawan Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Dharmasraya



Sumber : Hasil analisa Bappeda, Tahun 2021

Tabel 2-11 Gerakan Tanah Wilayah Kabupaten Dharmasraya

No	Zona Kerentanan Gerakan Tanah	Kelompok Batuan Utamanya	Jenis Gerakan Tanah	Sebaran
1	Tinggi	Kelompok Anggota filit dan serpih Formasi Kuantan (PCKs), Batuan Intrusi Granit (g), Andesit (Qatg), Bahan vulkanik tak terpisahkan (Qtau).	Jenis gerakan tanah luncuran hingga runtuh atau tumbang, lereng > 25%, kekar dan sesar.	Zona ini terdapat pada bagian Barat, meliputi Kecamatan Silago, Sialang, Kampung Surau Kecamatan Pulau Punjung
2	Sedang	Kelompok Batuan Anggota Batu Gamping Formasi Kuantan (PCKs), Anggota Formasi Kasai (QTpu) Anggota Filit Serpih Formasi Kuantan, Batuan Intrusi (g), Andesit (Qatg), dan bahan vulkanik tak terpisahkan.	Gelinciran – Seluncuran (bidang lapisan, kekar dan sesar).	Zona ini terdapat pada bagian Tengah dan Timur Laut meliputi wilayah Kecamatan Kota Baru dan Ampalu
3	Rendah	Kelompok Bantuan Anggota Batugamping Formasi Kuantan, Anggota Filit dan Serpih Formasi Kuantan (PCKs), Bahan vulkanik tak terpisahkan (Qtau), kipas Aluvium (Qf) dan Endapan Aluvium (Qaf).	Gelinciran – Luncuran (bidang foliasi, kekar dan sesar).	Penyebaran zona ini terdapat di bagian utara, selatan dan Timur daerah kajian yang meliputi wilayah Kecamatan Timpeh, Padang Laweh, Koto Besar, Kec. Koto Salak, Sungai Rumbai.
4	Sangat Rendah	Batuan penyusunan zona ini terdiri dari bahan vulkanik (Qv), Kipas Aluvium dan Endapan Aluvium (Qal).	Erosi tebing sungai (litologi bersifat lepas-lepas).	Sebaran zona ini terletak di bagian tengah dan timur daerah telitian

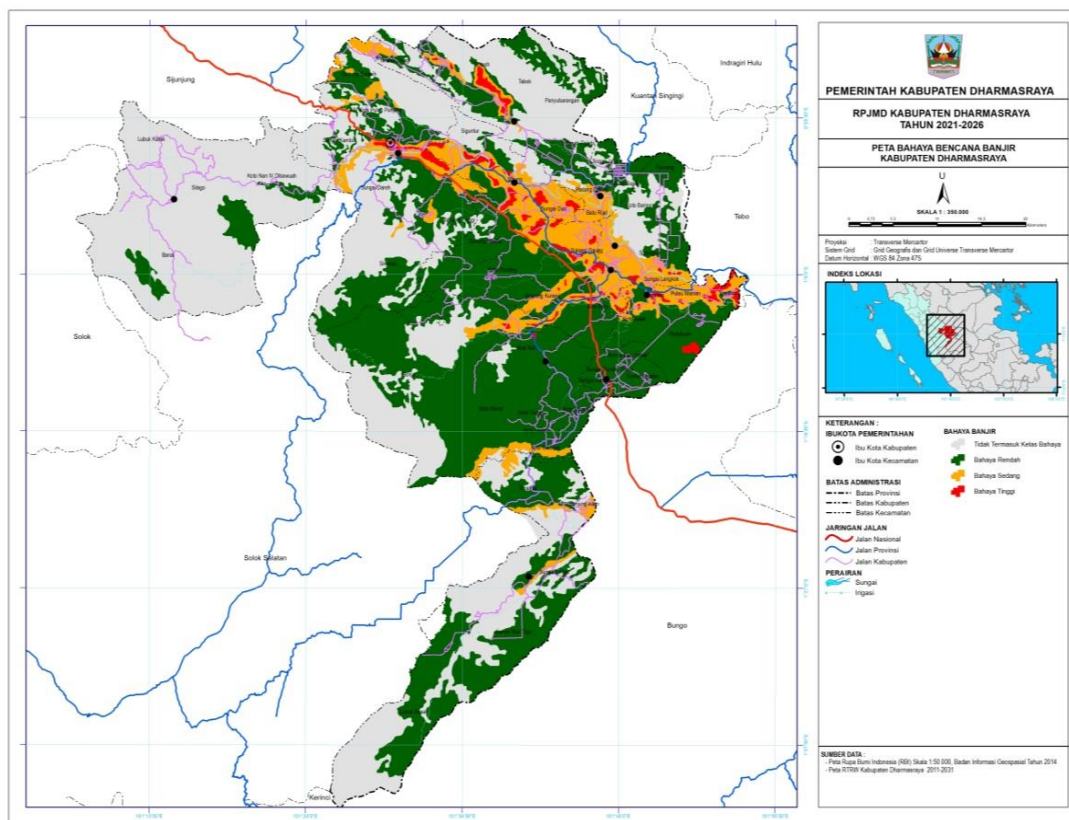
Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dharmasraya, tahun 2021

2.1.2.2. Bencana Banjir

Kawasan Rawan Banjir di Kabupaten Dharmasraya terdapat pada kawasan-kawasan yang bercirikan : dataran limpah banjir yang terbentuk oleh teras-teras sungai yang terbentuk pada masa lampau, pertemuan dua sungai besar, meander sungai, dan daerah hilir sungai yang berhulu pada kawasan berhutan gundul. Kawasan yang sangat potensi bencana banjir di Kabupaten Dharmasraya adalah dataran banjir yang morfologi dataran disepanjang aliran sungai Batanghari, Batang Timpeh, Sungai Batang Abai dan Sungai Bonjol, yang ketika aliran sungai pada kondisi normal tidak meluap namun pada saat musim hujan aliran sungai melampaui batas normal terjadi limpasan air sungai yang menyebabkan banjir.

Bahaya banjir sering terjadi di lokasi potensi banjir : Kampung Surau, Pelayangan, Nagari Gunung Selasih di Kecamatan Pulau Punjung. Banjir Bandang sekitar Batang Timpeh di Kecamatan Timpeh, Pasar Abai, Sungai Batang Abai, Sungai Bonjol di Kecamatan Koto Besar, Kecamatan Koto Salak, Kecamatan Sungai Rumbai dan Kecamatan Padang Laweh. Berikut data bencana banjir pada Kabupaten Dharmasraya.

Gambar 2-13 Peta Rawan Bencana Banjir di Kabupaten Dharmasraya



Sumber : Hasil analisa Bappeda, Tahun 2021

2.1.2.3. Kerawanan Longsor

Tingkat kerentanan terhadap bahaya longsor dari hasil analisis skoring terhadap parameter penentu kerawanan longsor klasifikasi berupa kelereng, ketinggian, curah hujan, dan jenis tanah maka Diperoleh kelas kerentanan yaitu tidak rawan, kerawanan rendah, kerawanan sedang, kerawanan tinggi.

Hasil dari analisis skoring dengan metode tabular dan overlay diperoleh gambaran tentang area rawan yang hanya sebagian kecil saja kawasan longsor yang terdapat di Kabupaten Dharmasraya.

Tabel 2-12 Luas Daerah Rawan Longsor Berdasarkan Tingkat Kerawananan

No	Kriteria Kerentanan Bahaya Longsor	Luas	
		(Ha)	(%)
1	Tidak Rawan	-	-
2	Kerawanan Rendah	73.143	24,17
3	Kerawanan Sedang	182.638	60,36
4	Kerawanan Tinggi	96.818	15,47
	Luas Lahan	301.645	100,00

Sumber : Hasil analisis RTRW Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031

2.1.2.4. Kerawanan Pencemaran Lingkungan

Baku mutu air raksa telah dilewati terutama oleh Sungai Muaro Pangian dan Sungai Batanghari bagian hulu, dan pada jumlah yang tidak terlalu signifikan pada Sungai Batang Abai Siat, Batang Betung, Batang Siat Hilir, Batang Timpeh, dan Muaro Batang Momongan.

Kualitas air beberapa sungai di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada Tabel 2-13.

Tabel 2-13 Kondisi Kualitas Air Sungai di Kabupaten Dharmasraya

No	Parameter	Satuan	Baku Mutu	Lokasi Sampling														
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Waktu Pemantauan (tgl/bln/thn)				8/27/ 2010	27/08 /2010	27/08 /2010	8/27 /2010	8/27 /2010	8/27 /2010	8/27 /2010	8/27 /2010	5/31 /2010	5/31 /2010	5/31 /2010	5/31 /2010	8/27 /2010	8/27 /2010	8/27 /2010
1	FISIKA																	
	Temperatur	°C										28,4	30,0	30,1	30,1			
	TDS	Mg/L	1000	64	17	22	55	95	45	182	23	21,7	80,4	64,4	57,6	15	88	51
	TSS	Mg/L	50	6	23	13	42	421	8	520	19	305	9	20	12	16	51	25
2	KIMIA ORGANIK																	
	PH		6-9	6,57	6,37	6,76	6,70	6,34	6,80	7,05	6,50	6,82	7,48	7,33	7,50	6,64	6,98	6,80
	BOD	Mg/L	2	2,4	2,0	1,6	2,0	3,2	3,5	2,8	3,4	1,56	1,92	2,44	2,86	3,1	4,5	2,8
	COD	Mg/L	10	10	15	4	12	13	7	21	9	16	17	9	14	17	43	25
	DO	Mg/L	6	7,2	7,3	6,9	7,1	7,1	6,1	6,7	7,2	4,0	4,7	5,9	5,3	6,8	7,0	6,3
	Posfat	Mg/L	0,20	TTD	0,008	0,083	0,033	0,216	TTD	0,106	0,015	0,039	TTD	TTD	TTD	0,162	0,154	TTD
	NO2	Mg/L		TTD	0,004	TTD	0,005	0,119	TTD	0,099	TTD	0,019	0,007	0,008	0,023	TTD	TTD	TTD
	Tembaga	Mg/L	0,02	TTD	TTD	TTD	TTD	TTD	TTD	TTD	TTD					TTD	TTD	TTD
	Besi	Mg/L	0,3	0,265	2,152	1,574	3,617	11,92	0,882	12,14	0,4					1,229	4,869	1,551
	Timbal	Mg/L	0,03	TTD	TTD	TTD	TTD	TTD	TTD	TTD	TTD					TTD	TTD	TTD
	Air Raksa	Mg/L	0,001	TTD	0,00092	0,00138	0,00166	0,00299	TTD	0,00069	0,00054	0,00172	0,00172	0,00163	0,02099	0,01392	0,00205	0,00075
	Seng	Mg/L	0,05	5,440	5,821	0,377	0,299	0,297	0,114	0,334	0,135					3,947	0,648	0,074
	Sulfat	Mg/L	400	1,475	3,594	2,634	4,665	71,032	6,98	48,023	23,49					1,867	3,713	19,74

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya
Baku mutu berdasarkan PP 82 Tahun 2001 Kelas I

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 = Sungai Batang Momongan Hulu | 9 = Sungai Batang Siat Hilir |
| 2 = Sungai Batang Mimp | 10 = Sungai Batang Timpeh |
| 3 = Sungai Batang Siat Abai | 11 = Sungai Muaro batang Momongan |
| 4 = Sungai Betung | 12 = Sungai Muaro Pangian |
| 5 = Sungai Koto Balai & S. Batih | 13 = Sungai Batanghari (Hulu) |
| 6 = Sungai Pangian Hulu | 14 = Sungai Batanghari (Tengah) |
| 7 = Sungai.Piruko Palangko & Nyunyo | 15 = Sungai Batanghari (Hilir) |
| 8 = Sungai Kuranji&Btng Siat | |

2.1.3. Kondisi Demografi

Dalam penyajian kondisi demografi, akan disajikan karakter penduduk Kabupaten Dharmasraya berdasarkan jumlah, pertumbuhan, dan kepadatan penduduk. Kependudukan merupakan salah satu aspek penting yang dijadikan sebagai pertimbangan dalam perencanaan daerah. Penduduk sebagai objek sekaligus subjek dalam pembangunan wilayah merupakan salah satu potensi internal yang cukup penting dalam pengembangan wilayah itu sendiri.

Jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya pada Tahun 2020 mencapai 228.591 jiwa. Dilihat berdasarkan distribusi penduduk, jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Pulau Punjung sebanyak 45.339 jiwa atau 19,83 % dari total jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya, di Kecamatan Koto Baru sebanyak 32.519 jiwa atau 14,23 % dari total jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya dan di Kecamatan Sitiung sebanyak 28.324 jiwa atau 12,39 % dari total jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya.

Sementara jumlah penduduk terendah terdapat di Kecamatan Padang Laweh yaitu sebanyak 6.462 jiwa atau hanya 2,83 % dari total jumlah penduduk Kabupaten Dharmasraya. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2015 - 2020 mencapai 1,73%/tahun.

Kepadatan penduduk brutto Kabupaten Dharmasraya tahun 2020 sebesar 0.76 orang/ha. Atau sekitar 76 jiwa/km. Untuk lebih jelasnya jumlah, distribusi dan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2-14 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Dharmasraya Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Sungai Rumbai	20.199	20.352	20.022	20.487	22.489
2	Koto Besar	23.710	23.568	24.254	24.404	26.939
3	Asam Jujuhan	6.501	6.750	7.092	9.285	9.502
4	Koto Baru	28.259	28.424	28.637	29.331	32.519
5	Koto Salak	18.423	18.543	16.669	16.747	17.598
6	Tiumang	10.437	10.546	10.597	11.217	13.144
7	Padang Laweh	7.788	7.893	8.124	8.207	6.462
8	Sitiung	24.936	25.527	26.038	26.511	28.324
9	Timpeh	14.618	14.726	14.532	15.359	16.909
10	Pulau Punjung	37.680	35.674	39.909	39.167	45.339
11	Sembilan Koto	13.732	14.282	12.807	13.577	9.366
Total		206.283	206.285	208.681	214.292	228.591
Pertumbuhan		3,01	0,00	1,16	2,69	1,73

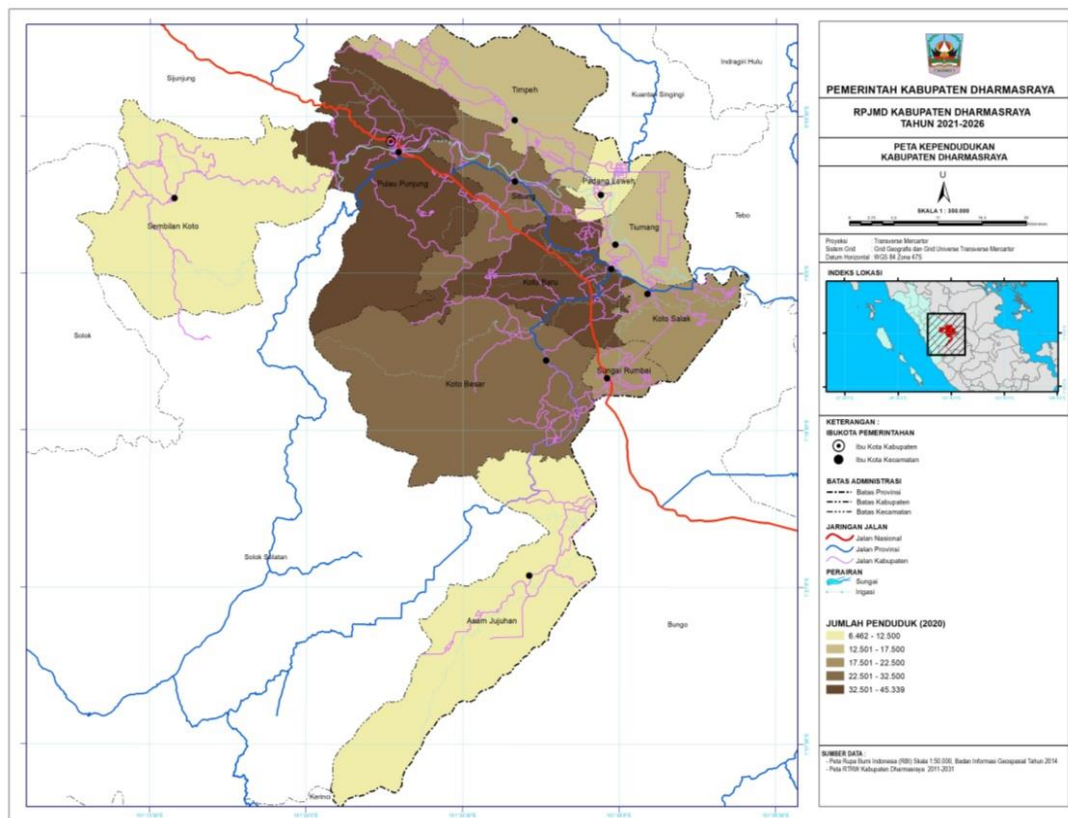
Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Tahun 2021

Tabel 2-15 Kepadatan Penduduk Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Ha)
1	Sungai Rumbai	5.109	22.489	4,1
2	Koto Besar	57.310	26.939	0,4
3	Asam Jujuhan	46.372	9.502	0,2
4	Koto Baru	21.747	32.519	1,4
5	Koto Salak	12.440	17.598	1,4
6	Tiumang	13.543	13.144	0,9
7	Padang Laweh	6.100	6.462	1,4
8	Sitiung	13.018	28.324	2,1
9	Timpeh	32.730	16.909	0,5
10	Pulau Punjung	44.750	45.339	0,9
11	Sembilan Koto	48.522	9.366	0,3
Jumlah Penduduk		301.645	228.591	0,8

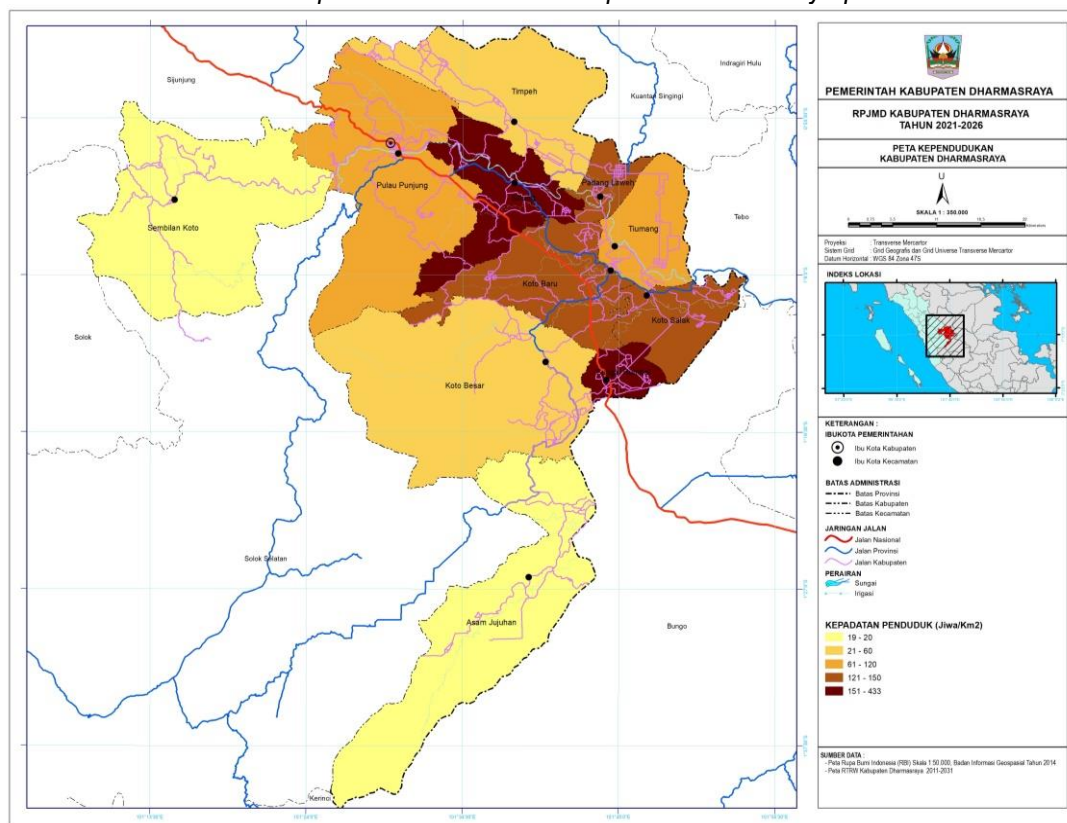
Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, hasil analisis

Gambar 2-14 Peta Jumlah dan Distribusi Penduduk Kabupaten Dharmasraya per Kecamatan



Sumber : Hasil analisa Bappeda, Tahun 2021

Gambar 2-15 Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Dharmasraya per Kecamatan



Sumber : Hasil analisa Bappeda, Tahun 2021

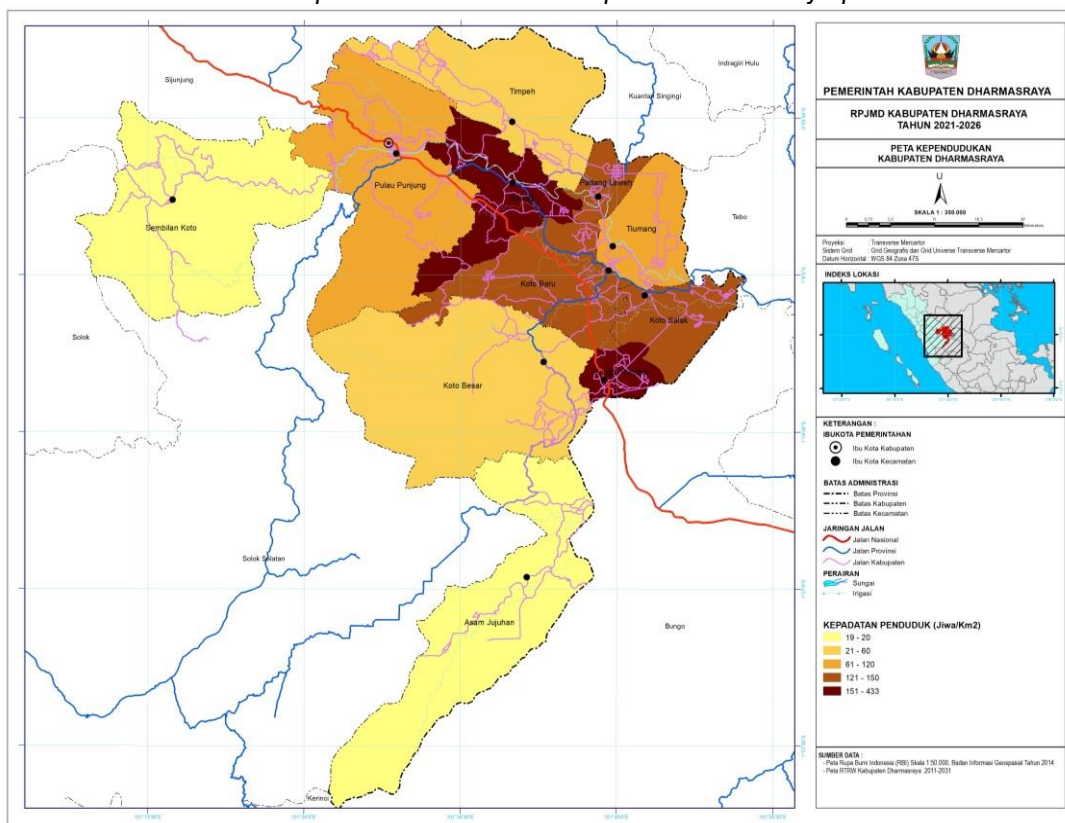
Selanjutnya apabila dilihat jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, maka secara eseluruhan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari jumlah penduduk perempuan dengan sex rasio sebesar 102,96, sedangkan sex rasio tertinggi ada pada kelompok umur 50-54 tahun dan 55-59 tahun.

Tabel 2-16 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020

Kelompok Umur	Jenis Kelamin (Jiwa)		Total (Jiwa)	Sex Rasio
	Pria	Wanita		
00-04	8.598	8.058	16.656	106,70
05-09	11.153	10.718	21.871	104,06
10-14	11.660	10.695	22.355	109,02
15-19	8.929	8.952	17.881	99,74
20-24	9.580	9.161	18.741	104,57
25-29	8.452	8.612	17.064	98,14
30-34	8.609	8.890	17.499	96,84
35-39	9.267	9.664	18.931	95,89
40-44	9.056	8.521	17.577	106,28
45-49	7.397	7.075	14.472	104,55
50-54	6.043	5.532	11.575	109,24
55-59	4.854	4.417	9.271	109,89
60-64	3.713	3.599	7.312	103,17
65-69	2.513	2.329	4.842	107,9
70-74	1.297	1.410	2.707	91,99
>75	1.655	1.896	3.551	87,29
JUMLAH	112.776	109.529	222.305	102,96

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, hasil analisis

Gambar 2-16 Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Dharmasraya per Kecamatan



Sumber : Hasil analisa Bappeda, Tahun 2021

Selanjutnya apabila dilihat jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin, maka secara eseluruhan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari jumlah penduduk perempuan dengan sex rasio sebesar 102,96, sedangkan sex rasio tertinggi ada pada kelompok umur 50-54 tahun dan 55-59 tahun.

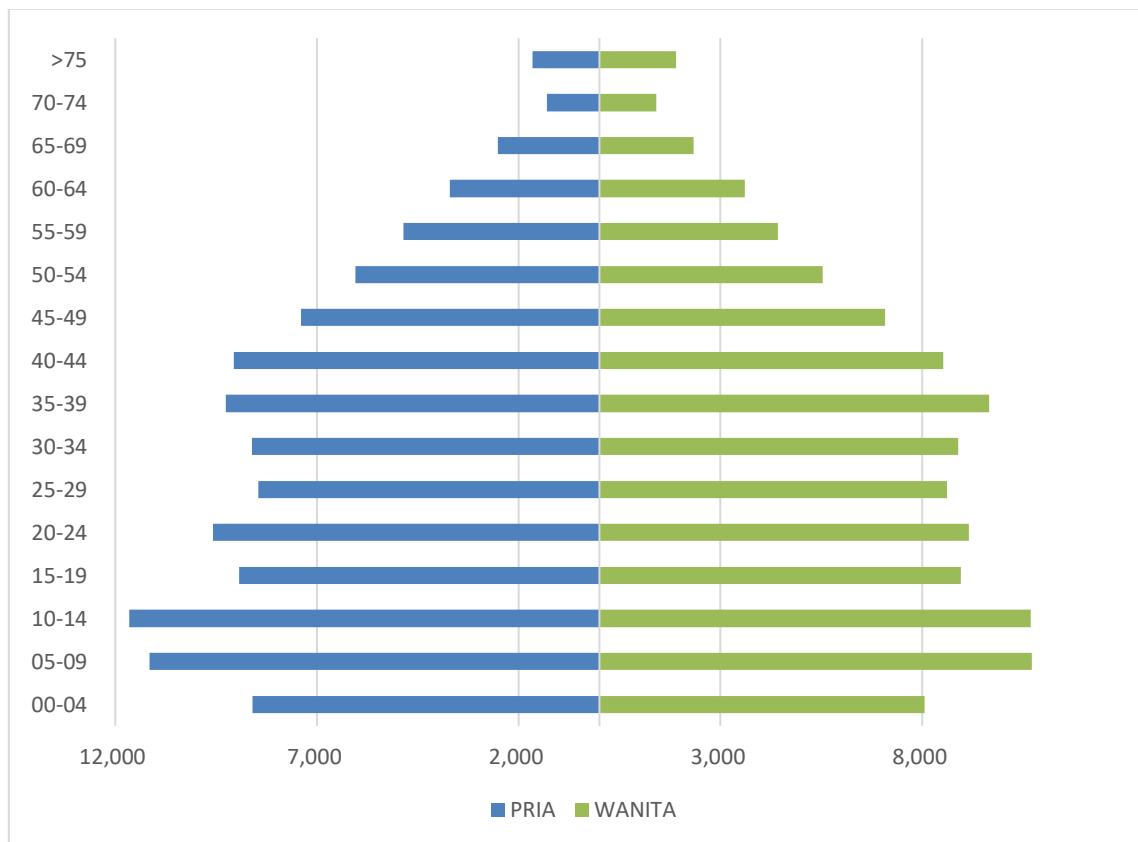
Tabel 2-17 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020

Kelompok Umur	Jenis Kelamin (Jiwa)		Total (Jiwa)	Sex Rasio
	Pria	Wanita		
00-04	8.598	8.058	16.656	106,70
05-09	11.153	10.718	21.871	104,06
10-14	11.660	10.695	22.355	109,02
15-19	8.929	8.952	17.881	99,74
20-24	9.580	9.161	18.741	104,57
25-29	8.452	8.612	17.064	98,14
30-34	8.609	8.890	17.499	96,84
35-39	9.267	9.664	18.931	95,89
40-44	9.056	8.521	17.577	106,28
45-49	7.397	7.075	14.472	104,55
50-54	6.043	5.532	11.575	109,24
55-59	4.854	4.417	9.271	109,89
60-64	3.713	3.599	7.312	103,17
65-69	2.513	2.329	4.842	107,9
70-74	1.297	1.410	2.707	91,99
>75	1.655	1.896	3.551	87,29
JUMLAH	112.776	109.529	222.305	102,96

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, hasil analisis

Dan apabila dilihat dari piramida penduduk seperti gambar di bawah maka terlihat bahwa semakin tinggi kelompok umur maka jumlah penduduknya semakin sedikit. Dan jumlah penduduk terbanyak ada pada kelompok usia 10-14 dan 05-09 tahun masing-masing sebesar 22.355 orang dan 21.871 orang.

Gambar 2-17 Piramida Penduduk Kabupaten Dharmasraya Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, data diolah

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Pada aspek kesejahteraan masyarakat dijelaskan mengenai indikator-indikator makro pembangunan daerah, diantaranya Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan PDRB, pendapatan perkapita, indeks gini, tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran. Adapun tampilan data yang digunakan dalam menganalisis kondisi indikator makro ditampilkan perbandingan antara kondisi daerah Kabupaten Dharmasraya dengan kondisi Provinsi Sumatera Barat maupun nasional. Sehingga didapatkan perbandingan Kabupaten Dharmasraya dengan rata-rata kab/kota di Sumatera Barat maupun secara nasional. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari data dan analisis di bawah :

2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM digunakan untuk Mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk), dengan nilai tersebut maka IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum.

IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar :

1. Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*)
2. Pengetahuan (*knowledge*)
3. Standar hidup layak (*decent standard of living*)

Tabel 2-18 menggambarkan perkembangan IPM Kabupaten Dharmasraya dari tahun 2016 sampai tahun 2020 yang dibandingkan dengan kondisi IPM tingkat provinsi dan nasional. Selama periode 2016 - 2020 IPM Kabupaten Dharmasraya cenderung mengalami peningkatan. Namun memasuki tahun 2020 terjadi sedikit penurunan, penurunan tersebut disebabkan oleh kondisi covid-19 yang sangat mempengaruhi aspek ekonomi maupun sosial masyarakat. Dari 4 indikator pembentuk IPM, maka yang mengalami penurunan terlihat pada pengeluaran perkapita saja, namun tiga indikator lainnya tidak berpengaruh signifikan.

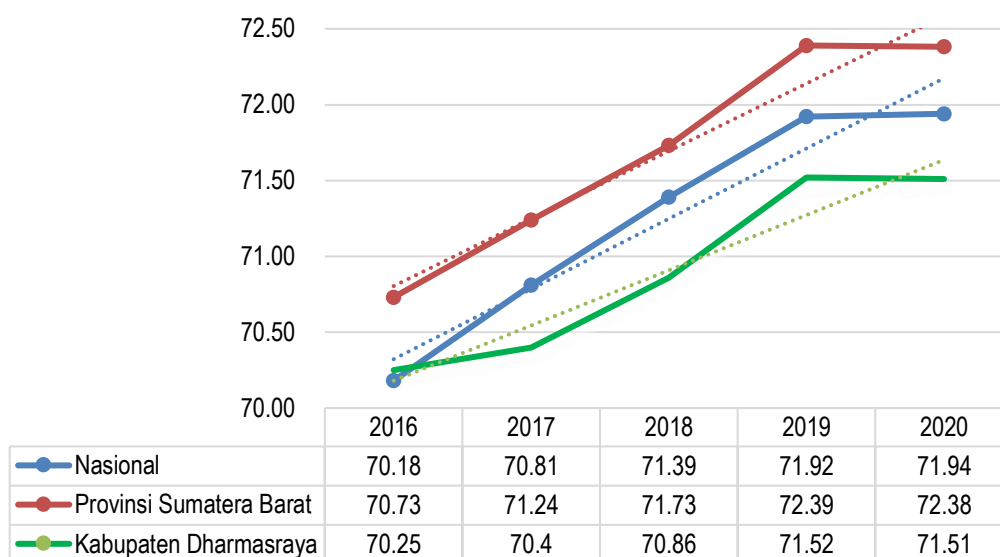
Tabel 2-18 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
A	IPM Nasional	Indeks	70,18	70,81	71,39	71,92	71,94
1	Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH)	Tahun	70,9	71,06	71,2	71,34	71,47
2	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,95	8,1	8,17	8,34	8,48
3	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,72	12,85	12,91	12,95	12,98
4	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan	(000 Rp/ Orang/ Tahun)	10.420	10.664	11.059	11.299	11.013
B	IPM Provinsi Sumatera Barat	Indeks	70,73	71,24	71,73	72,39	72,38
1	Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH)	Tahun	68,73	68,78	69,01	69,31	69,47
2	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,59	8,72	8,76	8,92	8,99
3	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,79	13,94	13,95	14,01	14,02
4	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan	(000 Rp/ Orang/ Tahun)	10.126	10.306	10.638	10.925	10.733
C	IPM Kabupaten Dharmasraya	Indeks	70,25	70,4	70,86	71,52	71,51
1	Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH)	Tahun	70,3	70,44	70,73	71,1	71,33
2	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,23	8,24	8,25	8,46	8,47
3	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,39	12,4	12,41	12,42	12,43
4	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan	(000 Rp/ Orang/ Tahun)	10.781	10.851	11.189	11.431	11.273

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

Dibandingkan dengan nasional dan provinsi, maka IPM kabupaten Dharmasraya berada di bawah nasional maupun provinsi (Gambar 2-18). Namun Kabupaten Dharmasraya berada di peringkat 10 dari 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat. Padahal pada tahun 2010 Kabupaten Dharmasraya telah berada di peringkat 8. Namun seiring berjalannya waktu, IPM Dharmasraya saat ini berada di bawah Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar maupun provinsi.

Gambar 2-18 IPM Dharmasraya, Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

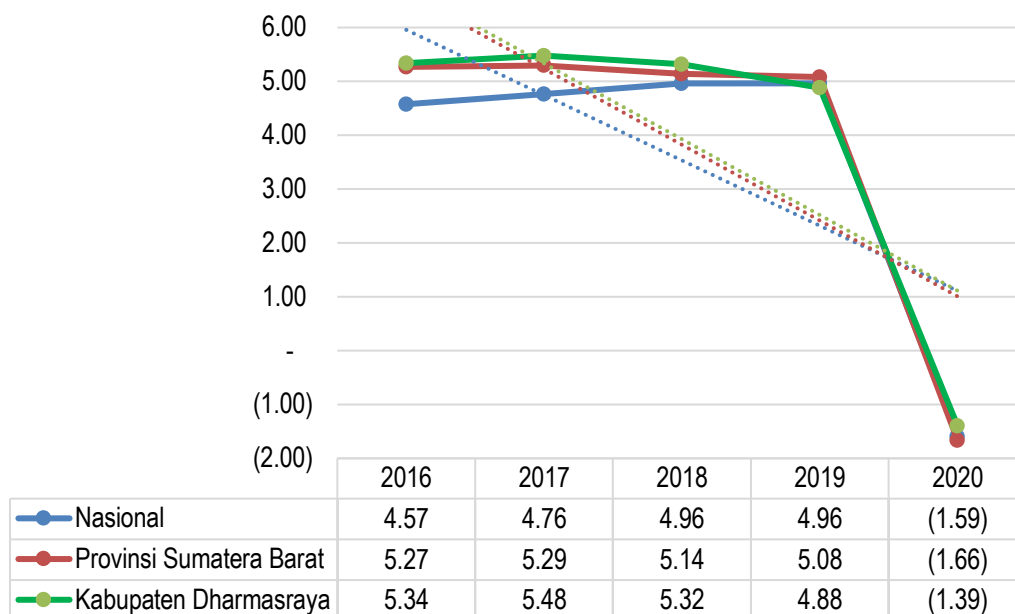
Menurunnya peringkat Kabupaten Dharmasraya terkait IPM terjadi karena lambatnya perkembangan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah selama 5 tahun terakhir. Pada Gambar 2.16 terlihat bahwa rata-rata pertumbuhan indikator rata-rata lama sekolah di Dharmasraya adalah 0,73% yang lebih rendah dari tingkat provinsi dan nasional yaitu 1,15% dan 1,63% masing-masingnya. Rata-rata pertumbuhan indikator harapan lama sekolah di Dharmasraya selama periode 2016 – 2020 sebesar 0,08% yang juga lebih rendah dibandingkan tingkat provinsi (0,42%) dan nasional (0,51%). Hal ini perlu menjadi perhatian untuk membentuk strategi untuk meningkatkan jumlah masyarakat yang menempuh pendidikan lebih tinggi.

2.2.2. Laju Pertumbuhan PDRB

Laju pertumbuhan PDRB merupakan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu, biasanya dihitung setiap tahun. Diantara tujuan dihitungnya pertumbuhan PDRB adalah untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional, serta Sebagai dasar pembuatan proyeksi atau perkiraan penerimaan daerah untuk perencanaan pembangunan, selain itu pertumbuhan PDRB juga dijadikan dasar pembuatan prakiraan bisnis, khususnya persamaan penjualan bagi perusahaan swasta. Dalam menghitung pertumbuhan PDRB, maka PDRB yang digunakan adalah PDRB atas dasar harga konstan.

Pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung sejak triwulan pertama tahun 2020, membawa pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional. Sehingga banyak sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan ekonomi negatif dan berkurangnya aktivitas perekonomian masyarakat. Namun demikian adanya harapan efek ini akan berkurang dan mereda di tahun 2021 ini, maka pertumbuhan ekonomi juga akan tumbuh positif.

Gambar 2-19 Laju Pertumbuhan PDRB (ADHK 2010) Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016-2020 (persen)



Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

Pada Gambar 2-19 digambarkan perbandingan laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Dharmasraya dengan laju pertumbuhan PDRB Propinsi Sumatera Barat dan PDRB Nasional pada harga konstan selama periode 2016 – 2020. Terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi sejak tahun 2017 baik secara nasional, provinsi maupun Kabupaten Dharmasraya sendiri. Bahkan terjadi pertumbuhan PDRB yang negatif pada tahun 2020 yang disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung sejak triwulan pertama tahun 2020.

Secara global, pertumbuhan ekonomi negatif terjadi sekitar 70% dari negara di dunia. Kondisi ini mengakibatkan banyaknya sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan ekonomi negatif dan berkurangnya aktifitas perekonomian masyarakat. Namun demikian adanya harapan efek ini akan berkurang dan mereda di tahun 2021 ini, maka pertumbuhan ekonomi juga akan tumbuh positif. Perlu adanya perencanaan yang strategis untuk memulihkan perekonomian.

Selanjutnya dilihat dari struktur PDRB, pertumbuhan negatif di tahun 2020, baik ditinjau dari nilai PDRB ADHK maupun PDRB ADHB, ditinjau dari pertumbuhan nilai PDRB ADHK, maka terdapat 11 (sebelas) sektor dengan pertumbuhan negatif, sedangkan ditinjau dari pertumbuhan nilai PDRB ADHB maka terdapat 9 (sembilan) sektor yang mengalami pertumbuhan negatif, sehingga hal ini mengakibatkan secara keseluruhan pertumbuhan PDRB ADHK di tahun 2020 menjadi negatif. Diantara sektor yang terdampak paling besar akibat pandemi covid-19 adalah sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar negatif 15,19 persen, selanjutnya sektor terdampak lainnya adalah sektor transportasi dan pergudangan dengan pertumbuhan negatif 13,18 persen, dan sektor jasa lainnya sebesar negatif 9,40 persen.

*Tabel 2-19 Petumbuhan PDRB Atas Dasar Harga konstan dan Atas Harga berlaku
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019-2020*

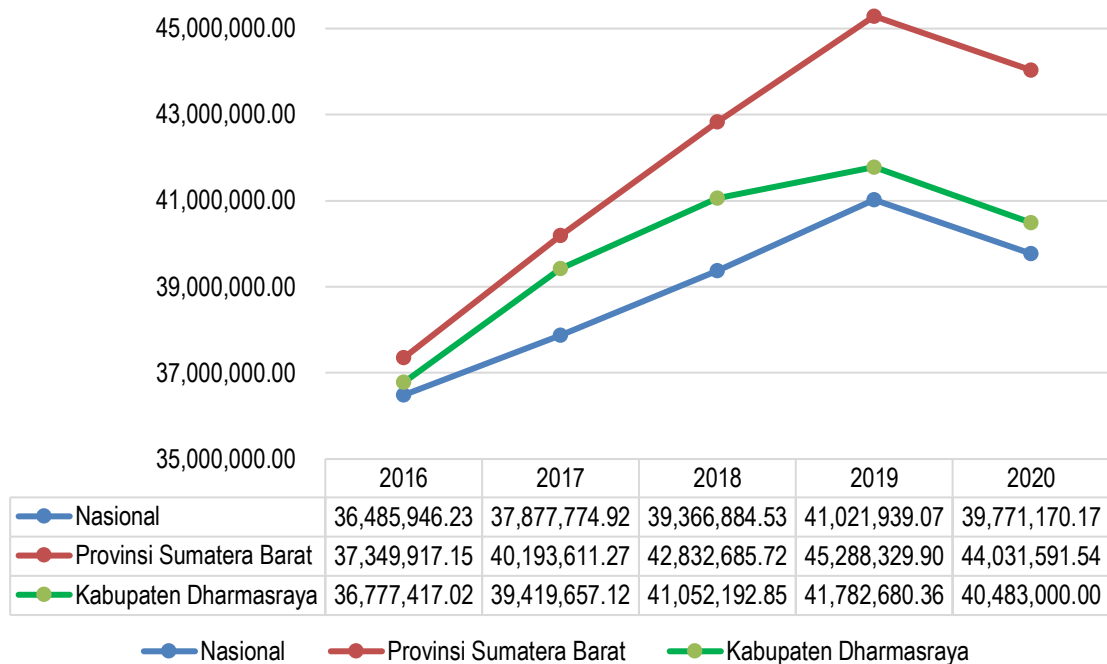
Lapangan Usaha	ADHK		ADHB	
	2019	2020	2019	2020
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,28	(0,76)	(1,84)	(3,81)
Pertambangan dan Penggalian	3,61	0,69	4,02	(5,28)
Industri Pengolahan	(4,90)	(3,35)	(12,01)	0,55
Pengadaan Listrik dan Gas	2,53	(6,52)	(0,32)	(5,54)
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,79	(2,08)	2,28	(1,95)
Konstruksi	7,88	(5,31)	11,61	(0,57)
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,94	(0,34)	7,28	(0,57)
Transportasi dan Pergudangan	8,25	(13,18)	11,04	(9,33)
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,75	(15,19)	10,34	(13,72)
Informasi dan Komunikasi	8,79	7,89	5,45	7,82
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,62	0,73	4,95	2,23
Real Estat	5,41	0,04	7,66	0,18
Jasa Perusahaan	4,33	(5,67)	6,55	(4,39)
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,70	(0,93)	10,31	8,40
Jasa Pendidikan	8,54	4,11	12,43	5,06
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,55	7,11	8,99	10,08
Jasa lainnya	9,33	(9,40)	11,90	(7,29)
	4,88	(1,39)	4,31	(0,99)

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

2.2.3. PDRB Perkapita (pendapatan perkapita)

PDRB perkapita menggambarkan besarnya pendapatan rata-rata semua penduduk di wilayah. PDRB perkapita didapatkan dari hasil pembagian PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) dengan jumlah penduduk. PDRB perkapita direfleksikan sebagai pendapatan perkapita. Indikator ini digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan suatu daerah. Semakin besar pendapatan per kapitanya, maka semakin besar juga kemungkinan daerah tersebut memiliki tingkat pembangunan dan pendapatan rata-rata masyarakatnya.

Gambar 2-20 Laju Pertumbuhan PDRB (ADHK 2010) Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016-2020 (Rupiah)



Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

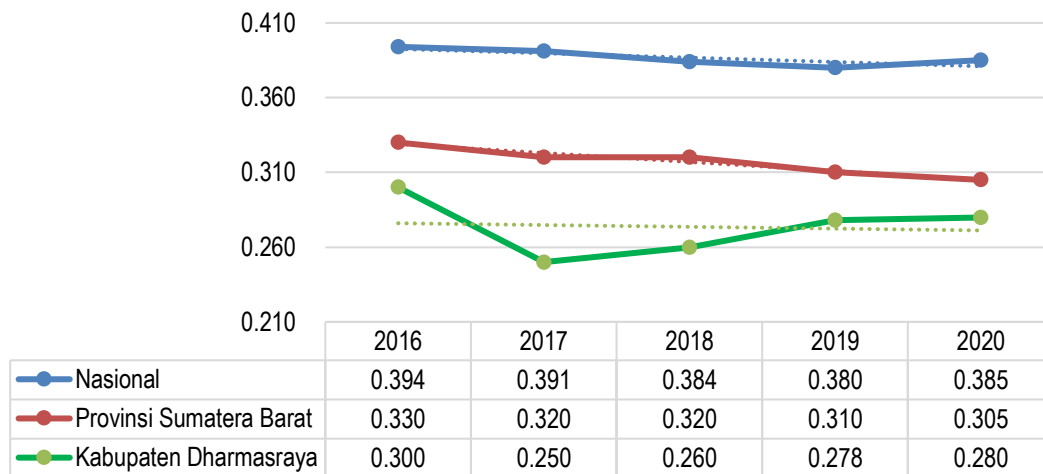
Pada Gambar 2-20 di atas, dapat dilihat bahwa PDRB perkapita penduduk Dharmasraya berada di atas nasional, tapi masih di bawah Provinsi Sumatera barat. Selain berpengaruh terhadap pertumbuhan PDRB. Dampak pertumbuhan ekonomi negatif akibat dampak pandemi covid-19 juga mempengaruhi turunnya PDRB perkapita di tahun 2020.

2.2.4. Indeks Gini (Ketimpangan pendapatan)

Indeks Gini atau disebut juga dengan Gini rasio digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 (nol) berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 (satu) berarti ketimpangan sempurna. Perubahan Gini Ratio merupakan indikasi dari adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk. Gini Ratio mengalami penurunan berarti distribusi pengeluaran penduduk mengalami perbaikan.

Dilihat dari pengelompokannya, maka indeks Gini dengan nilai di atas 0,5 dikelompokkan sebagai tingkat ketimpangan tinggi, untuk ketimpangan 0,4 - 0,5 disebut dengan tingkat ketimpangan sedang, sedangkan apabila rendah dari 0,4 disebut dengan tingkat ketimpangan rendah.

Gambar 2-21 Indeks Gini Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

Secara umum indeks Gini ketiganya berada pada kelompok ketimpangan rendah, semakin rendah ketimpangan, maka semakin bagus. Dibandingkan dengan nasional dan provinsi, maka Dharmasraya memiliki ketimpangan terendah. Namun di tahun 2020 indeks gini nasional dan Kabupaten Dharmasraya sedikit mengalami kenaikan, namun hanya Provinsi Sumbar yang memperlihatkan penurunan dari tahun sebelumnya. Meskipun demikian ketiga indeks di atas masih memperlihatkan tren penurunan.

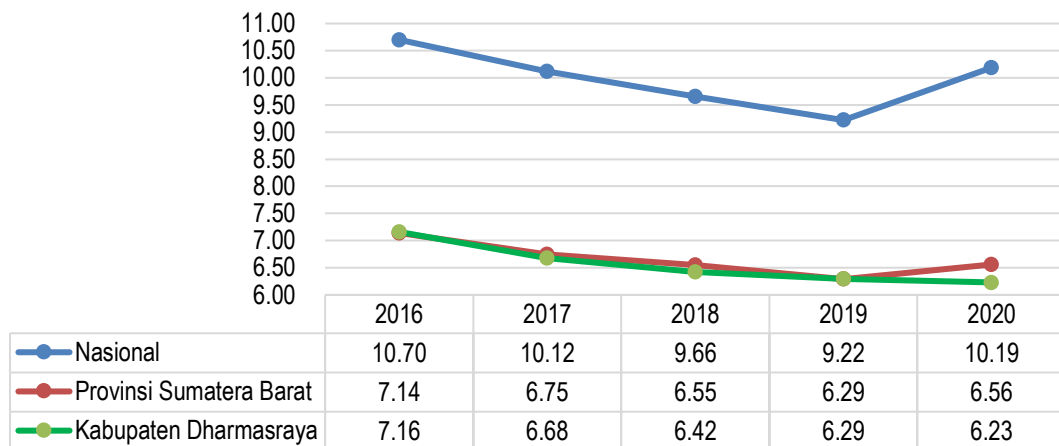
2.2.5. Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan merupakan persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan dari jumlah penduduk seluruhnya. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan (GK). Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Berdasarkan pendekatan ini BPS menetapkan garis kemiskinan setiap tahun. Pada tahun 2020, garis kemiskinan di Kabupaten Dharmasraya ditetapkan sebesar Rp.477.421 per orang/bulan.

Garis kemiskinan makanan adalah nilai pengeluaran kebutuhan makanan dan minuman (setara 2.100 kkalori per kapita per hari). Per kapita adalah per orang. Sebagian besar negara di dunia menggunakan standar 2.100 kkalori per kapita per hari, ditambah kebutuhan dasar non-makanan. Sedangkan **garis kemiskinan bukan makanan** adalah nilai paling rendah pengeluaran untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok bukan makanan lainnya. Jadi, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per orang setiap bulan di bawah garis kemiskinan itu.

Dari metodologi ini, BPS menetapkan garis kemiskinan di Kabupaten Dharmasraya sebesar 477.421 per orang per bulan untuk pengukuran garis kemiskinan kondisi Maret 2020. Jadi kalau penduduk yang pengeluarannya di bawah itu, sudah masuk kategori orang miskin. Jika Rp. 477.421 dibagi 30 hari, maka rata-rata belanja orang miskin kurang dari Rp. 15.914/orang/hari.

Gambar 2-22 Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016-2020



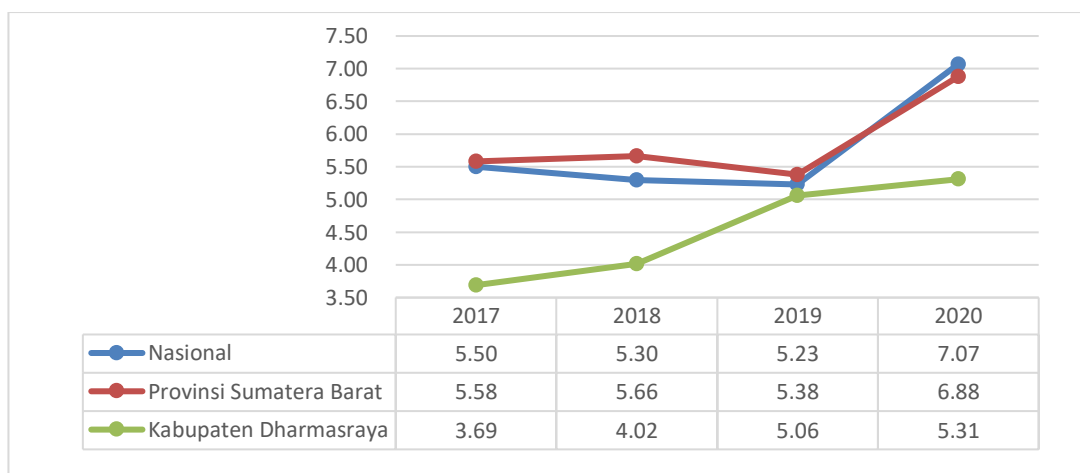
Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

Pada Gambar 2.20 terlihat bahwa tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Dharmasraya berada di bawah nasional. Terjadi penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Dharmasraya selama 5 tahun terkahir dari 7,16% pada tahun 2016 menjadi 6,23% pada tahun 2020. Meskipun pertumbuhan ekonomi negatif pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19, namun tingkat kemiskinan di Kabupaten Dharmasraya tidak meningkat. Hal ini karena data tingkat kemiskinan di Kabupaten Dharmasraya berdasarkan data BPS yang tersedia yaitu pada bulan Maret 2020. Sehingga kondisi ini belum dapat menggambarkan dampak dari Covid-19.

2.2.6. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka adalah Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Indikator ini Mengindikasikan besaran persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran.

Gambar 2-23 Tingkat pengangguran Terbuka di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016-2020



Sumber : BPS, Tahun 2021

Pada Gambar 2-23 terlihat bahwa Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Dharmasraya jauh di bawah kondisi tingkat pengangguran secara nasional dan Provinsi Sumatera Barat. Angka TPT di Dharmasraya selalu meningkat sejak tahun 2017 hingga tahun 2020, namun tidak dengan provinsi dan nasional yang mengalami fluktuatif. Meskipun demikian dari tahun 2019 ke tahun 2020 terjadi peningkatan TPT yang cukup tinggi di tingkat provinsi Sumatera barat dan nasional, namun kenaikan TPT di Kabupaten Dharmasraya tidak sebesar nasional ataupun provinsi. Berdasarkan hasil analisa data, maka kenaikan tingkat pengangguran di Dharmasraya hanya disebabkan oleh adanya penambahan jumlah pencari kerja yang baru menyelesaikan Pendidikan.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Untuk melihat kinerja masa lalu, pada sub bab ini ditampilkan berdasarkan urusan dan bidang urusan pemerintahan. Adapun masing-masing indikator dijelaskan terlebih dahulu definisi atau maksud dari indikator tersebut, diteruskan dengan data teknis tahun 2016-2020 yang disertai dengan visualisasi berupa grafik, dan dijelaskan melalui narasi mengenai analisa data maupun berdasarkan kondisi tinjauan lapangan. adapun indikator kinerja tersebut dapat dilihat sebagaimana ditampilkan di bawah :

2.3.1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

2.3.1.1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

A. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD

APK PAUD merupakan proporsi anak yang terdaftar dalam Pendidikan Anak Usia Dini usia 3-6 tahun (Taman Kanak-kanak, Bustanul Athfal/Raudhatul Athfal, PAUD terintegrasi BKB/Taman Posyandu, PAUD-TAM, PAUD-PAK, PAUD-BIA, TKQ, dll.) terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu.

Tabel 2-20 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	persen	64,56	65,56	62,98	65,23	68,62
Jumlah murid PAUD	Orang	3.690	3.881	5.320	6.466	7.614
Jumlah penduduk usia 3 – 6 Tahun	orang	5.716	5.920	8.447	9.912	11.096

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

Sejak tahun 2016 hingga tahun 2020, Angka Partisipasi Kasar PAUD terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2020 tercatat sebesar 68,62 persen, meskipun terjadi peningkatan dari tahun ke tahun, namun capaian ini masih tergolong rendah dibandingkan kondisi idealnya di angka 100 persen

B. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD

Angka partisipasi pada dunia kependidikan digunakan untuk melihat proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. Sejak tahun 2007 Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. Oleh sebab itu maka APK SD digunakan untuk melihat proporsi anak yang bersekolah SD atau sederajat terhadap jumlah penduduk yang seharusnya bersekolah di SD/ sederajat.

Tabel 2-21 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/sederajat Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/sederajat	persen	102,30	103,00	105,64	105,54	106,62
jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/sederajat	Orang	27.844	27.788	27.815	27.937	27.586
jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	orang	27.218	26.978	26.330	26.470	25.874

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

Angka Partisipasi Kasar SD/MI mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, tertinggi tercatat sebesar 109,54 di tahun 2019 dan terendah pada angka 102,30 di tahun 2016.

C. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP

Sepeerti halnya APD SD, maka APK SMP dilihat sebagai proporsi anak sekolah pada jenjang SMP atau sederajat terhadap penduduk usia 13-15 tahun

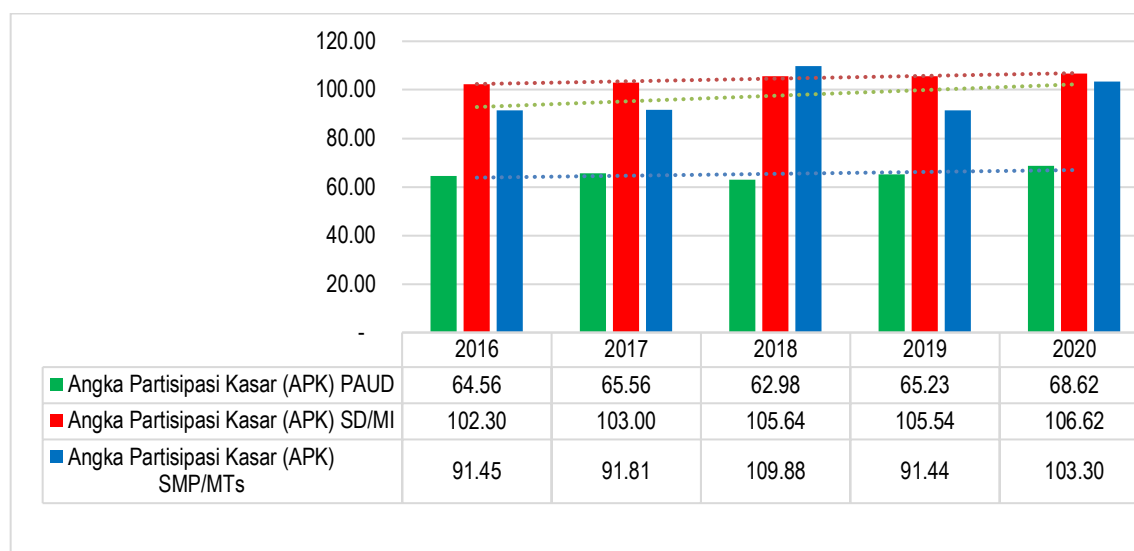
Tabel 2-22 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/Sederajat Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/ sederajat	Persen	91,45	91,81	109,88	91,44	103,30
jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs	Orang	9.776	10.118	12.566	12.845	11.220
jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	Orang	10.690	11.020	11.436	14.048	10.862

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs mengalami peningkatan dari APK SMP/MTs tertinggi tercatat sebesar 109,88 di tahun 2018 dan terendah pada angka 91,44 di tahun 2019.

Gambar 2-24 Perbandingan APK PAUD, APK SD/MI dan APK SMP/MTs



Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs mengalami peningkatan dari APK SMP/MTs tertinggi tercatat sebesar 109,88 di tahun 2018 dan terendah pada angka 91,44,30 di tahun 2019. Peningkatan angka APK SD/MI disebabkan oleh meningkatnya layanan Pendidikan di Kabupaten Dharmasraya dengan adanya pembangunan, rehab sekolah melalui dana DAK dan APBD dapat memenuhi fasilitasnya. Tingginya dukungan pemerintah daerah dan masyarakat terhadap Pendidikan merupakan salah satu dapat meningkatnya APK SMP/MTs

D. Angka Partisipasi Murni (APM) SD

APM SD menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah setara SD yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Kondisi ideal apabila seluruh anak usia sekolah setara SD dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100 persen

Tabel 2-23 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Mi Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Mi	persen	115,87	116,00	99,68	94,59	99,31
jumlah siswa kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/ sederajat	orang	31.538	31.294	26.246	25.038	25.696
jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	orang	27.218	26.978	26.330	26.470	25.874

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

Dari Tabel 2-23 diatas terlihat Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Mi di Kabupaten Dharmasraya Pada usia 7 -12 tahun dari tahun 2016 sampai tahun 2020 rata rata telah mencapai 99,31%. Angka partisipasi sekolah dapat dijadikan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah secara umum,

E. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP

APM SMP menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah setara SMP yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya

Tabel 2-24 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Mts	persen	67,78	67,95	85,67	87,72	93,13
jumlah siswa kelompok usia 13-15 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/ sederajat	orang	7246	7488	9797	12323	10116
jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	orang	10690	11020	11436	14048	10862

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

2.3.1.2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

A. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Semakin tinggi angka harapan hidup, maka semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakatnya.

Tabel 2-25 Angka Harapan Hidup Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH)	Tahun	70,9	71,06	71,2	71,34	71,47

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

B. Angka kematian bayi (AKB)

AKB menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup). AKB merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi.

Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Indikator ini merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

Tabel 2-26 Angka kematian bayi Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Angka kematian bayi (AKB)	per 1.000 kelahiran hidup	15,78	10,91	11,00	9,41	8,98
Jumlah kematian bayi (yang berumur kurang 1 tahun)	orang	64	49	54	52	50
Jumlah kelahiran hidup pada satu tahun tertentu	orang	4.056	4.491	4.911	5.527	5.565

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

C. Angka Kematian Ibu melahirkan (AKI)

AKI adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup.

Yang dimaksud dengan Kematian Ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan - kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya - tetapi bukan karena sebab lain seperti kecelakaan, terjatuh dan lainnya.

Tabel 2-27 Angka Kematian Ibu melahirkan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Kematian Ibu melahirkan (AKI)	per 100.000 kelahiran hidup	99	217,92	102	156	77
Jumlah kematian ibu dalam tahap kehamilan atau kelahiran	Orang	4	8	4	6	3
Jumlah kelahiran hidup	orang	4.056	3.671	3.911	3.854	3.895

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

Selama tahun 2016 hingga tahun 2020, AKI tertinggi tercatat sebesar 217,28 dan angka terendah terlihat di tahun 2020 sebesar 77,02. Dilihat dari jumlah kematian ibu dalam kehamilan atau kelahiran yang berada pada 3 hingga 8 orang pertahunnya, meskipun angka ini tidak tergolong tinggi, namun penyebab kematian ibu ini tetap harus diantisipasi. Salah satu tantangan yang dihadapi untuk satu tahun terakhir akibat dampak dari covid-19 adalah berkurangnya layanan Posyandu, serta adanya semacam ketakutan masyarakat untuk melakukan persalinan dan/ atau imunisasi di fasilitas kesehatan. Sehingga tantangan ini mesti menjadi perhatian di tengah pandemi covid-19 yang masih diperkirakan akan masih berlangsung beberapa waktu kedepan.

D. Prevalensi Malnutrisi (Prevalensi balita kekurangan gizi)

Indikator ini mengukur persentase anak balita yang tingginya dibawah ketinggian rata-rata penduduk acuan. Stunting pada anak-anak mencerminkan efek yang luas dari kekurangan gizi yang kronis dan menderita penyakit berulang yang disebabkan oleh latar belakang sosial dan ekonomi yang buruk.

Stunting pada anak-anak dapat memiliki dampak serius pada perkembangan fisik, mental, dan emosional anak-anak, dan bukti menunjukkan bahwa efek dari stunting pada usia muda, khususnya pada perkembangan otak, sulit untuk memperbaikinya pada usia lanjut walaupun jika anak menerima gizi yang tepat.

Selain itu anak yang mengalami stunting beresiko lebih besar menderita penyakit menular dan tidak menular pada usia dewasa seperti jantung, diabetes, dan penyakit pembuluh darah. Oleh karena itu, indikator ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya memberikan gizi yang cukup untuk anak-anak.

Kurang gizi tingkat berat disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dari makanan sehari-hari yang terjadi dalam waktu yang cukup lama. Gizi buruk diketahui dengan cara pengukuran berat badan menurut tinggi badan dan/atau umur dibandingkan standar dengan atau tanpa tanda-tanda klinis. Cara perhitungan underweight adalah gizi buruk dan gizi kurang dihitung dari berat badan dibagi dengan umur (BB/U).

Berikut adalah standart dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1995/MENKES/SK/XII/2010: I Batas gizi buruk pada balita adalah < -3.0 SD baku WHO. I Batas gizi kurang pada balita yaitu antara < -2.0 SD sampai dengan -3.0 SD baku WHO.

Indikator ini digunakan untuk mengukur besarnya penduduk yang mempunyai konsumsi energi yang sangat rendah sehingga memerlukan prioritas di dalam upaya perbaikan pangan dan gizi. Pembangunan berkelanjutan memerlukan usaha konkrit untuk mengurangi kemiskinan serta mencari solusi menghilangkan kelaparan dan kekurangan gizi.

Dalam upaya percepatan pencapaian target penganan stunting secara nasional maka telah dikeluarkan keputusan Menteri Bappenas Nomor Kep.10.M.PPN/HK/02/2021, tanggal 25 Februari 2021 tentang Penetapan Peluasan Kabupaten/Kota lokasi fokus intervensi penurunan stunting terintegrasi tahun 2022.

Terkait dengan hal tersebut maka Kabupaten Dharmasraya sudah ditetapkan sebagai salah satu lokasi prioritas dalam rangka intervensi pencegahan pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi.

Tabel 2-28 Prevalensi Malnutrisi Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Prevalensi Malnutrisi	indeks	26,3	25,9	25,7	25,5	25,3
Prevalensi Wasting	Kasus	6.5	4.5	5.3	8.7	12.5
Prevalensi Stunting	kasus	19.8	21.4	20.4	16.8	12.8

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

Ditinjau dari data prevalensi malnutrisi dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 sudah terjadi penurunan kasus setiap tahunnya dari 26,3 di tahun 2016 menjadi 25,3 di tahun 2020. Untuk prevalensi wasting ada penurunan dari tahun 2016 ke 2017, kemudian naik lagi di tahun 2018 hingga tahun 2020 karena indeks antropometri yg di gunakan BB/U, Jadi indek pengukuran antropometri yg di pakai adalah TB/U utk stunting BB/U wasting dan BB/TB untuk anak gizi kurang.

Sedangkan untuk prevalensi stunting tahun 2016 ke 2017 terjadi peningkatan kasus karena kurang akuratnya pengukuran yg dilakukan kader saat penimbangan di posyandu sementara data tersebut tetap di laporkan melalui e-pggbm, selanjutnya untuk tahun 2017 hingga tahun 2020 terjadi lagi penurunan setelah di lakukan validasi dengan kunjungan langsung ke balita stunting oleh tenaga pelaksana gizi (TPG) di Puskesmas.

E. Persentase Rumah Tangga PHBS

PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat.

Tabel 2-29 Persentase Rumah Tangga PHBS Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Rumah Tangga PHBS	persen	20	25	25	30	27,5

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

F. Meningkatnya Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) atau disebut juga *Open Defecation Free* (ODF) merupakan pendekatan untuk merubah perilaku higiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemucuan. Program STBM memiliki **indikator outcome dan output. Indikator outcome STBM yaitu menurunnya kejadian penyakit diare dan penyakit berbasis lingkungan lainnya** yang berkaitan dengan sanitasi dan perilaku

Tabel 2-30 Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Persen	15,38	19,23	30,77	34,62	40,38
Jumlah Nagari Stop PHBS (Nagari ODF)	nagari	8	10	16	18	21
Jumlah nagari	Nagari	52	52	52	52	52

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

G. Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani ≤24 jam

KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah. Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malpetaka. Mengingat seriusnya dampak yang ditimbulkan dari kejadian luar biasa dan wabah akibat penyakit menular terhadap derajat kesehatan masyarakat, maka perlu langkah – langkah perlindungan kepada masyarakat melalui kegiatan surveilans terpadu dengan melibatkan semua sektor dan masyarakat untuk mendeteksi dan mencegah faktor – faktor risiko kejadian penyakit yang berpotensi KLB/wabah. Penanganan KLB dari tahun 2016 hingga tahun 2020 selalu ditangani segera atau kurang dari 24 jam

Tabel 2-31 Persentase KLB yang ditangani ≤24 jam Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani ≤24 jam	Persen	100	100	100	100	100
Jumlah KLB yang ditangani ≤24 jam	Kasus	3	4	3	1	1
Jumlah kejadian Luar Biasa	kasus	3	4	3	1	1

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

H. Cakupan Pencegahan dan pengendalian penyakit menular

Cakupan pencegahan dan pengendalian penyakit menular adalah jangkauan pelayanan kesehatan terhadap penyakit infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme, seperti virus, bakteri, parasit, atau jamur, dan dapat berpindah ke orang lain yang sehat. Saat ini kejadian/kasus penyakit menular dimasyarakat cukup meningkat, hal ini sangat berpengaruh kepada derajat kesehatan masyarakat.

Dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular pendekatan keluarga dan gerakan masyarakat hidup sehat di arahkan sebagai upaya deteksi dan diagnosis dini penyakit, pendekatan keluarga dan GERMAS merupakan upaya efektif dalam rangka pencegahan dan pengendalian factor risiko terjadinya penyakit dan sebagai upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat sehingga tidak mudah terpapar penyakit.

Tabel 2-32 Cakupan pencegahan dan pengendalian penyakit menular Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan Pencegahan dan pengendalian penyakit menular	Persen	100	100	100	100	100
2	Jumlah orang terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	Kasus	154	108	133	283	233
3	Penemuan Kasus TB Paru BTA Positif Baru (Case Detecstion Rate)	persen	47	51	49,52	87,42	83,33

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
4	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Kasus	4	11	19	23	37
5	Jumlah orang dengan DBD yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Kasus	349	60	39	27	107

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

I. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit Tidak Menular

Indikator ini digunakan untuk menghitung jangkauan penemuan dan pelayanan kesehatan penyakit yang tidak menular dan bukan disebabkan oleh penularan vektor, virus atau bakteri, namun lebih banyak disebabkan oleh perilaku dan gaya hidup.

Tabel 2-33 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit Tidak Menular Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2018	2019	2020
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit Tidak Menular	Persen	80	84	100
Jumlah orang penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	Penderita	10.502	29.333	11.239
Jumlah orang penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	Penderita	4.096	3.758	1.783

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

Kecendrungan penyakit menular terus meningkat dan telah mengancam sejak usia muda. Selama dua decade terakhir ini, telah terjadi transisi epidemiologi yang signifikan, penyakit tidak menular telah menjadi beban utama, meskipun beban penyakit menular masih berat juga. Indonesia sedang mengalami double burden penyakit, yaitu penyakit tidak menular dan penyakit menular sekaligus. Secara nasional jumlah kematian karena penyakit tidak menular terus meningkat tahun 2007 kematian karena penyakit tidak menular mencapai 59,7%.

Penyakit menular secara global telah mendapat perhatian serius dengan masuknya PTM sebagai salah satu target dalam Sustainable Development Goals (SDGs) 2030. Hal ini didasari pada fakta yang terjadi di banyak Negara bahwa meningkatnya usia harapan hidup dan perubahan gaya hidup juga diiringi dengan meningkatnya prevalensi obesitas, kanker, penyakit jantung, diabetes mellitus dan penyakit kronis lainnya.

Penanganan PTM butuh waktu yang lama dan teknologi yang mahal, dengan demikian PTM memerlukan biaya yang tinggi dalam pencegahan dan penanggulangannya. Masuknya PTM ke dalam SDGs 2030 mengisyaratkan PTM harus menjadi prioritas nasional yang memerlukan penanganan secara lintas sektoral.

J. Visite Rate

Visit rate adalah Angka kunjungan rawat jalan/rawat inap pada Puskesmas/Puskesmas perawatan dibandingkan dengan jumlah penduduk disuatu wilayah.

Visit rate digunakan untuk menilai tingkat akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh pemerintah. Seperti amanat undang-undang bahwa kesehatan adalah hak fundamental setiap warga Negara karena itu setiap individu, keluarga dan masyarakat berhak memperoleh derajat kesehatan secara optimal dan mendapat perlindungan terhadap kesehatannya.

Pemerintah bertanggung jawab atas kesehatan dan kesejahteraan penduduk, serta mengupayakan penyelenggaraan kesehatan yang merata dan terjangkau bagi segenap lapisan masyarakat. Makin tinggi visite rate di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama menandakan akses masyarakat terhadap kesehatan semakin meningkat.

Tabel 2-34 Visit rate Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Visite Rate		7,1	7,1	14,2	21,4	21,4

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

K. Persentase Puskesmas Terakreditasi Utama

Akreditasi Puskesmas adalah pengakuan yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara Akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri setelah memenuhi standar Akreditasi dan akan dinilai kembali setiap **3 tahun sekali**. Tujuan utama akreditasi adalah untuk pembinaan peningkatan mutu kinerja melalui perbaikan yang berkesinambungan terhadap sistem manajemen, sistem manajemen mutu dan sistem penyelenggaraan pelayanan klinis, serta penerapan manajemen risiko.

Tabel 2-35 Persentase Puskesmas Terakreditasi Utama Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Puskesmas Terakreditasi Utama	persen	2,8	3	3,2	3,4	3,8

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

Penetapan status akreditasi yang diberikan lembaga independen, terdiri atas :

1. Tidak terakreditasi nilai Bab I, II < 75%, Bab IV, V, VII < 60%, Bab III, VI, VIII, IX < 20%
2. Terakreditasi dasar nilai Bab I, II < 75%, Bab IV, V, VII > 60%, Bab III, VI, VIII, IX > 20%
3. Terakreditasi madya nilai Bab I, II, IV, V > 75%, Bab VII, VIII > 60%, Bab III, VI, IX > 20%
4. Terakreditasi utama nilai Bab I, II, IV, V, VII, VIII > 80%, Bab III, VI, IX > 60%
5. Terakreditasi paripurna nilai semua Bab > 80%

Puskesmas yang terdapat di Kabupaten Dharmasraya berjumlah pada tahun 2020 berjumlah 14 unit, dan telah terakreditasi. Status akreditasi yang diberikan bervariasi, antara lain :

Tabel 2-36 Rincian Akreditasi Puskesmas

No	Nama Puskesmas	Tahun penilaian	Status Akreditasi	Tahun penilaian Kembali
1	Silago	2018	Dasar	2021
2	Sialang	2017	Madya	2020
3	Sungai Dareh	2017	Utama	2020
4	Gunung Medan	2018	Utama	2021
5	Sitiung I	2019	Paripurna	2022
6	Padang Laweh	2018	Madya	2021
7	Timpeh	2018	Madya	2021
8	Beringin Sakti	2019	Madya	2022
9	Koto Baru	2017	Madya	2020
10	Tiumang	2017	Madya	2020
11	Sitiung II	2017	Dasar	2020
12	Sungai Rumbai	2018	Madya	2021
13	Sungai Limau	2018	Madya	2021
14	Koto Besar	2017	Madya	2020

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

L. Persentase UPT RSUD Terakreditasi

Akreditasi Rumah Sakit adalah suatu pengakuan yang diberikan oleh pemerintah pada manajemen rumah sakit, karena telah memenuhi standar yang ditetapkan. Akreditasi menjadi syarat yang penting untuk dipenuhi oleh rumah sakit karena selain bertujuan menjamin mutu layanan kesehatan kepada masyarakat, akreditasi juga dapat menjadi bukti bahwa rumah sakit memiliki komitmen untuk memberikan layanan yang paripurna dan sesuai standar.

Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap akses layanan rujukan merupakan dasar peningkatan jumlah UPT RSUD di Kabupaten Dharmasraya. Pada tahun 2016, UPT RSUD di Kabupaten Dharmasraya hanya UPT RSUD Sungai Dareh dan telah terakreditasi, di tahun 2017 terdapat penambahan UPT RSUD Sungai Rumbai.

RSUD Sungai Rumbai mulai beroperasi pada tahun 2017, dan dalam tahap pengembangan, peningkatan sarana serta prasarana untuk memenuhi mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat sehingga diharapkan pada tahun 2020, UPT RSUD Sungai Rumbai dapat terakreditasi.

Tabel 2-37 Persentase UPT RSUD Terakreditasi Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase UPT RSUD Terakreditasi	Persen	100	50	50	50	100
Jumlah RSUD terakreditasi	unit	1	1	1	1	2
Jumlah RSUD seluruhnya	unit	1	2	2	2	2

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

2.3.1.3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

A. Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap

Pengelolaan jaringan jalan di Kabupaten Dharmasraya terdiri dari jalan negara, jalan propinsi dan jalan kabupaten. Ruas jalan negara merupakan jaringan jalan primer, arteri dan kelas III yang pembinaannya dilakukan oleh pemerintah pusat (Kementerian Pekerjaan Umum yang dilaksanakan oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II).

Ruas jalan negara di Kabupaten Dharmasraya sepanjang 62,50 Km yaitu ruas jalan yang menghubungkan Kota Padang – Kota Muaro Bungo dan kota-kota di wilayah bagian selatan Sumatera Barat.

Ruas jalan propinsi merupakan jaringan jalan kolektor primer dan kelas IIIA yang pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Barat. Ruas jalan Propinsi di Kabupaten Dharmasraya sepanjang 83,50 Km dengan kondisi sedang ruas jalan propinsi ini yaitu ruas Sikabau– Simpang III Koto Baru, ruas Simpang III Koto Baru – Tanjung Simalidu, Junction – Koto Baru dan Junction – Batas Sangir.

Tabel 2-38 Ruas Jalan Nasional di Kabupaten Dharmasraya

No Ruas	Nama Pangkal Ruas	Nama Ujung Ruas	Panjang Ruas (Km)	Lebar
N.051	Batas Kab. Sijunjung	Sungai Dareh	13,20	7
N.052	Sungai dareh	Junction	28,00	7
N.053	Junction	Batas Kota	21,30	7
Total Jalan Nasional			62,50	

Sumber : Updating Tahun 2019 Bidang Bina Marga, Dinas PUPR Kabupaten Dharmasraya

Tabel 2-39 Ruas Jalan Provinsi di Kabupaten Dharmasraya

No Ruas	Nama Pangkal Ruas	Nama Ujung Ruas	Panjang Ruas (KM)	Lebar
P.010	Sikabau	Simp. III Koto Baru	29,00	3,50
P.011	Simp. III Koto Baru	Tj. Simaladu	21,00	3,50
P.021	Junction	Koto Baru	5,20	3,50
P.054	Junction	Batas Sangir	28,30	3,50
Total Jalan provinsi			83,50	

Sumber : Updating Tahun 2019 Bidang Bina Marga, Dinas PUPR Kabupaten Dharmasraya

Jalan kabupaten merupakan jaringan jalan kolektor dan lokal primer, dan pada umumnya termasuk kelas IV yang pembinaannya oleh Pemerintah Kabupaten. Panjang jalan Kabupaten Dharmasraya ini sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 4 Tahun 2006, tentang Penetapan Status Jalan sebagai Jalan Kabupaten dan kota di Sumatera Barat.

Berdasarkan updating data pada Sistem Pengelolaan Database Jalan Provinsi Dan Kabupaten/Kota (SiPDJD) panjang jalan kabupaten yaitu 1.052,89 Km yang terdiri dari kondisi baik sepanjang 562,45 Km, kondisi sedang sepanjang 130,42 Km, dan kondisi rusak sepanjang 177,58 Km serta rusak berat sepanjang 182,44 Km.

Tabel 2-40 Updating Panjang Ruas Jalan Di Kabupaten Dharmasraya

No	Fungsi	Panjang (Km) Data Dinas PUPR	Trase Rencana	Panjang Updating (Km)
1	Jalan Nasional	60.62		60.62
2	Jalan Provinsi.	83.50		83.50
3	Jalan Kabupaten:	1042.85	49.92	1052,86
3.1	Sembilan Koto	121.80	19.90	128,91
3.2	Pulau Punjung	121.50		119,47
3.3	Sitiung	84.39		84,16
3.4	Timpeh	113.10		111,00
3.5	Koto Baru	101.91		100,17
3.6	Koto Salak	62.50		61,53
3.7	Padang Laweh	46.42		43,94
3.8	Tiumang	80.00		74,43
3.9	Sungai Rumbai	68.70		65,82
3.10	Koto Besar	146.53	30.02	162,70
3.11	Asam Jujuhan	96.00		100,72

Sumber : Updating Tahun 2019 Bidang Bina Marga, Dinas PUPR Kabupaten Dharmasraya

Tabel 2-41 Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Dharmasraya

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Persen	43,89	59,25	49,58	35,49	53,42
Panjang jalan kondisi baik	Km	454,62	613,67	513,55	367,61	562,45
Panjang Jalan (Km)	km	1035,72	1035,72	1035,72	1035,72	1052,86

Sumber : Bidang Bina Marga, Dinas PUPR Kabupaten Dharmasraya

Adanya perbedaan data proporsi panjang jalan dalam kondisi baik yang fluktuatif dari tahun ke tahun khususnya yang terlihat perbedaan sangat tinggi di tahun 2018 dan 2019 disebabkan pada tahun tersebut khususnya di tahun 2019 dilakukan updating database kondisi jalan dengan melakukan Survey Kondisi Jalan Kabupaten dan penginputan data dalam SiPDJD.

Hal tersebut menyebabkan hasil pendataan yang dilakukan dimasukkan sebagai updating database dalam SiPDJD, namun data yang dilakukan pada tahun awal dimulainya updateing belum sepenuhnya terhadap semua ruas jalan sehingga data yang masuk baru sebahagian hasil pendataan survey.

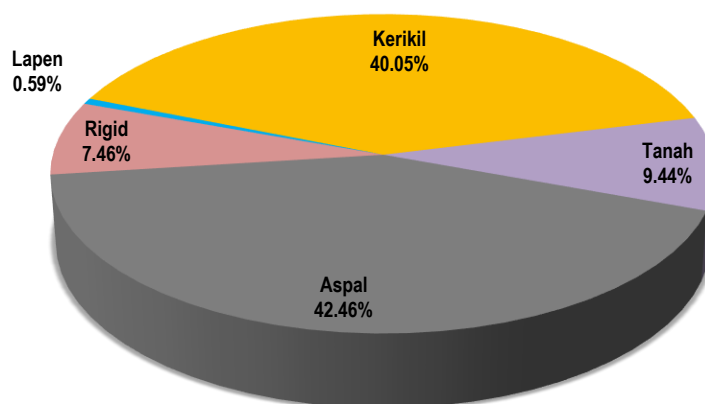
Pada tahun-tahun selanjutnya sesuai dengan hasil pendataan dan survey dilakukan penyesuaian dan perbaikan berdasarkan jumlah ruas yang dilaksanakan Survey Kondisi Jalan Kabupaten. Dengan adanya Survey Kondisi Jalan Kabupaten dan updating dalam SiPDJD maka kondisi dari jaringan jalan kabupaten akan terus di update dan diperbaharui sesuai dengan kondisi real.

Tabel 2-42 Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Dharmasraya

No	Jenis Permukaan	Panjang (Km)	Persentase (%)
1	Aspal	447,077	42,46
2	Rigid	78,517	7,46
3	Lapen	6,240	0,59
4	Kerikil	421,677	40,05
5	Tanah	99,348	9,44
Kabupaten Dharmasraya		1.052,859	100,00

Sumber : Updating Tahun 2019 Bidang Bina Marga, Dinas PUPR Kabupaten Dharmasraya

Gambar 2-25 Prosentase Jenis Permukaan Jalan



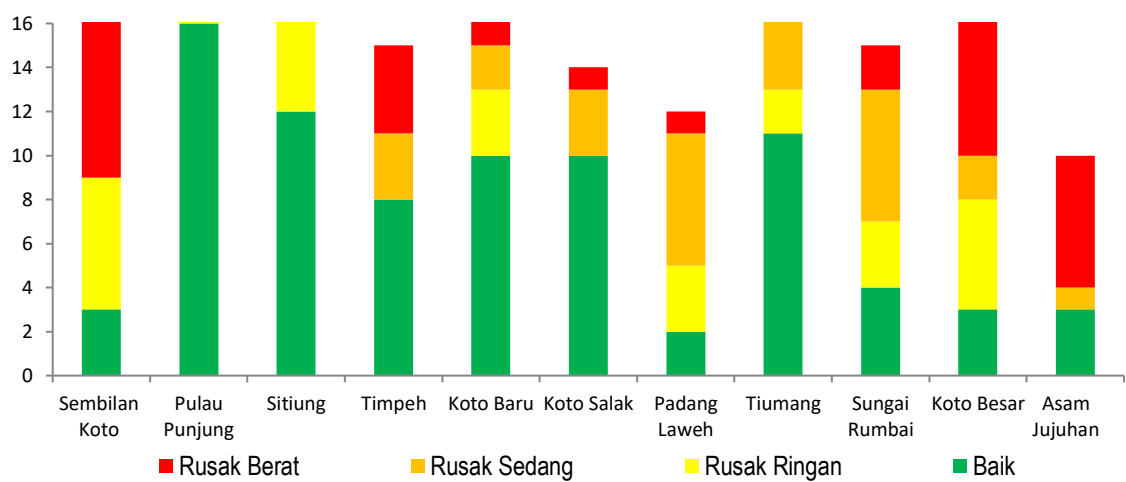
Sumber : Updating Tahun 2020 Bidang Bina Marga, Dinas PUPR Kabupaten Dharmasraya

Tabel 2-43 Jumlah Ruas per Kecamatan dan Kondisinya, 2019

No	Nama Kecamatan	Jumlah Ruas	Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat
1	Sembilan Koto	19	3	6	0	10
2	Pulau Punjung	26	16	4	2	4
3	Sitiung	23	12	9	1	1
4	Timpeh	15	8	0	3	4
5	Koto Baru	25	10	3	2	10
6	Koto Salak	14	10	0	3	1
7	Padang Laweh	12	2	3	6	1
8	Tiumang	17	11	2	4	0
9	Sungai Rumbai	15	4	3	6	2
10	Koto Besar	18	3	6	2	7
11	Asam Jujuhan	10	3	0	1	6
Kabupaten Dharmasraya		194	82	36	30	46

Sumber : Updating Tahun 2020 Bidang Bina Marga, Dinas PUPR Kabupaten Dharmasraya

Gambar 2-26 Kondisi Ruas Jalan Kabupaten Dharmasraya per-Kecamatan



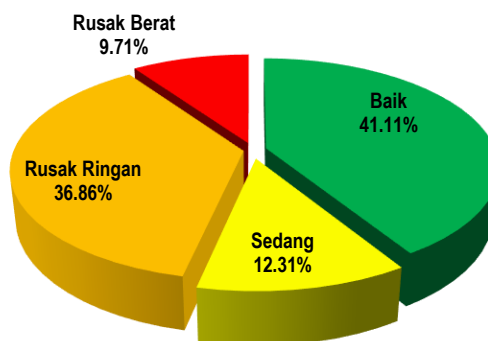
Sumber : Updating Tahun 2019 Bidang Bina Marga, Dinas PUPR Kabupaten Dharmasraya

Tabel 2-44 Kondisi Ruas Jalan di Kabupaten Dharmasraya

No	Kondisi	Panjang (Km)	Persentase (%)
1	Baik	432.855	41,11
2	Sedang	129.615	12,31
3	Rusak Ringan	388.130	36,86
4	Rusak Berat	102.259	9,71
Total		1.052.859	1.052.859

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Dharmasraya) dan Updating Tahun 2019

Gambar 2-27 Prosentasi Kondisi Ruas Jalan Kabupaten Dharmasraya



Sumber : Bidang Bina Marga, Dinas PUPR Kabupaten Dharmasraya (2017) dan Updating Tahun 2019

B. Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik

Berdasarkan hasil updating database Jembatan di Kabupaten Dharmasraya, maka didapatkan jumlah total Jembatan di Kabupaten Dharmasraya sebanyak 235 unit sedangkan yang masuk dalam database di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang baru 189 unit, sehingga perlu updating terhadap 46 unit jembatan yang belum masuk database tersebut.

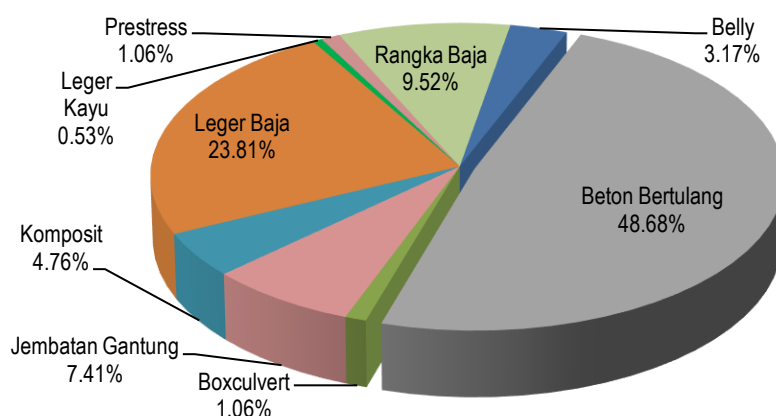
Kabupaten Dharmasraya dilalui oleh beberapa sungai yang memerlukan jembatan untuk memudahkan akses masyarakat ke berbagai tujuan. Jumlah Jembatan berdasarkan jenis konstruksinya, tipe dan kondisi masing-masing jembatan dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2-45 Jenis Jembatan

No	Bangunan Atas	Jumlah (Unit)	Persentase (%)
1	Belly	6	3.17
2	Beton Bertulang	92	48.68
3	Boxculvert	2	1.06
4	Jembatan Gantung	14	7.41
5	Komposit	9	4.76
6	Leger Baja	45	23.81
7	Leger Kayu	1	0.53
8	Prestress	2	1.06
9	Rangka Baja	18	9.52
Jumlah		189	100.00

Sumber : Bidang Bina Marga, Dinas PUPR Kabupaten Dharmasraya (2017) dan Updating Tahun 2020

Gambar 2-28 Prosentase Jenis Jembatan



Sumber : Bidang Bina Marga, Dinas PUPR Kabupaten Dharmasraya (2017) dan Updating Tahun 2020

Tabel 2-46 Kondisi Lantai Jembatan

No	Jenis Lantai	Jumlah (Unit)	Persentase (%)
1	0 – jembatan/elemen dalam kondisi baik sekali (baru)	114	60.32
2	1 – kondisi baik	7	3.70
3	2 – kondisi sedang dan masih dapat dipertanggung jawabkan	31	16.40
4	3 – kondisi rusak	31	16.40
5	4 – kondisi kritis	4	2.12
6	5 – kondisi runtuh	2	1.06
Kabupaten Dharmasraya		189	100,00

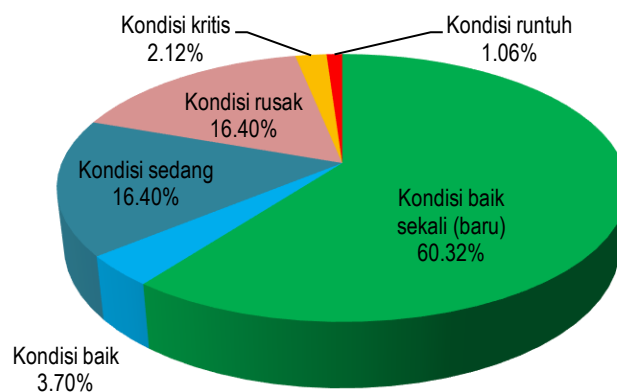
Sumber : Bidang Bina Marga, Dinas PUPR Kabupaten Dharmasraya (2017) dan Updating Tahun 2020

Tabel 2-47 Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik	persen	47	55,35	34,16	34,82	35,57

Sumber : Bidang Bina Marga, Dinas PUPR Kabupaten Dharmasraya (2017) dan Updating Tahun 2020

Gambar 2-29 Prosentase Kondisi Lantai Jembatan



Sumber : Bidang Bina Marga, Dinas PUPR Kabupaten Dharmasraya (2017) dan Updating Tahun 2020

Berdasarkan data updating jembatan yang dilakukan oleh Dinas PUPR Kabupaten Dharmasraya terlihat bahwa kondisi jembatan yang berada di Kabupaten Dharmasraya rata-rata dalam kondisi baik, dimana 60,32% diantaranya masih dalam kondisi baik dan tercatat sebanyak 16,40% berada dalam kondisi rusak serta 3,18% dalam kondisi kritis dan runtuh yang perlu penanganan segera.

C. Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik

Pengertian jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi. Selanjutnya secara operasional dibedakan ke dalam tiga kategori yaitu jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier.

Dari ketiga kelompok jaringan tersebut, yang langsung berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi ke dalam petakan sawah adalah jaringan irigasi tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter serta bangunan pelengkap lainnya. Persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten kondisi baik di Kabupaten Dharmasraya tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 2-48 Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik	persen	56,02	58,84	60,46	58,62	59,86

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

Kondisi daerah irigasi relatif berfluktuatif sepanjang tahun, pada tahun 2016 persentase luas irigasi dengan kondisi baik tercatat sebesar 56,02% dan meningkat menjadi 60,46% pada tahun 2018 namun di tahun 2019 menurun menjadi 58,62% dan meningkat lagi menjadi 59,86% di tahun 2020.

Fluktuasi kondisi jaringan irigasi ini tak terlepas dari upaya pengamanan jaringan irigasi untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kerusakan jaringan irigasi yang disebabkan oleh daya rusak air, hewan, atau oleh manusia. Beberapa faktor juga menjadi penyebab fluktuasi kondisi jaringan irigasi di Kabupaten Dharmasraya seperti kondisi jaringan yang sudah tua, pemeliharaan oleh P3A/GP3A yang rendah serta adanya jaringan irigasi yang belum maksimal sebagai akibat adanya perubahan fungsi sawah menjadi kebun sawit. Untuk itu penyediaan infrastruktur irigasi akan diselaraskan dengan lahan pertanian yang ada dan yang akan dibangun.

D. Persentase penduduk yang terlayani jaringan pipa air minum

Air Minum adalah Air Minum Rumah Tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Adapun kebutuhan air minum tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang digunakan untuk keperluan minum, masak, mandi, cuci, peturasan, dan ibadah.

Layanan air minum di Kabupaten Dharmasraya saat ini dikelola oleh UPTD Air Minum yang masih berada di bawah Dinas PUPR dan belum sepenuhnya mampu melayani kebutuhan masyarakat di Kabupaten Dharmasraya. Selain itu juga terdapat SPAM Perdesaan berupa PAMSIMAS untuk memenuhi kebutuhan daerah permukiman baik di ibu kota kabupaten maupun ibukota kecamatan dan pedesaan. Sumber air baku yang dimanfaatkan oleh sistem jaringan ini berasal dari air permukaan (sungai) dan air tanah (sumber mata air):

Capaian persentase penduduk yang terlayani oleh jaringan perpipaan air minum di Kabupaten Dharmasraya hingga tahun 2020 masih cukup rendah yaitunya sebesar 59.86% sebagaimana disajikan pada Tabel 2-49.

Kondisi ini disebabkan oleh masih sangat terbatasnya cakupan pelayanan air minum sistem perpipaan yang dikelola oleh UPT SPAM Kabupaten Dharmasraya, jaringan perpipaan yang ada hanya melayani kawasan Pulau Punjung, Sitiung dan Silago, dan untuk kawasan ibukota

kecamatan lainnya belum dapat terlayani, hal ini disebabkan oleh kondisi sistem unit produksi dan distribusi yang ada masih terbatas baik dari segi kapasitas maupun kuantitasnya. Untuk kawasan ibukota kecamatan yang belum dilayani sistem perpipaan dari UPT SPAM sebagian besar dilayani oleh PAMSIMAS yang dikelola oleh Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) yang ada di Kabupaten Dharmasraya.

Tabel 2-49 Persentase Penduduk yang Terlayani Jaringan Pipa Air Minum di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase penduduk yang terlayani jaringan pipa air minum	persen	56,02	58,84	60,46	58,62	59,86

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

2.3.1.4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kondisi eksisting perumahan rakyat dan kawasan permukiman di Kabupaten Dharmasraya terutama yang berada dikawasan perkotaan memiliki aksesibilitas yang cukup baik disertai dengan kegiatan ekonomi yang beragam. Pusat-pusat pertumbuhan wilayah seperti Kecamatan Pulau Punjung, Kecamatan Koto Baru dan Kecamatan Sungai Rumbai merupakan wilayah dengan intensitas kawasan permukiman yang lebih dominan dibandingkan wilayah lainnya. Perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Dharmasraya memiliki karakteristik yang berbeda-beda mengingat Kabupaten Dharmasraya memiliki kondisi morfologi yang bervariasi, ada yang datar, landai hingga berbukit-bukit, namun pada kawasan permukiman masyarakat sebagian besar berada di kawasan yang datar.

Berdasarkan jenis rumah yang ada dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu rumah permanen¹, rumah semi permanen² dan rumah temporer³.

Untuk kondisi rumah di Kabupaten Dharmasraya terdiri dari rumah permanen adalah sebesar 80,49%, rumah semi permanen sebesar 10,08% dan rumah kayu sebesar 9,43%. Ketersediaan rumah di Kabupaten Dharmasraya telah mencapai 58.526 unit. Dimana jumlah rumah terbanyak berada pada Kecamatan Pulau Punjung yaitu sebanyak 10.264 unit. Kemudian untuk jumlah rumah paling sedikit berada pada Kecamatan Padang Laweh yaitu sebanyak 1.320 unit. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2-50.

Tabel 2-50 Sebaran Jumlah Rumah di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020

No	Kecamatan	Nagari	Rumah Permanen	Rumah Semi Permanen	Rumah Kayu	Jumlah Rumah
1	Koto Baru	Koto Baru	3.233	310	182	3.725
		Sialang Gaung	1.589	108	98	1.795
		Ampang Kuranji	1.009	59	46	1.114
		Koto Padang	4.738	418	280	5.436
	Jumlah		10.569	895	606	12.070
2	Pulau Punjung	Sungai Dareh	1.382	126	259	1.767
		Tebing Tinggi	58	91	57	206

¹ Rumah dengan dinding tembok, lantai ubin/keramik dan atap seng/genteng/sirap/asbes

² Rumah dengan dinding setengah tembok/bata, lantai dari ubin/semu/kayu berkualitas rendah, dan atap seng/genteng/sirap/asbes

³ Rumah dengan dinding sangat sederhana (bambu/papan/ daun), lantai tanah, dan atap dari daun-daunan atau campuran genteng/seng bekas dan sejenisnya

No	Kecamatan	Nagari	Rumah Permanen	Rumah Semi Permanen	Rumah Kayu	Jumlah Rumah
		Empat Koto Pulau Punjung	1.882	189	216	2.287
		Sungai Kambut	1.658	191	350	2.199
		Gunung Selasih	1.167	132	62	1.361
		Sikabau	2.168	109	167	2.444
		Jumlah	8.315	838	1.111	10.264
3	Sungai Rumbai	Sungai Rumbai	1.218	128	151	1.497
		Kurnia Koto Salak	917	78	122	1.117
		Sungai Rumbai Timur	1.018	146	63	1.227
		Kurnia Selatan	1.764	167	134	2.065
		Jumlah	4.917	519	470	5.906
4	Sitiung	Sitiung	1.870	63	100	2.033
		Siguntur	1.288	81	35	1.404
		Gunung Medan	1.009	180	177	1.366
		Sungai Duo	1.606	55	125	1.786
		Jumlah	5.773	379	437	6.589
5	Sembilan Koto	Silago	439	112	27	578
		Lubuak Karak	275	19	28	322
		Koto Nan Empat Dibawuh	449	125	136	710
		Banai	535	251	80	866
		Jumlah	1.698	507	271	2.476
6	Timpeh	Timpeh	168	23	28	219
		Taratak Tinggi	925	141	249	1.315
		Tabek	439	634	154	1.227
		Panyubaringan	578	88	170	836
		Ranah Palabi	191	65	181	437
		Jumlah	2.301	951	782	4.034
7	Koto Salak	Koto Salak	928	67	0	995
		Ampalu	710	54	75	839
		Padukuan	797	111	57	965
		Pulau Mainan	856	181	77	1.114
		Simalidu	417	207	92	716
		Jumlah	3.708	620	301	4.629
8	Tiumang	Tiumang	957	117	4	1.078
		Sungai Langkok	286	17	387	690
		Koto Beringin	402	81	20	503
		Sipangkur	548	44	125	717
		Jumlah	2.193	259	536	2.988
9	Padang Laweh	Padang Laweh	236	10	38	284
		Batu Rijal	436	2	21	459
		Muaro Sopan	130	13	37	180
		Sopan Jaya	276	22	99	397
		Jumlah	1.078	47	195	1.320
10	Asam Jujuhan	Sungai Limau	349	45	32	426
		Alahan Nan Tigo	444	25	275	744
		Lubuk Besar	187	76	64	327
		Tanjung Alam	170	12	18	200
		Sinamar	385	391	15	791
		Jumlah	1.535	549	404	2.488
11	Koto Besar	Koto Besar	188	9	16	213
		Koto Tinggi	706	33	30	769
		Koto Gadang	1.028	56	85	1.169
		Bonjol	430	70	27	527
		Abai Siat	927	115	185	1.227
		Koto Laweh	832	19	34	885

No	Kecamatan	Nagari	Rumah Permanen	Rumah Semi Permanen	Rumah Kayu	Jumlah Rumah
		Koto Ranah	911	34	27	972
		Jumlah	5.022	336	404	5.762
		Jumlah Kabupaten	47.109	5.900	5.517	58.526

Sumber : Laporan RP3KP Kabupaten Dharmasraya, 2020

A. Cakupan permukiman layak huni

Permukiman dan rumah layak huni merupakan harapan dan idaman setiap insan. Pemerintah telah berupaya dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan kurang mampu, dengan tujuan mendorong masyarakat lain untuk berpartisipasi dan peduli terhadap sesama warga masyarakat tersebut

Tabel 2-51 Cakupan Permukiman Layak Huni Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020
Cakupan permukiman layak huni	Persen	82,50	83,32	84,15	85,00
Luas Permukiman layak huni (Ha)	Ha	2.035	2.056	2.076	2.097
Luas Wilayah Permukiman (Ha)	Ha	2.467	2.467	2.467	2.467

Sumber : Dinas Perkimtan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

Berdasarkan indikator cakupan pemukiman layak huni, maka target pada akhir tahun 2020 tercapai sebesar 85 persen dengan luas pemukiman layak huni sebesar 2.097 Ha dan luas wilayah pemukiman sebesar 2.467 Ha.

B. Cakupan ketersediaan rumah layak huni

Cakupan ketersediaan rumah layak huni adalah cakupan pemenuhan kebutuhan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.

Berdasarkan indikator cakupan ketersediaan rumah layak huni, maka capaian pada akhir tahun 2020 adalah sebesar 88,73 persen dengan jumlah rumah layak huni di suatu wilayah kerja 41.007 unit dan jumlah rumah di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu sebesar 46.217 unit.

Tabel 2-52 Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020
Cakupan ketersediaan rumah layak huni	Persen	87,88	88,24	88,45	88,73
Jumlah Rumah layak huni di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	unit	39.957	40.207	40.657	41.007
Jumlah Rumah di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu	unit	45.467	45.567	45.967	46.217

Sumber : Dinas Perkimtan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

Berdasarkan data dari nagari yang telah disurvei, Kabupaten Dharmasraya memiliki jumlah rumah yaitu 58.526 unit, dengan jumlah yang dikategorikan kedalam rumah tidak layak huni adalah sebesar 5.497 unit atau sebesar 10% dan untuk rumah layak huni sebesar 53029 unit atau sebesar 90%.

Penilaian rumah tidak layak huni ini merujuk pada Permen PUPR No. 33/PRT/M/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur, Rumah tidak layak huni (RTLH). Berikut ini merupakan jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2-53 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Berdasarkan Rumah Tangga di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020

No	Kecamatan	Nagari	Jumlah Rumah (unit)	Jumlah RTLH (unit)	RLH (unit)
1	Koto Baru	Koto Baru	3.725	182	3.543
		Sialang Gaung	1.795	95	1.700
		Ampang Kuranji	1.114	46	1.068
		Koto Padang	5.436	209	5.227
		Jumlah	12.070	532	11.538
2	Pulau Punjung	Sungai Dareh	1.767	127	1.640
		Tebing Tinggi	206	150	56
		Empat Koto Pulau Punjung	2.287	81	2.206
		Sungai Kambut	2.199	109	2.090
		Gunung Selasih	1.361	62	1.299
		Sikabau	2.444	277	2.167
		Jumlah	10.264	806	9.458
3	Sungai Rumbai	Sungai Rumbai	1.497	60	1.437
		Kurnia Koto Salak	1.117	126	991
		Sungai Rumbai Timur	1.227	63	1.164
		Kurnia Selatan	2.065	134	1.931
		Jumlah	5.906	383	5.523
4	Sitiung	Sitiung	2.033	100	1.933
		Siguntur	1.404	18	1.386
		Gunung Medan	1.366	357	1.009
		Sungai Duo	1.786	87	1.699
		Jumlah	6.589	562	6.027

No	Kecamatan	Nagari	Jumlah Rumah (unit)	Jumlah RTLH (unit)	RLH (unit)
5	Sembilan Koto	Silago	578	132	446
		Lubuak Karak	322	28	294
		Koto Nan Empat Dibawuh	710	11	699
		Banai	866	60	806
Jumlah			2.476	231	2.245
6	Timpeh	Timpeh	219	23	196
		Taratak Tinggi	1.315	204	1.111
		Tabek	1.227	788	439
		Panyubarangan	836	37	799
		Ranah Palabi	437	71	366
Jumlah			4.034	1.123	2.911
7	Koto Salak	Koto Salak	995	13	982
		Ampalu	839	75	764
		Padukuan	965	40	925
		Pulau Mainan	1.114	67	1.047
		Simalidu	716	96	620
Jumlah			4.629	291	4.338
8	Tiumang	Tiumang	1.078	95	983
		Sungai Langkok	690	387	303
		Koto Beringin	503	17	486
		Sipangkur	717	125	592
Jumlah			2.988	624	2.364
9	Padang Laweh	Padang Laweh	284	40	244
		Batu Rijal	459	22	437
		Muaro Sopan	180	37	143
		Sopan Jaya	397	68	329
Jumlah			1.320	167	1.153
10	Asam Jujuhan	Sungai Limau	426	109	317
		Alahan Nan Tigo	744	132	612
		Lubuk Besar	327	76	251
		Tanjung Alam	200	18	182
		Sinamar	791	15	776
Jumlah			2.488	350	2.138
11	Koto Besar	Koto Besar	213	20	193
		Koto Tinggi	769	63	706
		Koto Gadang	1.169	18	1.151
		Bonjol	527	102	425
		Abai Siat	1.227	191	1.036
		Koto Laweh	885	19	866
		Koto Ranah	972	15	957
Jumlah			5762	428	5.334
Jumlah Kabupaten			58.526	5.497	53.029

Sumber : Laporan RP3KP Kabupaten Dharmasraya, 2020

C. Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 hektar yang ditangani

Permukiman kumuh merupakan permukiman yang tidak layak huni yang ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Berdasarkan hal tersebut, maka pemerintah melakukan penanganan pada daerah permukiman kumuh.

Sesuai dengan target Sustainable Development Goals/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs/TPB) dimana pada Tujuan 11 bertujuan untuk Membangun kota dan permukiman inklusif, aman, tahan lama dan berkelanjutan, maka pada tahun 2030, memastikan akses terhadap perumahan dan pelayanan dasar yang layak, aman dan terjangkau bagi semua dan meningkatkan mutu permukiman kumuh. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Dharmasraya berupaya untuk meningkatkan upaya penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di bawah 10 hektar sesuai kewenangannya mengingat potensi tumbuhnya kawasan kumuh baru, dikarenakan jumlah penduduk yang kian bertambah, sementara ruang terbatas, serta perilaku masyarakat yang kurang peduli terhadap pentingnya lingkungan yang bersih dan sehat.

Disisi lain Peningkatan jumlah rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni belum seluruhnya didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum yang memadai, sehingga memicu meluasnya permukiman kumuh dan makin menurunnya kualitas lingkungan permukiman.

Adapun indikator kawasan permukiman kumuh yang dibawah 10 Ha yang ditangani adalah sebesar 62,70 persen dapat direalisasikan pada tahun 2020. Program / Kegiatan dalam penanganan kawasan kumuh yang dilakukan di Kabupaten Dharmasraya belum sepenuhnya terintegrasi mengingat belum adanya dokumen RP2KPKP sehingga penanganan masih bersifat parsial seperti pembangunan drainase lingkungan permukiman, rigid beton jalan dan pelaksanaan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni. Persentase kawasan permukiman kumuh yang dibawah 10 Ha yang ditangani selengkapnya disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2-54 Persentase Kawasan Permukiman Kumuh di bawah 10 hektar yang ditangani Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Kawasan Permukiman Kumuh di bawah 10 hektar yang ditangani	Persen	-	50,40	54,60	58,65	62,70
Luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 hektar yang ditangani	Ha	-	55	60	64	68

Sumber : Dinas Permukiman Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

D. Cakupan lingkungan permukiman sehat dan aman yang didukung dengan PSU

Untuk mewujudkan lingkungan permukiman sehat dan aman maka diperlukan dukungan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU). Berdasarkan indikator cakupan lingkungan permukiman sehat dan aman yang didukung PSU, maka pada akhir tahun 2020 telah terealisasi sebesar 95,96% dengan rincian jumlah lingkungan yang didukung PSU sebesar 120,96% dan jumlah lingkungan perumahan sebesar 126,05%. Cakupan lingkungan permukiman sehat yang didukung PSU selengkapnya disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2-55 Cakupan Lingkungan Permukiman Sehat dan Aman Didukung dengan PSU Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020
Cakupan lingkungan permukiman sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Persen	59,98	71,97	83,97	95,96
Jumlah lingkungan yang didukung PSU pada kurun waktu tertentu (Ha)	Persen	75,6	90,72	105,84	120,96
Jumlah lingkungan perumahan pada kurun waktu tertentu (Ha)	Persen	126,05	126,05	126,05	126,05

Sumber : Dinas Perkimtan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

E. Cakupan rumah layak huni yang terjangkau

Dalam upaya memberikan pelayanan rumah layak huni, maka pemerintah mendorong penyediaan rumah layak huni yang terjangkau oleh masyarakat khususnya golongan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Berdasarkan indikator cakupan rumah layak huni yang terjangkau, pada tahun 2020 realisasinya adalah sebesar 8,52 persen dengan Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau sebesar 350 unit dan Jumlah rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu sebesar 4.110 unit. Rincian cakupan rumah layak huni yang terjangkau oleh MBR selengkapnya diuraikan dalam Tabel 2-56.

Tabel 2-56 Cakupan rumah layak huni yang terjangkau Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020
Cakupan rumah layak huni yang terjangkau	Persen	6,78	7,28	7,85	8,52
Jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu	unit	350	350	350	350
Jumlah rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu	unit	5.160	4.810	4.460	4.110

Sumber : Dinas Perkimtan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

2.3.1.5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Pelaksanaan kewenangan pada urusan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat terdiri dari 3 sub bidang, yaitu sub bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, sub bidang bencana, dan sub bidang kebakaran. Adapun sub bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dan sub bidang kebakaran dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, sedangkan sub bidang bencana dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Pada sisi kebencanaan, Dharmasraya cenderung memiliki kontur daerah yang datar serta memiliki kawasan hutan dan perkebunan rakyat maupun perkebunan besar yang cukup luas, sehingga kejadian bencana yang sering terjadi adalah berupa banjir di musim hujan serta kebakaran hutan dan kawasan pemukiman. Oleh karena itu, perlu dilakukan mitigasi bencana untuk mengurangi risiko

bencana, meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat terhadap bencana, serta memperkuat kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta pergantian musim hujan dan musim kemarau.

A. Persentase Penyelesaian kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum

Untuk mengukur ketentraman dan ketertiban umum, maka salah satu indikator yang digunakan adalah persentase penyelesaian kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum. Adapun capaian persentase penyelesaian kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum pada tahun 2020 sudah terealisasi sebesar 100 persen. Artinya pemerintah telah mengupayakan untuk mengantisipasi dampak gangguan ketentraman dan ketertiban umum dengan baik.

Tabel 2-57 Persentase Penyelesaian Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Penyelesaian kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum	persen	100	100	100	100	100

Sumber : Satpol PP Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

B. Persentase Penegakan Perda dan Perkada yang memuat sanksi

Dari sisi regulasi, maka perwujudan ketentraman dan ketertiban umum diukur dengan tindakan penegakan perda dan perkada yang memuat sanksi. Berdasarkan indikator tersebut, maka capaian persentase penegakan perda dan perkada yang memuat sanksi pada akhir tahun 2020 adalah sebesar 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah telah melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendalian dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum.

Tabel 2-58 Persentase Penegakan Perda dan Perkada yang memuat sanksi Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Penegakan Perda dan Perkada yang memuat sanksi	persen	100	100	100	100	100

Sumber : Satpol PP Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

C. Persentase responstime 15 menit pada lokasi kebakaran

Berkaitan dengan bencana kebakaran, maka indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja adalah persentase responstime pada lokasi kebakaran yaitu sebesar 15 menit.

Berdasarkan tingkat capaian persentase responstime pada lokasi kebakaran pada tahun 2020 sudah tercapai sebesar 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pelayanan pemerintah dalam hal ini melalui BPBD telah memberikan pelayanan secara optimal. Hal ini tentunya juga didukung oleh partisipasi dari masyarakat dalam melakukan penanganan kebakaran secara mandiri.

Tabel 2-59 Persentase Respon time 15 menit pada Lokasi Kebakaran Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase respon time 15 menit pada lokasi kebakaran	persen	100	100	100	100	100

Sumber : Satpol PP Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

D. Indikator kebencanaan

Proses penanggulangan bencana juga tidak hanya dilakukan saat bencana saja, namun dapat dimulai sebelum terjadinya bencana. Sebelum terjadinya bencana maka hal yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kapasitas dalam pencegahan dan penanggulangan bencana.

Adapun Faktor kunci keberhasilan dalam penanganan bencana adalah terdiri dari unsur peralatan dan sumber daya manusia. Dalam hal peningkatan sumberdaya manusia, pemerintah telah memfasilitasi pembentukan kelompok masyarakat yang peduli dan siaga terhadap bencana.

Pada tahun 2018 dan 2019 terlihat jumlah kelompok masyarakat yang dibentuk untuk menghadapi bencana masing-masing 1 kelompok, artinya pembentukan kelompok masih diprioritaskan untuk daerah yang rawan terhadap bencana. Indikator kebencanaan Kabupaten Dharmasraya selengkapnya disajikan dalam Tabel 2-60.

Tabel 2-60 Indikator Kebencanaan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Tahap Prabencana : Jumlah kelompok masyarakat daerah rawan bencana yang siap menghadapi bencana.	Klp	0	0	1	1	0
Tahap Tanggap Darurat : Persentase kejadian bencana yang dapat ditanggulangi.	Persen	100%	100%	100%	100%	100%
Tahap Tanggap Bencana : Rata-rata waktu respon kejadian bencana (jam)	Jam	1	1	1	1	1

Sumber : Dinas BPBD Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

Selanjutnya berdasarkan indikator persentase kejadian bencana yang dapat ditanggulangi dapat terealisasi 100 persen pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

Jika dilihat pada tabel data bencana di Kabupaten Dharmasraya maka tahun 2019 bencana yang terjadi antara lain adalah kebakaran lahan 50 kejadian, banjir 36 kejadian, kekeringan 15 kejadian, angin puting beliung 11 kejadian, kabut asap 6 kejadian dan longsor sebanyak 2 kejadian. Sedangkan pada tahun 2020, bencana yang paling sering terjadi adalah banjir sebanyak 51 kejadian dan angin puting beliung sebanyak 4 kejadian.

Berdasarkan data tersebut maka, pemerintah harus berupaya untuk melakukan pencegahan terhadap kejadian bencana yang sering terjadi yaitu kebakaran lahan, banjir, kekeringan dan

puting beliung melalui peningkatan kapasitas sumber daya dan edukasi kepada masyarakat. Rincian kejadian bencana di Kabupaten Dharmasraya tahun 2016-2020 disajikan dalam Tabel 2-61.

Tabel 2-61 Data Bencana di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

No	Jenis Bencana	Jumlah Kejadian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Banjir	14	16	30	36	51
2	Angin Puting Beliung	5	8	14	11	4
3	Kekeringan	-	3	-	15	-
4	Kebakaran Lahan	15	-	-	50	-
5	Kabut Asap	-	-	-	6	-
6	Longsor	2	1	1	2	4
	Total	36	28	45	120	59

Sumber Data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dharmasraya

Untuk mengukur kinerja perangkat daerah, maka indikator yang digunakan adalah jumlah nagari tangguh bencana, persentase korban bencana yang diselamatkan dan persentase pemulihan pasca bencana. Adapun jumlah nagari tangguh bencana pada akhir tahun 2020 adalah sebesar 11 nagari (21,15 persen) dari 52 nagari.

Hal ini tentunya belum dirasakan secara optimal untuk seluruh kabupaten Dharmasraya. Artinya pemerintah perlu membuat kebijakan untuk mendorong nagari untuk mengalokasikan kegiatan yang bersifat kebencanaan melalui alokasi dana nagari melalui koordinasi dengan BPBD sehingga kesiapsiagaan masyarakat dalam mengatasi kebencanaan dapat ditingkatkan dan risiko bencana dapat diminimalisir.

Sedangkan untuk persentase korban bencana yang diselamatkan dan dievakuasi adalah 100 persen. Pada tahap pemulihan daerah pasca bencana, maka pada tahun 2020 terealisasi sebesar 75 persen. Berikut ini disajikan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran sebagaimana Tabel 2-62.

Tabel 2-62 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran

		Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	
1	Jumlah Nagari Tangguh Bencana	2	0	1	1	2	4	3	11
2	Persentase korban bencana yang diselamatkan dan dievakuasi	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase daerah pasca bencana yang dipulihkan	100%	75 %	75 %	75 %	75 %	75 %	75 %	75%

Sumber Data : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

2.3.1.6. *Urusan Pemerintahan Bidang Sosial*

Pada tahun 2016-2020 tercatat adanya peningkatan jumlah PPKS di Kabupaten Dharmasraya. PPKS tersebut didominasi oleh fakir miskin dan penyandang cacat yang dari tahun ke tahun penanganannya terus ditingkatkan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Tabel 2-63:

Tabel 2-63 Persentase PPKS Yang Tertangani Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
persentase PPKS yang tertangani	Persen	66,26	99,86	88,62	90	75
Jumlah PPKS yg diberikan bantuan	Orang	9.566	93.146	56.018	65.106	
Jumlah PPKS yg seharusnya	orang	14.437	93.275	63.211	72.340	

Sumber : Dinas SOSP3APPKB Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

2.3.2. *Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar*

2.3.2.1. *Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja*

A. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah salah satu ukuran yang dapat menggambarkan partisipasi penduduk usia kerja dalam kegiatan ekonomi. TPAK merupakan perbandingan jumlah angkatan kerja yaitu jumlah penduduk yang bekerja dan mencari pekerjaan terhadap jumlah seluruh penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). Penduduk lainnya adalah bukan angkatan kerja yaitu penduduk yang tidak terlibat dalam kegiatan ekonomi, yaitu penduduk yang sekolah, mengurus rumah tangga, dan lain sebagainya.

Tabel 2-64 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	persen	65,88	64,53	68,37	70,17	72,72

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

Dari data di atas dapat dilihat selama 5 tahun terakhir terjadinya kecenderungan peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja dari 65,88% pada tahun 2016 menjadi 72,72% pada tahun 2020. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Hal ini tentu perlu menjadi perhatian untuk dapat meningkatkan lapangan pekerjaan

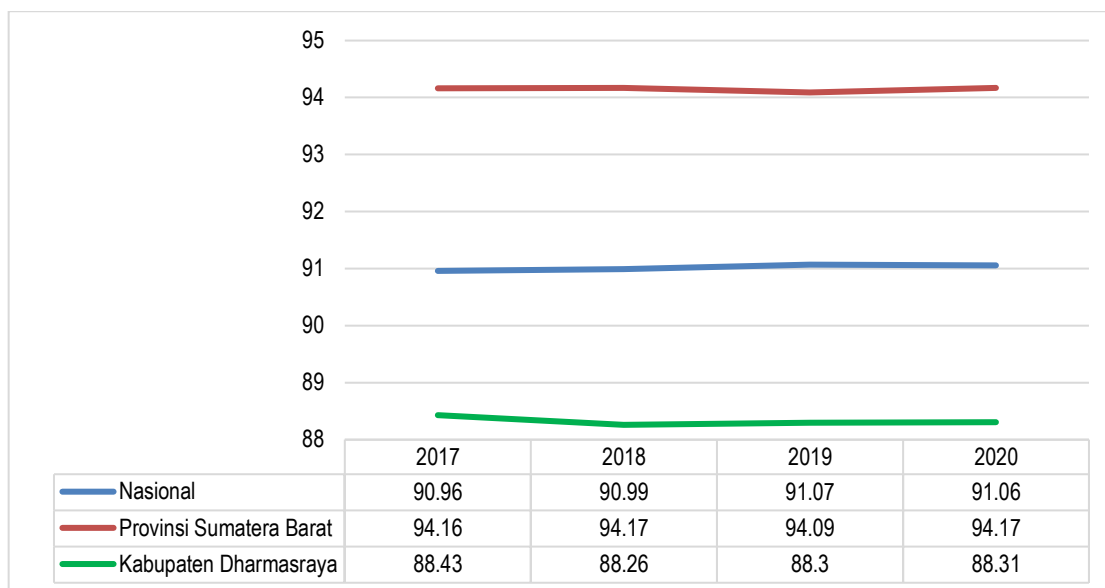
2.3.2.2. *Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*

A. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

IPG adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. IPG merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antargender dalam pencapaian pembangunan manusia, mengungkapkan

ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. apabila nilai IPG semakin mendekati 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki.

Gambar 2-30 Perbandingan IPG Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional



Sumber : BPS Provinsi Sumatera, Tahun 2021

B. Persentase keaktifan Focalpoint perangkat daerah

Focal Point PUG adalah aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan **pengarusutamaan gender** di unit kerjanya masing-masing. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya terus melakukan penguatan Focal Point PUG pada Perangkat Daerah. Pada tahun 2018 tercatat baru 44.11% OPD yang telah memiliki Focalpoint PUG dan pada tahun 2020 seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah memiliki Focalpoint PUG. Keberadaan focalpoint PUG pada Perangkat Daerah dalam rangka penguatan pemahaman tentang PUG dan PPRG (Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender) serta mendorong Perangkat Daerah untuk melengkapi dokumen perencanaan dengan GAP (Gender Analysis Pathway) dan GBS (Gender Budget Statement/ pernyataan anggaran responsif gender).

Tabel 2-65 Persentase keaktifan Focalpoint Perangkat Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Indikator	satuan	2018	2019	2020
Persentase keaktifan Focalpoint perangkat daerah	persen	44,11	100	100

Sumber : Dinas SOSP3APPKB Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

C. Persentase Organisasi Perempuan yang Aktif

Untuk meningkatkan kualitas dan sumberdaya dan peran perempuan untuk terciptanya kesejahteraan dan peran aktif dari organisasi perempuan di Kabupaten Dharmasraya Indikator yang mendukungnya adalah persentase organisasi perempuan yang masih aktif atau masih

eksistensi keberadaan dalam pemberdayaan perempuan. diantaranya organisasi perempuan yang ada di Kabupaten Dharmasraya diantaranya Dharmawanita persatuan, Bhayangkari, dan Pemberdayaan kesejahteraan Keluarga (PKK). Adapun capaian target kinerja sebagai berikut

*Tabel 2-66 Persentase Organisasi Perempuan yang aktif
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020*

Indikator	Satuan	2018	2019	2020
persentase Organisasi perempuan yang aktif	Persen	85,71	90,47	95,23

Sumber : Dinas SOSP3APPKB Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

Capaian kinerja tersebut merupakan data jumlah organisasi perempuan dikategorikan masih aktif perannya sebagai kelembagaan organisasi perempuan pada tahun 2020 adalah 95.23% organisasi perempuan. Untuk meningkatkan persentase organisasi perempuan yang aktif, Dinas SOSP3APPKB Kabupaten Dharmasraya telah melaksanakan pembinaan kepada organisasi perempuan Kabupaten Dharmasraya.

D. Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA)

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, terus melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan sebagai Kabupaten Layak Anak, baik secara regulasi maupun dukungan infrastruktur. Sejumlah upaya telah dilakukan pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam pengembangan kabupaten layak anak. Diantaranya, dengan menyusun regulasi kebijakan pengembangan Kabupaten Layak Anak melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan dipertegas dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengembangan Kabupaten Layak Anak dan Peraturan Bupati Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Aksi Pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Dharmasraya tahun 2019-2023.

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, telah membentuk Gugus Tugas Layak Anak, yang bertugas mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan Kabupaten Layak Anak mulai dari tingkat kabupaten hingga nagari atau desa.

Tabel 2-67 Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2018	2019	2020
Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA)	Status	Inisiator	pratama	Tidak ada penilaian

Sumber : Dinas SOSP3APPKB Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

E. Rasio Perempuan Korban Kekerasan yang Tertangani

Kasus kekerasan perempuan dan anak seperti fenomena gunung es. Yaitu kasus yang dilaporkan ke lembaga perlindungan perempuan dan lembaga perlindungan anak hanya sebagian kecil dari kasus yang sebenarnya. Berdasarkan data Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3APPKB) Kabupaten Dharmasraya pada 2020 terdapat 120-an kasus kekerasan terhadap

perempuan dan anak dimana penanganan kasus secara umum dapat ditangani secara keseluruhan.

Namun angka tersebut tentu saja jumlah kasus yang tercatat atau terungkap ke permukaan, sementara yang tidak tercatat atau tidak muncul ke permukaan barangkali bisa saja angkanya dua kali atau tiga kali lipat. Terkait dengan kondisi tersebut pemerintah Kabupaten Dharmasraya terus mensosialisasikan dan mendorong pemerintah kecamatan dan nagari untuk mampu membentuk satgas perlindungan perempuan dan anak di wilayah kerja masing-masing.

*Tabel 2-68 Rasio perempuan korban kekerasan yang tertangani
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020*

Indikator	Satuan	2018	2019	2020
rasio perempuan korban kekerasan yang tertangani	persen	100	100	100

Sumber : Dinas SOSP3APPKB Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

F. Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Terkait dengan permasalahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Dharmasraya, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menjalin kerja sama dengan pemerintahan Kecamatan dan Nagari untuk menekan terjadinya peningkatan KDRT.

Secara umum penyebab terjadinya persoalan KDRT ini, menyangkut faktor pendidikan, ekonomi, lingkungan keluarga, pemahaman terhadap hukum atau hal lainnya.

*Tabel 2-69 Rasio kekerasan dalam rumah tangga
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020*

Indikator	Satuan	2018	2019	2020
Rasio kekerasan dalam rumah tangga	rasio	0,01	0,002	0,002

Sumber : Dinas SOSP3APPKB Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

2.3.2.3. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

A. Persentase Cadangan Pangan Terhadap Kebutuhan Pangan Daerah

Penyediaan Cadangan pangan merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka untuk menjaga ketahanan pangan. Penyediaan cadangan pangan berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara produksi dengan kebutuhan serta mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekurangan pangan yang bersifat sementara (transien) yang disebabkan gangguan atau terhentinya pasokan bahan pangan yang disebabkan oleh bencana alam, terganggunya transportasi dll.

Persoalan pangan tidak semata menjadi domain tanggung jawab pemerintah, namun perlu melibatkan dan memberdayakan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. Pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 mengamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan cadangan pangan masyarakat sesuai

dengan kearifan lokal. Pengembangan cadangan pangan masyarakat ini, memiliki dua sisi relevansi yakni :

Pertama, memantapkan keberadaan cadangan pangan untuk mewujudkan keterjaminan atas ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Untuk itu perlu ada sinergisitas antar anggota kelompok penerima manfaat, penyuluh pertanian, aparat ketahanan pangan pusat dan daerah.

Kedua, mengembangkan peran serta masyarakat secara optimal untuk mengembangkan kelembagaan cadangan pangan masyarakat. Hal ini mengarah pada upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan kegiatan usaha ekonomi produktif di bidang pangan yang pengelolaannya dilakukan secara sinergis oleh kelembagaan lumbung pangan masyarakat.

Persentase cadangan daerah adalah perbandingan ketersediaan cadangan pangan yang dimiliki oleh daerah dengan kewajiban penyediaan pangan daerah berdasarkan perhitungan yang dibutuhkan masyarakat.

Pada tahun 2020, kewajiban penyediaan pangan yang harus di laksanakan oleh pemerintah Kabupaten Dharmasraya adalah sebesar 99,63 Ton yang berupa Cadangan pangan Pemerintah Daerah (CPPD) . salah satu penyebab rendahnya cadangan pangan adalah belum adanya Satgas pangan, dimana Satgas pangan tersebut berfungsi dalam menjaga harga dan ketersediaan pangan.

Tabel 2-70 Persentase cadangan pangan terhadap kebutuhan pangan daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase cadangan pangan terhadap kebutuhan pangan daerah	persen	15	15	15	18	28

Sumber : Dinas Pangan dan perikanan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

Cadangan pangan daerah Kabupaten Dharmasraya jika dibandingkan dengan kebutuhan yang harus disediakan masih sangat kecil yaitu kisaran 15 – 28%. Hal ini terjadi karena keterbatasan alokasi anggaran untuk penyediaan cadangan pangan pemerintah daerah (CPPD) dimana CPPD tersebut hanya ada pada Tahun 2020 sebanyak 7,75 Ton dan sisanya merupakan cadangan pangan masyarakat (LPM) sebanyak 20 Ton pada tahun 2020. Pada Tahun 2016 s.d 2019, cadangan pangan daerah hanya bersumber dari cadangan pangan masyarakat yang berada di Lumbung pangan masyarakat sebanyak 7 LPM.

B. Ketersediaan Kalori dan Protein Perkapita/hari

Ketersediaan Kalori dan Protein adalah jumlah pangan yang tersedia di pasar untuk di konsumsi dalam kurun waktu tertentu dalam bentuk energy/kapita/hari, protein gram/kap/hari dan lemak per kapita/hari. Perhitungan dari Ketersediaan kalori dan protein dilakukan melalui analisis neraca bahan makanan.

Ketersediaan kalori dan protein yang dianjurkan menurut PPH konsumsi yaitu sebesar 2.150 K.Kal/Kapita/hari dan protein 63 gram/kap/hari. Sedangkan menurut angka kebutuhan energy

(AKE) ketersediaan yang di rekomendasikan adalah 2.400 K.kal/kap/hari. Ketersediaan kalori dan protein dipengaruhi oleh penyediaan pangan, penggunaan pangan dan ketersediaan pangan.

*Tabel 2-71 Ketersediaan Kalori dan Protein Perkapita/hari
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020*

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Ketersediaan Kalori	K.Kal/Kap/hr	2.685	2.520	2.789	2.548	2.540
Ketersediaan Protein	Gram/Kap/hr	-	70,27	83,20	79,21	79,11

Sumber : Dinas Pangan dan perikanan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

Realisasi Ketersediaan kalori dan protein/kapita/hari di Kabupaten Dharmasraya sudah melebihi rekomendasi ketersediaan kalori yaitu sebesar 2.400 K.Kal/Kap/hr dan Protein 63 gr/kap/hr. Hal ini menggambarkan bahwa penyediaan pangan (food supply), penggunaan pangan (food utilization), dan ketersediaan dalam keadaan baik dan menunjukkan masyarakat dapat mengakses pangan sesuai dengan kebutuhannya.

C. Skor Pola Pangan Harapan

Pola Pangan Harapan (PPH) atau Desirable Dietary Pattern (DDP) adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. PPH merupakan instrumen untuk menilai situasi konsumsi pangan wilayah yang dapat digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan konsumsi pangan ke depan, dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya dan preferensi konsumsi pangan masyarakat. Selain itu, PPH juga dapat dijadikan acuan untuk menentukan sasaran dalam perencanaan dan evaluasi penyediaan khususnya produksi pangan.

*Tabel 2-72 Skor Pola Pangan Harapan
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020*

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Skor Pola Pangan Harapan	skor	76,5	80,6	83	89,4	85,6

Sumber : Dinas Pangan dan perikanan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

Capaian Skor pola pangan harapan masyarakat mengalami peningkatan pada 4 tahun pertama (2016-2019) akan tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019. Hal ini dipengaruhi oleh situasi pandemi covid 19 dan kebijakan PSBB yang diterapkan oleh pemerintah sehingga masyarakat terbatas dalam beraktivitas diluar rumah untuk membeli kebutuhan pangan yang di butuhkan.

Diharapkan dengan telah di mulainya era new normal dan kegiatan masysrakat telah berjalan seperti biasa dengan tetap menerapkan protocol kesehatan, maka skor konsumi pangan dapat kembali meningkat.

2.3.2.4. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan

A. Persentase tanah Pemerintah Daerah yang bersertifikat

Dalam rangka peningkatan layanan bidang pertanahan, pemerintah daerah terus melakukan pembenahan khususnya terkait dengan validasi data dan pendataan tanah-tanah pemerintah daerah yang tercatat dalam asset. Terkait dengan hal tersebut sampai tahun 2020 pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah melakukan program bidang pertanahan sebagaimana disajikan pada Tabel 2-73.

*Tabel 2-73 Persentase tanah Pemerintah daerah yang bersertifikat
Tahun 2016-2020*

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020
Persentase tanah Pemerintah daerah yang bersertifikat	Persen	39,82	42,94	54,56	70,15
Jumlah Luas Lahan Tanah Pemda yang bersertifikat (Ha)	Ha	255,43	275,43	350	450
Jumlah Luas lahan Tanah Pemda (Ha)	Ha	641,46	641,46	641,46	1.600

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

Guna meningkatkan validitas data pertanahan pemerintah daerah, pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah melakukan pendataan ulang dimana diperoleh gambaran bahwa database pertanahan yang ada terdapat selisih data setelah dilakukan pengukuran ulang oleh petiugas ukur. Selain adanya selisih data tersebut juga ditemui adanya pemindahan aset dari tanah ex-transmigrasi menjadi tanah pemerintah daerah.

Dengan demikian terjadi perubahan jumlah aset tanah Pemda yang signifikan, dari yang semula berjumlah 641 Ha menjadi 1.600 Ha. Sementara tanah milik Pemda yang bersertifikat kondisi Desember 2020 berjumlah 450 Ha. Kondisi ini tentu saja akan menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk bias melakukan percepatan sertifikasi tanah yang telah terdata tersebut.

B. Jumlah Kasus Pertanahan Milik Pemda dan Masyarakat Yang Terasilitasi/Diselesaikan

Saat ini penyelesaian sengketa atau permasalahan terkait bidang pertanahan di Indonesia dapat dilakukan baik melalui jalur pengadilan maupun di luar pengadilan (mediasi). Kebijakan Pemerintah saat ini lebih mengutamakan penyelesaian di luar pengadilan terlebih dahulu, dan bila memang tidak dapat terselesaikan melalui jalur mediasi, penyelesaian dapat dilanjutkan ke acara pengadilan.

Jalur pengadilan itu dapat berupa Pengadilan Umum, Pengadilan Tata Usaha Negara (misalnya pada kasus tuntutan pembatalan sertifikat tanah), serta Pengadilan Agama dalam hal sengketa tanah warisan dan tanah wakaf.

Kasus fasilitasi kasus tanah yang ada di kabupaten Dharmasraya pada tahun 2016-2020 terus menunjukkan kenaikan kasus yang diselesaikan. Jumlah tersebut meningkat seiring dengan makin meningkatnya pemahaman masyarakat akan legalitas tanah maupun kebutuhan ruang untuk aktifitas ekonomi. Berdasarkan data Dinas Perkimtan maka pada tahun 2020 terjadi 15 kasus yang sudah terdaftar dan 10 kasus yang sudah diselesaikan baik.

Tabel 2-74 Persentase Penyelesaian / Fasilitas Kasus Tanah Pemerintah Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020
Persentase penyelesaian / fasilitas kasus tanah Pemerintah	Persen	33,33	40,00	50,00	66,67
Jumlah Kasus yang terfasilitasi/terselesaikan	kasus	1	2	5	10
Jumlah Kasus yang terdaftar	kasus	3	5	10	15

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

2.3.2.5. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

A. Indeks Kualitas Air

Kualitas Air (*Water Quality Index / WQI*) adalah metode sederhana yang digunakan sebagai bagian dari survei kualitas air secara umum dengan menggunakan sekelompok parameter yang mengurangi sejumlah besar informasi ke nomor tunggal, biasanya berdimensi, dengan cara yang mudah direproduksi.

Tabel 2-75 Indeks Kualitas Air Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Indikator Sasaran	Satuan	Target					Realisasi				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Kualitas Air	persen	64	65	68	68,5	60	63	63,58	65,84	60,00	70,00

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

Pada Indikator Sasaran Indeks Kualitas Air Sebagaimana target yang telah ditetapkan yaitu akhir dari capaian kinerja tahun 2020 dengan target kinerja sebesar 60 persen telah terealisasi 70 persen, atau tercapai 117 persen dari target.

B. Indeks Kualitas Udara

Indeks Standar Pencemar Udara adalah angka yang tidak mempunyai satuan yang menggambarkan kondisi kualitas udara ambien di lokasi dan waktu tertentu yang didasarkan kepada dampak terhadap kesehatan manusia, nilai estetika dan makhluk hidup lainnya.

Tabel 2-76 Indeks Kualitas Udara Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Indikator Sasaran	Satuan	Target					Realisasi				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Kualitas Udara	persen	64	65	85,5	86	86	63	63,58	84,28	86,00	86,11

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

Pada Indikator Sasaran Indeks Kualitas Udara dengan target kinerja sebesar 86 persen telah terealisasi 86,11 persen, atau tercapai 100 persen sedangkan Indikator Sasaran Indeks Kualitas Tutupan Lahan dengan target sebesar 43 persen telah terealisasi 40,95 persen, atau tercapai 95,23 persen dari target.

C. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

IKTL merupakan penyempurnaan dari indeks tutupan lahan (ITH) yang digunakan sebelum tahun 2017. Pada metode perhitungan IKLH sebelumnya, terdapat keterbatasan dalam metode perhitungan indikator tutupan lahan sebagai satu-satunya indikator yang mewakili isu hijau. Oleh Karena itu dilakukan penyempurnaan metode perhitungan IKTL dengan menambahkan tutupan semak belukar dan belukar rawa yang berada di kawasan hutan, sempadan sungai, danau dan pantai, lereng >25% (0,6 dari tutupan hutan), Ruang Terbuka Hijau (RTH), Kebun Raya dan Taman Keanekaragaman Hayati (0,6 dari tutupan hutan).

Tabel 2-77 Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Indikator Sasaran	Satuan	Target					Realisasi				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	persen	64	65	50	50,5	43	63	63,58	43,73	42,92	40,95

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

Pada Indikator Sasaran Indeks Kualitas Tutupan Lahan dengan target sebesar 43 persen telah terealisasi 40,95 persen, atau tercapai 95,23 persen dari target.

D. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Nilai indeks kualitas udara bersama-sama dengan indeks kualitas air dan indeks tutupan lahan akan menentukan nilai indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) yang akan menjadi indikator pencapaian kinerja program dan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pemerintah daerah. Pada kurun waktu 2016 hingga 2019, IKLH Kabupaten Dharmasraya masih masuk kategori kurang dengan nilai $58 \leq \text{IKLH} \leq 66$. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan nilai IKA, IKU dan ITH sehingga meningkatkan nilai IKLH kabupaten Dharmasraya dari 64,98 pada tahun 2016 menjadi 67,94 pada tahun 2020. Nilai IKLH tersebut masuk kedalam kategori cukup yaitu dengan nilai $66 \leq \text{IKLH} \leq 74$.

Tabel 2-78 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

No	Tahun	IKA	IKU	ITH/ IKL	IKLH	Keterangan
1	2016	56,67	84,17	45,23	64,98	Kurang
2	2017	51,82	84,64	39,95	61,41	Kurang
3	2018	50,00	84,28	38,26	60,20	Kurang
4	2019	53,64	86,01	49,78	61,81	Kurang
5	2020	52,73	91,90	49,77	67,94	Cukup

Keterangan :

- Index Pencemaran Air (IKA); Index Pencemaran Udara (IKU); Index Kualitas Lahan (IKTL)
- Perhitungan IKLH berdasarkan Surat Edaran Dirjen PPKL No.S.318/PPKL/SET/REN.O/12/2020 perihal Metode Perhitungan IKLH 2020-2024.
- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dihitung berdasarkan perumusan $\text{IKLH} = (0.376 \times \text{IKA}) + (0.405 \times \text{IKU}) + (0.219 \times \text{IKL})$

E. Cakupan Sumber Daya Alam Yang Terlindungi

Pada Indikator Sasaran Cakupan sumber daya alam yang terlindungi (kawasan Sumber Daya Air yang harus dilindungi). Pada akhir capaian renstra tahun 2020 sebagaimana di atas dapat diuraikan bahwa target yang akan dicapai ada 1 Kawasan (1 Ha) dari 200 Ha (0,005) dan terealisasi 1 kawasan (6 Ha) atau 600 persen . 1 kawasan yang dimaksud adalah kawasan Sungai Batang Timpeh dan Sungai Kuamang kec. Padang laweh. Meningkatnya capaian sebesar 600% (6 Ha) dari target 1 Ha dapat dijelaskan bahwa kegiatan ini dilakukan melalui CSR PT. SAK melalui PT. Megasawindo Perkasa yang ditanami dengan penghijauan dan konservasi disepanjang sungai Kuamang dan Batang Timpeh berupa tanaman kayu-kayuan.

Tabel 2-79 Cakupan Sumber Daya Alam yang Terlindungi di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Indikator Sasaran	Satuan	Target					Realisasi				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan Sumber Daya Alam yang terlindungi	Ha/Kawasan	1 kaw	1 kaw	1 kaw	5	1	1 kaw	1 kaw	1 kaw	4,8 Ha	6 Ha

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

F. Meningkatnya Luas Tutupan Lahan/Menurunnya Lahan Kritis

Berdasarkan Indikator Sasaran Meningkatnya luas tutupan lahan (menurunnya lahan kritis), maka pada akhir capaian renstra tahun 2020 dengan target yang akan dicapai sebesar 5 Ha dan terealisasi sebesar 6 Ha atau 120%. Adapun peningkatan luas tutupan lahan tersebut merupakan dampak dari penghijauan yang dilakukan pada kawasan Sungai Batang Timpeh dan Sungai Kuamang kec. Padang laweh yang merupakan kepedulian PT. SAK.

Tabel 2-80 Meningkatnya Luas Tutupan Lahan/Menurunnya Lahan Kritis Tahun 2016-2020

Indikator Sasaran	Satuan	Target					Realisasi				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Meningkatnya luas tutupan lahan/ Menurunnya lahan kritis	Ha	5	5	5	5	5	5	5	3,8	4,8	6

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

G. Cakupan Pengelolaan Sampah

Untuk memenuhi amanat Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah pada Kabupaten Dharmasraya dan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 40 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga

Selain dalam pelaksanaan operasional pelayanan persampahan pada perkotaan, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya juga sedang giatnya menggalakkan pengolaan sampah mulai dari sumbernya melalui program GENARSIH SEHATI dengan memberdayakan kelompok daswisma yang ada di Nagari. Terkait pembinaan dan operasional Bank Sampah, saat ini Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah berhasil mendorong 8 Unit Bank Sampah baik yang

dikelola oleh masyarakat. Dari Bank Sampah yang terbentuk sampai, tahun 2020 yang aktif ada sebanyak 6 (unit), tetapi yang beroperasi hanya sebanyak 4 (empat) unit bank Sampah yaitu Bank Sampah Sajati V (Tebing Tinggi, Pulau Punjung), Bank Sampah Sajati VI (Nagari Tiumang, Tiumang), Bank Sampah Sajati VII (Lubuk Bulang, Pulau Punjung) dan Bank Sampah Sajati VIII (Nagari Sungai Rumbai, Sungai Rumbai).

Dalam pelayanan persampahan selain dengan dana dari APBD dan retribusi juga dibantu dari dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari beberapa perusahaan yang ada di kabupaten Dharmasraya seperti kontainer, alat penjepit sampah, tumbler/botol minuman, tempat sampah, tempat sampah terpilah dan karung/goni.

Walaupun sudah tersedia tempat pembuangan sampah yang ada di pusat-pusat kawasan dan di jalan-jalan utama baik berupa TPS kontainer, TPS kayu, TPS batu, TPS kembar tapi masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya. Hal ini terlihat dari masih adanya pembuangan sampah di sembarang tempat, seperti ke sungai, pinggir jalan, lahan kosong dan sebagainya.

Pada Tabel disajikan target dan realisasi dari upaya pengelolaan sampah di Kabupaten Dharmasraya tahun 2016-2020, dimana pada tahun 2016-2018 data dan kondisi pengelolaan sampah masih belum terdata.

Tabel 2-81 Cakupan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Indikator Sasaran	Satuan	Target					Realisasi				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Pengurangan Sampah (Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali)	persen	-	-	-	10	10	-	-	-	8,31	8,92
Penanganan Sampah (Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota)	persen	-	-	-	7	8	-	-	-	6,10	6,72

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

H. Cakupan Ketaatan Usaha dan/atau Kegiatan Dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)

Tabel 2-82 Cakupan Ketaatan Usaha dan/atau Kegiatan Dalam Pengelolaan Limbah B3 di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Indikator Sasaran	Satuan	Target					Realisasi				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan ketaatan usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan limbah B3	usaha/kegiatan	0	0	50	50	50	0	0	22	25	29

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

Berdasarkan Cakupan ketaatan usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), maka terjadi penurunan kegiatan usaha yang mengelola limbah B3 yaitu dari target 50 usaha/kegiatan dan realisasi sebesar 29 usaha/kegiatan dengan tingkat capaian sebesar 58 persen.

2.3.2.6. *Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil*

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu: persentase kepemilikan KTP elektronik, cakupan kepemilikan akte kelahiran, penerbitan kartu identitas anak. Tiga indikator ini telah ditetapkan menjadi indikator kinerja secara nasional. Kemudian indikator lain yaitu cakupan akte kematian. Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Direktorat Administrasi Kependudukan telah menetapkan target nasional untuk rekam KTP elektronik untuk penduduk diatas usia 17 tahun yaitu 100%(2019) dan 98% (2020). Untuk cakupan kepemilikan akte kelahiran penduduk usia 0-18 tahun 85% tahun 2019 dan 92% tahun 2020 serta penerbitan kartu identitas anak tahun 2019 yaitu telah melaksanakan penerbitan dan tahun 2020 sebesar 20%.

A. Persentase kepemilikan KTP-eletronik

*Tabel 2-83 Persentase kepemilikan KTP-elektronik
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020*

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase kepemilikan KTP-elektronik	persen	93,11	94,23	98	99,23	97,74
Kepemilikan KTP-el		111.771	131.011	140.801	147.757	149.352
Wajib KTP-el (usia 17 tahun keatas)		120.042	139.033	143.675	148.739	152.911

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

Sebagaimana terlihat pada Tabel 2-83 bahwa kepemilikan KTP elektronik di Kabupaten Dharmasraya tahun 2019 yaitu hampir mendekati 100% yaitu 99,23% sedangkan pada tahun 2020 sebesar 97,74%. Artinya kinerja daerah dalam indikator ini hamper mendekati target nasional.

B. Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

*Tabel 2-84 Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020*

Indikator	Satuan	2018	2019	2020
Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	persen	2,4	27,40	35,55
Jumlah anak memiliki KIA		1.496	18.255	25.026
Jumlah Anak Usia 0-17 tahun		62.340	66.610	69.398

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

Target kinerja untuk peneribitan Kartu Identitas Anak (KIA) secara nasional baru dimulai pada tahun 2020 yaitu sebesar 20%, dan sebelumnya pemerintahan daerah dalam hal ini Dinas

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota hanya diberikan target berupa telah melaksanakan penerbitan dan tidak diberikan target jumlah. Berdasarkan Tabel 2.30 terlihat bahwa penerbitan KIA telah dimulai di Kabupaten Dharmasraya sejak tahun 2018 dengan capaian 2,4% dan mengalami peningkatan yang drastis menjadi 27,40% tahun 2019 dan menjadi 35,55% pada tahun 2020 yaitu melampaui target nasional 20%.

C. Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran pada Penduduk Usia 0-17 Tahun

Untuk cakupan kepemilikan akte kelahiran bagi penduduk usia 0-17 tahun di Kabupaten Dharmasraya sebesar 85,73% tahun 2018 dan telah diatas target nasional, sementara pada tahun 2020 sebesar 87,17% dan lebih kecil dari target nasional yaitu 92%. Hal ini disebabkan oleh masih banyak orang tua dari anak tidak dapat memenuhi salah satu persyaratan dalam pengurusan akte kelahiran dikarenakan tidak lengkapnya dokumen kependudukan lainnya seperti surat nikah. Permasalahan ini telah diatasi melalui kerjasama dengan Pengadilan Agama yaitu melakukan isbat nikah bagi muslim dan pencatatan akte perkawinan bagi penduduk non-muslim.

Tabel 2-85 Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran pada Penduduk Usia 0-17 Tahun Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran pada Penduduk Usia 0-17 Tahun	persen	75,21	76,3	80,12	85,73	87,17
Jumlah Anak yang memiliki akta	Orang	45.236	48.413	55.264	61.103	65.506
Jumlah Anak Usia 0-18 tahun	orang	60.146	63.451	68.976	71.274	75.062

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

D. Persentase Cakupan Akta Kematian dari Peristiwa Kematian yang dilaporkan

Salah satu dokumen kependudukan yang jarang diurus oleh masyarakat yaitu akta kematian, meskipun bagi profesi tertentu akte kematian sangat dibutuhkan misalnya terkait dengan hak pension, warisan dan lain sebagainya.

Tabel 2-86 Persentase Cakupan Akta Kematian dari Peristiwa Kematian yang dilaporkan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Cakupan Akta Kematian dari Peristiwa Kematian yang dilaporkan	persen	85	-	90,67	95,23	100
Jumlah Akta Kematian yang diterbitkan		200	-	564	603	2.867
Jumlah Kematian yang dilaporkan		235	-	622	655	2867

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

Pada Tabel 2-84 terlihat bahwa tingkat kesadaran masyarakat dalam mengurus akte kematian sudah sangat baik dan hal ini sangat didukung oleh kerjasama dan keaktifan pemerintahan nagari dalam melaporkan peristiwa kematian ke Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya. Fungsi dari akte kematian, juga diperlukan dalam mengurangi anomaly jumlah pendudukan, dimana penduduk yang telah meninggal dunia masih berstatus aktif karena tidak bisa dihapus apabila tidak memiliki akte kematian. Bagi pendudukan anomaly, maka hak-haknya dalam mendapatkan bantuan dari pemerintah secara de jure masih ada, meskipun secara de facto yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Hal ini tentu akan berdampak terhadap ketidakakuratan data kependudukan dan terjadinya pemborosan anggaran dalam pelaksanaan program kerja pemerintah. Bahkan kondisi data anomaly juga bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu secara ilegal dalam penyelenggaraan pemerintahan seperti adanya bantuan fiktif, pemilih fiktif dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah sehingga mengurangi kualitas demokrasi.

2.3.2.7. *Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa*

Dilihat dari perkembangan setiap tahunnya, persentase nagari tertinggal dan sangat tertinggal mengalami penurunan yang berarti semakin sedikit jumlah nagari tertinggal dan sangat tertinggal.

Tabel 2-87 Persentase Nagari Tertinggal dan Sangat Tertinggal Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase nagari tertinggal dan sangat tertinggal	Persen	55.76	55.76	25	23.07	7.69
Jumlah Nagari Tertinggal dan Sangat Tertinggal	Nagari	29	29	13	12	4
Jumlah Nagari Seluruhnya	nagari	52	52	52	52	52

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

Pada tahun 2016 jumlah nagari yang tertinggal dan sangat tertinggal ada sebanyak 29 nagari, hal ini telah mencapai target yang sudah ditetapkan. Pada tahun 2017-2019 belum mencapai target dan pada tahun 2020 sudah mencapai target yang ditetapkan dengan jumlah nagari yang tertinggal dan sangat tertinggal hanya tertinggal 4 (empat) Nagari.

2.3.2.8. *Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana*

A. Angka Kelahiran Total

Angka Kelahiran Total atau Total Fertility Rate (TFR) didefinisikan sebagai jumlah kelahiran hidup laki-laki dan perempuan tiap 1.000 penduduk yang hidup hingga akhir masa reproduksinya dengan catatan

Tabel 2-88 Angka kelahiran total Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Angka kelahiran total	PER 1.000 penduduk	2,71	2,69	2,66	2,64	2,62

Sumber : Dinas SOSP3APPKB Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

B. Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Cpr)

Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) adalah perbandingan antara PUS yang menjadi peserta KB aktif (peserta KB yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi) dengan jumlah PUS, dinyatakan dalam persentase. Indikator ini berguna untuk mengukur perbaikan kesehatan ibu melalui pengaturan kelahiran. Indikator ini juga digunakan sebagai proksi untuk mengukur akses terhadap pelayanan reproduksi kesehatan yang sangat esensial. Berdasarkan Tabel 2-83 terlihat bahwa CPR Kabupaten Dharmasraya tahun 2016-2020 mengalami kenaikan.

*Tabel 2-89 Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (CPR)
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020*

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (CPR)	Persen	81,1	81,15	81,2	81,25	81,3

Sumber : Dinas SOSP3APPKB Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

Penelitian Putri, et al (2019) menemukan bahwa pemakaian kontrasepsi modern mempunyai efektifitas mencegah kehamilan $\geq 93\%$ sedangkan metode kontrasepsi tradisional mempunyai efektifitas mencegah kehamilan $\geq 73\%$. Hal ini memberikan indikasi bahwa upaya untuk mengedukasi PUS untuk memakai metode kontrasepsi modern masih perlu ditingkatkan agar semakin efektif mencegah kehamilan.

C. Persentase Kebutuhan Ber-KB (Unmet-Need)

Unmet need adalah kebutuhan Pasangan usia subur untuk ber KB tetapi kebutuhan tersebut tidak terpenuhi. Kebutuhan tersebut adalah tidak ingin anak lagi atau ingin menjarangkan kehamilan berikutnya tetapi PUS tidak memakai alat kontrasepsi.

*Tabel 2-90 Persentase kebutuhan ber-KB (unmet-Need)
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020*

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase kebutuhan ber-KB (unmet-Need)	%	10,29	10,27	10,25	10,23	10,21

Sumber : Dinas SOSP3APPKB Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

D. Persentase Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Aktif

UPPKS adalah program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga yang dikembangkan melalui usaha ekonomi mikro dengan sasaran keluarga, khusus nya keluarga Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I. Sasaran UPPKS adalah peserta KB, pasangan usia subur khususnya Keluarga Pra Sejahtera (KPS) dan Keluarga Sejahtera I (KS I).

Tabel 2-91 Persentase kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) aktif Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
persentase kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) aktif	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas SOSP3APPKB Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

E. Persentase Kelompok Tribina Yang Aktif

Kelompok tribina terdiri tiga aktivitas, yaitu Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL). Adapun penjelasan mengenai ketiga aktivitas tersebut adalah sebagai berikut :

- Bina keluarga balita adalah kegiatan yang khusus mengelola tentang pembinaan tumbuh kembang anak melalui pola asuh yang benar berdasarkan kelompok umur, yang dilaksanakan oleh sejumlah kader dan berada ditingkat Desa.
- Bina Keluarga Balita (BKB) adalah upaya peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan kesadaran ibu serta anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang balitanya melalui rangsangan fisik, motorik, kecerdasan, sosial, emosional serta moral yang berlangsung dalam proses interaksi antara anggota keluarga lainnya dengan anak balita
- BKL adalah kelompok kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga yang memiliki lanjut usia dalam pengasuhan, perawatan dan pemberdayaan lansia agar dapat meningkatkan kesejahteraannya

Tabel 2-92 Persentase kelompok tribina yang aktif Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
persentase kelompok tribina yang aktif	%	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas SOSP3APPKB Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

2.3.2.9. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Untuk urusan pemerintahan bidang perhubungan, saat ini pemerintah Kabupaten Dharmasraya baru memberikan layanan pada pemberian izin kir (keur) kendaraan wajib uji. Untuk trayek angkutan masih belum ada yang menjadi kewenangan daerah mengingat angkutan umum yang ada baru sebatas angkutan antar kota antar kabupaten dan anatar kota antar provinsi yang melintasi kabupaten Dharmasraya. Selain itu saat ini Dharmasraya juga belum memiliki terminal bus sebagai titik pergantian antar moda dan naik turun penumpang angkutan umum.

Mengingat layanan bidang perhubungan saat ini baru pada pelayanan di UPT Uji Kendaraan bermotor mengingat belum adanya trayek angkutan umum dan terminal, sehingga berdasarkan Tabel 2-94 memperlihatkan bahwa tingkat capaian yang diperoleh dari setiap indikator kinerja sudah menunjukkan peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Dilihat dari permasalahan yang dilalui, keterlibatan antar bidang untuk menunjang tercapainya kinerja perhubungan pentingnya kinerja SDM dibagian lalu lintas dan angkutan, maka dari itu pelatihan diklat sangat penting untuk tenaga personil.

Tabel 2-93 Banyaknya Kendaraan Bermotor Wajib Uji Tahun 2020

No	Jenis Kendaraan	Golongan	Pribadi	Umum	Dinas	Jumlah
A	Mobil Bus					
1	Bus Sedang	V	-	1	5	6
2	Bus Besar	IV	5	-	-	5
B	Mobil barang					
1	Pick Up	IV	940	-	17	957
2	Truk Sedang	V	74	188	-	262
3	Truk besar	VI	73	215	-	288
4	Truk Tronton	VII	-	-	-	-
	Jumlah		1.092	404	22	1.518

Sumber : BPS Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

UPTD Pelayanan Pendapatan Propinsi di Dharmasraya (Samsat)

Tabel 2-94 Capaian Urusan Bidang Perhubungan Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah kasus kecelakaan	-	64	78	87	76	88
Akreditasi unit pengujian kendaraan bermotor	bobot	-	-	C	C	B
Persentase angkutan barang yang melakukan uji KIR	persen	-	78,76	75	60	87

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

Namun masih tingginya angka kecelakaan sangat ditunjang oleh kelengkapan prasarana keselamatan fasilitas perhubungan seperti pengadaan rambu-rambu, pengadaan lokasi parkir, marka jalan, serta lampu jalan kedepannya.

Dengan tersedianya akses ke seluruh wilayah Dharmasraya, juga memungkinkan meningkatnya kendaraan yang melakukan uji KIR yang berujung dengan lebih baiknya pengawasan dibidang transportasi yang layak dan meningkatnya PAD, karena sudah didukung dengan fasilitas yang baik dan tenaga SDM dengan lulusan khusus pengujian.

2.3.2.10. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika

A. Persentase sarana pemerintah daerah yang memiliki telekomunikasi terintegrasi

Berdasarkan indikator pemerintah daerah yang memiliki telekomunikasi terintegrasi, maka hal ini sudah terealisasi 100 persen pada tahun 2020. Hal ini merupakan dampak dari pandemi covid-19 yang membatasi kegiatan secara langsung. Oleh karena itu, untuk memberikan pelayanan yang maksimal dan meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah maka diperlukan suatu perangkat telekomunikasi disetiap OPD. Adapun untuk mendukung penyediaan perangkat telekomunikasi ini maka pemerintah daerah mengambil kebijakan untuk pengalihan sebagian anggaran untuk penanganan Covid-19 termasuk penyediaan sarana telekomunikasi.

Tabel 2-95 Persentase Sarana Pemerintah Daerah yang Memiliki Telekomunikasi Terintegrasi di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase perangkat daerah yang memiliki jaringan terintegrasi	%	0	0	54,05%	78,95%	100%	100%

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

B. Jumlah sistem informasi dan aplikasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik

Indikator Jumlah sistem informasi dan aplikasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik diuraikan menjadi 3 sebagai berikut:

1. Persentase jumlah OPD yang memiliki website dan melakukan pembaharuan informasi minimal 1 kali sebulan
2. Persentase nagari yang memiliki website dan melakukan pembaharuan informasi minimal 1 kali sebulan
3. Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi di tingkat Nagari

Tabel 2-96 Jumlah Sistem Informasi dan Aplikasi Dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase jumlah OPD yang memiliki website dan melakukan pembaharuan informasi minimal 1 kali sebulan	%	0	0	32,43	50	94,74	100
2.	Persentase nagari yang memiliki website dan melakukan pembaharuan informasi minimal 1 kali sebulan	%	0	0	15,30	100	100	100
3.	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi di tingkat Nagari	%	0	0	11,53	21,00	21,00	21,00

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

Berdasarkan realisasinya indikator dua indikator sudah tercapai 100 persen pada akhir tahun 2020, namun untuk indikator cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi di tingkat nagari hanya tercapai sebesar 21 persen.

Kondisi bidang Komunikasi dan Informatika di Kab. Dharmasraya saat ini, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Masih belum terpenuhinya infrastruktur telekomunikasi di Kabupaten, masih ada beberapa wilayah *blank spot* yang memerlukan perhatian khusus agar masyarakat di wilayah tersebut segera mendapatkan akses telekomunikasi.

Swasta juga mengambil peran dengan mendirikan menara-menara seluler oleh operator BTS di wilayah kecamatan di seluruh Kabupaten Dharmasraya, sehingga *blank spot* terus berkurang. Dengan fasilitas komunikasi yang memadai, akan menjamin pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam berkomunikasi. Wilayah blank spot di Kabupaten Dharmasraya yang masih ada yaitu Nagari Banai Kec Sembilan Koto, Nagari Lubuk Karak Kec Sembilan Koto, Nagari Ranah Palabi Kec Timpeh, dan Nagari Alahan Nan Tigo Kec Asam Jujuhan.

2. Berdirinya radio-radio swasta yang tersebar di berbagai wilayah di Kabupaten Dharmasraya selain memberikan hiburan secara gratis kepada masyarakat, juga memberikan informasi tentang berbagai potensi, kebijakan, program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, namun sejak majunya akses internet perkembangan radio menjadi lebih sulit yang saat ini hanya eksis 2 unit saja.
3. untuk menjembatani informasi antara masyarakat dan pemerintah dalam penyebaran informasi dan penyerapan aspirasi, maka dibentuklah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), yang merupakan mitra kerja pemerintah dalam melaksanakan pembangunan seluruh masyarakat. KIM adalah lembaga layanan publik yang dibentuk dan dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat yang berorientasi pada layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Di Kabupaten Dharmasraya baru terdapat 11 kelompok KIM, dimana terdapat 1 kelompok di setiap kecamatan.
4. Pengembangan *E-Government* merupakan upaya untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik agar lebih efektif dan efisien.
Pembangunan infrastruktur jaringan internet di Kabupaten Dharmasraya terus dilakukan dan diupayakan pengembangannya sehingga memungkinkan terkoneksi OPD se Kabupaten Dharmasraya dalam jaringan internet/intranet sehingga transformasi data/informasi antara masing-masing unit kerja dapat berjalan lancar. Saat ini sudah seluruh OPD terkoneksi melalui Dinas Komunikasi dan Informatika, namun kualitas koneksi masih rendah. Ke depan perlu dilakukan peningkatan kualitas koneksi dan peningkatan koneksi di UPT kesehatan, UPT pendidikan, UPT pertanian, UPT PUPR, UPT DLH dan lainnya. Peningkatan koneksi ini akan mewujudkan pelayanan *smart city*.
5. Layanan *Maintenance* Jaringan Internet OPD merupakan layanan pemeliharaan jaringan internet di OPD yang mengalami hambatan baik akibat cuaca ataupun lainnya. Fasilitasi akses koneksi internet dan intranet bagi seluruh institusi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
6. Peningkatan informasi OPD dilakukan pembuatan website di OPD dan Nagari setiap tahun, saat ini seluruh organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk Kecamatan dan Nagari telah memiliki website dan dimasa yang akan datang akan ditingkatkan up date informasinya. Khusus website OPD Dinas Komunikasi dan Informatika dan website induk Kabbupaten Dharmasraya dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

2.3.2.11. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

A. Persentase Koperasi Aktif

Suatu koperasi dianggap aktif jika secara kelembagaan dan usaha telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) minimal sekali dalam tiga tahun terakhir.

Tabel 2-97 Persentase Koperasi Aktif Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Koperasi Aktif	%	55,07	45,27	38,42	39,22	33,33
Jumlah koperasi yang RAT	Koperasi	114	91	78	80	68
Jumlah koperasi seluruhnya	Koperasi	207	201	203	204	204

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

Pada Tabel 2-97 terlihat bahwa persentase jumlah koperasi yang aktif menurun setiap tahun selama periode 2016 – 2020. Jumlah koperasi aktif pada tahun 2016 sebanyak 55,07% pada tahun 2016, menurun menjadi 33,33% pada tahun 2020. Namun demikian jumlah koperasi dengan kategori sehat meningkat tajam sejak tahun 2018.

B. Jumlah Koperasi Sehat

Sebagai badan usaha, koperasi membutuhkan manajemen yang baik agar tujuan koperasi tercapai dengan baik dan benar. Hal yang membedakan koperasi dengan badan usaha lainnya terletak pada unsur manajemen organisasi yang menggerakkan operasional koperasi yakni pengurus, pengelola dan anggota. Koperasi merupakan ekonomi berbasis kerakyatan dan dengan kekuatan anggotanya koperasi dapat tangguh dan mandiri sehingga pengelolaan koperasi yang baik tidak bisa lepas dari kapasitas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia Pengurus maupun pengelolanya.

Pengelolaan koperasi seringkali menghadapi banyak permasalahan seperti lemahnya kualitas SDM pengurus dan pengelola koperasi, tingkat partisipasi anggota rendah, pengelola belum profesional, belum mampu mencari terobosan usaha baru, belum dapat memanfaatkan peluang usaha yang ada, penguasaan teknologi terbatas, pemasaran tidak maksimal dan struktur permodalan masih lemah/terbatas. Sehingga Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan terus melakukan perbaikan pengelolaan koperasi yang baik melalui pelatihan peningkatan kapasitas pengurus koperasi, sehingga dapat terus meningkatkan jumlah koperasi sehat dimana pada tahun 2020 sudah tercatat 30 unit koperasi yang sehat dimana sebelumnya hanya ada 6 unit koperasi yang sehat tercatat (Tabel 2-98).

Tabel 2-98 Jumlah Koperasi Sehat Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Koperasi Sehat	Koperasi	6	6	13	25	30

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

C. Persentase IKM dengan Peningkatan Omzet

Persentase IKM dengan Peningkatan Omzet adalah satu cara pengukuran untuk melihat perkembangan IKM yang ada di Dharmasraya. Dengan cara membandingkan jumlah Omzet IKM Tahun n dan di kurangi jumlah Omzet IKM tahun $n - 1$ di bagi jumlah Omzet IKM tahun $n-1$ di kali 100%

Tabel 2-99 Persentase IKM dengan Peningkatan Omzet Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2018	2019	2020
Persentase IKM dengan Peningkatan Omzet	%	7,78	6,62	6,50
Omzet IKM tahun n	Rupiah	92.999.751	96.836.486	103.170.000
Omzet IKM tahun $n - 1$	Rupiah	85.758.123	92.999.751	96.836.486

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

D. Jumlah Pelaku Usaha Mikro Naik Kelas

Pertumbuhan terhadap pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Dharmasraya mengalami pertumbuhan cukup pesat sejak empat tahun terakhir. Berdasarkan data pertumbuhan pelaku UMKM oleh dinas terkait, hingga pertengahan 2020 populasinya sudah mencapai 10.017 pelaku usaha atau naik hampir dua kali lipatnya dari 2016 dengan populasi sebanyak 5.188 orang.

Sementara persentase pelaku usaha Industri Kecil Menengah (IKM) dengan peningkatan omzet sudah berada pada posisi 6,62 persen atau naik sekitar 4 persen dari 2017 sebesar 2 persen. Hingga 2pelaku usaha mikro yang tercatat sudah naik kelas menjadi pelaku usaha kecil mencapai 34% atau naik sekitar 10% dari 2018. Namun pada tahun 2020 memang terjadi penurunan menjadi 22% yang bisa jadi disebabkan oleh adanya Pandemi Covid-19 sehingga terjadi perlambatan tersebut (Tabel 2-100).

Tabel 2-100 Jumlah pelaku usaha mikro naik kelas
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah pelaku usaha mikro naik kelas	unit	15	20	25	34	22

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

2.3.2.12. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

A. Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal

Realisasi Investasi Penanaman Modal di Kabupaten Dharmasraya tercatat menunjukan peningkatan dari tahun 2016-2019, namun pada tahun 2020 terlihat adanya penurunan yang dimungkinkan akibat pengaruh Pandemi Covid-19 yang sangat mempengaruhi setiap aspek kehidupan dan ekonomi masyarakat bahkan dunia.

Tabel 2-101 Nilai realisasi Investasi Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai realisasi Investasi	rupiah	527.868.200	291.101.280	3.557.285.000	160.860.163.587	148.462.000.000

Sumber : Dinas Penanaman Modal Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

2.3.2.13. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga

A. Jumlah cabang olahraga yang aktif

Pemerintah Kabupaten Dharmasraya terus mengembangkan potensi olahraga di Kabupaten Dharmasraya dan terus menggali potensi baru dalam pengembangan olahraga yang dimiliki daerah dalam memajukan dunia olahraga di Kabupaten Dharmasraya. Cabang olahraga yang cukup berkembang seperti TROI, karate, volly dan beberapa cabang lainnya secara umum sudah berkembang dan mampu memperkenalkan Dharmasraya di kancah nasional.

Tabel 2-102 Jumlah cabang olahraga yang aktif Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020
Jumlah cabang olahraga yang aktif	Kelp	29	30	32	33

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

2.3.2.14. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral

Pada urusan pemerintahan bidang statistik maka indikator yang digunakan adalah persentase ketersediaan data statistik sektoral. Berdasarkan capaian pada akhir tahun 2020, maka persentase ketersediaan data statistik sektoral adalah sebesar 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola data statistik sudah dilakukan dengan baik.

Tabel 2-103 Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral Tahun 2016-2020

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja			
		2017	2018	2019	2020
Persentase ketersediaan data Statistik sektoral	%	75%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

Dalam bidang statistik di Kab. Dharmasraya saat ini, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. **Wali data pada Forum Satu Data kabupaten Dharmasraya.** Dalam pengelolaan data statistik kabupaten yang tergabung dalam forum satu data Kabupaten Dharmasraya, maka Bidang Statistik yang berada di Dinas Kominfo berfungsi sebagai walidata, Bappeda Kabupaten Dharmasraya sebagai sekretariat Forum Satu Data dan BPS Kabupaten Dharmasraya sebagai Pembina data, dan perangkat daerah sebagai produsen data

2. **Perbanyak dokumen PDRB Kabupaten dan Statistik Dalam Angka.** selain berfungsi dalam pengelolaan data, bidang statistik memiliki tugas dalam memperbanyak dokumen statistik daerah yang akan digunakan oleh perangkat daerah dalam merumuskan kebijakan, perencanaan serta dalam rangka menunjang fungsi pengendalian dan evaluasi, baik di tingkat perangkat daerah maupun daerah secara keseluruhan
3. **Pembuatan website rumah data** <https://rumahdata.dharmasrayakab.go.id> yang digunakan untuk melakukan penyimpanan dan pengelolaan data statistik kabupaten
4. **Pembentukan dan pembinaan nagari statistik.** Kabupaten Dharmasraya merupakan Kabupaten pertama yang membentuk desa statistik di Indonesia yang berlokasi di nagari Sungai Duo Kecamatan Sitiung yang telah diluncurkan pada tanggal 4 September 2019, dan telah dilanjutkan untuk nagari statistik lainnya dan dikembangkan menjadi kecamatan statistik.

Dengan adanya ketersediaan data sektoral yang baik, serta didukung oleh data yang lengkap dari tingkat dnagari, maka diharapkan ini akan dapat memperbaiki ketersediaan dan keakuratan data terutama dari lingkup kewilayahan.

2.3.2.15. *Urusan Pemerintahan Bidang Persandian*

Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Sertifikat Digital

Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas seseorang dalam aktivitas secara Elektronik.

Tabel 2-104 Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Sertifikat Digital Tahun 2016-2020

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja		
		2018	2019	2020
Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah (Sertifikat Digital)	%	55,00	55,00	55,00

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

Dalam bidang persandian di Kabupaten Dharmasraya saat ini, dapat kami jelaskan sebagai berikut:

1. Bidang persandian merupakan bidang baru yang dibebankan kepada daerah dan terus dilakukan berbagai upaya persiapan terutama regulasi hukum dalam pelaksanaan.
2. Pengamanan aplikasi yang dibangun oleh OPD dan berada di pusat server Dinas Komunikasi dan Informatika diantaranya : Simda Keuangan, sub domain perangkat daerah, SKP online dan e-disiplin

2.3.2.16. *Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan*

Urusan pemerintahan bidang kebudayaan merupakan salah satu urusan strategis dalam konteks visi pembangunan Kabupaten Dharmasraya baik visi pembangunan jangka menengah (RPJMD) tahun 2021-2026 maupun visi pembangunan jangka panjang tahun 2005-2025. Merujuk kepada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, pada Tabel 2-105 terdapat tiga indikator untuk melihat sejauhmana capaian kinerja urusan bidang kebudayaan.

Secara lebih rinci dapat dijelaskan bahwa jumlah group kesenian daerah yang dilestarikan mengalami peningkatan dari 25 group pada tahun 2018 menjadi 30 group pada tahun 2020. Kemudian, lembaga adat yang aktif juga mengalami peningkatan dari 85% tahun 2018 menjadi 100% pada tahun 2020. Selanjutnya jumlah cagar budaya yang telah ditetapkan terus bertambah dari 11 cagar budaya pada tahun 2019 dan 26 cagar budaya pada tahun 2020.

Tabel 2-105 Indikator Kinerja Bidang Kebudayaan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2018	2019	2020
Jumlah group kesenian daerah yang dilestarikan	Grup	25	30	30
Persentase lembaga adat yang aktif	Persen	85	90	100
Jumlah cagar budaya yang ditetapkan	unit	-	11	26

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

2.3.2.17. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

A. Jumlah pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan

Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan

Tabel 2-106 Jumlah pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan	orang	17.136	22.447	127.084	157.579	67.742

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

B. Persentase perpustakaan yang melaksanakan manajemen perpustakaan

Perpustakaan yang dimaksud adalah perpustakaan daerah, perpustakaan sekolah maupun perpustakaan yang dikelola oleh masyarakat. Sedangkan Manajemen perpustakaan adalah suatu proses dan upaya mencapai tujuan perpustakaan dengan mengatur dan memanfaatkan sumber daya perpustakaan yang dimiliki berupa manusia, dana, perlengkapan dan koleksi perpustakaan sehingga dapat menghasilkan karya, fungsi, peran, dan keahliannya masing-masing

Tabel 2-107 Persentase perpustakaan yang melaksanakan manajemen perpustakaan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase perpustakaan yang melaksanakan manajemen perpustakaan	Persen	20,22%	2,94%	7,72%	8,09%	6,25%

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

2.3.2.18. *Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan*

Capaian kinerja dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kearsipan dapat dilihat dari dua indikator sasaran yaitu persentase perangkat daerah dan nagari yang mengelola arsip secara baku.

A. Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku

Pada Tabel 2-108 digambarkan bahwa persentase perangkat daerah yang telah mengelola arsip secara baku mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 yaitu dari 8,11 % menjadi 39,47%. Ke depan, upaya peningkatan pengelolaan arsip masih harus ditingkatkan karena masih terdapat sebanyak 60,53% dari jumlah perangkat daerah yang belum mengelola arsip secara baku.

Tabel 2-108 Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen	8,11%	7,89%	7,89%	7,89%	39,47%

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

B. Persentase Nagari yang mengelola arsip secara baku

Pada Tabel 2-101 digambarkan bahwa persentase pemerintahan nagari yang telah mengelola arsip secara baku mengalami peningkatan dari 0% pada tahun 2016 meningkat menjadi 17,31% pada tahun 2020. Sama halnya dengan kinerja pengelolaan arsip di tingkat perangkat daerah, maka upaya peningkatan pengelolaan arsip di Nagari masih harus ditingkatkan karena masih terdapat sebanyak 82,69% nagari belum mengelola arsip secara baku.

Tabel 2-109 Persentase Nagari yang mengelola arsip secara baku Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Nagari yang mengelola arsip secara baku	Persen	0%	1,92%	5,77%	11,54%	17,31%

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

Berdasarkan uraian dari Tabel 2-108 dan Tabel 2-109 terlihat bahwa tantangan dalam pengelolaan arsip di Kabupaten Dharmasraya masih cukup berat. Secara umum problem-problem pengelolaan urusan pemerintahan bidang kearsipan yaitu masih kurang pemahaman dan kesadaran tentang arti pentingnya atau vitalnya keberadaan arsip dalam kerangka kerja suatu administrasi. Tertib administrasi yang diharapkan akan hanya menjadi slogan semata apabila tidak dimulai dari tertib kearsipan (Hakim, 2015; 115).

Kemudian, manajemen kearsipan di era digital juga mengalami perubahan dan membutuhkan pendekatan yang berbeda. Minimal ada tiga hal penting yang sangat diperlukan dalam pengelolaan arsip di era teknologi informasi dan digitalisasi yaitu: (1) sumberdaya manusia yang memiliki wawasan ilmu kearsipan, agar benar-benar kompeten, mampu dan terampil saat mengelola arsip. (2) Perangkat baik perangkat keras maupun perangkat lunak, saat ini media

penyimpanan arsip sudah dan akan banyak beralih dari media penyimpanan konvensional (hard copy) ke media elektronik (soft copy).

Di era pengelolaan arsip digital pengelolaan arsip sudah berbentuk data base dan big data sehingga mudah untuk ditemukan kembali arsipnya yang sama dengan dokumen aslinya dengan hasil arsip berbentuk visual. (3) ruangan, ketika sudah memiliki hard ware dan soft ware, dibutuhkan ruangan untuk menempatkan perangkat. Ruangan yang dibutuhkan tentu berbeda ketika arsip telah didigitalisasi dengan belum digitalisasi.

2.3.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

2.3.3.1. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Produksi Perikanan

Perikanan merupakan salah satu sumberdaya alam yang ada di Kabupaten Dharmasraya yang dapat menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat. Produksi Perikanan adalah hasil yang diperoleh dari aktivitas/kegiatan baik budidaya ikan maupun penangkapan ikan. Ikan itu sendiri merupakan salah satu sumber pangan yang bernilai gizi tinggi yang terdapat dalam lingkungan perairan baik perairan umum, lautan maupun dalam lingkungan budidaya.

Seiring dengan penambahan penduduk, kebutuhan masyarakat akan sumber pangan yang bergizi salah satunya ikan juga semakin meningkat. Mengharapkan ketersediaan dari hasil tangkapan, merupakan hal yang tidak mungkin dilakukan dikarenakan populasi ikan di perairan umum dan lautan mengalami penurunan akibat adanya kerusakan lingkungan dan tingginya eksploitasi terhadap ikan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam rangka penyediaan ikan untuk kebutuhan masyarakat adalah melalui kegiatan budidaya.

Produksi perikanan Kabupaten Dharmasraya sebagian besar berasal dari kegiatan budidaya ikan. Dukungan sumberdaya alam seperti luasan area untuk kolam ikan, sumberdaya air yang berasal dari irigasi ataupun sungai serta dukungan infrastruktur perikanan yang telah dibangun oleh pemerintah mampu untuk mendukung pengembangan budidaya ikan di daerah. Sedangkan untuk produksi perikanan tangkap dari masa ke masa terus mengalami penurunan. Hal ini akibat dari menurunnya kualitas lingkungan perairan umum seperti pencemaran air, penambangan pasir dan illegal minning serta aktivitas penangkapan dengan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan.

Tabel 2-110 Produksi Perikanan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Produksi Perikanan	Ton	19.366	15.562	17.042	19.597	22.185

Sumber : Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

Capaian Produksi Perikanan Kabupaten Dharmasraya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan sebagai akibat dari semakin meningkatnya luasan usaha budidaya seperti kolam ikan, kolam terpal, perkembangan teknologi budidaya ikan seperti budidaya Bioflok, peningkatan pengetahuan masyarakat dalam budidaya ikan dan dukungan pembangunan infrastruktur pendukung Perikanan yang disediakan oleh Pemerintah sehingga dapat berkembang dengan baik. Akan tetapi melihat dukungan potensi Perikanan yang dimiliki, masih banyak hal yang dapat dikembangkan dan diusahakan dalam sektor tersebut.

2.3.3.2. *Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata*

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang dapat diandalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah dan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah jika dapat dikelola dengan baik.

Di Kabupaten Dharmasraya, salah satu bentuk wisata yang potensial untuk dikembangkan adalah wisata budaya karena Kabupaten Dharmasraya kaya akan seni budaya daerah, adat istiadat, dan peninggalan sejarah terdahulu. Keinginan wisatawan untuk berkunjung ke Kabupaten Dharmasraya cukup besar

A. Jumlah kunjungan wisatawan

Tabel 2-111 Jumlah kunjungan wisatawan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah kunjungan wisatawan	orang	-	31.034	35.423	37.830	6.164

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

Dari Tabel 2-111 memperlihatkan adanya peningkatan jumlah wisatawan selama 4 tahun terakhir. Pada tahun 2017 sampai 2019 terjadi peningkatan jumlah wisatawan sebanyak 6.796 wisatawan. Pada tahun 2020 terjadi penurunan jumlah wisatawan akibat dampak pandemi Covid-19.

Tabel 2-112 Jumlah kunjungan wisatawan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

NO	Nama Objek Wisata	Jenis Objek	Lokasi yang terinci	Jarak tempuh dari ibukota
A.	Kec. Sembilan Koto			
1	Timbulun Lubuak Labu	Wisata Alam	Nagari Banai	50 Km
2	Air terjun Barangin	Wisata Alam	Nagari lubuak Karak	45 Km
3	Lubuk Ikan Larangan	Wisata Alam		45 Km
4	Makam Ninik Tuo	Wisata Religi		55 Km
B.	Kec. Pulau Punjung			
5	Bukik Tambun	Wisata Olahraga	Nagari Kampung Surau	5 Km
6.	Goa Ngalau Sungai Suko	Wisata Alam	Nagari Gunung Selasih	7 Km
	Pemandian Dufana	Wisata Buatan	Sungai Kambut	4 Km
	Pemandian Dua Saudara	Wisata Buatan	Kubang Panjang	4 Km
7.	Timbulun Indah	Wisata Bahari	Taratak Pulau Punjung	1 Km
8.	Bendungan Batu Bakawuik	Wisata Bahari	Sungai Kambuik	7 Km
9.	Goa Cigak	Wisata Alam	Kampung Surau	30 Km
10.	RM.Rajo Sungai Dareh	Wisata Sejarah	Sungai Dareh	1 Km
11.	Bendungan Batang Mimpai	Wisata Bahari	Sei Dareh	2 Km
12	Hot Spiring Sungai Belit	Wisata alam	Sungai Belit	5 Km
13	Gua Cigak	Wisata Alam	Kampung Surau	13 Km
14	Rumah Gadang Rajo Pulau Punjung	Wisata Budaya	Pulau Punjung	1 Km
15	Rumah Gadang Puti Bulian	Wisata Budaya	Sungai Dareh	1 Km
16	Embung Ampang Kamang	Wisata Buatan	Sungai Kilang	5 Km
17	Candi Rambahan	Wisata Sejarah	Lubuk Bulang	20 Km
18	Tugu PRRI	Wisata Sejarah	Sungai Dareh	1 Km
19	Savana Padang Darek	Wisata Alam	Pulau Punjung	4 Km
20	Ruang Terbuka Hijau	Wisata Buatan	Sungai Kambut	4 Km
21	Taman Bambu	Wisata eco & edukasi	Tebing Tinggi	8 Km
	Taman Hiburan	WISATA ECO	Pulau Punjung	7 Km
C.	Kec. Sitiung			
22	Rumah Gadang Siguntur	Wisata Sejarah	Siguntur, Nagari Siguntur	15 Km
23	Pemandian Ajo Manenggang	Wisata Buatan	Pisang Berebus	15 Km

NO	Nama Objek Wisata	Jenis Objek	Lokasi yang terinci	Jarak tempuh dari ibukota
24	Pemandian Lawai	Wisata Buatan	Gunung Medan	20 Km
25	Goa Ngalau Sungai Sariak	Wisata Alam	Siguntur	13 Km
26	Goa Ngalau Timbek	Wisata Alam	Siguntur	7 Km
27	Aia Timbua	Wisata Alam	Siguntur	15 km
28	Mesjid Tua dan Makam-Makam Raja Siguntur	Wisata Sejarah	Siguntur, Nagari Siguntur	5 Km
29	Candi Padang Roco	Wisata Sejarah	Sei Langsung, Nagari Siguntur	17 Km
30	Candi Pulau Sawah	Wisata Sejarah	Siguntur, Nagari Siguntur	15 Km
31	Batik Tanah Liek	Minat Khusus	Blok B	30 Km
32	Rumah Gadang Siguntur	Wisata Sejarah	Siguntur, Nagari Siguntur	15 Km
33	Puncak Gunung Medan	Wisata Alam	Gunung Medan	20 Km
34	Candi Awank Mombiak	Wisata Sejarah	Siguntur, Nagari Siguntur	15 Km
35	Sungai Pulai	Wisata Olahraga	Pulai	30 Km
36	Gelanggan Olahraga Dharmasraya	Wisata Olahraga	Gunung Medan	18 Km
37	Pemandian Ajo Manenggang	Wisata Buatan	Pisang Berebus	15 Km
38	Pemandian Lawai	Wisata Buatan	Gunung Medan	20 Km
D.	Kec. Timpeh			
39	Air Terjun Sungai Banang	Wisata alam	Timpeh	40 Km
40	Goa Sungai Pinang	Wisata Alam	Timpeh	35 Km
41	Goa Gadang Timpeh	Wisata Alam	Timpeh	40Km
42	Air Terjun Tujuh Tingkat	Wisata Alam	Tabek	35 Km
43	Puncak Timpeh	Wisata Alam	Tabek	30 Km
E.	Kec. Koto Baru			
44	Makam Syekh Alif Ba	Wisata Religi	Ampang Kuranji	35 Km
45	Talago Baranang Siang	Wisata Bahari	Pulau Maianan	30 Km
46	Danau Cinta	Wisata Air	Koto Baru	30 Km
47	Makam Nenek Susu Tunggal	Wisata Religi	Ampang Kuranji	35 Km
F.	Kec. Padang Laweh			
48	Rumah Gadang Padang Laweh	Wisata Sejarah	Padang Laweh	42 Km
G.	Kec. Koto Besar			
49	Bendungan Batang Siat	Wisata Bahari	Abai Siat	35 Km

NO	Nama Objek Wisata	Jenis Objek	Lokasi yang terinci	Jarak tempuh dari ibukota
50	Rumah Kerajaan Koto Besar	Wisata Sejarah	Koto Besar	45 Km
51	Embung Koto Ranah	Wisata Buatan	Koto Besar	45 Km
H.	Kec. Asam Jujuhan			
52	Air Terjun Sungai Suyiu	Wisata Alam	Sungai Suyiu	60 Km
53	Sungai Batu Kangkung	Wisata Olahraga	Batu Kangkung	63 Km
I.	Kec. Koto Salak			
54	Pulau Cinta	Wisata Bahari	Pulau Mainan	55 Km
55	Kec. Sungai Rumbai			
56	Pondok Isehan Rawa Tulang	Wisata Buatan	Sungai Rumbai	55 km

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

Potensi wisata Kabupaten Dharmasraya tersebar di 9 (sembilan) kecamatan dari 11 kecamatan yang ada yang terdiri dari wisata sejarah dan budaya, wisata alam dan wisata buatan. Pengembangan wisata terus dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Dharmasraya dengan memperkenalkan berbagai objek wisata dan event wisata di tingkat regional maupun nasional. Sebelum aondemi Covid-19 Pemerintah Dharmasraya sudah mengadakan berbagai event bertaraf nasional, diantaranya festival Pamalayu untuk memperkenalkan potensi wisata yang ada di Dharmasraya.

B. Jumlah pelaku ekonomi kreatif

Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif

Tabel 2-113 Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020
Jumlah pelaku ekonomi kreatif	unit	650	700	750	800

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

Tabel 2-113 jumlah pelaku ekonomi kreatif semakin meningkat selama 4 tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin terbukanya peluang bagi pelaku industry kreatif dalam beinovasi baik disisi produk maupun makin besarnya peluang pasar. Kondisi ini dapat menjadi peluang bagi peningkatan daya saing daerah

2.3.3.3. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Sektor Pertanian merupakan leading sektor dalam perekonomian Kabupaten Dharmasraya dengan kontribusi sebesar 29% terhadap PDRB. Ada 5 komoditi unggulan di Kabupaten Dharmasraya yaitu padi, jagung, kelapa sawit, karet dan ternak sapi/kerbau.

Tabel 2-114 Produksi Komoditi Unggulan Bidang Pertanian Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Produktivitas padi	ton/ha	4,75	4,60	4,52	4,59	4,64
	Produksi	ton	59.282	58.259	72.208	67.850	68.652
	Luas panen	ha	12.477	12.658	15.963	14.774	14.783
2	Produktivitas Jagung	ton/ha	6,76	6,11	6,11	6,23	5,79
	Produksi	ton	2.424	24.470	85.471	104.626	4.069
	Luas panen	ha	382	3.823	2.498	843	698
3	Produktivitas Kelapa sawit	ton/ha	4.03	3.91	3.83	4.68	4.98
	Produksi	ton	84.867	108.593	85.471	104.626	104.992
	Luas panen	ha	29.185,50	27.822,85	22.196,10	22.361,85	22.441,85
4	Produktivitas karet	ton/ha	0.91	0.85	0.99	0.87	0.78
	Produksi	ton	36.135	29.019	29.832	29.615,41	29.689
	Luas panen	ha	37.267,20	34.155,58	34.226,08	34.188,00	34.278,00
5	Produksi Daging	Ton	1.155	1.254	4.617	4.187	6.340
	Populasi Ternak (Sapi/Kerbau)	ekor	48.279	46.045	46.993	48.062	49.043

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

Dilihat dari komoditi unggulan sektor pertanian, produksi jagung meningkat sangat tajam selama periode 2016 – 2019 dari 2.424 ton menjadi 104.626 ton. Hal ini berhubungan dengan pemanfaatan lahan sawit saat peremajaan. Namun pada tahun 2020 terjadi penurunan produksi jagung yang sangat signifikan. Produksi padi cenderung stabil selama 5 tahun terakhir. Sejak tahun 2017 produksi padi meningkat dari 55.696 ton menjadi 66.664 ton pada tahun 2020. Kenaikan ini seiring dengan peningkatan luas panen. Pada sub sektor tanaman perkebunan, kelapa sawit tetap menjadi komoditi utama. Produksi kelapa sawit menurun pada tahun 2018 karena sebagian lahan yang diremajakan. Namun pada tahun 2019 kembali meningkat. Sementara produksi tanaman karet relatif stabil sejak tahun 2017. Terjadi peningkatan populasi ternak besar (sapi/kerbau) sejak tahun 2017. Hal ini mendorong terjadinya peningkatan produksi daging di Kabupaten Dharmasraya

2.3.3.4. *Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan*

Kinerja bidang perdagangan dapat diukur dengan indikator koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu, kondisi pasar dan sarana perdagangan. Nilai koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu adalah indikator yang menggambarkan tingkat stabilisasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu (antar bulan dalam periode 1 tahun). Pada Tabel 2.54 terlihat bahwa koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok semakin membaik selama 5 tahun terakhir yang diperlihatkan semakin menurunnya nilai koefisien variasi. Hal ini berarti bahwa disparitas harga kebutuhan pokok dari bulan ke bulan semakin kecil yang mengindikasikan semakin stabilnya harga barang kebutuhan pokok.

*Tabel 2-115 Indikator Kinerja Bidang Pedagangan
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020*

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Pasar Kondisi baik	%	22,22	24,32	18,91	27,02	32,43
Koefisien Variasi Harga Barang Kebutuhan Pokok antar waktu	≤	9	9	8	8	8
Alat UTTP yang Beratanda tera sah	Unit	-	200	750	772	480

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

Kondisi perdagangan juga semakin membaik yang dapat dilihat dari peningkatan persentase pasar kondisi baik selama 5 tahun terakhir dari 22,22% pada tahun 2016 menjadi 32,43% pada tahun 2020. Selain itu jumlah alat UTTP yang Bertanda tera sah juga semakin meningkat pada periode 2017 – 2019. Namun pada tahun 2020 jumlah alat UTTP yang Bertanda tera sah menurun sangat tajam. Hal ini disebabkan oleh kurangnya perhatian masyarakat untuk standar alat UTTP saat pandemi Covid-19.

2.3.3.5. *Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian*

Kinerja Bidang Perindustrian dapat dilihat dari perkembangan IKM. Ada tiga indikator yang digunakan untuk mengukur perkembangan IKM yaitu Persentase Peningkatan Omzet IKM, Persentase Pertumbuhan IKM, dan Jumlah Sentra IKM yang dibina.

*Tabel 2-116 Indikator kinerja Bidang Perindustrian
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020*

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase IKM dengan Peningkatan Omzet	%	-	-	7,78	6,62	6,50
Omzet IKM tahun n	Rupiah	-	85.758.123	92.999.751	96.836.486	103.170.000
Omzet IKM tahun n - 1	Rupiah	-		85.758.123	92.999.751	96.836.486
Persentase Pertumbuhan IKM	%	-	6,60	7,48	7,59	7,05
Jumlah IKM Tahun n	IKM	-	630	681	737	789
Jumlah IKM Tahun n - 1	IKM	-	591	630	681	737
Jumlah Sentra IKM yang dibina	IKM	-	21	21	25	26

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

Berdasarkan Tabel 2-116 diatas terjadi peningkatan nilai omzet IKM setiap tahun selama 2017 – 2020. Namun perkembangannya melambat. Hal ini berarti bahwa lemahnya penyerapan produk oleh pasar. Untuk perlu adanya dukungan untuk pemberdayaan IKM terutama dalam pengembangan pasar. Jumlah IKM selalu meningkat setiap tahun selama 5 tahun terakhir dengan pertumbuhan di atas 7% per tahun walaupun terjadi pandemi pada tahun 2020. Hal ini memperlihatkan semakin bergairahnya IKM yang akan mampu meningkatkan lapangan pekerjaan. Pemerintah terus melakukan pembinaan terhadap IKM sejak tahun 2017 yang terlihat dari peningkatan jumlah sentra IKM yang dibina.

2.3.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

2.3.4.1. Sekretariat Daerah

A. Nilai LPPD

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. LPPD memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja pemerintah daerah yang terdiri dari capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan. Muatan pelaporan terdiri dari capaian ekonomi makro, capaian kinerja makro, serta capaian akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Adapun penilaian terhadap laporan dokumen ini dilakukan oleh Kemendagri setiap tahunnya

Tabel 2-117 Nilai LPPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Rangking	Rngking	231	120	37	-	-
Skor	indeks	2,8124	3,1226	3,1551	3,5138	-
status	Tinggi/ sangat tinggi	Tinggi	Sangat tinggi	Sangat tinggi	Sangat tinggi	-

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

Dilihat dari perkembangan setiap tahunnya terjadi peningkatan hasil penilaian oleh kemendagri, bukan hanya kinerjanya saja yang meningkat, dilihat dari perankingan juga sudah masuk 50 besar nasional, artinya kinerja pemerintah daerah Kabupaten Dharmasraya sudah mampu bersaing dengan daerah lain di luar Sumatera Barat.

B. Hasil evaluasi AKIP

Evaluasi atas implementasi SAKIP Evalusi merupakan alat dalam rangka peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Nilai akhir dari penilaian evaluasi tersebut dinyatakan dalam bentuk nilai AA untuk nilai tertinggi, hingga D untuk nilai evaluasi terendah. Adapun komponen yang dinilai dari evaluasi ini berdasarkan Permenpan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat dilihat dari tabel di bawah :

Tabel 2-118 Komponen Penilaian Evaluasi Atas Implementasi SAKIP

No	Komponen	Bobot
1	Perencanaan Kinerja	30%
2	Pengukuran Kinerja	25%
3	Pelaporan Kinerja	15%
4	Evaluasi Internal	10%
5	Capaian Kinerja	20%
	Total	100%

Sumber : Permenpan No.12/2015

Tabel 2-119 Nilai Hasil Evaluasi AKIP Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai hasil evaluasi	AA/A/ BB/B/CC	B	B	B	B	B
Tingkat akuntabilitas kinerja	indeks		60,46		62,58	63,44
Perencanaan Kinerja	bobot				18,43	19,35
Pengukuran Kinerja	bobot				16,22	16,48
Pelaporan Kinerja	bobot				10,92	10,58
Evaluasi internal	bobot				5,91	6,47
Capaian kinerja	bobot				11,1	10,56

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

Hasil penilaian AKIP yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN RB atas penyampaian laporan AKIP yang disampaikan oleh pemerintah daerah Dharmasraya juga menunjukkan peningkatan, sehingga dengan peningkatan tersebut diharapkan ke depan efektifitas dan efisiensi serta percepatan pencapaian target pembangunan terhadap pelaksanaan visi, misi tujuan dan sasaran pembangunan terhadap target pembangunan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan akan semakin tinggi ketercapaiannya. Sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi yang terus dilaksanakan serta dengan melakukan berbagai iniovasi pembangunan daerah.

C. Indikator Kinerja Sekretariat Daerah

Tabel 2-120 Indikator Kinerja Sekretariat daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah produk hukum yang difasilitasi, harmonisasi dan dievaluasi penyusunannya serta didokumentasikan dan disosialisasikan	Dokumen	11	15	18	32	16
Jumlah penyelesaian permasalahan hukum daerah	kasus	4	5	4	3	5
Jumlah zakat yang dikumpulkan oleh BAZNAS	Rp	4.617.900.543	4.458.970.057	4.391.540.510	4.612.908.294	4.680.164.079
Persentase pencapaian realisasi fisik kegiatan tahunan	Persen	0	81,57	83,09	98	98
Persentase Jumlah pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dengan metode kompetitif	Paket	-	-	-	26	27
Persentase Barang Subsidi yang diawasi	Persen	100	100	100	100	100
Nilai Sakip komponen pelaporan	Bobot	7,6	10,14	10,16	10,92	11,27
Persentase OPD dengan nilai IKM lebih besar dan sama B (75)	persen	-	-	-	97	91

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

2.3.4.2. Sekretariat DPRD

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam pasal 365 ayat (1) dinyatakan bahwa DPRD berfungsi sebagai fungsi legislasi, anggaran dan fungsi anggaran. Sedangkan sekretariat DPRD bertugas dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas DPRD Kabupaten Dharmasraya.

Sebagai unsur dari penyelenggaraan pemerintahan daerah, dimana pemerintahan daerah tersebut terdiri dari Bupati/Wakil Bupati dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah, sehingga dalam hal ini DPRD berfungsi sebagai mitra pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan.

Adapun kinerja DPRD Kabupaten Dharmasraya adalah sebagai berikut :

Tabel 2-121 Indikator Kinerja DPRD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Peraturan Daerah (Perda) yang ditetapkan berdasarkan program rancangan peraturan daerah (Promperperda)	Persen	51	54	54	44	30
Persentase ditetapkannya Perda APBD dan APBD-P	Persen	100	100	100	100	100
Persentase rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	persen	-	-	100	100	-

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

2.3.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

2.3.5.1. Perencanaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa unsur penunjang perencanaan memiliki 4 tahap yang terdiri dari ; tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan Daerah. Sedangkan dilihat dari output yang dihasilkan terdiri dari dokumen RPJPD untuk dokumen perencanaan jangka panjang, RPJMD untuk dokumen perencanaan 5 tahun, dan RKPD untuk perencanaan tahunan.

Tabel 2-122 Indikator Kinerja Perencanaan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase hasil musrenbang kecamatan yang diakomodir dalam RKPD	Persen	20%	25%	30%	23,07	
Persentase ketersediaan data perencanaan data pembangunan	Persen	75	80	90	90	95
Persentase pencapaian RKPD terhadap RPJMD	persen	-	75	80	93,06	96

Sumber : Bappeda Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

2.3.5.2. Keuangan

Unsur penunjang pemerintahan keuangan memiliki tugas utama dalam membiayai Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban APBD. Dimana kewenangan tersebut berdasarkan prioritas dan kemampuan keuangan daerah sebagaimana telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan daerah dan dokumen kebijakan daerah lainnya.

Tabel 2-123 Indikator Kinerja Keuangan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP/WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Rata-rata ketergantungan dana transfer	Persen	93,34	86,94	90,89	92,36	91,63
Persentase SILPA terhadap APBD	Persen	0,64	4,32	0,87	1,69	0,38

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

2.3.5.3. Kepegawaian

A. Indeks Profesionalitas ASN

Indeks Profesionalitas ASN merupakan tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.

Indeks Profesionalitas ASN ditetapkan oleh BKN berdasarkan hasil input pengembangan kompetensi dan kualifikasi yang diikuti oleh ASN serta hasil penilaian kinerja dan hukuman disiplin yang diterima oleh ASN.

Tabel 2-124 Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2016- 2020

No	Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	68	45,46	68	58,04
	Indeks Profesionalisme dimensi kualifikasi	Nilai	0,47	12,32	12	12,53
	Indeks Profesionalisme dimensi kompetensi	Nilai	0	12,82	24	15,49
	Indeks Profesionalisme dimensi kinerja	Nilai	82,69	15,32	27	24,8
	Indeks Profesionalisme dimensi disiplin	Nilai	0,46	5	5	5

Sumber : BKPSDM Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

Sistem penilaian pada tahun 2017 berbeda dengan tahun setelahnya. Pada tahun 2017 yang diukur indeks profesionalitasnya hanya pejabat struktural, dengan melihat penilaian gap antara profil PNS dengan jabatan yang didudukinya.

Melihat dari data pada table diatas terjadinya fluktuatif hasil penilaian Indeks Profesionalitas ASN terjadi karena adanya:

1. Adanya mutasi ASN
2. Adanya pegawai yang pension
3. Adanya penerimaan CPNS.

Adapun indikator kinerja unsur penunjang urusan pemerintahan kepegawaian adalah sebagai berikut :

B. Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan kompetensi

Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan kompetensi merupakan semua jenis pendidikan dan pelatihan yang diikuti oleh ASN, dapat berupa peningkatan kualifikasi pendidikan, mengikuti pelatihan, seminar, bimbingan teknis dan lain sebagainya.

Tabel 2-125 Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan kompetensi Tahun 2016 s/d 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan kompetensi	Persen	9,81	16,22	22,99	30,59	33,63
	Jumlah pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi	Jumlah	400	585	802	1111	1196
	Jumlah pegawai	Jumlah	4078	3607	3489	3632	3556

Sumber : BKPSDM Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwasanya setiap tahun terdapat peningkatan persentase pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi. Meskipun adanya fluktuasi jumlah pegawai yang disebabkan karena beberapa hal diantaranya

1. Pemindahan guru-guru SMA dan SMK dari pemerintah kabupaten/Kota ke Pemerintahan Propinsi.
2. Adanya penerimaan CPNS.
3. Adanya pegawai yang pensiun.

C. Persentase ASN yang menyusun SKP tepat waktu

Persentase ASN yang menyusun SKP tepat waktu adalah ASN yang mengumpulkan SKP dan PKP ke BKPSDM dan dientrikan ke aplikasi SAPK.

Tabel 2-126 Persentase ASN yang menyusun SKP tepat waktu Tahun 2016 s/d 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase ASN yang menyusun SKP tepat waktu	Persen	100	100	100	100	99,35
	Jumlah ASN yang menyusun SKP	Jumlah	4078	3607	3489	3632	3533
	Jumlah pegawai	Jumlah	4078	3607	3489	3632	3556

Sumber : BKPSDM Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

Adanya penurunan persentase ASN yang menyusun SKP tepat waktu pada tahun 2020 disebabkan karena keterlambatan beberapa ASN dalam mengumpulkan SKP. Hal tersebut disebabkan karena keterbatasan informasi pada beberapa daerah serta karena adanya wabah Covid-19.

D. Persentase penempatan ASN sesuai kompetensi

Penempatan ASN sesuai dengan kompetensi adalah semua PNS yang telah mengikuti uji kompetensi dan ditempatkan sesuai dengan hasil uji kompetensi tersebut

Tabel 2-127 Persentase penempatan ASN sesuai kompetensi Tahun 2016 s/d 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase penempatan ASN sesuai kompetensi	Persen	33,78	32,23	33,39	35,03	41,25
	Jumlah penempatan ASN sesuai kompetensi	Jumlah	149	156	173	179	205
	Jumlah pegawai	Jumlah	441	484	518	511	497

Sumber : BKPSDM Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

Uji kompetensi yang dilaksanakan hanya pada level Esselon III. Hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran pada BKPSDM Kabupaten Dharmasraya.

E. Persentase kasus ASN yang tertangani

Persentase kasus yang tertangani adalah kasus indisipliner ASN yang tertangani di BKPSDM. Kasus yang tertangani adalah kasus pelanggaran disiplin yang penjatuhan hukuman disiplinnya menjadi kewenangan Bupati.

Tabel 2-128 Persentase kasus ASN yang tertangani Tahun 2016 s/d 2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase kasus ASN yang tertangani	Persen	100	100	100	100	100
	Jumlah kasus yang diterima	Jumlah	12	12	8	6	5
	Jumlah kasus yang tertangani	Jumlah	12	12	8	6	5

Sumber : BKPSDM Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

Rata-rata persentase kasus yang tertangani setiap tahunnya adalah 100%. Melihat data yang ada setiap tahunnya terjadi penurunan kasus yang sampai di BKPSDM Kabupaten Dharmasraya.

2.3.6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

2.3.6.1. Inspektorat Daerah

Inspektorat Kabupaten merupakan unsur pengawas pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tabel 2-129 Realisasi Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah

INDIKATOR	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Tingkat Kapabilitas APIP	level	2	3DC	3DC	3DC	3
Tingkat maturitas implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	level	-	1	3	3	3

Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

Penilaian kapabilitas APIP dilakukan oleh BPKP dengan menggunakan metode Internal Audit Capability Model (IACM) yang terdiri dari 5 level, yaitu level 1 (*initial*), level 2 (*insfrastruktucture*), Level 3 (*integrated*), Level 4 (*managed*) dan Level 5 (*optimizing*).

Pada periode sebelumnya Inspektorat Kabupaten Dharmasraya sudah berada pada level 2 dengan tanpa dilakukan Quality Assurance oleh tim BPKP. Pada Tahun 2017 awal dilakukan penilaian oleh BPKP dengan menggunakan metode IACM Inspektorat Kabupaten Dharmasraya memperoleh nilai Level 2. Pada akhir 2017 dilakukan penilaian lagi untuk menuju level 3 sehingga Inspektorat memperoleh nilai pada evel 3 DC yang artinya ada beberapa insdikator yang tidak terpenuhi sehingga menjadi level 3 dengan catatan. Pada tahun 2018 tidak dilakukan penilaian pada tahun 2019 dilakukan penialian namun belum bia mencapai nilai level 3 penuh, pada tahun 2020 sudah dilakukan penilaian namun sampai saat ini belum keluar hasil penilaian tersebut.

Penilaian maturitas SPIP dilakukan oleh BPKP dengan pendekatan kuantitatif, pada lima area penilaian yaitu : lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan

komunikasi serta pemantauan. Penilaian maturitas SPIP berada pada enam tingkatan , yaitu : 0 (belum ada), level 1 (rintisan), level 2 (berkembangan), level 3 (terdefinisi), level 4 (terkelola dan terukur), level 5 (optimum). Penilaian ini dilakukan terhadap SPIP pemerintah daerah Kabupaten Dharmasraya

Penilaian mauritas SPIP baru dilaksanakan pada tahun 2017 yang dilakukan oleh BPKP Kabupaten Dharmasraya memperoleh nilai pada level 1. Pada tahun 2018 dilakukan penilaian oleh BPKP Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya memperoleh nilai 3,01 sehingga berada pada level 3. Pada tahun 2018 tidak dilakuakan, pada tahun 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya sudah melengkapi dokumen untuk penilaian dengan system e-SPIP namun belum dinilai karena BPKP mengutamakan daerah yang belum level.

2.3.7. Unsur Pemerintahan Umum

2.3.7.1. Kesatuan Bangsa dan Politik

Kesatuan bangsa dan politik merupakan unsur pemerintahan umum yang bertugas dalam penanganan konflik di masyarakat, penganggulangan tingkat kriminalitas, kenakalan remaja, pembinaan kelembagaan politik serta pendidikan politik di masyarakat

Tabel 2-130 Kinerja Kesatuan Bangsa dan politik

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Pembinaan Partai Politik	Persen	30	30	30	68,7	125
2	Persentase Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	Persen	30	30	30	55	20,2
3	Persentase Pembinaan LSM	Persen	30	30	30	63,6	33,3
4	Jumlah Konflik Sosial	Kasus	5	5	5	5	3
5	Jumlah Penyakit Masyarakat	Kasus	2	3	3	2	3

Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, tahun 2021

2.4. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Dimana SPM ini terkait dengan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar Pemerintahan Daerah.

Adapun urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang diatur dalam SPM terdiri dari :

1. Urusan pemerintahan bidang pendidikan.
2. Urusan pemerintahan bidang kesehatan.
3. Urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
4. Urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman.
5. Urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, SPM untuk urusan pemerintahan ini diatur menjadi masing-masing menjadi 3 (tiga) sub urusan :
 - a. Sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum,
 - b. Sub urusan kebakaran,
 - c. Sub urusan bencana.
6. Urusan pemerintahan bidang sosial.

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, bahwa kewajiban yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, yaitu penerapan, pelaporan, pembinaan dan pengawasan SPM. Untuk penerapan SPM ada 4 tahapan yang akan dilaksanakan, yaitu:

1. **Pengumpulan data**, hal ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi tentang jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, pengumpulan data tersebut diintegrasikan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
2. **Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar**, tahapan ini dilakukan dengan menghitung selisih antara jumlah barang dan/atau jasa yang dibutuhkan untuk pemenuhan Pelayanan Dasar dengan jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk menghitung selisih antara jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pemenuhan Pelayanan Dasar dengan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.
3. **Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar**, penyusunan rencana ditujukan agar Pelayanan Dasar tersedia secara cukup dan berkesinambungan, perencanaan SPM menjadi muatan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan Daerah sebagai prioritas belanja Daerah.

Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar, tahapan ini dilakukan oleh perangkat Daerah melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar didasari melalui penetapan target pencapaian program dan kegiatan yang didasari oleh data jumlah penerima Pelayanan Dasar yang diperoleh setiap tahunnya.

Selanjutnya penyampaian laporan penerapan SPM juga akan menjadi bagian materi muatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang akan disampaikan oleh pemerintah daerah pada Kementerian Dalam Negeri setiap tahunnya. Adapun laporan SPM dimaksud muatannya yaitu; Hasil Penerapan SPM, Kendala Penerapan SPM serta ketersediaan Anggaran dalam Penerapan SPM. Hasil pelaporan SPM Pemerintah Daerah dapat digunakan sebagai instrumen dalam :

1. Penilaian kinerja perangkat daerah;
2. Pengembangan kapasitas daerah dalam peningkatan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar;
3. Penyempurnaan kebijakan penerapan SPM dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

Selanjutnya tahapan yang tidak kalah pentingnya adalah berupa pembinaan dan pengawasan SPM oleh Kepala Daerah terhadap hasil penerapan SPM yang telah dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait. Pembinaan dan pengawasan ini dilakukan dalam rangka meninjau berhasil atau tidaknya pelaksanaan SPM, baik dari sisi target yang dicapai maupun dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Bagi pemerintah provinsi, hasil rekapitulasi pelaksanaan SPM kabupaten/kota akan menjadi bahan masukan dalam perumusan kebijakan tingkat provinsi, selanjutnya bagi pemerintah pusat laporan penerapan SPM menjadi bahan untuk merumuskan kebijakan nasional terkait pemenuhan pelayanan dasar bagi masyarakat.

2.4.1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Realisasi SPM Bidang Pendidikan Dasar tahun 2020 terhadap target yang ditetapkan tentang Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya, diuraikan sebagaimana berikut di bawah ini :

- A. Jumlah Warga Negara Usia 7 – 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/ MI, SMP/ MTS)

Tabel 2-131 Realisasi SPM SD / MI, SMP/MTS

No	Jenjang Pendidikan	Target (Orang)	Realisasi (Orang)	Realisasi (%)
1	SD / MI, SMP/MTS	11.532	11.532	100

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

- B. Jumlah warga negara usia 7- 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.

Tabel 2-132 Realisasi SPM Pendidikan Kesetaraan

No	Jenjang Pendidikan	Target (Orang)	Realisasi (Orang)	Realisasi (%)
1	Pendidikan kesetaraan	468	468	100

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

C. Jumlah warga negara usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD

Tabel 2-133 Realisasi SPM PAUD

No	Jenjang Pendidikan	Target (Orang)	Realisasi (Orang)	Realisasi (%)
1	PAUD	798	798	100

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

Capaian SPM untuk bidang pendidikan sudah tercapai 100% sesuai dengan target dan realisasi untuk ketiga indikator yang diukur mulai dari tingkat PAUD, SD dan SMP

2.4.2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Realisasi SPM Bidang Kesehatan tahun 2020 terhadap target yang ditetapkan tentang Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal pada Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya, diuraikan sebagaimana berikut di bawah ini :

Tabel 2-134 Realisasi SPM Bidang Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target (orang)	Capaian (orang)	Persentase (%)
1.	Pelayanan Kesehatan ibu hamil	6.122	3.527	57,61
2.	Pelayanan Kesehatan ibu bersalin	5.843	3.881	66,42
3.	Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	5.565	3.817	68,59
4.	Pelayanan Kesehatan balita	27.352	16.379	59,88
5.	Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	28.353	18.177	64,11
6.	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	162.489	67.943	41,81
7.	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	24.817	24.766	99,79
8.	Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi	72.654	11.239	15,47
9.	Pelayanan Kesehatan penderita diabetes millitus	2.179	1.783	81,83
10.	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	531	444	83,62
11.	Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberculosis	3.075	2.157	70,15
12.	Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency virus</i>)	5.219	5.219	100,00

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

Pelayanan Kesehatan ibu hamil capaiannya dibawah target 100% yaitu 57,61%. Dalam pelayanan ibu hamil, indikator pelayanan diukur pada layanan 10 T pada ibu hamil yang berkunjung selama empat kali pada periode kehamilan, yaitu satu kali pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua dan dua kali pada trimester ketiga. Layanan yang diberikan antara lain :

- Pengukuran berat badan
- Pengukuran tekanan darah
- Pengukuran Lingkar Lengan Atas (LILA)
- Pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri)
- Penentuan Presentasi Janin dan Denyut Jantung Janin (DJJ)
- Pemberian imunisasi sesuai dengan status imunisasi
- Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet
- Tes Laboratorium
- Tatalaksana/penanganan kasus
- Temu wicara (konseling)

Apa bila salah satu indikator layanan tidak didapatkan maka dianggap tidak mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil. Tidak tercapainya target 100% dikarenakan pelayanan yang tidak dilaporkan dari fasilitas kesehatan swasta ke puskesmas serta Pandemi covid 19 mempengaruhi kunjungan ibu hamil pada fasilitas kesehatan.

Pelayanan Kesehatan ibu bersalin capaiannya dibawah target 100% yaitu 66,42%. Dalam pelayanan persalinan sesuai setandar meliputi pelayanan persalinan normal dan persalinan komplikasi yang dilakukan di fasilitas kesehatan dengan dua orang petugas baik itu dokter, bidan maupun perawat. Tidak tercapainya target 100% dikarenakan banyak persalinan yang dilakukan diluar Kabupaten Dharmasraya dan belum terintegrasinya pencatatan pelaporan serta belum evektifnya sistem rujukan yang terintegrasi di Kabupaten Dharmasraya maupun dengan Kabupaten terdekat.

Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir capaiannya dibawah target 100% yaitu 68,59%. Dalam pelayanan Kesehatan bayi baru lahir terdapat dua indikator yang taralain pelayanan Neonatal esensial saat lair (0-6 jam) dan pelayanan Neonatal esensial setelah lahir (6 jam-28 hari). Adapun jenis pelayanan yang diberikan, antara lain :

Pelayanan Neonatal Esensial saat lahir (0-6 jam)

- Pemotongan dan perawatan tali pusat.
- Inisiasi Menyusu Dini (IMD).
- Injeksi vitamin K1.
- Pemberian salep/tetes mata antibiotic.
- Pemberian imunisasi (injeksi vaksin Hepatitis B0).

Pelayanan Neonatal Esensial setelah lahir (6 jam – 28 hari)

- Konseling perawatan bayi baru lahir dan ASI eksklusif.
- Memeriksa kesehatan dengan menggunakan pendekatan MTBM.
- Pemberian vitamin K1 bagi yang lahir tidak di fasilitas pelayanan kesehatan atau belum mendapatkan injeksi vitamin K1.
- Imunisasi Hepatitis B injeksi untuk bayi usia < 24 jam yang lahir tidak ditolong tenaga kesehatan.
- Penanganan dan rujukan kasus neonatal komplikasi.

Apa bila salah satu indikator layanan tidak didapatkan maka dianggap tidak mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir. Tidak tercapainya target 100% dikarenakan belum terintegrasinya pencatatan pelaporan terhadap bayi yang lahir diluar Kabupaten Dharmasraya dan pelayanan kesehatan bayi baru lahir dilakukan dirumah warga oleh tenaga non kesehatan.

Pelayanan Kesehatan balita capaiannya dibawah target 100% yaitu 59,88%. Dalam pelayanan Kesehatan balita Terdapat 3 indikator dalam pelayanan yaitu pemberian vitamin 2 kali, pemantauan pertumbuhan 8 kali, pemantauan perkembangan 2 kali, apabila salah satu indikator tidak terpenuhi maka dianggap tidak mendapatkan pelayanan balita. Tidak tercapainya target 100% dikarenakan tidak berjalannya kegiatan posyandu secara optimal akibat pandemi covid 19 dan dibatasinya kegiatan kunjungan rumah sehingga sasaran balita yang terlayani mengalami penurunan.

Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar capaiannya dibawah target 100% yaitu 64,11%. Dalam pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar terdapat 2 indikator yaitu skrining kesehatan dan tindak lanjut hasil skrining kesehatan yang dilakukan pada anak kelas 1 sampai dengan kelas 9 di sekolah minimal satu kali dalam satu tahun ajaran dan usia 7 sampai 15 tahun diluar sekolah. apabila salah satu indikator tidak terpenuhi maka dianggap tidak mendapatkan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar. Tidak tercapainya target 100% dikarenakan tidak berjalannya proses belajar dan mengajar secara optimal pada masa pandemi covid 19 ini.

Pelayanan kesehatan pada usia produktif capaiannya dibawah target 100% yaitu 41,81%. Pelayanan kesehatan pada usia produktif meliputi Edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana di fasilitas kesehatan atau UKBM dan Skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular selama 1 kali dalam satu tahun. Tidak tercapainya target 100% dikarenakan kegiatan edukasi maupun skrining penduduk usia produktif dilaksanakan pada saat kegiatan Posbindu PTM, sedangkan dalam kondisi pandemi kegiatan melibatkan masyarakat dibatasi.

Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut capaiannya dibawah target 100% yaitu 99,79%. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut meliputi edukasi perilaku hidup bersih dan sehat serta skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular yang dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Tidak tercapainya target 100% dikarenakan kegiatan edukasi maupun skrining penduduk usia lanjut dilaksanakan pada saat kegiatan Posyandu Lansia, sedangkan dalam kondisi pandemi kegiatan melibatkan masyarakat dibatasi.

Pelayanan kesehatan penderita Hipertensi capaiannya dibawah target 100% yaitu 15,47%. Dan Pelayanan kesehatan penderita Diabetes mellitus capaiannya dibawah target 100% yaitu 81,83%. Hal ini disebabkan Menurunnya kunjungan kefasilitas pelayanan kesehatan akibat adanya pandemi covid-19. Selain itu pelayanan kesehatan pada penderita Hipertensi dan Diabetes Melitus (DM) dilakukan pada saat pelaksanaan Posbindu PTM dimana pelaksanaan tidak maksimal mengingat masih dalam kondisi pandemic dan penderita hipertensi dan diabetes mellitus adalah masyarakat yg berisiko tinggi yang merupakan kormobid dari covid-19, sehingga perlu kehati-hatian dalam pelaksanaannya.

Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat capaiannya dibawah target 100% yaitu 83,62%. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat meliputi pemeriksaan kesehatan jiwa dan edukasi. Tidak tercapainya target 100% disebabkan belum optimalnya kerjasama lintas sector dalam pandataan, penjangkaran sertapenanganan ODGJ Berat.

Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis capaiannya dibawah target 100% yaitu 70,15%. Hal ini disebabkan karena menurunnya kunjungan pasien kefasyankes akibat adanya pandemic covid-19. Selain menurunnya kunjungan juga disebabkan karena kegiatan yang melibatkan peran serta masyarakat dibatasi akibat pandemi sehingga kegiatan lapangan menurun.

Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) telah mencapai target 100%. Pelayanan yang dilakukan antara lain Edukasi perilaku beresiko dan skrining. Dalam pelaksanaannya pelayanan telah mencapai 100%.

2.4.3. *Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang*

Realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang tahun 2020 terhadap target yang ditetapkan, diuraikan sebagaimana berikut di bawah ini :

Tabel 2-135 Realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (KK)	Realisasi (KK)	Persentase
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	4.148	4.022	97%
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	6.343	6.343	100%

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

2.4.4. *Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman*

Terkait dengan SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terdapat realisasi SPM yang tidak ditetapkan pada tahun 2020 mengingat pada tahun tersebut memang tidak terdapat program/kegiatan yang terkait dengan pemenuhan SPM tersebut mengingat belum adanya program penyediaan relokasi rumah yang terkena program Pemerintah Daerah.

Sedangkan terkait dengan target pemenuhan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana terpenuhi dengan adanya program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BPS) dan program Rusunawa serta perumahan Khusus.

Tabel 2-136 Realisasi SPM Bidang Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi	Persen
1	Pemenuhan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	-	-	100 %
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah	Jumlah warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	-	-	

Sumber : Dinas Perkimtan Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

2.4.5. *Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat*

Urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban terdiri dari 3 sub urusan yaitu (1) ketenteraman dan ketertiban umum, (2) bencana, dan (3) kebakaran. Untuk menghitung kinerja pembangunan maka terdapat 5 indikator yang diukur sebagaimana terdapat pada tabel 2-131 di bawah :

*Tabel 2-137 Realisasi SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Serta Perlindungan Masyarakat*

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (orang)	Capaian (Orang)	Persen
1.	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara	222.305	222.305	100%
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	222.305	222.305	100%
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	222.305	222.305	100%
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	3.119	3.119	100%
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	222.305	222.305	100%

Sumber : Satpol PP Kabupaten Dharmasraya, dan BPBD Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

2.4.6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Terkait dengan urusan bidang sosial secara umum seluruh target yang ditetapkan sesuai dengan SPM telah tercapai seluruhnya sesuai target yang ditetapkan yang terdiri dari 5 target sebagaimana disajikan pada Tabel 2-138

Tabel 2-138 Realisasi SPM Bidang Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (orang)	Capaian (Orang)	%
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	104	104	100%
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar pantai	7	7	100%
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	9	9	100%
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah warga negara / gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	20	20	100%
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paksa bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	17.024	17.024	100%

Sumber : Dinas SOSP3APPKB Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

2.5. Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Dharmasraya

Analisis pencapaian pembangunan berkelanjutan secara umum bermaksud untuk menganalisis ketercapaian Tujuan, Target, dan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden RI Nomor 59 tahun 2017. Implementasi TPB/SDGs di Indonesia untuk pencapaian 17 goals dengan pengembangan indikator TPB/SDGs 169 target dan 319 indikator yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintahan provinsi, pemerintah kabupaten dan kota sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

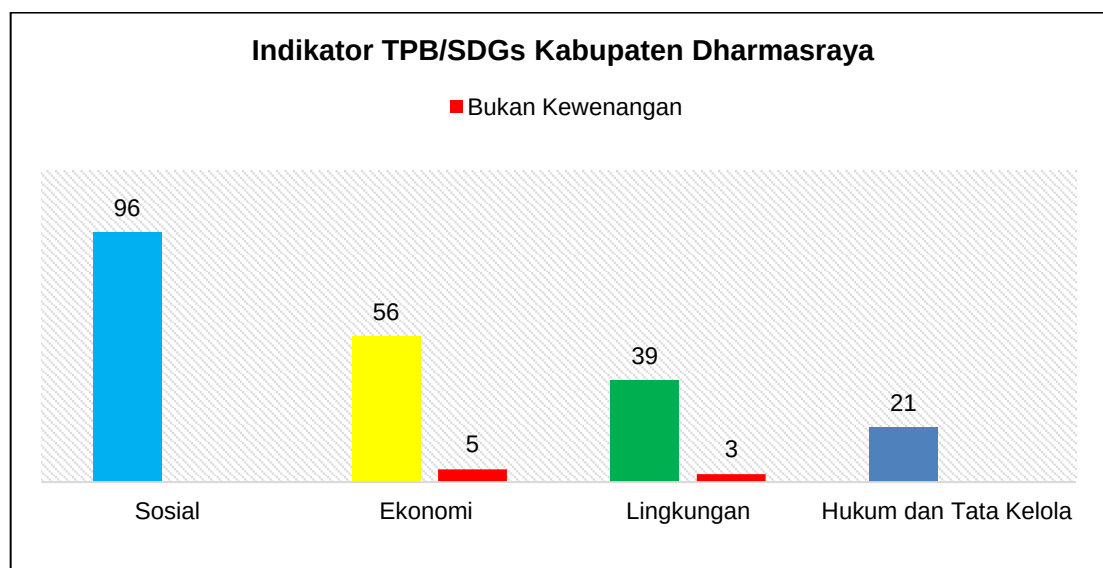
Analisis pencapaian TPB/SDGs di Kabupaten Dharmasraya dilakukan dengan menyandingkan antara target indikator TPB/SDGs yang tertuang dalam Peraturan Presiden RI Nomor 59 Tahun 2017 dengan data TPB/SDGs Kabupaten Dharmasraya sehingga diperoleh klasifikasi penilaian capaian indikator TPB/SDGs yang terbagi dalam 4 (empat) kategori :

1. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target/SS
2. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target/SB
3. Indikator TPB yang tidak ada/belum ada data/NA
4. Indikator TPB yang bukan kewenangan

Berdasarkan hasil analisis capaian TPB yang sesuai dengan kewenangan kabupaten adalah 16 TPB (kecuali TPB 14, Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan (Ekosistem Lautan)).

Sedangkan jumlah indikator dari 16 TPB yang menjadi kewenangan kabupaten adalah 220 indikator. Dari 220 indikator tersebut, terdapat 8 (delapan) indikator yang bukan kewenangan (BK) Kabupaten Dharmasraya (Tabel 2-139), dengan demikian, jumlah indikator TPB/SDGs yang menjadi kewenangan Kabupaten Dharmasraya adalah 212 indikator (Gambar 2-31).

Gambar 2-31 Jumlah Indikator Menjadi Kewenangan Kabupaten Dharmasraya Berdasarkan Pilar Pembangunan



Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026

Tabel 2-139 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) yang Bukan Kewenangan (BK) Kabupaten Dharmasraya

NO	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	OPD	PILAR
TPB 6. Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan				Lingkungan
1	6.3.2.(a)	Kualitas air danau.	DLH	
TPB 7. Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua				Ekonomi
2	7.2.1*	Bauran energi terbarukan.	DINAS ESDM PROVINSI	
3	7.3.1*	Intensitas energi primer.	DINAS ESDM PROVINSI	
TPB 9. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi				Ekonomi
4	9.1.1.(b)	Panjang pembangunan jalan tol.	Dinas Perhubungan	
5	9.1.1.(c)	Panjang jalur kereta api.	Dinas Perhubungan	
6	9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis.	Dinas Perhubungan	
TPB 11. Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan				Lingkungan
7	11.1.1.(b)	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).	DPUPR	
8	11.3.1.(b)	Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).	DPUPR	

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026

Kondisi Kabupaten Dharmasraya dalam melaksanakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) menghadapi berbagai tantangan. Berikut dapat dilihat capaian jumlah indikator yang telah mencapai target nasional.

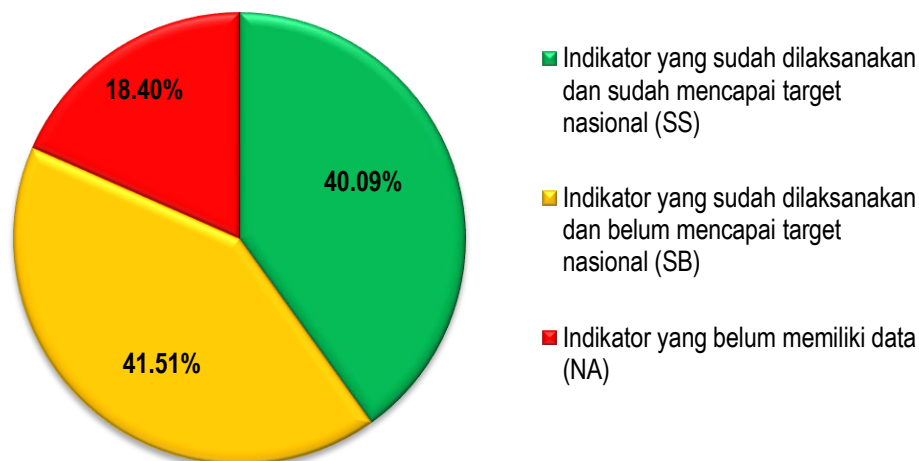
Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan terhadap data indikator TPB/SDGs pada OPD yang berwenang dapat dilihat bahwa indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target adalah sebanyak 85 indikator (40,09%), indikator yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target adalah sebanyak 88 indikator (41,51%), dan indikator yang belum memiliki data adalah sebanyak 39 indikator (18,40%). Pada Tabel 2-140 dan Gambar 2-32 berikut dapat dilihat proporsi capaian indikator TPB/SDGs Kabupaten Dharmasraya.

Tabel 2-140 Capaian Indikator TPB/SDGs Kabupaten Dharmasraya

No	Kondisi Data	Jumlah	Persentase
1.	Indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SS)	85	40,09%
2.	Indikator yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional (SB)	88	41,51%
3.	Indikator yang belum memiliki data (NA)	39	18,40%
TOTAL		212	100%

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026

Gambar 2-32 Persentase Capaian Jumlah Indikator TPB/SDGs Terhadap Target Nasional



Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026

Pilar dengan capaian kategori tertinggi adalah pilar sosial (48 indikator dengan kategori SS), diikuti dengan pilar ekonomi (19 indikator dengan kategori SS). Capaian indikator TPB/SDGs Kabupaten Dharmasraya berdasarkan pilar dapat dilihat pada Tabel 2-141.

Tabel 2-141 Capaian Indikator TPB/SDGs Kabupaten Dharmasraya Berdasarkan Pilar

TPB/SDGs	SS	SB	NA	Jumlah Indikator TPB
Pilar Sosial	48	31	17	96
Pilar Ekonomi	19	23	14	56
Pilar Lingkungan	8	27	4	39
Pilar Hukum dan Tata Kelola	10	7	4	21

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026

Indikator TPB/SDGs kabupaten yang merupakan SPM adalah sebanyak 60 indikator dari 220 indikator yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten atau sebanyak 27,73 %, yang termasuk ke dalam 6 (enam) SPM sebagai berikut.

- 1. SPM Kesehatan**
 SPM Kesehatan sebanyak 26 Indikator atau 11,82 % dari seluruh indikator TPB dan 43,33 % dari indikator SPM
- 2. SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat**
 SPM ini sebanyak 10 indikator atau 4,55% dari seluruh indikator TPB dan 16,67 % dari indikator SPM
- 3. SPM Pekerjaan Umum**
 SPM Pekerjaan Umum sebanyak 7 indikator atau 3,18 % dan 11,67 % dari indikator SPM
- 4. SPM Pendidikan**
 SPM Pendidikan sebanyak 13 indikator atau 5,91 % dari seluruh indikator TPB dan 21,67 % dari indikator SPM

5. SPM Perumahan Rakyat

SPM Perumahan Rakyat sebanyak 1 indikator atau 0,45 % dari seluruh indikator TPB dan 1,67 % dari indikator SPM

6. SPM Sosial

SPM Sosial sebanyak 3 indikator atau 1,36 % dari seluruh indikator TPB dan 5 % dari indikator SPM

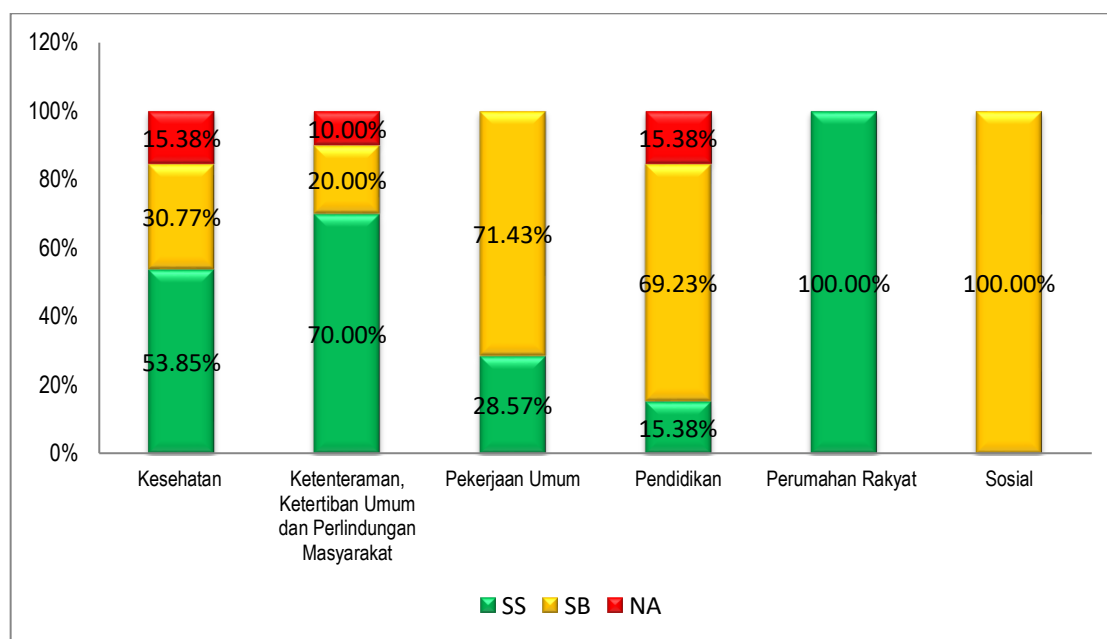
Capaian Indikator TPB/SDGs Kabupaten Dharmasraya Berdasarkan SPM sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2-142 dan Gambar 2-33 sebagai berikut.

Tabel 2-142 Capaian Indikator TPB/SDGs Provinsi Kabupaten Dharmasraya

No	SPM	SS		SB		NA		Total
1	Kesehatan	14	53,85%	8	30,77%	4	15,38%	26
2	Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	7	70,00%	2	20,00%	1	10,00%	10
3	Pekerjaan Umum	2	28,57%	5	71,43%	0	0,00%	7
4	Pendidikan	2	15,38%	9	69,23%	2	15,38%	13
5	Perumahan Rakyat	1	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	1
6	Sosial	0	0,00%	3	100,00%	0	0,00%	3
		26		27		7		60

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026

Gambar 2-33 Capaian TPB/SDGs Berdasarkan SPM



Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026

2.6. Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan (DDDTLH)

Kabupaten Dharmasraya memiliki daya dukung yang sebagian besar adalah sangat rendah dan rendah untuk jasa penyediaan pangan dan air bersih, serta sebagian besar sedang dan rendah untuk jasa penyediaan sumberdaya genetik. Bagian wilayah yang memiliki daya dukung tinggi untuk jasa pangan, air bersih adalah wilayah dimana kepadatan penduduk adalah tinggi, sehingga terancam terjadi alih fungsi lahan dan tingginya pencemaran air.

Jasa pengaturan yang daya tampungnya sebagian besar rendah dan sangat rendah adalah jasa tata aliran air dan banjir, pencegahan dan perlindungan dari bencana, dan pengolahan dan penguraian limbah. Sementara wilayah yang rendah dan sangat rendah daya tampungnya merupakan wilayah dimana terdapat permukiman masyarakat. Tekanan penduduk terhadap lingkungan, seperti pembuangan limbah besar peluangnya akan melampaui daya tampung. Selain itu, masyarakat juga menjadi semakin rentan terhadap bencana alam alam, termasuk banjir.

Kabupaten Dharmasraya juga memiliki daya dukung yang amat terbatas untuk jasa budaya tempat tinggal dan ruang hidup serta jasa estetika. Tentunya ini mengindikasikan sempitnya wilayah kabupaten ini yang dapat dikembangkan untuk permukiman yang dapat aman dan layak.

Kabupaten ini juga memiliki daya dukung dan daya tampung yang sebagian besar rendah dan sangat rendah untuk jasa pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan. Kondisi mengindikasikan bahwa sebagian besar wilayah Dharmasraya adalah sangat lamban terbentuknya lapisan tanah.

Disisi lain, Kabupaten Dharmasraya memiliki daya dukung yang sebagian besar adalah sangat tinggi dan tinggi untuk jasa penyediaan serat, penyediaan energy, Jasa pengaturan kualitas udara, jasa pendukung siklus hara dan jasa pendukung biodiversitas. Namun demikian, daya dukung dan daya tampung yang sebagian besar sangat tinggi dan tinggi ini belum didukung pemanfaatannya yang optimal untuk mendukung pembangunan daerah.

2.6.1. Supply dan Demand (DDDTLH Ril)

DDDTLH ini terdiri dari:

1. Daya dukung pangan;
2. Daya dukung air bersih; dan
3. Daya dukung fungsi lindung.

2.6.1.1. Daya Dukung Pangan

Kondisi eksisting daya dukung pangan (padi) Kabupaten Dharmasraya dengan metode ketersediaan dan kebutuhan pangan adalah surplus, artiya produksi lebih besar dari pada konsumsi. Secara umum, daya dukung pangan Kabupaten Dharmasraya saat ini dapat dikategorikan rentan dalam penyediaan pangan karena terdapat 5 kecamatan dengan daya dukung pangan defisit. Kondisi eksisting daya dukung pangan Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada Tabel 2-143.

Prediksi konsumsi beras Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2030 diperkirakan mencapai 41.313 ton sedangkan prediksi produksi diperkirakan hanya 41.313 ton, seperti terlihat pada Tabel 2-144. Oleh karena itu dapat disimpulkan pada tahun 2030 diperkirakan daya dukung pangan di

Kabupaten Dharmasraya adalah defisit seperti terlihat pada Tabel 2-144. Terdapat 6 Kecamatan yang diprediksi mengalami defisi pangan yaitu Sungai Rumbai, Koto Besar, Asam Jujuhan, Koto Baru. Kondisi ini jika dibiarkan tanpa upaya tambahan akan menyebabkan Kabupaten Dharmasraya secara keseluruhan mengalami defisit pangan pada tahun-tahun berikutnya.

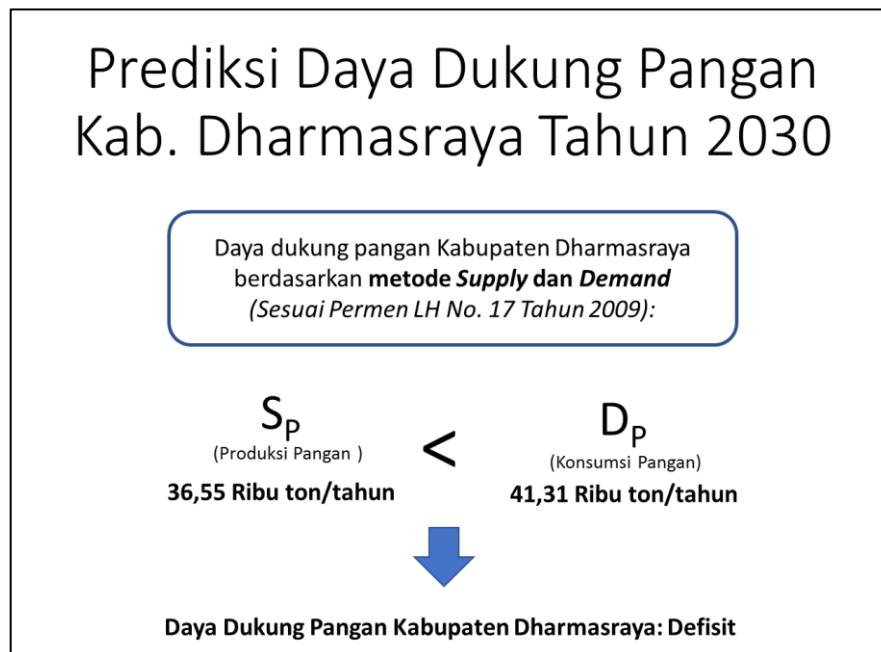
Tabel 2-143 Kondisi Eksisting Daya Dukung Pangan Kabupaten Dharmasraya

No	Nama Kecamatan	Rata-Rata Produksi Padi (ton) ^{*)}	Rata-Rata Produksi Beras (ton) ^{**)}	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Konsumsi Beras (Ton) ^{***)}	Daya Dukung Pangan	Evaluasi
1	Sungai Rumbai	0	0	26.520	3.311	-	Defisit
2	Koto Besar	216,24	135,67	26.140	3.264	0,04	Defisit
3	Asam Jujuhan	394,48	247,50	20.000	2.497	0,10	Defisit
4	Koto Baru	6.688,27	4196,22	34.980	4.368	0,96	Defisit
5	Koto Salak	6.980,17	4379,36	17.110	2.136	2,05	Surplus
6	Tiumang	983,49	617,04	11.780	1.471	0,42	Defisit
7	Padang Laweh	5.100,63	3200,14	8.560	1.069	2,99	Surplus
8	Sitiung	15.806,12	9916,76	27.120	3.386	2,93	Surplus
9	Timpeh	4.194,86	2631,86	15.600	1.948	1,35	Surplus
10	Pulau Punjung	12.147,41	7621,29	50.770	6.339	1,20	Surplus
11	Sembilan Koto	5.751,51	3608,50	9.000	1.124	3,21	Surplus
	Kab. Dharmasraya	58263,18	36554,32	247.580	30.913	1,18	Surplus

Tabel 2-144 Proyeksi Produksi Pangan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2030

No	Nama Kecamatan	Rata-Rata Produksi Padi (ton) ^{*)}	Rata-Rata Produksi Beras (ton) ^{**)}	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Konsumsi Beras (Ton) ^{***)}	Daya Dukung Pangan	Evaluasi
1	Sungai Rumbai	0	0,00	40.183	5.017	-	Defisit
2	Koto Besar	216,24	135,67	29.132	3.637	0,04	Defisit
3	Asam Jujuhan	394,48	247,50	41.112	5.133	0,05	Defisit
4	Koto Baru	6.688,27	4.196,22	41.970	5.240	0,80	Defisit
5	Koto Salak	6.980,17	4.379,36	18.923	2.363	1,85	Surplus
6	Tiumang	983,49	617,04	12.015	1.500	0,41	Defisit
7	Padang Laweh	5.100,63	3.200,14	14.277	1.783	1,80	Surplus
8	Sitiung	15.806,12	9.916,76	31.362	3.916	2,53	Surplus
9	Timpeh	4.194,86	2.631,86	17.710	2.211	1,19	Surplus
10	Pulau Punjung	12.147,41	7.621,29	73.261	9.147	0,83	Defisit
11	Sembilan Koto	5.751,51	3.608,50	10.928	1.364	2,64	Surplus
	Kab. Dharmasraya	58.263,2	36.554,32	330.874	41.313	0,88	Defisit

Gambar 2-34 Daya Dukung Pangan dengan Metode Supply dan Demand



2.6.1.2. Daya Dukung Air

Proyeksi kebutuhan air Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2030 dapat dilihat pada Tabel 2-145. Diperkirakan kebutuhan air untuk kebutuhan domestik mencapai 529,4 juta m³/tahun, untuk kebutuhan pertanian dan perkebunan adalah 930,9 m³/tahun, jadi proyeksi total kebutuhan air Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2030 adalah 2,39 milyar m³/tahun.

Tabel 2-145 Proyeksi Kebutuhan Air Kabupaten Dharmasraya Tahun 2030

Uraian	Jumlah Penduduk	Satuan	Kebutuhan Air (m ³ /org/tahun)	m ³ /tahun
Jumlah Penduduk	330.874	orang	1.600	529.398.011
Uraian	Besaran Luas Lahan (Alokasi RTRW)	Satuan	Kebutuhan Air (ltr/detik/Ha)	m ³ /tahun
Kawasan Perkebunan	173.061,00	Ha	0,3	1.637.295.509
Kawasan Pertanian Lahan Basah	4.822,00	Ha	1	152.066.592
Kawasan Pertanian Lahan Kering	7.664,00	Ha	0,3	72.507.571
TOTAL				2.391.267.683

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026

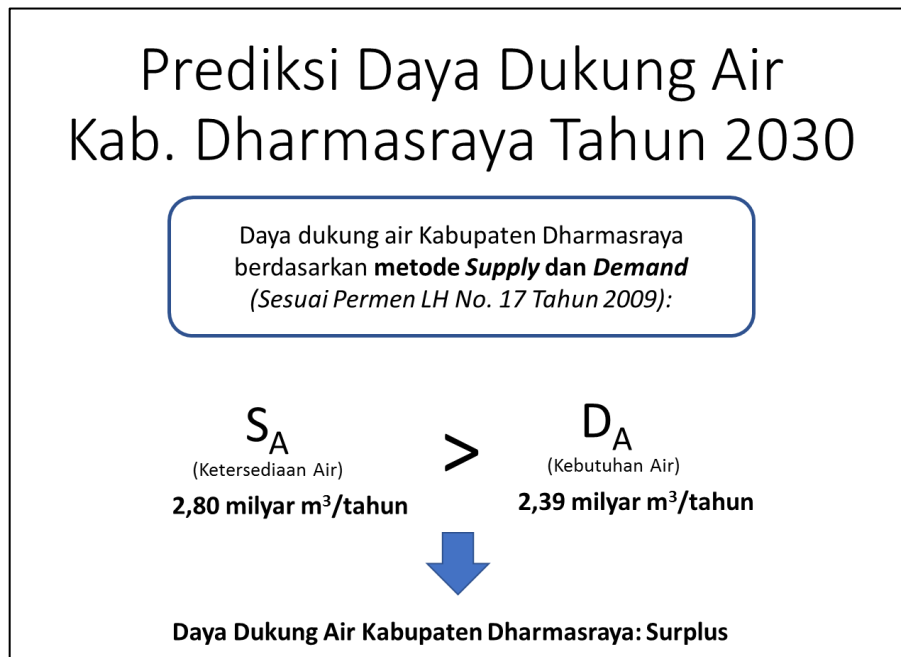
Potensi penyediaan air bersih Kabupaten Dharmasraya pada saat ini berasal dari 18 sungai dengan total potensi ketersediaan air 2,8 milyar m³/tahun, seperti terlihat pada Tabel 2-146. Kondisi daya dukung air permukaan Kabupaten Dharmasraya adalah surplus karena potensi ketersediaan air lebih besar dari prediksi kebutuhan seperti terlihat pada Tabel 2-146.

Tabel 2-146 Potensi Ketersediaan Sumber Air Kabupaten Dharmasraya

No	Nama Sungai	Debit Min (m ³ /dtk)	m ³ /tahun
1	Batang Hari*	45	1.419.120.000
2	Batang Siat*	0,43	13.560.480
3	Batang Pangian*	4,83	152.318.880
4	Sungai Pangian*	3,09	97.446.240
5	Batang Muaro Momongan	6,83	215.390.880
6	Batang Timpeh	2,94	92.715.840
7	Batang Piruko*	4,93	155.472.480
8	Batang Sinamar	5,13	161.779.680
9	Sungai Jujuhan	4,09	128.982.240
10	Batang Sipotar	1,02	32.166.720
11	Batang Timpeh Usau	1,2	37.843.200
12	Batang Labo	0,09	2.838.240
13	Batang Mimpi	4,01	126.459.360
14	Batang Bungo	0,99	31.220.640
15	Sungai Betung	1,12	35.320.320
16	Batang Siraho	0,21	6.622.560
17	Sungai Asam	2,03	64.018.080
18	Sungai Nabuan	0,92	29.013.120
Kab. Dharmasraya			2.802.288.960

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026

Gambar 2-35 Daya Dukung Air Permukaan dengan Metode Supply dan Demand



Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026

2.6.1.3. Daya Dukung Fungsi Lindung

Dari total luas lahan di Kabupaten Dharmasraya sekitar 299.062 Ha, sekitar 184.225,16 Ha yang mempunyai fungsi lindung. Fungsi lindung terluas terdapat pada rencana pola ruang kawasan perkebunan. Daya dukung lahan Kabupaten Dharmasraya dihitung berdasarkan rasio kawasan dengan fungsi lindung dengan total peruntukan lahan pada dokumen RTRW Kabupaten Dharmasraya.

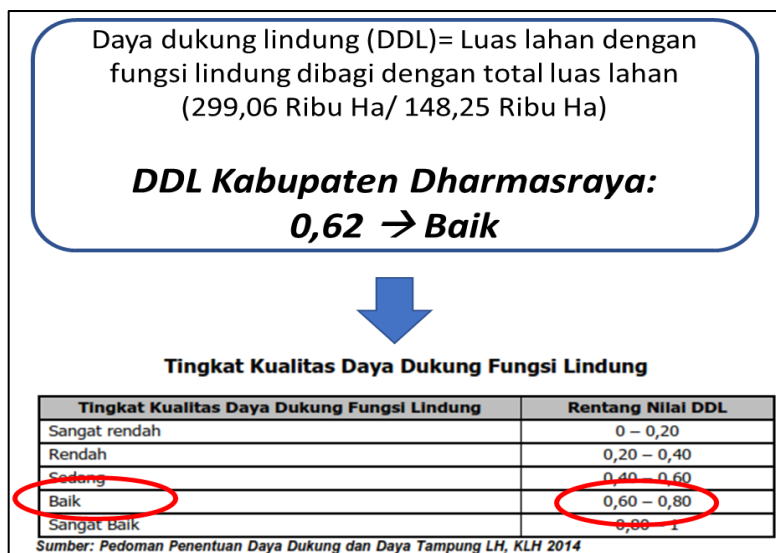
Daya dukung lahan Kabupaten Dharmasraya adalah 0,62. Nilai ini termasuk kategori sedang seperti terlihat pada Gambar 2-36. Gambar 2-36 Daya Dukung Fungsi Lindung Kabupaten Dharmasraya. Oleh karena itu, daya dukung fungsi lindung Kabupaten Dharmasraya membutuhkan upaya tambahan.

Tabel 2-147 Proyeksi Luas Lahan dengan Fungsi Lindung Kabupaten Dharmasraya

No	Rencana Pola Ruang	Luas (Ha)	Koefisien Lindung	Luas lahan dengan fungsi lindung
1	Hutan Lindung	11.406,00	0,98	11.177,88
2	Suaka Alam	5.372,00	0,98	5.264,56
3	Sempadan Sungai	6.605,00	0,98	6.472,90
4	Kawasan Cagar Budaya	918	0,98	899,64
5	Hutan Produksi	27.237,00	0,98	26.692,26
6	Hutan Produksi Konversi	17.901,00	0,98	17.542,98
7	Hutan Produksi Terbatas	28.296,00	0,98	27.730,08
8	Pertanian Lahan Basah	4.822,00	0,46	2.218,12
9	Pertanian Lahan Kering	7.664,00	0,46	3.525,44
10	Kawasan perkebunan	173.061,00	0,46	79.608,06
11	Kawasan Pertambangan	3.433,00	0,18	617,94
12	Kawasan Cadangan Pertanian	903	0,46	415,38
13	Kawasan Permukiman	11.444,00	0,18	2.059,92
	Kab. Dharmasraya	299.062,00		184.225,16

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026

Gambar 2-36 Daya Dukung Fungsi Lindung Kabupaten Dharmasraya



Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026

2.6.2. Analisis DDDTLH: Jasa Ekosistem

- ✓ Kabupaten Dharmasraya memiliki daya dukung yang sebagian besar adalah sangat rendah dan rendah untuk jasa penyediaan pangan dan air bersih, serta sebagian besar sedang dan rendah untuk jasa penyediaan sumberdaya genetik. Bagian wilayah memiliki daya dukung tinggi untuk jasa pangan, air bersih adalah wilayah dimana kepadatan penduduk adalah tinggi, sehingga terancam terjadi alih fungsi lahan dan tingginya pencemaran air.
- ✓ Jasa pengaturan yang daya tampungnya sebagian besar rendah dan sangat rendah adalah jasa tata aliran air dan banjir, pencegahan dan perlindungan dari bencana, dan pengolahan dan penguraian limbah. Sementara wilayah yang rendah dan sangat rendah daya tampungnya merupakan wilayah dimana terdapat permukiman masyarakat. Tekanan penduduk terhadap lingkungan, seperti pembuangan limbah besar peluangnya akan melampaui daya tampung. Selain itu, masyarakat juga menjadi semakin rentan terhadap bencana alam alam, termasuk banjir.
- ✓ Kabupaten Dharmasraya juga memiliki daya dukung yang amat terbatas untuk jasa budaya tempat tinggal dan ruang hidup serta jasa estetika. Tentunya ini mengindikasikan sempitnya wilayah kabupaten ini yang dapat dikembangkan untuk permukiman yang dapat aman dan layak.
- ✓ Kabupaten ini juga memiliki daya dukung dan daya tampung yang sebagian besar rendah dan sangat rendah untuk jasa pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan. Kondisi mengindikasikan bahwa sebagian besar wilayah Dharmasraya adalah sangat lamban terbentuknya lapisan tanah.
- ✓ Disisi lain, Kabupaten Dharmasraya memiliki daya dukung yang sebagian besar adalah sangat tinggi dan tinggi untuk jasa penyediaan serat, penyediaan energy, Jasa pengaturan kualitas udara, jasa pendukung siklus hara dan jasa pendukung biodiversitas. Namun demikian, daya dukung dan daya tampung yang sebagian besar sangat tinggi dan tinggi ini belum didukung pemanfaatannya yang optimal untuk mendukung pembangunan daerah.

Tabel 2-148 DDDTLH Jasa Ekosistem Kabupaten Dharmasraya

No	Jasa Ekosistem	Persentase Luas DDDTLH (%)		
		Sangat Tinggi & Tinggi	Sedang	Rendah & Sangat Rendah
	Jasa Penediaan			
1	Pangan	27,01	40,16	32,82
2	Air Bersih	8,60	41,84	49,56
3	Serat	99,06	0,24	0,70
4	Bahan Bakar	76,07	19,05	4,88
5	Sumberdaya Genetik	25,55	39,19	35,26
	Jasa Pengaturan			
1	Iklim	60,70	38,02	1,28
2	Tata Aliran Air dan Banjir	21,75	39,37	38,88
3	Pencegahan dan Perlindungan dari Bencana	27,98	29,00	43,02
4	Pemurnian Air	54,34	44,81	0,85
5	Pengolahan dan Penguraian Limbah	16,98	26,28	56,74
6	Kualitas Udara	98,87	0,34	0,80
7	Penyerbukan Alami (Pollination)	57,97	40,77	1,25
8	Pengendalian Hama dan Penyakit	49,49	41,09	9,42
	Jasa Budaya			
1	Tempat Tinggal dan Ruang Hidup	0,59	0,16	99,25
2	Rekreasi dan Ecotourism	24,84	55,25	19,91
3	Estetika	23,90	11,76	64,33
	Jasa Pendukung			
1	Pembentukan Lapisan Tanah dan Pemeliharaan Kesuburan	21,18	29,89	48,93
2	Siklus Hara (Nutrient Cycle)	80,21	11,51	8,28
3	Produksi Primer	42,60	18,69	38,70
4	Biodiversitas	93,19	5,99	0,82

Sumber : KLHS RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026

BAB 3. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Pengelolaan keuangan daerah secara umum dapat dilihat dari perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dari tahun ke tahun. Secara umum APBD terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. APBD digunakan untuk mendanai program/kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan prioritas pembangunan dalam perencanaan daerah serta untuk memenuhi kebutuhan rutin maupun hal mendesak dalam satu tahun anggaran bersangkutan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka APBD ditetapkan setiap tahunnya melalui peraturan daerah. Dimana kebutuhan dana untuk pembangunan yang terlihat dari jumlah belanja daerah selalu berada di atas kemampuan keuangan daerah/pendapatan daerah. Oleh sebab itu dengan mempertimbangkan keterbatasan keuangan tersebut maka perlu mempertimbangkan azas-azas pengelolaan keuangan daerah secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Dari aspek efektif, pembelanjaan daerah diharapkan mampu untuk mendanai program/kegiatan untuk mencapai target kinerja yang direncanakan. Sedangkan aspek efisien lebih mengukur memenuhi kebutuhan belanja dan jenis belanja yang benar-benar dibutuhkan untuk membiayai pelaksanaan program pembangunan. Pada azas transparan lebih kepada melihat keterbukaan informasi publik untuk mengakses informasi terkait dengan pendanaan pembangunan daerah. Sedangkan dari sisi akuntabel lebih pengelolaan keuangan daerah yang mampu mengelola keuangan daerah secara terukur berdasarkan sumber-sumber pendanaan sesuai dengan perkembangan potensi ekonomi daerah.

Untuk menyesuaikan antara kebutuhan pembangunan dalam periode RPJMD ini dengan kemampuan daerah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan daerah, maka proyeksi-proyeksi tersebut perlu didasarkan perkembangan kinerja keuangan masa lalu, sehingga dalam menganalisis pengelolaan keuangan daerah ke depan terlebih dahulu harus memahami potensi yang ada serta kemampuan daerah dalam mengelolanya pada masing-masing jenis obyek Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah sesuai dengan kewenangan daerah.

Pembahasan tentang gambaran umum keuangan daerah berhubungan dengan analisis kinerja pengelolaan keuangan daerah. Analisis ini dimaksudkan untuk menilai tentang sumber pendapatan daerah dan kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Untuk memahami kemampuan keuangan daerah tersebut, perlu analisis kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya. Berdasarkan hal tersebut dapat diproyeksikan pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagai kerangka pendanaan di masa datang.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah, serta kondisi Aset, Kewajiban (Utang), dan Ekuitas (Modal). Kinerja pengelolaan keuangan daerah dapat dianalisis dari Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Daerah. Dari Laporan Realisasi Anggaran dapat dinilai perkembangan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah, termasuk kebijakan dalam pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan tersebut. Dari Neraca Pemerintah Daerah dapat dianalisis kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi Utang melalui analisis

perkembangan elemen utama Aset Daerah, Kewajiban Daerah, dan Ekuitas Daerah, serta menggunakan rasio-rasio keuangan.

Dalam periode analisis pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Dharmasraya 2016-2020, terjadi 3 perubahan/kejadian mendasar yang berpengaruh signifikan terhadap keuangan daerah. Perubahan pertama tahun 2017 sehubungan dengan pengurangan kewenangan daerah kabupaten/kota karena pemberlakuan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain dalam urusan/bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, Kelautan, Kehutanan, dan Pendidikan. Pengurangan kewenangan urusan tersebut mengakibatkan pengurangan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Dharmasraya. Selanjutnya pengurangan ini mengakibatkan penurunan jumlah Dana Alokasi Umum (DAU), karena jumlah PNS merupakan salah satu variabel penentuan besaran DAU.

Pandemi Covid-19 yang terjadi tahun 2020 berpengaruh besar terhadap pelaksanaan APBD; tidak hanya penyesuaian jumlah DAU yang diterima daerah tetapi juga kebijakan refocusing Belanja Daerah. Perubahan ketiga adalah pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengakibatkan perubahan antara lain dalam klasifikasi Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Dengan demikian, analisis pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mempertimbangkan perubahan kondisi yang terjadi tahun 2017 dan tahun 2020.

Jumlah dan laju pertumbuhan rata-rata per tahun dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada tabel 3-1 di bawah

Tabel 3-1 Realisasi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 (Rp Juta)

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan Rata-Rata pertahun (%)
A	PENDAPATAN DAERAH	875.675,59	949.023,48	923.540,95	1.019.358,07	990.191,14	3,12
A1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	56.933,12	98.937,39	84.116,20	78.882,92	82.877,84	9,84
1	Pendapatan Pajak Daerah	11.559,90	14.933,09	29.231,34	19.178,96	17.751,81	11,32
2	Pendapatan Retribusi Daerah	4.769,48	4.186,56	2.655,85	3.054,85	1.866,61	(20,91)
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	4.216,46	3.834,41	3.177,29	3.590,31	4.063,75	(0,92)
4	Lain-lain PAD yang Sah	36.387,28	75.983,33	49.051,72	53.058,79	59.195,67	12,94
B	PENDAPATAN DANA PERIMBANGAN	740.796,80	696.906,89	708.972,42	761.630,74	731.498,44	(0,32)
1	Dana Bagi Hasil Pajak	21.116,34	11.207,22	17.647,99	13.711,56	12.973,43	(11,47)
2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1.731,74	2.048,58	1.729,96	2.116,62	2.174,08	5,85
3	Dana Alokasi Umum	507.913,22	501.682,28	501.889,28	524.888,50	478.355,77	(1,49)
4	Dana Alokasi Khusus	210.035,49	181.968,82	187.705,19	220.914,06	237.995,16	3,17
C	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	77.945,67	153.179,20	130.452,33	178.844,41	175.814,86	22,55
1	Dana Penyesuaian	35.357,32	96.844,02	60.749,03	97.546,29	99.826,68	29,63
2	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi	36.193,54	37.301,05	38.744,28	47.598,14	41.101,03	3,23
3	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	3.409,55	950,00	-	-	-	
4	Pendapatan Hibah	2.985,27	18.084,13	30.959,02	33.699,98	34.887,15	84,89
II	BELANJA DAERAH	881.881,59	935.591,35	931.599,59	1.036.553,41	985.750,17	2,82
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	448.829,51	424.581,62	491.682,44	556.278,28	545.148,19	4,98

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan Rata-Rata pertahun (%)
1	Belanja Pegawai	354.263,31	316.349,17	353.644,85	383.764,18	373.993,88	1,36
2	Hibah	15.379,02	5.621,22	30.837,84	49.451,25	38.795,44	26,03
3	Bantuan Sosial	-	184,00	194,50	3.132,00	164,00	(3,76)
4	Bagi Hasil Pajak Ke Desa	-	846,61	1.366,44	3.170,65	933,02	3,29
5	Bantuan Keuangan Ke Desa / Parpol	78.594,65	101.202,85	104.894,47	116.736,02	106.337,58	7,85
6	Belanja Tak Terduga	592,54	377,77	744,34	24,18	24.924,27	154,67
B	BELANJA LANGSUNG	433.052,08	511.009,74	439.917,14	480.275,13	440.601,98	0,43
1	Belanja Pegawai	863,19	481,42	726,98	46.376,91	44.049,27	167,27
2	Belanja Barang dan Jasa	166.760,73	240.093,76	223.663,20	207.300,13	201.505,78	4,85
3	Belanja Modal	265.428,16	270.434,56	215.526,96	226.598,09	195.046,93	(7,41)
	SURPLUS / (DEFISIT)	(6.206,00)	13.432,13	(8.058,63)	(17.195,34)	4.440,97	
C	PEMBIAYAAN DAERAH						
C1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN						
1	Penggunaan SiLPA	26.192,16	21.931,31	31.647,42	23.588,79	3.893,45	(37,91)
2	Penerimaan Piutang Daerah	479,65	-	-	-	-	(100,00)
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	26.671,81	21.931,31	31.647,42	23.588,79	3.893,45	(38,19)
C2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN						
1	Penyertaan Modal Pem. Daerah	-	3.716,00	-	2.500,00	-	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		3.716,00	-	2.500,00		
	PEMBIAYAAN NETTO	26.671,81	18.215,31	31.647,42	21.088,79	3.893,45	(38,19)
	Koreksi SiLPA	1.945,16					
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	22.410,97	31.647,43	23.588,79	3.893,45	8.334,42	(21,91)

Sumber: Badan Keuangan Daerah, Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

3.1.1.1. Pendapatan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. Sumber penerimaan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya berasal dari Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan. Pendapatan Daerah meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ;
2. Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus ; dan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil dari Pemda Lainnya, dan Dana Insentif Daerah.

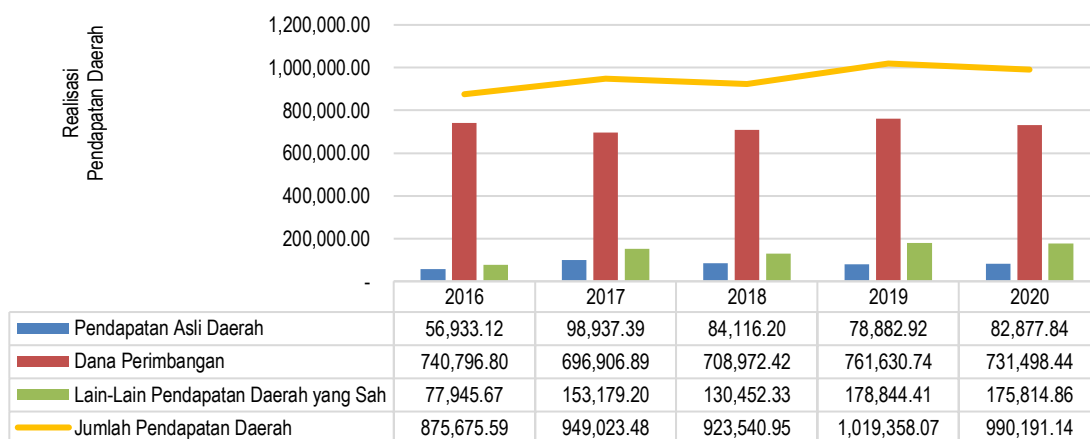
Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tahun 2016-2020 mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun relatif rendah. Pendapatan Daerah mengalami peningkatan rata-rata sebesar 3,12% per tahun, yaitu dari Rp875.675,59 juta tahun 2016 menjadi Rp990.191,14 juta tahun 2020. Laju pertumbuhan yang rendah tersebut dipengaruhi 2 perubahan, penurunan kewenangan daerah dan dampak kebijakan pemotongan DAU. Pengurangan kewenangan daerah karena implementasi UU 23 tahun 2004 mengakibatkan penurunan jumlah alokasi DAU dari Pemerintah Pusat tahun 2017. Namun demikian, penurunan DAU tersebut diikuti dengan kenaikan PAD dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan jumlah lebih tinggi. Penerimaan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dari Dana Perimbangan turun dari Rp740.796,80 juta tahun 2016 menjadi

Rp696.906,89 juta tahun 2017, tapi dalam periode yang sama, PAD naik dari Rp56.933,12 juta menjadi Rp98.937,39 juta, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah naik dari Rp77.945,67 juta menjadi Rp153.179,20 juta.

Kebijakan Pemerintah Pusat untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19 dengan mengurangi Dana Perimbangan, mengakibatkan tahun 2020 terjadi penurunan Pendapatan Daerah dari Rp1.019.358,07 juta tahun 2019 menjadi Rp990.191,14 juta tahun 2020. Penurunan ini terutama disebabkan penurunan penerimaan DAU, sedangkan PAD dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tidak banyak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya.

Dalam periode 2017-2019, PAD menunjukkan tren penurunan. Sebaliknya Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah menunjukkan tren peningkatan. Perkembangan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Gambar 3-1.

Gambar 3-1 Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 (Rp juta)



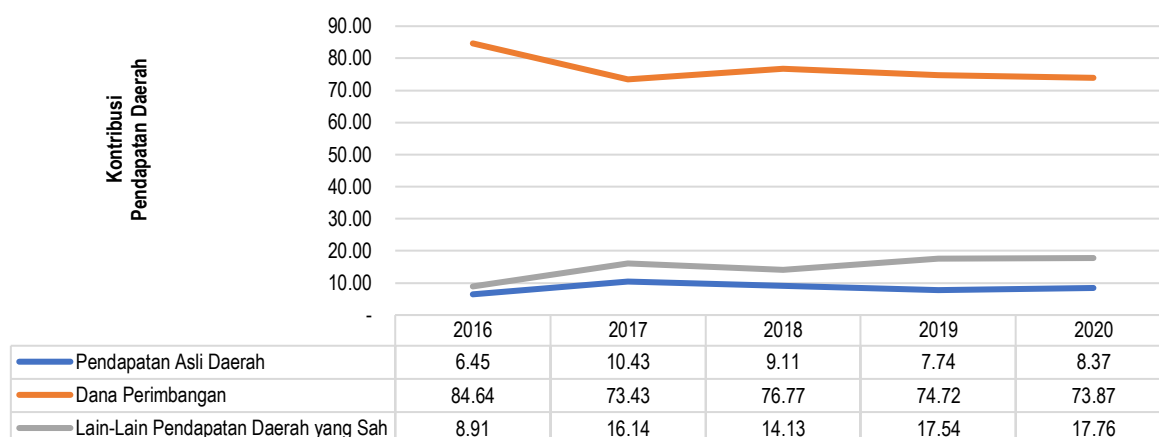
Sumber: Badan Keuangan Daerah, Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

Pendapatan Asli Daerah yang berfluktuasi dengan tren cenderung meningkat, mengakibatkan kontribusi PAD terhadap sumber Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya lainnya mengalami peningkatan. Namun peningkatan cenderung mengalami penurunan, yaitu dari 10,43% tahun 2017 menjadi 8,37% tahun 2020.

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa pengurangan kewenangan daerah kabupaten/kota mengakibatkan alokasi DAU turun sehingga kontribusi DAU terhadap Pendapatan Daerah turun pada tahun 2017 dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari 84,64% menjadi 73,43%. Tetapi, pada tahun-tahun berikutnya tidak banyak mengalami perubahan.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah juga menunjukkan laju pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan Dana Perimbangan, dan juga secara konsisten mengalami peningkatan antara tahun 2017-2020, mengakibatkan kontribusi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah menunjukkan tren peningkatan, yaitu dari 16,14% tahun 2017 menjadi 17,76% tahun 2020. Perkembangan kontribusi sumber Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Gambar 3-2.

Gambar 3-2 Kontribusi Sumber Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 (%)



Sumber: Badan Keuangan Daerah, Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

A. Pendapatan Asli Daerah

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

1. Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehingga pajak sifatnya mengikat objek pajak, jika tidak dibayar maka wajib pajak akan menerima sanksi sebagaimana di atur oleh perundang-undangan. Selain sebagai Sebagai sumber pendapatan daerah (budgetary), pajak juga berfungsi sebagai alat pengatur (regulatory) untuk berbagai kebijakan daerah.
2. Retribusi Daerah, merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat. Penyetaan modal yang dilakukan adalah dari bagian laba dari Bank Nagari serta beberapa BPR.
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah merupakan jenis pendapatan yang disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak, retribusi, maupun hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan ini juga merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Pendapatan ini berasal dari jasa giro, pendapatan bunga bank atas deposito, pelayanan air minum, pendapatan BLUD serta dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN).

Sumber utama Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya adalah Lain-lain PAD yang Sah. Jumlah pendapatan dari Lain-lain PAD yang Sah antara tahun 2016-2020 cenderung berfluktuasi. Jika tahun 2016 penerimaan Lain-lain PAD yang Sah berjumlah Rp36.387,28 juta dan

meningkat menjadi Rp75.983,33 juta tahun 2017, tetapi tahun 2018 turun menjadi Rp49.051,72 juta. Peningkatan yang terjadi pada tahun 2017 ini disebabkan Pendapatan Dana Bos sebesar Rp28.771,60 juta dicatat sebagai Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, sedangkan pada tahun-tahun berikutnya dicatat sebagai Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pada tahun 2020, Lain-lain PAD yang Sah yang dihasilkan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya berjumlah Rp59.195,67 juta. Dengan demikian, antara tahun 2016-2020 terjadi pertumbuhan rata-rata per tahun 12,94%. Sumber utama pendapatan Lain-lain PAD yang Sah adalah pendapatan RSUD Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya yang dikelola dengan menggunakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD). Pada masa datang RSUD Sungai Dareh Kabupaten Dharmasraya dapat menjadi Andalan Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat Dharmasraya dan juga kabupaten/kota tetangga Provinsi Jambi.

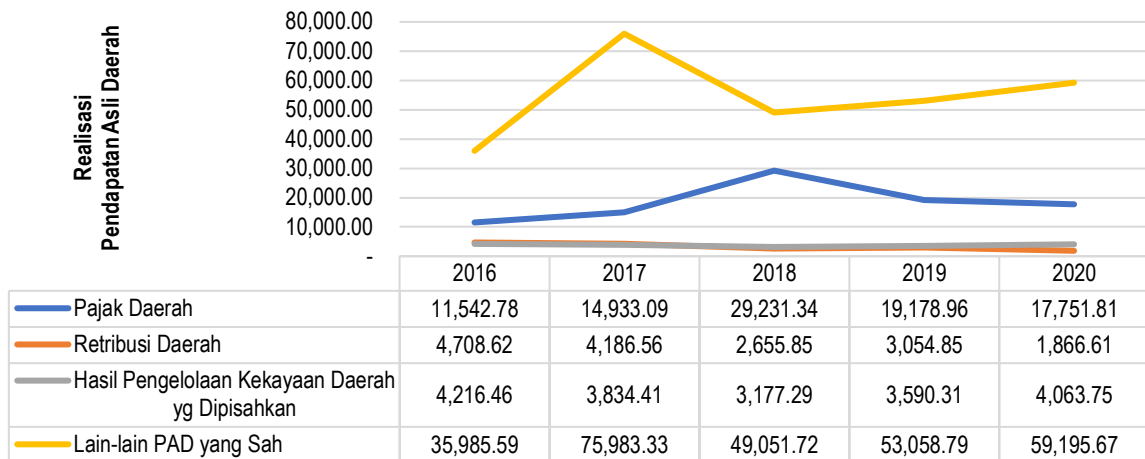
Pendapatan yang berasal dari Pajak Daerah berfluktuasi; antara tahun 2016-2018 terjadi peningkatan dari Rp11.559,90 tahun 2016 menjadi Rp29.231,34 tahun 2018, tetapi tahun-tahun berikutnya turun sehingga tahun 2020 menjadi Rp17.751,81 juta. Peningkatan yang signifikan pada tahun 2018 disebabkan perpanjangan BPHTB dari PT Andalas Wahana Berjaya (AWB) di Kabupaten Dharmasraya dengan nilai Rp12.024,28 juta. Salah satu kelemahan dalam pemungutan Pajak Daerah ini adalah masalah kepatuhan Wajib Pajak. Oleh sebab itu, kebijakan dan upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan penerimaan Pajak Daerah selama ini harus dievaluasi termasuk peraturan perundangan-undangan agar kebijakan sanksi yang tegas dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Hal yang sama juga terjadi pada Retribusi Daerah; dari tahun 2016-2020 selalu menunjukkan penurunan. Retribusi Daerah tahun 2016 berjumlah Rp4.769,48 juta dan tahun 2020 menjadi Rp1.866,61 juta. Dengan demikian, dalam periode 2016-2020 terjadi pertumbuhan rata-rata minus 20,91% per tahun. Sama halnya dengan Pajak Daerah, kebijakan dan upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan penerimaan Pajak Daerah selama ini harus lebih dievaluasi termasuk peraturan perundangan-undangan agar sanksi yang tegas dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Retribusi.

Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya masih relatif kecil dan sedikit mengalami penurunan. Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ini mengalami penurunan dari Rp4.216,46 juta menjadi Rp4.063,75 juta tahun 2020. Berarti dalam kurun waktu tersebut terjadi pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar minus 0,92%. Sumber utama dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ini berasal dari Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat atau lebih dikenal Bank Nagari.

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Gambar 3-3.

Gambar 3-3 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 (Rp juta)



Sumber: Badan Keuangan Daerah, Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

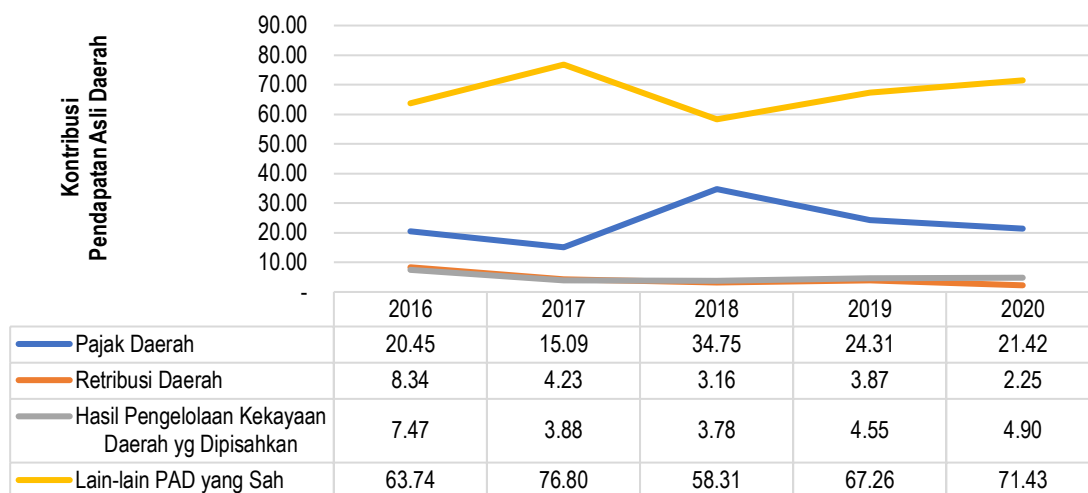
Analisis kontribusi masing-masing sumber PAD menunjukkan bahwa Lain-lain PAD yang Sah memberikan kontribusi terbesar tetapi mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Kontribusi Lain-lain PAD yang Sah tahun 2016 adalah 63,91%, naik menjadi 76,80% tahun 2017, tetapi turun menjadi 58,31% tahun 2018. Namun demikian, pada tahun-tahun berikutnya mengalami peningkatan sehingga menjadi 71,43% tahun 2020.

Kontribusi terbesar kedua adalah Pajak Daerah, yang kontribusinya juga mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, yaitu dari 20,30% tahun 2016 menjadi 15,08% tahun 2017, kembali naik tahun 2018 menjadi 34,75. Namun demikian, peningkatan ini tidak dapat dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya. Bahkan cenderung turun sehingga menjadi 21,42% tahun 2020.

Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, sama-sama menunjukkan tren kontribusi penurunan. Namun penurunan laju pertumbuhan Retribusi Daerah lebih tinggi dibandingkan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, yaitu minus 27,99% berbanding 9,80%.

Perkembangan kontribusi sumber Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Gambar 3-4.

Gambar 3-4 Kontribusi Sumber Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 (%)

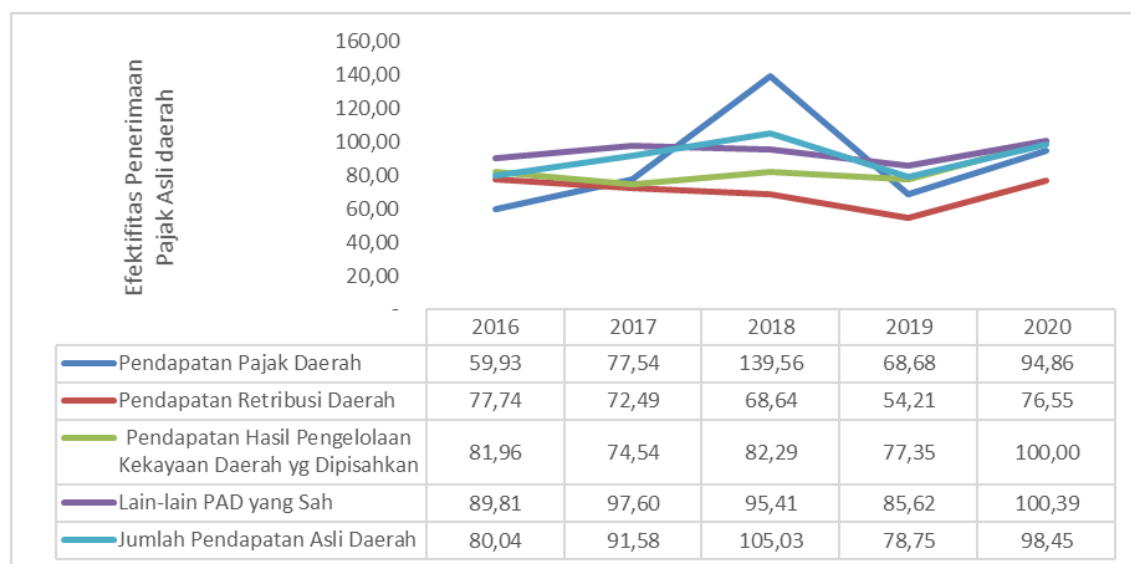


Sumber: Badan Keuangan Daerah, Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

Analisis perbandingan realisasi dengan anggaran (efektifitas penerimaan) PAD Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tergolong kurang efektif, karena tidak setiap tahun periode 2016-2020 di atas 90%. Efektifitas penerimaan terendah terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 78,75%, dan yang tertinggi terjadi tahun 2018 yaitu sebesar 105,03%. Jika dibandingkan efektifitas penerimaan sumber-sumber PAD tersebut, pendapatan dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan memiliki tingkat efektifitas penerimaan rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan dengan Retribusi Daerah.

Bahkan, efektifitas penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pernah kurang dari 60%. Oleh sebab itu, peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dan Retribusi Daerah merupakan salah fokus kebijakan yang mutlak perlu ditingkatkan. Perkembangan efektifitas penerimaan PAD dapat dilihat pada gambar 3-5

Gambar 3-5 Efektifitas Penerimaan PAD Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020



Sumber: Badan Keuangan Daerah, Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

B. Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari APBN/dana pusat yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil (DBH) pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK).

1. DBH terdiri dari DBH pajak dan DBH bukan pajak. DBH pajak berasal dari Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPH WPOPDN), dan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH Pasal 21). Sedangkan DBH bukan pajak atau disebut juga dengan DBH sumber daya alam (SDA) terdiri dari Kehutanan, Pertambangan Umum, Perikanan, Pertambangan Minyak Bumi, Pertambangan Gas Bumi; dan Pertambangan Panas Bumi.
2. Dana Alokasi Umum (DAU), merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Secara nasional Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto dan ditetapkan dalam APBN.

Perhitungan besaran DAU dihitung oleh Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD). Besaran DAU dapat dilihat dari formula berikut :

$$\text{DAU} = \text{Alokasi dasar (AD)} + \text{Celah Fiskal (CF)}$$

Besaran alokasi dasar diperoleh dari besaran gaji PNS Daerah, sedangkan celah fiskal dihitung dengan mengalikan bobot celah fiskal daerah bersangkutan dengan alokasi DAU celah fiskal nasional. Untuk celah fiskal suatu daerah dihitung berdasarkan selisih antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal

Kebutuhan fiskal daerah dihitung berdasarkan perkalian antara total belanja daerah rata-rata dengan penjumlahan dari perkalian masing-masing bobot variabel dengan indeks jumlah penduduk, indeks luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, Indeks Pembangunan Manusia, dan indeks Produk Domestik Regional Bruto perkapita. Sedangkan kapasitas fiskal daerah merupakan penjumlahan dari Pendapatan Asli Daerah dan DBH. Sedangkan kapasitas fiskal ditetapkan setiap tahunnya oleh kementerian keuangan, di tahun 2020 berdasarkan PMK Nomor 120/PMK.07/2020, kapasitas fiskal Kabupaten Dharmasraya termasuk daerah kategori rendah yaitu dengan indeks kapasitas fiskal (IKF) sebesar 0,540. Kapasitas tinggi apabila IKF berada di angka 1 atau lebih. Salah satu perubahan dalam perhitungan DAU sejak tahun 2016, bahwa Kementerian Keuangan tidak lagi menggunakan data penduduk dari BPS sebagai data dasar, namun sudah menggunakan data kependudukan dan catatan sipil.

3. Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Setiap tahun pemerintah menetapkan jenis DAK sekaligus menetapkan bidang-bidang yang akan dibiayai melalui dana pusat sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun bersangkutan. Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Sedangkan besaran alokasi DAK masing-masing daerah ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Khusus untuk DAK Fisik besarnya ditentukan setelah adanya

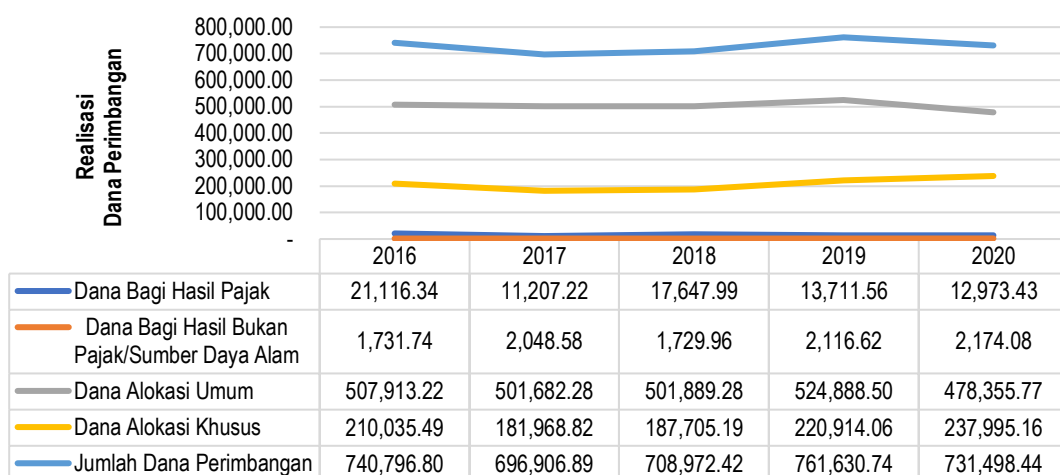
persetujuan pemerintah atas usulan kegiatan yang diusulkan oleh pemerintah daerah melalui aplikasi Krisna yang dikoordinasikan oleh Bappenas. dengan melibatkan Kementerian/Lembaga terkait.

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa Dana Perimbangan mengalami penurunan pada tahun 2017 dibandingkan tahun sebelumnya karena pengurangan kewenangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya sesuai diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu dari Rp740.796,80 juta tahun 2016 menjadi Rp. 696.906,89 juta tahun 2017. Selama 3 tahun berikutnya mengalami peningkatan dengan laju pertumbuhan 3,00%, sehingga menjadi Rp761.630,74 juta tahun 2019. Tetapi, tahun 2020 turun menjadi Rp731.498,44 juta. Hal ini terjadi akibat kebijakan Pemerintah untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19 sehingga ada pengurangan Dana Alokasi Umum. Dengan demikian, pertumbuhan rata-rata per tahun penerimaan Dana Perimbangan dalam kurun waktu tahun 2016-2020 minus 0,32%.

Analisis berdasarkan tingkat pertumbuhan menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil Pajak menunjukkan tingkat pertumbuhan rata-rata minus tertinggi dibandingkan dengan sumber pendapatan Dana Perimbangan lainnya. Pertumbuhan rata-rata per tahun Dana Bagi Hasil Pajak adalah minus 11,47%, yaitu dari Rp21.116,34 juta tahun 2016 menjadi Rp12.973,43 juta tahun 2020.

DAU merupakan pendapatan Dana Perimbangan yang memiliki pertumbuhan minus tertinggi kedua, yaitu dari Rp507.913,22 jta tahun 2016 menjadi Rp478.355,77 juta tahun 2020, atau tumbuh minus 1,49% per tahun. Sedangkan pendapatan DAK dan Dana Bagi Hasil Alam dan masih mengalami pertumbuhan positif, masing sebesar 3,17% dan 5,85%. Perkembangan Pendapatan Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Gambar 3-6

Gambar 3-6 Realisasi Pendapatan Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 (Rp juta)

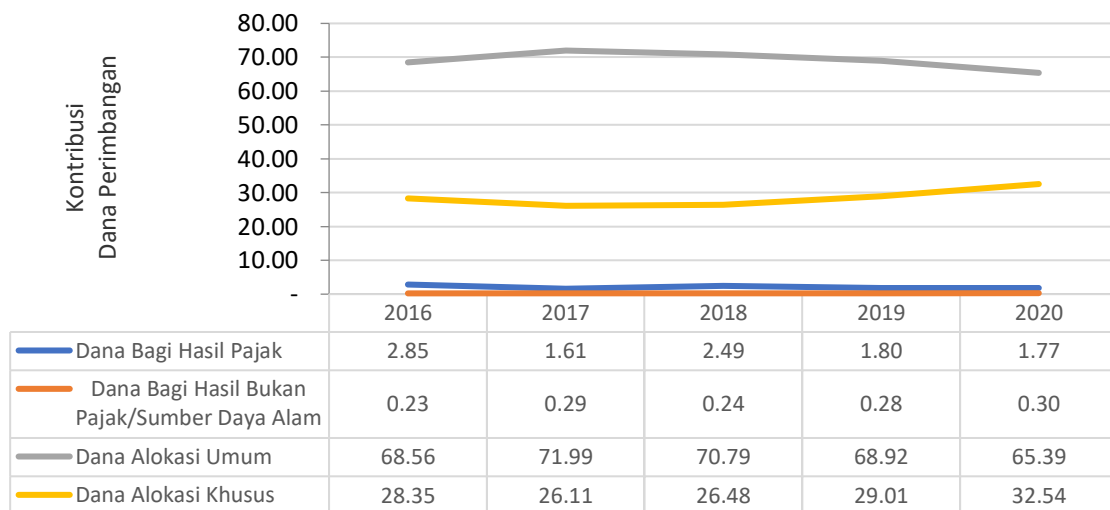


Sumber: Badan Keuangan Daerah, Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

Jumlah pendapatan DAU jauh lebih besar dibandingkan sumber penerimaan Dana Perimbangan lainnya, mengakibatkan perbedaannya menjadi lebar, namun sedikit turun tahun 2020, yaitu dari 68,56% tahun 2016 menjadi 65,39% tahun 2020. Sebaliknya, Dana Alokasi Khusus mengalami peningkatan dari 28,35% pada tahun 2016 menjadi 32,54% tahun 2020. Jika dilihat pertumbuhan rata-rata per tahun, hanya kontribusi pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dan DAU

yang menunjukkan pertumbuhan minus, sehingga perbedaan kontribusi DAU menurun dan DAK meningkat. Sedangkan jenis pendapatan Dana Perimbangan lainnya masih memiliki pertumbuhan kontribusi yang positif. Perkembangan kontribusi jenis pendapatan Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Gambar 3-7.

Gambar 3-7 Kontribusi Sumber Pendapatan Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 (%)

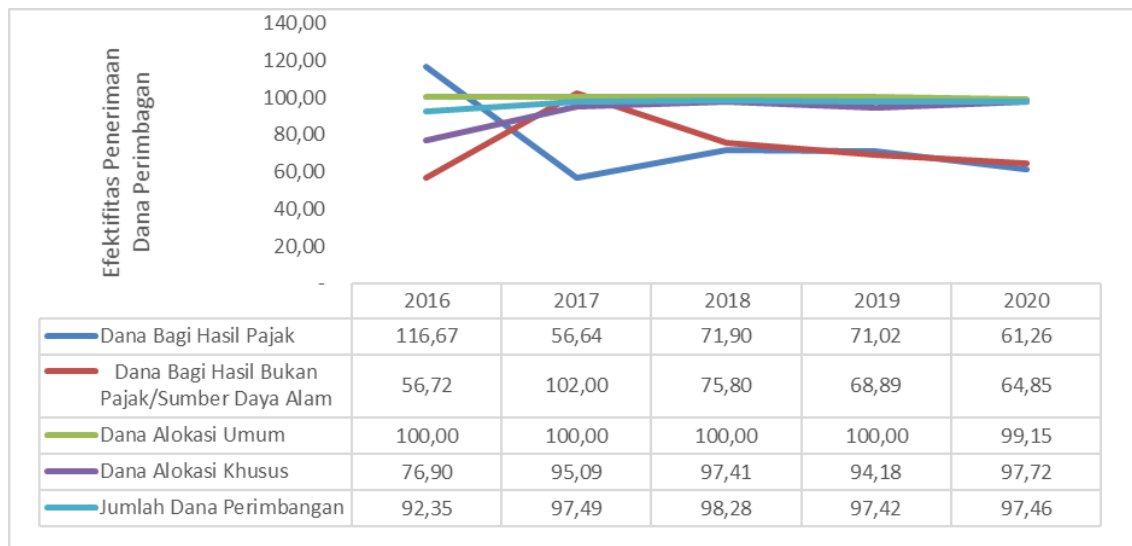


Sumber: Badan Keuangan Daerah, Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

Analisis perbandingan realisasi dengan anggaran Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tergolong efektif, rata-rata setiap tahun di atas 90%. Efektifitas penerimaan terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 92,35%, dan yang tertinggi terjadi tahun 2018 yaitu sebesar 98,28%. Jika dibandingkan efektifitas penerimaan sumber-sumber Dana Perimbangan tersebut, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam merupakan sumber Dana Perimbangan yang memiliki tingkat efektifitas penerimaan rata-rata yang lebih rendah dibandingkan dengan sumber Dana Perimbangan lainnya. Secara logika, hal ini tidak mungkin terjadi karena PDRB Kabupaten Dharmasraya menunjukkan peningkatan sehingga seharusnya DBH Pajak dan Bukan Sumber Daya Alam seharusnya juga meningkat. Untuk itu kelemahan dalam DBH ini seperti NPWP pajak orang pribadi dan badan yang bekerja/beraktivitas dan atau beroperasi di Kabupaten Dharmasraya harus menggunakan alamat di Kabupaten Dharmasraya.

Perkembangan efektifitas penerimaan Dana Perimbangan dapat dilihat pada Gambar 3-8.

Gambar 3-8 Efektifitas Penerimaan Dana Perimbangan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020



Sumber: Badan Keuangan Daerah, Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

C. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan. Sumber penerimaannya berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya., selama periode tahun 2016 sampai 2020 hanya ada 4 sumber penerimaan, terkecuali dana darurat.

- ✓ Pendapatan hibah, pendapatan hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat. Sumber pendapatan hibah selama ini berasal dari badan usaha atau perusahaan yang berada di wilayah Dharmasraya.
- ✓ Bagi hasil pajak dari provinsi, alokasi bagi hasil pajak provinsi ditetapkan melalui SK gubernur Sumatera Barat. Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 26 Tahun 2011, tentang Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera barat, terdapat 5 (lima) jenis bagi hasil pajak provinsi terhadap kab/kota yaitu: pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan terakhir adalah pajak rokok.
- ✓ Dana penyesuaian dan otonomi khusus. Merupakan dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat. Dana penyesuaian bisa dikatakan dibelanjakan bukan dalam bentuk belanja langsung, namun di kabupaten hanya berfungsi sebagai “uang singgah” dan disalurkan melalui belanja tidak langsung. Misalnya dana desa yang masuk melalui dana penyesuaian, lalu di alokasikan ke nagari dalam bentuk bantuan keuangan kepada desa/nagari yang berasal dari dana desa yang dianggarkan langsung oleh pusat serta alokasi dana desa yang berasal dari APBD kabupaten, besaran alokasi dana desa yaitu 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan diluar dana alokasi khusus (DAK). Sejalan dengan peningkatan dana yang ditransfer ke nagari, maka perlu menjaga kualitas penggunaan dana desa melalui intensifikasi peran kabupaten untuk melakukan monitoring dan evaluasi penggunaan dana desa tersebut.

- ✓ Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya, merupakan dana yang diterima oleh pemerintah kabupaten dengan pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya. jenis pendapatan ini dapat bersifat umum maupun bersifat khusus. Artinya jika bersifat khusus maka kabupaten dapat mengalikasinya sesuai dengan kebutuhan daerah, namun jika bersifat khusus maka kabupaten sudah menerima dana sesuai dengan pengalokasian yang sudah ditentukan sebelumnya. Perubahan proporsi pendapatan daerah lebih dominan disebabkan oleh adanya peningkatan jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah di dalam pendapatan ini termasuk dana desa yang berasal dari pusat yang dianggarkan untuk 52 nagari.

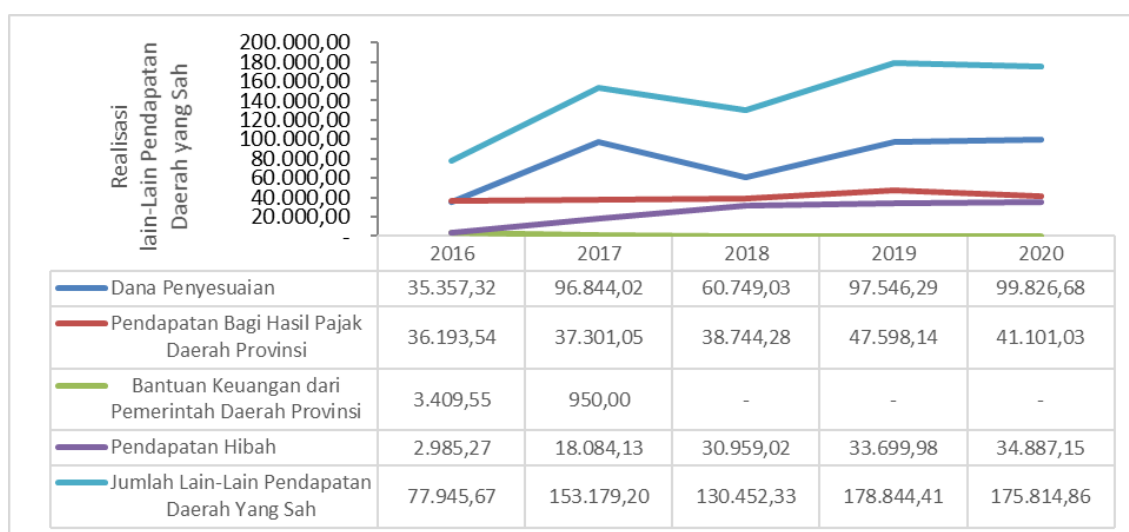
Sumber Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang dihasilkan dalam 5 tahun terakhir juga mengalami perkembangan yang berfluktuasi. Sumber penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berasal dari Dana Penyesuaian, Bagi Hasil Pajak Provinsi, dan Pendapatan Hibah. Dari ketiga sumber tersebut, Bagi Hasil Pajak Provinsi relatif mengalami perkembangan yang stabil, kecuali tahun 2020. Perkembangan jumlah pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Tahun 2016 Rp36.193,54 juta dan meningkatkan menjadi Rp47.598,14 juta tahun 2019. Sejalan penurunan penerimaan Pajak Daerah Provinsi Sumatera Barat, maka tahun 2020 jumlah Bagi Hasil Pajak dari Provinsi untuk Pemerintah Kabupaten Dharmasraya juga turun menjadi Rp41.101,03 juta. Secara keseluruhan, pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 3,23%.

Pendapatan Dana Penyesuaian meningkat signifikan tahun 2016 dari Rp35.357,32 juta, dan meningkat menjadi Rp96.844,02 juta tahun 2017, dan sedikit mengalami peningkatan tahun-tahun berikutnya sehingga menjadi Rp99.826,68 juta tahun 2020. Dengan dalam tahun 2016-2020 terjadi pertumbuhan rata-rata per tahun 29,63%. Namun antara 2017-2020 terjadi pertumbuhan rata-rata 1,02%.

Pendapatan Hibah yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam 3 tahun terakhir mengalami sedikit peningkatan. Pendapatan Hibah yang diperoleh tahun 2018 berjumlah Rp30.959,02 juta dan meningkat menjadi Rp34.887,15 juta tahun 2020. Dengan demikian, dalam 3 tahun terakhir, jumlah Pendapatan Hibah tumbuh rata-rata per tahun 6,15%.

Perkembangan Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada

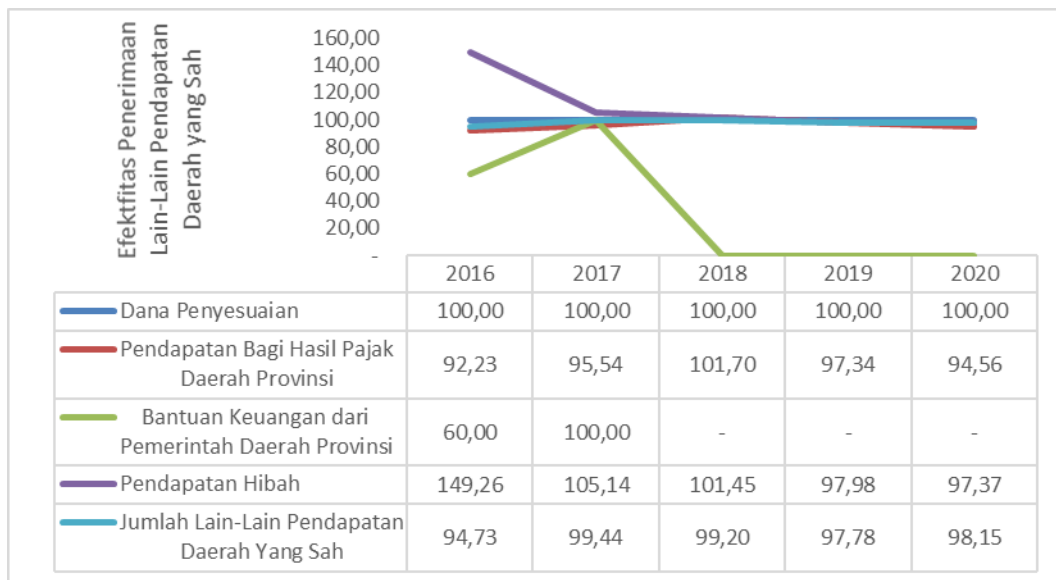
Gambar 3-9 Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 (Rp juta)



Sumber: Badan Keuangan Daerah, Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

Analisis efektifitas penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tergolong efektif, rata-rata setiap tahun di atas 90%. Efektifitas penerimaan terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 60,60%, dan yang tertinggi terjadi tahun 2017 yaitu sebesar 149,26%. Kecuali Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi, sumber pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah lainnya di atas 90,00%. Perkembangan efektifitas penerimaan Dana Perimbangan dapat dilihat pada Gambar 3-10.

Gambar 3-10 Efektifitas Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020



Sumber: Badan Keuangan Daerah, Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

3.1.1.2. Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah dilakukan berdasarkan klasifikasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung lebih fokus untuk pengeluaran/operasional rutin pemerintah daerah, dan tidak berhubungan dengan pelaksanaan program atau kegiatan tertentu. Sedangkan Belanja Langsung berhubungan dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pembangunan daerah.

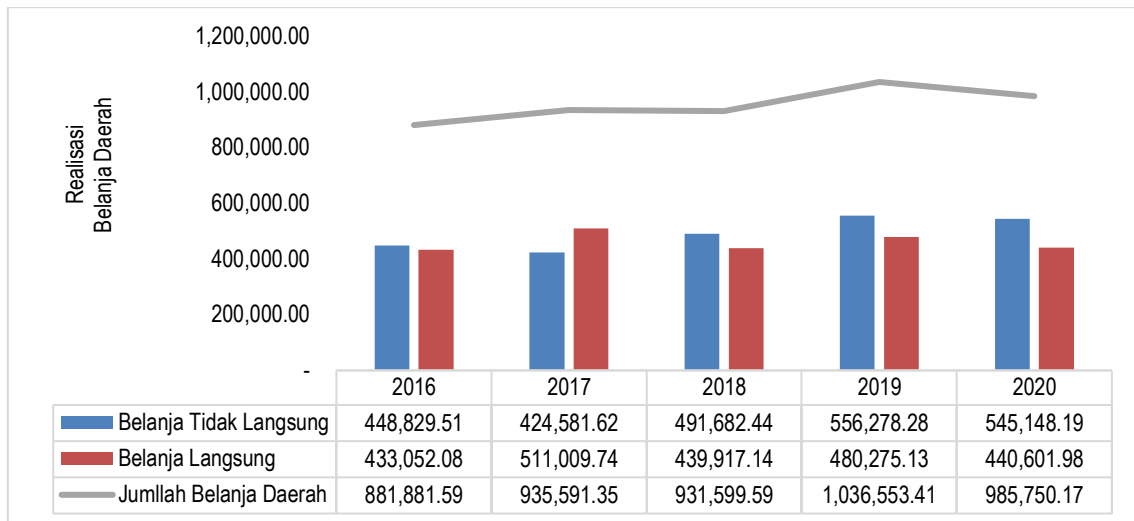
Jumlah Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mengalami peningkatan dari Rp881.881,59 juta tahun 2016 menjadi Rp1.036.553,41 juta tahun 2019, tetapi sedikit turun menjadi Rp985.748,83 juta pada tahun 2020 karena dampak pandemi Covid-19. Hal ini berarti dalam laju pertumbuhan rata-rata per tahun dalam periode tersebut 2,82%.

Jumlah Belanja Tidak Langsung tahun 2017 lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja Tidak Langsung tahun 2016 berjumlah Rp448.829,51 juta dan turun menjadi Rp424.581,62 juta tahun 2017. Tetapi, tahun-tahun berikutnya mengalami peningkatan yang stabil sehingga jumlah Belanja Tidak Langsung tahun 2020 Rp545.148,19 juta. Hal ini berarti dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terjadi pertumbuhan rata-rata 4,98% per tahun.

Belanja Langsung mengalami perkembangan berfluktuasi. Jumlah Belanja Langsung tahun 2016 berjumlah Rp443.052,08 juta, meningkat menjadi Rp511.009,74 juta tahun 2017, tetapi turun menjadi Rp439.917,14 juta tahun 2018. Walaupun pada tahun 2019 mengalami peningkatan, namun Belanja Langsung ini kembali turun menjadi Rp440.601,98 juta tahun 2020. Penurunan ini terjadi karena kebijakan Pemerintah Pusat melakukan pengurangan dana DAU dan refocusing anggaran guna membantu mengatasi Pemerintah Pusat dampak pandemi Covid-19. Penurunan tahun 2020 telah mengakibatkan laju pertumbuhan Belanja Langsung dalam waktu 5 tahun terakhir menjadi minus 0,43%.

Perkembangan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Gambar 3-11.

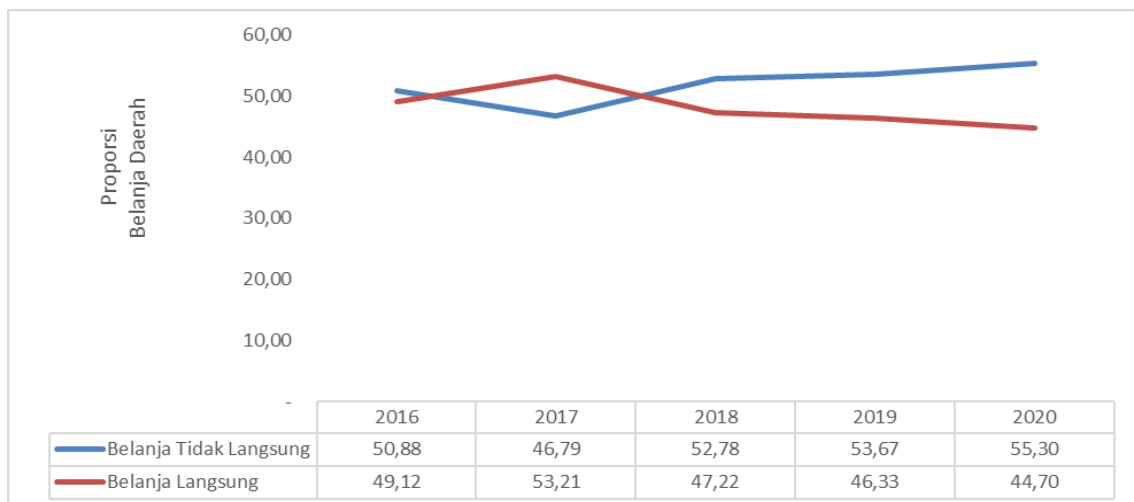
**Gambar 3-11 Realisasi Belanja Daerah Pemerintah
Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 (Rp juta)**



Sumber: Badan Keuangan Daerah, Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

Fenomena yang menarik untuk dianalisis lebih lanjut adalah adanya perubahan proporsi jumlah belanja. Pada tahun 2017 jumlah Belanja Langsung lebih besar dibandingkan tahun lainnya antara 2016-2020 lainnya. Hal ini terjadi karena tahun 2017 tersebut terjadi peningkatan Belanja Barang dan Jasa yang signifikan. Tetapi pada tahun-tahun berikutnya mengalami penurunan, dan sebaliknya Belanja Tidak Langsung mengalami peningkatan. Proporsi Belanja Daerah sebagaimana dijelaskan di atas dapat dilihat pada Gambar 3-12.

Gambar 3-12 Proporsi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 (%)



Sumber: Badan Keuangan Daerah, Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

A. Belanja Tidak Langsung

Analisis lebih rinci dari Belanja Tidak Langsung menunjukkan dominasi Belanja Pegawai; lebih dari 68,00% Belanja Tidak Langsung tersebut merupakan Belanja Pegawai. Kecuali tahun 2017,

jumlah Belanja Tidak Langsung menunjukkan tren peningkatan. Penurunan Belanja Tidak Langsung tahun 2017 tersebut disebabkan penurunan jumlah pegawai akibat pengurangan kewenangan daerah kabupaten/kota sebagai implikasi dari pemberlakuan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, antara lain dalam urusan/bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, Kelautan, Kehutanan, dan Pendidikan.

Akibat penurunan jumlah pegawai Pemerintah Kabupaten Dharmasraya sebagaimana dijelaskan di atas, mengakibatkan Belanja Pegawai Tidak Langsung mengalami penurunan dari Rp354.263,31 juta tahun 2016 menjadi Rp316.349,17 juta tahun 2017. Pada tahun-tahun berikutnya terjadi peningkatan menjadi Rp383.764,18 juta tahun 2019 dan turun menjadi Rp373.993,88 juta tahun 2020. Dengan demikian, terdapat tren peningkatan Belanja Pegawai Tidak Langsung dengan laju pertumbuhan rata-rata 1,36% per tahun.

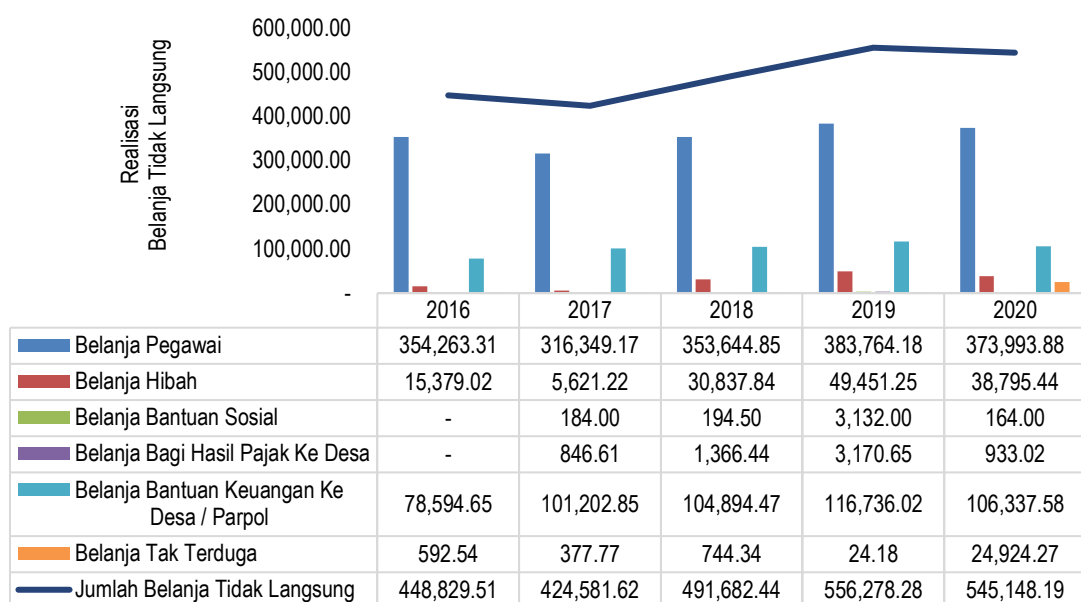
Belanja Tidak Langsung terbesar kedua adalah Belanja Bantuan Keuangan Ke Desa/Parpol, dengan laju pertumbuhan rata-rata per tahun 7,85%, yaitu dari Rp78.594,65 juta menjadi Rp116.736,02 juta tahun 2019, dan turun menjadi Rp106.337,58 juta tahun 2020.

Belanja Hibah juga menunjukkan peningkatan yang cukup besar, khususnya 3 tahun terakhir. Jumlah Belanja Hibah tahun 2016 berjumlah Rp15.379,02 juta, dan meningkat menjadi Rp30.837,84 juta tahun 2018, dan kembali mengalami peningkatan yang lebih besar tahun 2020 menjadi Rp38.795,44 juta.

Belanja Tidak Terduga relatif kecil, dan tidak banyak berubah sampai tahun 2019. Namun, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya melakukan kebijakan khusus untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19 sehingga terjadi peningkatan yang sangat signifikan tahun 2020. Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tahun 2016 berjumlah Rp592,54 juta, dan tahun-tahun berikutnya tidak banyak perubahan.

Tetapi tahun 2020, Belanja Tidak Terduga naik drastis menjadi Rp24.924,27 juta. Hal ini menunjukkan tekad Pemerintah Kabupaten Dharmasraya untuk mengurangi beban masyarakat akibat dampak pandemi Covid-19. Perkembangan realisasi dan proporsi Belanja Tidak Langsung sebagaimana dijelaskan di atas dapat dilihat pada Gambar 3-13 dan Gambar 3-14.

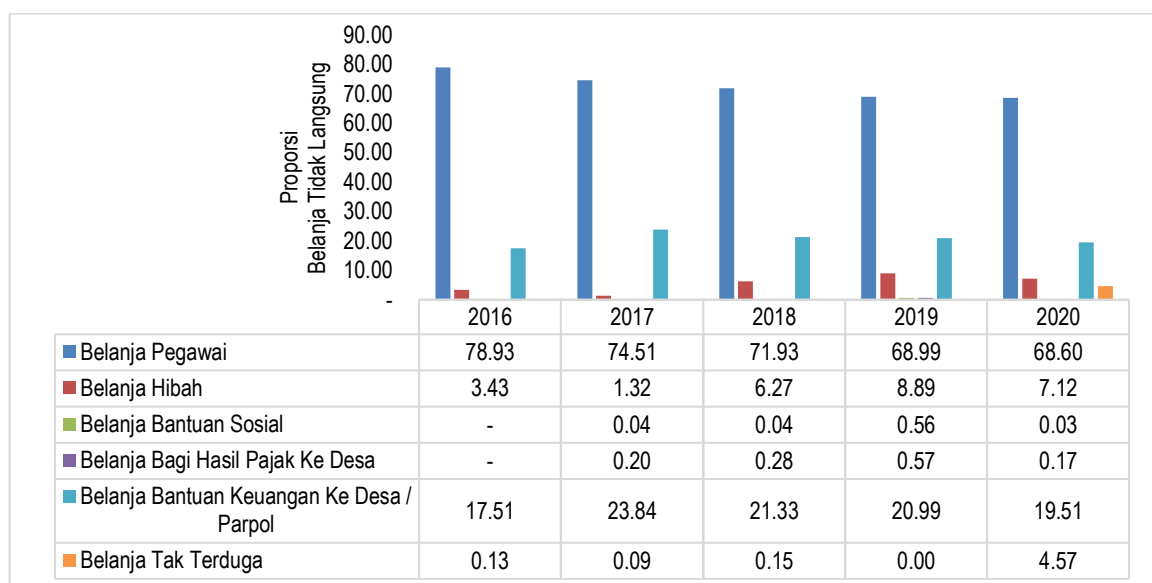
Gambar 3-13 Realisasi Belanja Tidak Langsung Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 (Rp juta)



Sumber: Badan Keuangan Daerah, Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

Sekalipun jumlah Belanja Pegawai memiliki tren yang meningkat sebagaimana dijelaskan di atas, namun dari segi proporsinya terhadap total Belanja Tidak Langsung menunjukkan tren sedikit penurunan. Demikian juga dengan Belanja Bantuan Keuangan Ke Desa/Parpol juga dari segi jumlah menunjukkan tren peningkatan, tetapi dari segi proporsi menunjukkan tren sedikit penurunan. Hal disebabkan tren peningkatan jumlah Belanja Hibah yang lebih tinggi mengakibatkan proporsinya pun menunjukkan tren yang lebih tinggi pula Gambar 3-14 menunjukkan perkembangan proporsi Belanja Tidak Langsung.

Gambar 3-14 Proporsi Belanja Tidak Langsung Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 (%)

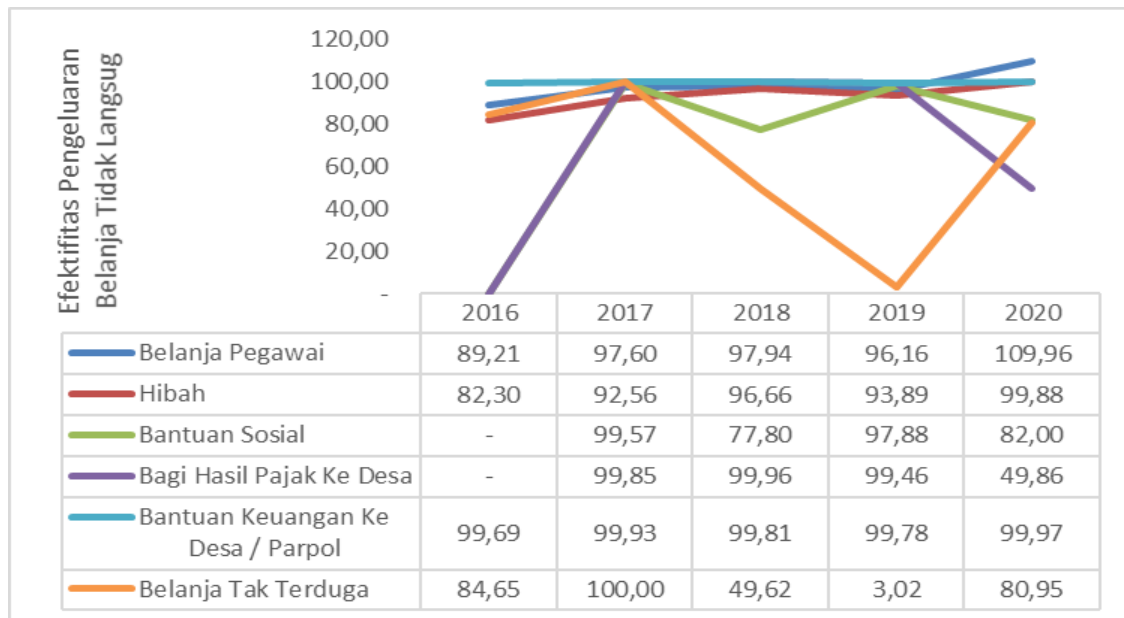


Sumber: Badan Keuangan Daerah, Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

Analisis perbandingan anggaran dan realisasi dari Belanja Tidak Langsung menunjukkan bahwa terdapat perbedaan efektifitas pengeluaran diantara jenis Belanja Tidak Langsung. Namun

setiap tahunnya rata-rata di atas 90%. Kecuali Belanja Tidak Terduga, semua jenis belanja yang membentuk Belanja Tidak Langsung memiliki tingkat efektifitas pengeluaran di atas 90%. Perkembangan efektifitas pengeluaran Belanja Tidak Langsung sebagaimana dijelaskan di atas dapat dilihat pada Gambar 3-15

Gambar 3-15 Efektifitas Pengeluaran Belanja Tidak Langsung Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 (%)



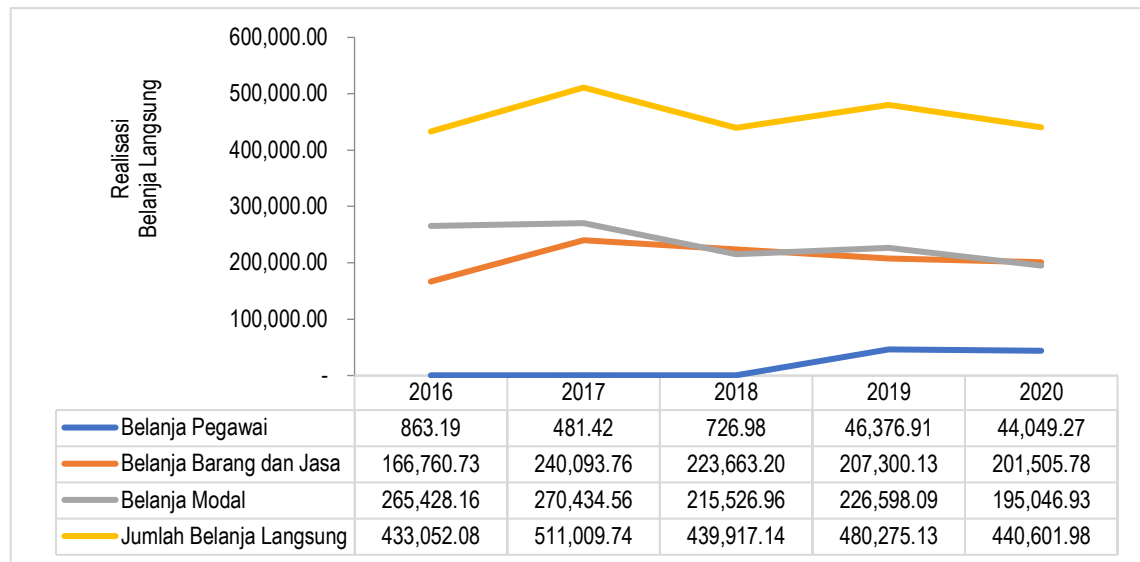
Sumber: Badan Keuangan Daerah, Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

B. Belanja Langsung

Sejalan dengan Instruksi Presiden (INPRES) tentang refocussing anggaran dalam rangka percepatan penanganan pandemi Covid-19, maka Belanja Barang dan Jasa mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2020. Jumlah Belanja Barang dan Jasa tahun 2016 adalah Rp166.760,73 juta dan meningkat menjadi Rp223.663,20 juta tahun 2018, tetapi tahun-tahun berikutnya turun, menjadi Rp207.300,13 juta tahun 2019 dan turun menjadi Rp201.505,78 juta tahun 2020.

Perkembangan Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Dharmasraya juga menunjukkan tren penurunan. Belanja Modal tahun 2016 berjumlah Rp265.428,16 juta dan tahun 2017 meningkat menjadi Rp270.434,56 juta. Tetapi tahun-tahun berikutnya menunjukkan tren penurunan sehingga menjadi Rp195.046,93 juta tahun 2020. Di samping disebabkan keterbatasan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, penurunan tahun 2020 khususnya disebabkan refocussing anggaran dalam rangka percepatan penanganan pandemi Covid-19. Perkembangan realisasi Belanja Langsung sebagaimana dijelaskan di atas dapat dilihat pada Gambar 3-16.

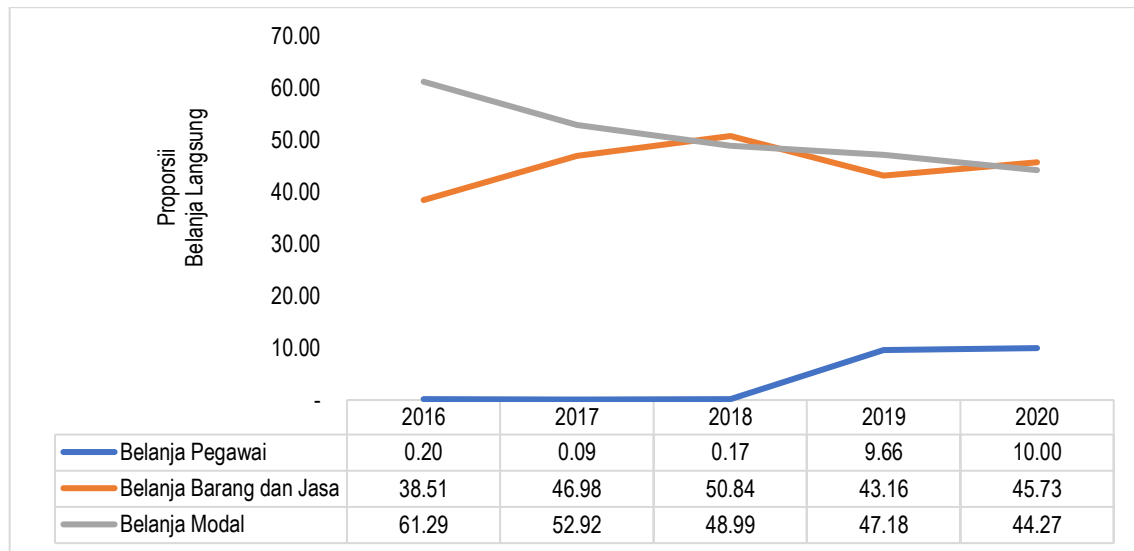
Gambar 3-16 Realisasi Belanja Langsung Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 (Rp juta)



Sumber: Badan Keuangan Daerah, Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

Tren peningkatan dan penurunan jumlah Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal sebagaimana dijelaskan di atas, mengakibatkan adakalanya proporsi Belanja Barang dan Jasa yang lebih besar dibandingkan Belanja Modal. Atau Sebaliknya, Belanja Modal lebih besar dibandingkan Belanja Barang dan Jasa. Hal ini terjadi pada tahun 2018 dan tahun 2020. Tetapi secara keseluruhan, proporsi Belanja Modal jauh lebih besar dibandingkan dengan Belanja Barang dan Jasa. Perkembangan proporsi jenis Belanja Langsung tersebut dapat dilihat pada Gambar 3-17.

Gambar 3-17 Proporsi Belanja Langsung Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 (%)

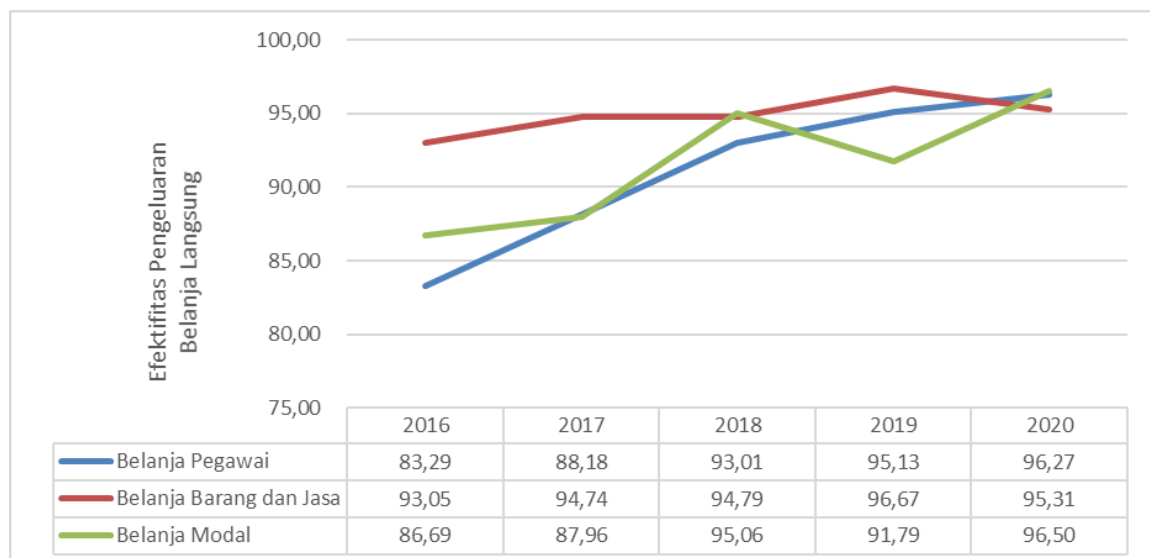


Sumber: Badan Keuangan Daerah, Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

Analisis perbandingan anggaran dan realisasi dari Belanja Langsung menunjukkan capaian yang cukup baik, karena semua jenis Belanja Langsung dan selama 5 tahun periode yang dianalisis tingkat capaiannya mendekati 90%, kecuali Belanja Pegawai yang terjadi tahun 2016 dan 2017. Capaian efektifitas pengeluaran Belanja Langsung seperti ini membutuhkan peningkatan kualitas perencanaan anggaran kegiatan yang telah direncanakan dapat dibelanjakan secara lebih efektif atau di atas 90,00%. Penghematan belanja tidak hanya pada pelaksanaan kegiatan saja, tetapi sudah dimulai dari penyusunan perencanaan, antara lain dengan menggunakan Analisis Standar Belanja sebagai dasar dalam menentukan jumlah belanja suatu kegiatan.

Perkembangan efektifitas pengeluaran Belanja Langsung sebagaimana dijelaskan di atas dapat dilihat pada Gambar 3-18.

Gambar 3-18 Efektifitas Pengeluaran Belanja Langsung Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020



Sumber: Badan Keuangan Daerah, Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

C. Pembiayaan

Pembiayaan dikelompokkan menjadi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan sehingga selisihnya akan menghasilkan Pembiayaan Netto. Pembiayaan Netto Pemerintah Kabupaten Dharmasraya selama periode Tahun 2016-2020 mengalami peningkatan dari Rp26.671,81 juta tahun 2016 menjadi Rp3.893,45 juta tahun 2020.

Penerimaan Pembiayaan tersebut terutama berasal dari penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Pengeluaran Pembiayaan hanya terjadi pada tahun 2017 dan tahun 2019 untuk Penyertaan Modal pada BUMD. Dengan demikian, penurunan pembiayaan netto tersebut menggambarkan pelaksanaan APBD yang lebih efektif sehingga SiLPA tahun 2020 menjadi kecil. Perkembangan realisasi pembiayaan ini dapat dilihat pada Tabel 3.6.

Tabel 3-2 Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 (Rp juta)

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan Rata-Rata pertahun (%)
C1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN						
1	Penggunaan SiLPA	26.192,16	21.931,31	31.647,42	23.588,79	3.893,45	(37,91)
2	Penerimaan Piutang Daerah	479,65	-	-	-	-	(100,00)
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	26.671,81	21.931,31	31.647,42	23.588,79	3.893,45	(38,19)
C2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN						
1	Penyertaan Modal Pem. Daerah	-	3.716,00	-	2.500,00	-	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		3.716,00	-	2.500,00		
	PEMBIAYAAN NETTO	26.671,81	18.215,31	31.647,42	21.088,79	3.893,45	(38,19)
	Koreksi SiLPA	1.945,16					
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	21.931,31	31.647,43	23.588,79	3.893,45	8.334,42	(21,91)

Sumber: Badan Keuangan Daerah, Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

3.1.1.3. Analisis Kesehatan Fiskal Daerah

Salah satu analisis yang digunakan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam menilai Kesehatan Fiskal Daerah adalah konsep yang dikembangkan oleh Kenneth W. Brown (1993). Analisis fiskal ini menggunakan beberapa indikator rasio untuk menilai kondisi kesehatan fiskal Pemerintah Daerah, yang setiap rasionya terfokus pada empat aspek kesehatan fiskal yaitu pendapatan, pengeluaran, posisi operasi, dan struktur hutang.

Analisis kesehatan fiskal daerah ini dilakukan berdasarkan data Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota 3 terbitan, tahun 2015-2016, tahun 2017-2018, dan tahun 2019-2020. Data keuangan tersebut tidak semuanya realisasi tetapi juga anggaran. Data anggaran keuangan terdiri tahun 2016, 2018, dan 2020. Sedangkan data realisasi terdiri dari tahun 2017 dan tahun 2019. Namun dengan keterbatasan seperti itu, maka dalam analisis lebih ditekankan data tahun 2017 dan tahun 2019.

1. Pendapatan Daerah Per Kapita

Rasio pendapatan daerah per kapita menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam melayani penduduk dari daerah tersebut. Semakin besar jumlah penduduk, maka semakin besar pula beban yang harus ditanggung pemerintah, sehingga dibutuhkan dana (pendapatan) yang lebih besar. Rasio ini merupakan ukuran riil dari pendapatan daerah, sehingga diharapkan analisis

rasio ini mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah pada masa datang. Rasio ini dihitung dengan membagi total pendapatan daerah dengan jumlah penduduk, atau dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Indikator Pendapatan Daerah Per Kapita} = \frac{\text{Total Pendapatan Daerah}}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

Analisis data penduduk dan pendapatan daerah kabupaten-kabupaten di Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2020 menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Dharmasraya di bawah rata-rata laju pertumbuhan penduduk kabupaten se-Sumatera Barat, dan laju pertumbuhan Pendapatan Daerah rata-rata per tahun di atas rata-rata kabupaten di Sumatera Barat.

Laju pertumbuhan seperti itu mengakibatkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam membiayai pelayanan kepada penduduknya sedikit di atas rata-rata kabupaten di Sumatera Barat. Kemampuan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam membiayai pelayanan penduduknya tahun 2017 adalah Rp4,01 juta dan naik menjadi Rp4,12 juta tahun 2019. Sedangkan data tahun 2020, diperkirakan (anggaran) bisa naik menjadi Rp4,51 juta. Jika dibandingkan dengan rata-rata kabupaten se-Sumatera Barat, kemampuan membiayai pelayanan dari Pemerintah Kabupaten Dharmasraya sedikit di bawah rata-rata kabupaten se-Sumatera Barat.

Untuk meningkatkan rasio ini, maka Pemerintah Kabupaten Dharmasraya harus membuat berbagai kebijakan untuk meningkatkan intensifikasi pemungutan berbagai sumber PAD serta meningkatkan sumber-sumber pendapatan lain guna meningkatkan Pendapatan Daerah. Perkembangan kemampuan membiayai pelayanan penduduk menurut kabupaten se-Sumatera Barat dapat dilihat pada Tabel 3-3.

Tabel 3-3 Rasio Pendapatan Daerah Per Kapita Menurut Pemerintah Kabupaten di Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (Rp juta)

No	Kabupaten	2016*	2017	2018*	2019	2020*	Pertumbuhan Rata-Rata per Tahun (%)
1	Kepulauan Mentawai	10,52	10,35	10,73	10,99	11,13	1,42
2	Pesisir Selatan	3,34	3,31	3,20	3,66	3,54	1,46
3	Solok	3,31	3,10	3,07	3,36	3,15	(1,26)
4	Sijunjung	4,13	4,24	3,89	4,20	3,62	(3,23)
5	Tanah Datar	3,69	3,88	3,63	3,85	3,59	(0,68)
6	Padang Pariaman	3,24	3,38	3,51	3,63	3,44	1,51
7	Agam	2,97	2,84	2,91	3,08	2,89	(0,64)
8	Limapuluh Kota	3,34	3,39	3,38	3,49	3,60	1,87
9	Pasaman	3,73	3,62	3,46	3,68	3,56	(1,17)
10	Solok Selatan	5,06	4,81	4,64	5,34	5,03	(0,16)
11	Dharmasraya	4,01	4,03	3,71	4,12	4,51	2,97
12	Pasaman Barat	2,66	2,51	2,73	2,72	2,97	2,75
	Rata-rata	4,17	4,12	4,07	4,34	4,25	0,51

Sumber: BPS, Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten, Kota se Sumatera Barat Tahun 2015-2016, Tahun 2017-2018, dan Tahun 2019-2020 (diolah)

*/ Data APBD

2. Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan PAD mendanai belanja untuk memberikan pelayanan publik. Rasio ini menunjukkan tingkat kemandirian daerah; semakin tinggi rasio kemandirian daerah akan semakin baik kinerja daerah. Kemandirian PAD inilah sejatinya yang menjadi dasar utama pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia melalui penyerahan sumber-sumber pembiayaan kepada daerah sesuai asas *money follows function* atau saat ini menekankan *money follows program*.

Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung berdasarkan formula sebagai berikut:

Indikator Kemandirian Keuangan Daerah	=	Pendapatan Asli Daerah
		Total Pendapatan Daerah

Data tahun 2016-2020 menunjukkan bahwa ketergantuan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya terhadap Sumber Dana dari Pemerintah Pusat atau sumber lainnya di atas rata-rata kabupaten di Sumatera Barat. Rasio kemandirian keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tahun 2017 adalah 10,43% dan turun menjadi 7,74% tahun 2019. Jika dibandingkan dengan rata-rata kabupaten se-Sumatera Barat, rasionya sedikit dibawah capai Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, masing-masing adalah 11,11% dan 7,54%. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya harus membuat kebijakan dan upaya-upaya peningkatan PAD harus menjadi fokus OPD terkait, agar kemandirian Pemerintah Kabupaten Dharmasraya bisa ditingkatkan; mendekati capaian kinerja yang lebih tinggi dari rata-rata kabupaten se Sumatera Barat.

Perkembangan rasio kemandirian kabupaten se-Sumatera Barat dapat dilihat pada Tabel 3-4.

Tabel 3-4 Rasio Kemandirian Daerah Menurut Kabupaten di Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (%)

No	Kabupaten	2016*	2017	2018*	2019	2020*	Pertumbuhan Rata-Rata per Tahun (%)
1	Kepulauan Mentawai	5,75	7,46	8,23	3,96	5,16	(2,66)
2	Pesisir Selatan	5,51	11,69	8,48	7,93	8,75	12,28
3	Solok	4,12	9,90	6,29	5,95	6,11	10,34
4	Sijunjung	6,73	11,06	8,06	8,41	6,90	0,63
5	Tanah Datar	9,03	12,87	12,07	9,69	12,35	8,17
6	Padang Pariaman	5,33	10,18	8,12	6,73	7,40	8,54
7	Agam	6,74	11,73	7,47	8,18	8,18	4,96
8	Limapuluh Kota	5,78	9,39	6,60	6,37	7,29	5,95
9	Pasaman	6,41	14,29	10,23	9,51	8,99	8,81
10	Solok Selatan	4,76	9,50	3,05	7,43	7,74	12,90
11	Dharmasraya	7,48	10,43	8,93	7,74	10,16	7,98
12	Pasaman Barat	6,99	14,83	8,64	8,61	11,15	12,38
	Rata-rata	6,22	11,11	8,02	7,54	8,35	7,64

Sumber: BPS, Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten, Kota se Sumatera Barat
Tahun 2015-2016, Tahun 2017-2018, dan Tahun 2019-2020 (diolah)

*/ Data APBD

3. Ruang Fiskal Daerah

Ruang fiskal daerah merupakan konsep untuk mengukur fleksibilitas yang dimiliki pemerintah daerah dalam mengalokasikan APBD untuk membiayai kegiatan yang menjadi prioritas daerah. Indikator ini menunjukkan keleluasaan (diskresi) yang dimiliki Pemerintah Daerah dalam

menggunakan dananya secara bebas dalam menentukan prioritas belanja, sehingga perlu menjadi perhatian dalam menentukan prioritas agar dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di suatu daerah. Semakin besar ruang fiskal, semakin leluasa pemerintah daerah dalam menyesuaikan penggunaan dana dengan prioritas daerah.

Ruang fiskal daerah dihitung berdasarkan pendapatan daerah selain yang sudah memiliki *earmark* (DAK, hibah, dana penyesuaian dan otsus, dan dana darurat) yang dapat digunakan untuk membiayai belanja diskresi (belanja selain belanja yang bersifat wajib seperti belanja pegawai dan belanja bunga). Rasio Ruang Fiskal Daerah dihitung berdasarkan formula sebagai berikut:

$$\text{Indikator Ruang Fiskal Daerah} = \frac{\text{Ruang Fiskal Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

Pengurangan kewenangan kabupaten akibat implementasi UU 23 tahun 2014 mengakibatkan penurunan yang signifikan dari dana *earmark* yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, yaitu dari Rp78.733,09 juta tahun 2016 menjadi Rp58.302,84 juta tahun 2017. Namun pada tahun-tahun berikutnya jumlah dana *earmark* Kembali menunjukkan peningkatan, sehingga tahun meningkat menjadi Rp135.326,21 juta.

Namun demikian, peningkatan dana *earmark* tersebut juga diikuti dengan peningkatan Belanja Pegawai Tidak Langsung yang jauh lebih besar. Belanja Pegawai Tidak Langsung dan Pegawai Langsung tahun 2016 Rp 354.648,82 juta menjadi Rp 316.830,58 juta tahun 2017, dan tahun-tahun berikutnya meningkat signifikan sehingga tahun 2020 menjadi Rp417.967,34 juta.

Akibat peningkatan Belanja Pegawai Tidak Langsung dan Pegawai Langsung yang lebih besar daripada peningkatan dana *earmark* mengakibatkan dana yang dapat digunakan untuk membiayai program/kegiatan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya lainnya menjadi turun. Akibatnya terjadinya penurunan Ruang Fiskal Daerah dari 33,33% tahun 2017 dan menjadi menjadi 20,15% tahun 2020.

Dengan ruang fiskal yang terbatas seperti dijelaskan di atas, maka Pemerintah Kabupaten Dharmasraya harus lebih selektif dan cermat dalam menentukan prioritas dan pengalokasian anggaran untuk menyelesaikan permasalahan dan tantangan pembangunan di Kabupaten Dharmasraya.

Tabel 3-5 Rasio Ruang Fiskal Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 (%)

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pendapatan Daerah	875.195,93	949.023,48	923.540,95	1.019.358,07	990.191,14
B1	Dana Alokasi Khusus	210.035,49	181.968,82	187.705,19	220.914,06	237.995,16
B2	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	35.357,32	96.844,02	60.749,03	97.546,29	99.826,68
B3	Pendapatan Hibah	2.985,27	18.084,13	30.959,02	33.699,98	34.887,15
B4	Belanja Pegawai	354.648,82	316.830,58	354.371,83	430.141,09	417.967,34
B	Selisi	272.169,04	335.295,93	289.755,88	237.056,64	199.514,82
C	Ruang Fiskal Daerah (%)	31,10	35,33	31,37	23,26	20,15

Sumber: Badan Keuangan Daerah, Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

4. Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peningkatan pajak dan retribusi daerah menunjukkan tingkat kemampuan daerah dalam menggali potensi pajak dan retribusi daerah. Rasio yang semakin besar menunjukkan kemampuan

daerah dalam mengkonversi potensi penerimaan menjadi realisasi penerimaan yang semakin besar. Indikator peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah dihitung berdasarkan formula sebagai berikut:

Indikator Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	=	$\frac{\text{Pajak Daerah dan Retribusi Daerah}}{\text{Pendapatan Domestik Regional Bruto}}$
---	---	--

Rasio tersebut juga dipergunakan untuk menilai tingkat kepatuhan pembayaran pajak oleh masyarakat dalam suatu daerah dan digunakan untuk mengetahui kira-kira seberapa besar peranan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam perekonomian daerah. Dengan demikian, pada hakikatnya rasio ini bisa dipergunakan untuk melihat indikasi besarnya beban pajak (tax burden) yang harus ditanggung masyarakat. Karena sifatnya yang demikian itu, maka sebenarnya tax burden terkait dengan ability to pay, di mana orang yang lebih mampu seharusnya membayar pajak lebih banyak. Tax burden terkait pula dengan keadilan.

Rasio Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PDRB dari Pemerintah Kabupaten Dharmasraya relatif kecil, tetapi sedikit di bawah capaian rata-rata kabupaten di Sumatera Barat. Rasio yang dicapai Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tahun 2017 adalah 0,21% sedangkan rata-rata kabupaten di Sumatera Barat adalah 0,22%. Sedangkan rasio yang dicapai Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tahun 2019 adalah 0,21% sedangkan rata-rata kabupaten di Sumatera Barat adalah 0,22%.

Indikasi penyebab rendahnya capaian kinerja ini di antaranya adalah belum optimalnya unit pemungut pajak dan retribusi dalam melakukan intensifikasi pemungutan dan tingkat kesadaran dari pembayar pajak dan retribusi yang masih perlu ditingkatkan. Kebijakan dan penguatan terhadap peraturan terkait dengan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Dharmasraya juga perlu dilakukan agar penegakkan disiplin dan atau sanksi yang lebih keras dapat dilaksanakan secara efektif.

Rasio Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PDRB dari Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tahun 2016-2020 menunjukkan tren peningkatan 2,17% sedangkan rata-rata kabupaten di Sumatera Barat menunjukkan peningkatan dengan rata-rata per tahun 4,57%. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya harus mengusahakan secara maksimal untuk meningkatkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah khususnya, atau PAD umum, maka tidak tertutup kemungkinan Rasio Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PDRB Pemerintah Kabupaten Dharmasraya di bawah rata-rata kabupaten di Sumatera Barat.

Perkembangan Rasio Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PDRB menurut kabupaten dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3-6 Rasio Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PDRB Menurut Kabupaten di Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (%)

No	Kabupaten	2016*	2017	2018*	2019	2020*	Pertumbuhan Rata-Rata per Tahun (%)
1	Kepulauan Mentawai	0,37	0,33	0,36	0,39	0,45	5,31
2	Pesisir Selatan	0,18	0,18	0,28	0,21	0,29	13,46
3	Solok	0,20	0,17	0,21	0,20	0,22	1,93
4	Sijunjung	0,20	0,23	0,20	0,20	0,14	(8,14)
5	Tanah Datar	0,19	0,20	0,23	0,22	0,30	12,59
6	Padang Pariaman	0,31	0,39	0,39	0,32	0,31	(0,07)
7	Agam	0,19	0,19	0,20	0,19	0,23	5,18
8	Limapuluh Kota	0,18	0,16	0,21	0,18	0,24	7,52
9	Pasaman	0,13	0,19	0,16	0,18	0,17	6,69
10	Solok Selatan	0,20	0,18	0,28	0,19	0,24	4,37
11	Dharmasraya	0,30	0,21	0,25	0,21	0,33	2,17
12	Pasaman Barat	0,22	0,18	0,21	0,16	0,26	4,94
	Rata-rata	0,22	0,22	0,25	0,22	0,27	4,57

Sumber: BPS, Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten, Kota se Sumatera Barat Tahun 2015-2016, Tahun 2017-2018, dan Tahun 2019-2020 (diolah)

*/ Data APBD

5. Kemampuan Mendanai Belanja Daerah

Kemampuan keuangan daerah antara lain tercermin dari seluruh penerimaan daerah, baik Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan, yang seharusnya bisa mencukupi untuk digunakan dalam mendanai seluruh pengeluaran daerah; Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan yang direncanakan. Semakin besar rasio penerimaan daerah terhadap pengeluaran daerah, maka kemampuan mendanai belanja daerah akan semakin besar pula. Indikator kemampuan mendanai belanja daerah dihitung berdasarkan formula sebagai berikut:

$$\text{Kemampuan Mendanai Belanja Daerah} = \frac{\text{Penerimaan Daerah}}{\text{Pengeluaran Daerah}}$$

Kemampuan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam mendanai Belanja Daerah relatif terkendali, namun kecenderungannya menunjukkan sedikit penurunan. Jika tahun 2017 rasio kemampuan mendanai Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya sebesar 103,37% dan turun menjadi 100,37% tahun 2019. Kondisi ini sejalan dengan rata-rata kabupaten di Sumatera Barat, yang mengalami penurunan dari 107,14 % tahun 2017 menjadi 104,64% tahun 2019.

Perkembangan rasio kemampuan mendanai Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dapat dilihat pada Tabel 3-7.

Tabel 3-7 Rasio Kemampuan Mendanai Belanja Daerah Menurut Kabupaten di Sumatera Barat Tahun 2017 dan 2019 (%)

No	Kabupaten	2017	2019
1	Kepulauan Mentawai	101,33	103,02
2	Pesisir Selatan	105,85	100,99
3	Solok	103,40	103,36
4	Sijunjung	114,55	109,10
5	Tanah Datar	116,88	105,05
6	Padang Pariaman	101,88	103,91
7	Agam	104,22	104,38
8	Limapuluh Kota	105,75	102,90
9	Pasaman	107,74	109,38
10	Solok Selatan	102,39	107,69
11	Dharmasraya	103,37	100,37
12	Pasaman Barat	118,38	105,57
	Rata-Rata	107,14	104,64

Sumber: BPS, Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten, Kota se Sumatera Barat Tahun 2015-2016, Tahun 2017-2018, dan Tahun 2019-2020 (diolah)

*/ Data APBD

6. Belanja Modal

Rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja Daerah mencerminkan proporsi Belanja Daerah yang dibelanjakan untuk Belanja Modal. Belanja modal yang besar diharapkan akan memberikan dampak yang positif. Karena, manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat untuk membiayai pembangunan fisik ataupun non fisik, dan berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi di daerah yang kemudian akan meningkatkan potensi penerimaan daerah yang baru selain dari sektor swasta, rumah tangga dan luar negeri. Di samping itu, Belanja Modal memiliki *multiplier effect* dalam menggerakkan roda perekonomian daerah. Oleh karena itu, semakin tinggi rasio Belanja Modal, diharapkan semakin besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, semakin rendah rasio Belanja Modal, semakin berkurang pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Rasio belanja modal daerah dihitung berdasarkan formula sebagai berikut:

Indikator	=	Belanja Modal
Belanja Modal		Total Belanja Daerah

Data tahun 2016-2020 menunjukkan penurunan dalam rasio Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Dharmasraya. Rasio Belanja Modal tahun 2017 adalah 28,91% dan turun menjadi 22,07% tahun 2019. Kondisi ini sejalan dengan rata-rata kabupaten di Sumatera Barat, di mana terjadi penurunan dari 22,32% tahun 2017 menjadi 19,70% tahun 2019.

Perkembangan rasio Belanja Modal menurut kabupaten di Sumatera Barat dapat dilihat pada Tabel 3-8.

Tabel 3-8 Rasio Belanja Modal Menurut Kabupaten di Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (%)

No	Kabupaten	2016*	2017	2018*	2019	2020*	Pertumbuhan Rata-Rata per Tahun (%)
1	Kepulauan Mentawai	30,88	31,01	32,69	30,15	24,18	(5,94)
2	Pesisir Selatan	20,54	17,04	18,31	19,18	22,92	2,78
3	Solok	17,58	17,39	16,21	15,61	11,69	(9,70)
4	Sijunjung	25,43	21,18	21,55	20,41	12,38	(16,47)
5	Tanah Datar	15,38	16,24	13,89	15,02	12,62	(4,82)
6	Padang Pariaman	20,31	25,95	20,60	18,22	17,82	(3,21)
7	Agam	14,08	19,33	15,81	18,63	14,53	0,79
8	Limapuluh Kota	20,24	18,53	19,11	18,57	19,03	(1,53)
9	Pasaman	25,32	18,51	13,83	12,44	16,21	(10,54)
10	Solok Selatan	31,00	28,04	29,34	24,25	24,71	(5,51)
11	Dharmasraya	29,64	28,91	26,00	22,07	23,26	(5,88)
12	Pasaman Barat	26,04	25,76	29,18	21,87	22,64	(3,45)
	Rata-rata	23,04	22,32	21,38	19,70	18,50	(5,34)

Sumber: BPS, Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota se Sumatera Barat Tahun 2015-2016, Tahun 2017-2018, dan Tahun 2019-2020 (diolah)

*/ Data APBD

7. Belanja Pegawai Tidak Langsung

Dalam konteks manajemen kinerja, Belanja Pegawai Tidak Langsung merupakan belanja yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan atau program, yang berarti tidak berhubungan dengan target kinerja tertentu. Semakin kecil rasio belanja pegawai tidak langsung ini, maka akan semakin besar proporsi Belanja Daerah yang dapat dialokasikan untuk belanja langsung guna meningkatkan kinerja daerah. Indikator Belanja Pegawai Tidak Langsung dihitung berdasarkan formula sebagai berikut:

Indikator Belanja Pegawai Tidak Langsung	=	$\frac{\text{Belanja Pegawai Tidak Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}}$
--	---	---

Pengurangan pegawai akibat pengalihan kewenangan dari kabupaten/kota ke provinsi berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengakibatkan terjadinya penurunan Belanja Pegawai Tidak Langsung di seluruh kabupaten di Indonesia, termasuk di Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya.

Analisis data tahun 2017 menunjukkan bahwa proporsi rata-rata Belanja Pegawai Tidak Langsung seluruh pemerintahan kabupaten di Sumatera Barat adalah 40,01% dari Belanja Daerah dan naik menjadi 41,19% tahun 2019. Sedangkan proporsi belanja ini di Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tahun 2017 adalah 33,81% dan meningkat menjadi 37,02% tahun 2019.

Tabel 3-9 berikut memperlihatkan perkembangan dan perbandingan proporsi Belanja Pegawai Tidak Langsung seluruh kabupaten di Sumatera Barat.

Tabel 3-9 Proporsi Belanja Pegawai Tidak Langsung Menurut Kabupaten di Sumatera Barat Tahun 2016-2020 (%)

No	Kabupaten	2016*	2017	2018*	2019	2020*	Pertumbuhan Rata-Rata per Tahun (%)
1	Kepulauan Mentawai	23,07	22,58	22,74	25,71	28,30	5,24
2	Pesisir Selatan	51,40	42,43	44,39	40,55	38,84	(6,76)
3	Solok	54,65	45,66	49,51	48,15	49,60	(2,39)
4	Sijunjung	41,63	38,00	42,25	38,07	41,78	0,09
5	Tanah Datar	54,76	46,16	44,82	44,08	44,07	(5,28)
6	Padang Pariaman	56,47	43,04	43,62	46,30	44,46	(5,80)
7	Agam	56,71	45,31	48,24	45,04	46,00	(5,10)
8	Limapuluh Kota	54,13	45,68	46,30	46,32	44,54	(4,76)
9	Pasaman	44,07	41,73	46,98	44,91	44,73	0,37
10	Solok Selatan	37,47	33,68	38,69	37,90	37,07	(0,26)
11	Dharmasraya	41,53	33,81	38,57	37,02	38,78	(1,70)
12	Pasaman Barat	46,65	42,07	36,77	40,25	38,71	(4,55)
	Rata-rata	46,88	40,01	41,91	41,19	41,41	(3,05)

Sumber: BPS, Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten_Kota se Sumatera Barat Tahun 2015-2016, Tahun 2017-2018, dan Tahun 2019-2020 (diolah)

*/ Data APBD

8. Kemampuan Pembayaran Pokok Hutang dan Bunga Daerah

Indikator kemampuan pembayaran pokok hutang dan bunga daerah menunjukkan proporsi pendapatan daerah yang digunakan untuk membayar pokok pinjaman beserta bunganya dalam satu periode. Semakin kecil rasionya, maka semakin tinggi jaminan pengembalian utang dari suatu Pemerintah Daerah. Indikator kemampuan pembayaran pokok hutang dan bunga daerah dihitung berdasarkan formula berikut:

$$\text{Kemampuan Membayar Pokok Pinjaman dan Bunga} = \frac{\text{Pembayaran Pokok Pinjaman dan Bunga}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

Karena adanya peraturan dan pembatasan yang ketat dari Pemerintah Pusat, maka sampai saat ini tidak banyak daerah yang telah melakukan Pinjaman (Utang) Daerah. Kabupaten di Sumatera Barat yang saat ini memiliki pinjaman sehingga menimbulkan belanja bunga dan angsuran pokok pinjaman hanya Kabupaten Pesisir Selatan. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang sampai saat ini tidak memiliki Utang (kecuali hutang belanja) sehingga tidak menimbulkan Belanja Bunga.

3.1.2. Neraca Daerah

Neraca menggambarkan tentang aset, kewajiban, dan ekuitas yang dimiliki oleh suatu organisasi, termasuk organisasi pemerintah daerah. Secara umum, transaksi yang mempengaruhi neraca daerah adalah transaksi yang berasal dari belanja modal dan pembiayaan. Jika ada belanja modal maka terjadi peningkatan aset tetap. Sedangkan jika ada pengeluaran pembiayaan maka terjadi peningkatan investasi jangka panjang, pembentukan dana cadangan dan atau penurunan kewajiban. Jika ada penerimaan pembiayaan maka perhitungan anggaran dan atau kenaikan kewajiban.

Analisis kinerja Neraca Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 – 2020 terlihat bahwa rata-rata proporsi aset tetap jauh lebih besar dibandingkan aset lancar dan investasi jangka panjang,

yaitu dengan perbandingan 86,57%, 3,22%, dan 1,06% sedangkan sisanya adalah aset lainnya. Perbandingan atau perkembangan proporsi kelompok aset tersebut tidak mengalami perubahan yang signifikan antara tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2020.

Analisis berdasarkan pos-pos aset menunjukkan bahwa jumlah nilai aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Tahun 2016 nilai aset hanya sebesar Rp2.119.569,75 juta dan kemudian meningkat menjadi Rp2.429.453,623 juta tahun 2020, yang berarti dalam kurun waktu tahun 2016 – 2020 terjadi pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 3,47%. Peningkatan seperti ini dihasilkan antara lain melalui peningkatan aset tetap, investasi jangka panjang, dan aset lancar.

Dari 4 sumber peningkatan aset Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tersebut, pertumbuhan jumlah Aset lainnya jauh lebih tinggi dibandingkan kelompok aset lainnya. Pertumbuhan rata-rata per tahun Aset Lainnya adalah 7,98%, yaitu dari Rp175.066,84 juta tahun 2016 dan menjadi Rp237.979,05 juta tahun 2020. Pertumbuhan rata-rata pertahun tertinggi kedua adalah Investasi Jangka Panjang dengan tingkat pertumbuhan sebesar 4,11%, yaitu dari Rp21.236,00 juta tahun 2016 dan menjadi Rp24.952,00 juta tahun 2020. Pertumbuhan tertinggi berikutnya adalah Aset Tetap dengan pertumbuhan 3,02% dan Aset Lancar sebesar 3,01%.

Jumlah aset harus sama dengan jumlah kewajiban dan ekuitas. Oleh sebab itu, pertumbuhan jumlah aset harus sama dengan pertumbuhan jumlah kewajiban dan ekuitas. Pertumbuhan rata-rata per tahun jumlah ekuitas lebih rendah dibandingkan pertumbuhan jumlah kewajiban, yaitu 3,47% berbanding 3,72%. Namun karena komposisi jumlah ekuitas jauh lebih besar (lebih kurang 99%) dibandingkan jumlah kewajiban, maka pertumbuhan kewajiban tersebut tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap komposisi kewajiban dan ekuitas. Tabel 3-10 berikut menyajikan perkembangan jumlah pos-pos neraca dan tingkat pertumbuhan rata-rata per tahun.

Tabel 3-10 Perkembangan Jumlah Pos-Pos Neraca Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dan Tingkat Pertumbuhan Rata-Rata Tahunan Tahun 2016-2020 (Rp juta)

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan Rata-Rata tahunan (%)
A S E T							
	ASET LANCAR	67.477,09	81.815,87	75.976,13	74.274,38	69.754,43	0,83
	Kas di Kas Daerah	19.785,15	25.821,01	14.533,46	88,80	6.154,89	
	Kas di Kas Satlak						
	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,65		2,90		-	
	Kas di Bendahara Penerimaan	99,23	0,36	8,23	5,40	0,99	
	Kas di Bendahara BLUD	2.150,61	5.664,32	8.565,18	1.094,99	1.526,71	
	Kas di Bendahara BOS			483,69	2.695,21	645,58	
	Kas Lainnya	508,26	138,78				
	Deposito						
	Piutang Pajak	24.812,88	29.803,33	29.849,89	32.002,20	34.309,13	
	Penyisihan Piutang Pajak	(17.213,73)	(20.562,96)	(20.772,96)	(21.818,56)	(24.365,36)	
	Piutang Retribusi	27,22	317,18	307,16	138,13	242,69	
	Penyisihan Piutang Retribusi	(2,72)	(28,67)	(211,49)	(110,95)	(100,95)	
	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg	16,68	18,00	7,32	4.063,75	3.524,57	
	Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan	(0,65)	(1,80)	(3,66)	(21,31)	(17,62)	
	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi						
	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	4.744,43	5.708,42	10.450,53	12.310,60	5.821,96	
	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang sah	(42.747,00)	(498,14)	(533,76)	(546,18)	(923,33)	
	Piutang Dana Bagi Hasil	1.050,49	1.132,97	3.931,93	6.462,15	15.473,11	
	Belanja Dibayar Dimuka	163,82	211,30	225,63	169,32	231,01	
	Piutang lainnya		29,63	13,05	13,05	13,05	
	Penyisihan Piutang Lainnya		(0,15)	(1,31)	(1,31)	(1,31)	
	Persediaan	31.767,56	34.062,28	29.120,34	37.729,07	27.219,31	

Sumber: Badan Keuangan Daerah, Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

Tabel 3.14 (Lanjutan) Perkembangan Jumlah Pos-Pos Neraca Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dan Tingkat Pertumbuhan Rata-Rata Tahunan Tahun 2016-2020 (Rp juta) (Lanjutan)

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan Rata-Rata tahunan (%)
	INVESTASI JANGKA PANJANG	21.236,00	24.952,00	24.952,00	27.452,00	27.452,00	6,63
	Investasi Non Permanen						
	Investasi Permanen	21.236,00	24.952,00	24.952,00	27.452,00	27.452,00	
	ASET TETAP	1.855.789,81	1.935.442,68	2.090.546,43	2.131.232,29	2.210.869,13	4,47
	Tanah	607.050,38	599.249,01	655.393,51	650.764,36	649.170,78	
	Peralatan dan Mesin	199.178,48	218.584,35	222.496,46	260.565,32	310.784,96	
	Gedung dan Bangunan	536.548,18	501.610,75	581.063,34	620.623,14	665.269,93	
	Jalan, Irigasi dan Jaringan	829.096,32	990.891,28	1.147.788,52	1.215.452,77	1.268.023,95	
	Aset Tetap Lainnya	15.798,41	37.961,28	54.193,28	72.876,41	105.717,57	
	Konstruksi dalam Pengerjaan	80.581,47	94.503,91	36.917,33	87.268,27	113.119,89	
	Akumulasi Penyusutan	(412.463,43)	(507.357,91)	(607.306,01)	(776.317,98)	(901.217,95)	
	DANA CADANGAN						
	Dana Cadangan						
	ASET LAINNYA	175.066,84	197.494,04	237.979,05	220.115,54	74.374,29	(19,27)
	Tuntutan Ganti Rugi	339,41	339,41	329,22	302,12	293,26	
	Aset Tak Berwujud	1.838,07	2.043,88	2.630,69	3.778,74	3.834,41	
	Akumulasi Amortisasi	(553,64)	(732,27)	(957,35)	(1.231,26)	(1.569,82)	
	Aset Lain-lain	164.488,89	187.118,08	239.673,94	221.011,35	213.829,47	
	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga						
	Akumulasi Penyusutan	(1.923,89)	(2.153,07)	(3.697,44)	(3.745,41)	(142.013,03)	
	Kas yang Dibatasi Penggunaannya	10.878,00	10.878,00				
	Jumlah Aset Lainnya	175.066,84	197.494,04	237.979,05	220.115,54	74.374,29	
	TOTAL AKTIVA	2.119.569,75	2.239.704,59	2.429.453,62	2.453.074,21	2.382.449,85	2,97

Sumber: Badan Keuangan Daerah, Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

Pos-Pos Neraca Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dan Tingkat Pertumbuhan Rata-Rata Pertahun Tahun 2016-2020 (Rp juta)

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan Rata-Rata pertahun (%)
KEWAJIBAN							
	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	6.867,10	17.277,68	20.532,75	28.629,18	35.955,98	
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	1.764,78	748,24	17,72	0,60	4,90	
	Utang Bunga						
	Pendapatan diterima dimuka	3.455,08	2.138,73	81,21	59,37	2.661,67	
	Utang kepada Pihak Ketiga						
	Bagian Lancar Ut. Jk Panjang						
	Utang Beban	1.647,23	14.390,71	19.668,72	25.959,70	33.289,42	
	Utang transfer						
	Utang Jangka Pendek Lainnya			765,09	2.609,52	-	
	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	10.878,00	10.878,00	-	-	-	
	Utang Dalam Negeri						
	Utang Jangka Panjang Lainnya	10.878,00	10.878,00				
	JUMLAH KEWAJIBAN	17.745,10	28.155,68	20.532,75	28.629,18	35.955,98	19,31
	EKUITAS	2.101.824,65	2.211.548,91	2.408.920,87	2.424.445,02	2.346.493,87	2,79
	Ekuitas	2.101.824,65	2.211.548,91	2.408.920,87	2.424.445,02	2.346.493,87	
	TOTAL KEWAJIBAN & EKUITAS	2.119.569,75	2.239.704,59	2.429.453,62	2.453.074,21	2.382.449,85	2,97

Sumber: Badan Keuangan Daerah, Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

Untuk memahami kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dapat dilakukan berdasarkan analisis rasio keuangan. Secara konseptual ada 4 macam analisis rasio keuangan yang dapat digunakan, meliputi rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio leverage, dan rasio profitabilitas.

1. **Rasio likuiditas**

Rasio Likuiditas bertujuan untuk melihat kemampuan organisasi dalam melunasi hutangnya pada saat jatuh tempo. Semakin tinggi rasio likuiditas berarti semakin tinggi kemampuan organisasi dalam melunasi hutangnya. Analisis rasio likuiditas dapat dilakukan berdasarkan rasio lancar, rasio quick, dan rasio kas. Ketiga rasio sama-sama bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah daerah dalam membayar hutang lancarnya pada saat jatuh tempo, tetapi rasio kas lebih menunjukkan kemampuan riil berdasarkan kas yang dimiliki.

2. **Rasio Solvabilitas**

Analisis solvabilitas bertujuan untuk melihat kemampuan organisasi dalam melunasi seluruh hutangnya, baik hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang. Analisis solvabilitas ini secara tidak langsung juga dapat dilakukan melalui rasio leverage, dimana rasio leverage ini bertujuan untuk melihat sejauhmana organisasi menggunakan dana pinjaman (hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang) dalam menjalankan roda organisasinya. Analisis rasio solvabilitas dapat dihitung berdasarkan perbandingan total hutang dengan total aset, dan atau total hutang dengan modal. Kedua rasio ini sama-sama bertujuan untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi seluruh kewajibannya seandainya seluruh aset dan atau modal digunakan.

3. **Rasio Profitabilitas**

Analisis rasio profitabilitas bertujuan menilai kemampuan menghasilkan laba. Karena organisasi pemerintah daerah tidak bertujuan laba maka perhitungan dan analisis rasio ini menjadi tidak relevan dilakukan.

Karena rasio profitabilitas tidak relevan dilakukan pada organisasi pemerintahan, maka dalam pembahasan berikutnya, analisis rasio keuangan yang digunakan dalam menilai kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya hanya berdasarkan rasio likuiditas dan rasio solvabilitas saja.

Baik rasio lancar maupun rasio kas menunjukkan kemampuan yang sangat luar biasa, namun semua rasio ini menunjukkan penurunan. Penurunan ini bukan berarti adanya penurunan kemampuan dalam melunasi kewajiban Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, tetapi lebih disebabkan adanya perbedaan perlakuan akuntansi yang diterapkan. Tetapi, dengan pemberlakuan basis akrual dari tahun 2016, maka pada setiap akhir tahun harus diakui hutang-hutang belanja yang akan dilunasi pada awal tahun berikutnya. Oleh sebab itu, jumlah kewajiban jangka pendek tahun 2020 jauh lebih besar dibandingkan dengan kewajiban jangka pendek tahun 2016.

Rasio lancar mengalami penurunan dari 982,61% tahun 2016 menjadi 370,02% tahun 2020. Sedangkan rasio quick turun dari 520,01% tahun 2016 menjadi 228,20% tahun 2020. Hal yang sama ditunjukkan oleh rasio kas; turun dari 982,61% tahun 2016 menjadi 370,02% tahun 2020. Ketiga rasio ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mempunyai kemampuan untuk melunasi hutang lancar puluhan kali lipat, dan atau jumlah hutang Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang sangat kecil sekali. Namun dari sisi lain, jumlah kas yang sangat besar ini kurang

baik dari fungsi pemerintah sebagai pengerak pembangunan. Pada masa datang, saldo kas pada akhir tahun hanya sebatas kebutuhan minimal bulanan pelaksanaan kegiatan administrasi rutin tahun berikut.

Kondisi jumlah hutang yang sangat kecil itu juga dapat dilihat berdasarkan rasio total hutang terhadap ekuitas dan atau total aset kurang dari 1%. Artinya, hutang yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Dharmasraya hanya kurang dari 1% dari jumlah aset atau ekuitas. Dengan demikian, ke 4 (empat) rasio keuangan ini menunjukkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang sangat baik dalam melunasi seluruh hutangnya. Tabel 3-11 berikut menyajikan rasio keuangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

Tabel 3-11 Rasio Keuangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 (%)

No	Uraian	Tahun					Pertumbuhan per tahun (%)
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	Rasio lancar (current ratio)	982,61	473,54	370,02	259,44	370,02	(21,66)
2	Rasio quick (quick ratio)	520,01	276,39	228,20	127,65	228,20	(18,61)
3	Kas Rasio	982,61	473,54	370,02	259,44	370,02	(21,66)
4	Rasio total hutang terhadap total aset	0,84	1,26	0,85	1,17	0,85	0,24
5	Rasio hutang terhadap modal (Ekuitas)	0,84	1,27	0,85	1,18	0,85	0,24

Sumber: Badan Keuangan Daerah, Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2021

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan tahun 2016 sampai tahun 2020 secara umum terlihat pada pelaksanaan pendapatan, belanja serta pembiayaan yang dilaksanakan berdasarkan APBD setiap tahunnya. Berdasarkan data realisasi pendapatan dan belanja, setiap tahunnya terlihat adanya peningkatan yang cukup signifikan, baik didorong oleh adanya peningkatan PAD, dana perimbangan maupun kebijakan yang terkait dengan lain-lain pendapatan yang sah. Meskipun pengelolaan pembiayaan daerah. Penganggaran yang baik, akan menghasilkan struktur keuangan yang ideal dan optimal untuk dianggarkan pada pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan prioritas pembangunan dan kebutuhan yang ada di lapangan guna pencapaian target pembangunan. Oleh sebab itu azas pokok yang perlu dicapai dalam penganggaran ini adalah efisiensi dan efektifitas. Semakin efisien penganggaran daerah maka akan semakin efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sesuai target yang ditetapkan.

3.2.1. Kebijakan pendapatan daerah.

Kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dari tahun 2016-2020 sebagaimana tergambar dari pendapatan daerah, baik PAD, dana perimbangan maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

3.2.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, maka PAD memiliki sumber utama yaitu dari pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Selain pajak dan retribusi daerah juga terdapat lain-lain PAD yang sah. Khusus untuk pajak dan retribusi daerah juga telah didukung oleh regulasi daerah dalam bentuk pertauran daerah diantaranya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pajak Daerah serta beberapa peraturan daerah lainnya yang mengatur tentang retribusi daerah. Selain didasari oleh peraturan yang ada, juga telah dilakukan berbagai upaya dan strategi lainnya seperti peningkatan

kemampuan SDM pengelola pendapatan daerah serta peningkatan kesadaran masyarakat melalui berbagai media sosialisasi mengenai hak dan kewajiban serta manfaat akan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah.

3.2.1.2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan dana yang berasal dari pemerintah pusat/APBN. Meskipun perkembangan dana perimbangan ini sangat dipengaruhi oleh kebijakan pusat, namun hal ini tidak sepenuhnya ditentukan kebijakan pusat dalam pengalokasiannya ke daerah, tapi juga ditentukan oleh upaya daerah dalam berbagai bentuk, dalam rangka optimalisasi penerimaan dana pusat juga membutuhkan berbagai upaya agar dana ini selalu dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan setiap tahunnya, diantaranya adalah :

- ✓ Optimalisasi penerimaan dana bagi hasil (DBH) dilakukan melalui penyediaan data dan informasi mengenai berbagai data teknis dan potensi wilayah yang ada serta kebutuhan informasi lainnya ke pemerintah pusat, serta pemberlakuan reward and punishment terhadap penggunaan DBH tahun sebelumnya
- ✓ Untuk besaran dana Dana Alokasi Umum (DAU) memang sudah ditentukan oleh pusat berdasarkan perkembangan APBN sesuai dengan rumus/formulasi statistik yang kompleks, antara lain dengan variabel jumlah penduduk, luas wilayah, capaian nilai IPM dan indikator lain yang ditentukan untuk setiap daerah. Oleh sebab itu setiap daerah akan menerima jumlah dan ayang berbeda sesuai dengan perkembangan indikator-indikator tersebut
- ✓ Sedangkan untuk dana alokasi khusus (DAK), DAK terdiri dari DAK Non Fisik dan DAK Fisik. Untuk DAK non Fisik besarnya ditentukan oleh data teknis serta usulan yang disampaikan ke pemerintah pusat. Adapun hal ini ditentukan berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis. Sedangkan DAK Fisik ditentukan berdasarkan Prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan setiap tahunnya serta usulan yang disampaikan oleh pemerintah daerah yang disetujui oleh pemerintah pusat melalui aplikasi Krisna Bappenas.

3.2.1.3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Pendapatan ini berasal dari pendapatan hibah, bagi hasil pajak dari provinsi, dana penyesuaian dan otonomi khusus, serta bantuan keuangan dari provinsi. Pendapatan hibah yang diterima daerah berasal dari hibah yang diterima dari pihak perusahaan perusahaan swasta besar yang ada di Kabupaten Dharmasraya serta adanya hibah dari pemerintah pusat. Hibah dari perusahaan swasta besar sebagian besar bergerak pada perkebunan sawit, CPO dan pengolahan karet. Besarnya pendapatan hibah ini dipengaruhi oleh komitmen antara perusahaan dan pemerintah daerah untuk ikut serta dalam pembiayaan pembangunan daerah. Kedepannya diharapkan pendapatan hibah ini dapat meningkat seiring dengan perkembangan perusahaan yang ada

3.2.2. Kebijakan Belanja Daerah

Besaran belanja daerah sangat dipengaruhi oleh pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah. Seperti halnya hukum ekonomi bahwa kebutuhan selalu melebihi dari kemampuan pendapatan yang ada. Oleh sebab itu pengalokasian belanja, maka wajib memperhatikan kemampuan pendapatan daerah dan kondisi dan kebijakan pembiayaan daerah. Untuk itu sebagaimana prinsip belanja pemerintah yaitu efektif dan efisien, maka beberapa kebijakan yang telah dilakukan diantaranya :

- ✓ Mengutamakan belanja yang bersifat rutin dan mengikat seperti belanja pegawai, operasional perangkat daerah serta belanja bagi hasil ke pemerintah nagari

Tabel 3-12 Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

No	Tahun	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	Total Pengeluaran (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan)	Proporsi (%)
1	Tahun 2018	452.485,72	931.599,59	48,57
2	Tahun 2019	473.970,73	1.039.053,41	45,62
3	Tahun 2020	432.740,50	985.748,83	43,90

Sumber : Badan Keuangan Daerah, Kabupaten Dharmasraya, Tahun 2020

- ✓ Tabel 3-12 menunjukkan bahwa jumlah Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur pada 3 tahun terakhir menunjukkan penurunan. Akibatnya, persentase proporsi belanja ini pun mengalami penurunan. Jika tahun 2018, proporsi Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur sebesar 48,57% dari Total Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Dharmas Raya, maka tahun 2020 turun menjadi 43,90%.
- ✓ Analisis terhadap realisasi belanja wajib dan mengikat serta prioritas utama dimaksudkan untuk mengetahui atau memastikan jumlah kebutuhan dana yang tidak bisa tidak harus dikeluarkan daerah karena kewajiban pemerintah baik karena peraturan maupun karena adanya perjanjian. Semakin tinggi jumlah belanja wajib dan mengikat serta prioritas utama berarti semakin terbatas dana yang dapat digunakan untuk tujuan lainnya yang tidak terikat.

Hasil perhitungan belanja periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama menunjukkan fluktuasi selama tahun 2016 tahun 2020. Belanja wajib dan mengikat tersebut mengalami sedikit penurunan dari Rp484.062,59 juta tahun 2016 menjadi Rp538.255,24 juta tahun 2020. Dengan demikian peningkatan belanja periodik wajib selama ini masih dalam batas yang dapat dikendalikan.

Tabel 3-13 berikut memperlihatkan perkembangan belanja periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama Kabupaten Dharmasraya tahun 2016 –2020. Sedangkan pada Tabel 3-14 dapat dilihat proyeksi belanja periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama yang diprediksi berdasarkan pertumbuhan rata-rata per tahun dalam 5 tahun terakhir

Tabel 3-13 Realisasi Belanja Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 –2020

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	Pertumbuhan Rata-Rata pertahun (%)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	243.331,77	211.180,87	212.755,02	234.583,05	225.327,86	(1,90)
2	Belanja Sertifikasi Guru	55.602,51	41.988,64	60.632,42	62.497,14	62.020,44	2,77
2	Belanja BLUD RSUD dan Puskesmas	28.777,08	37.920,88	41.385,00	43.285,00	56.156,15	18,19
3	Belanja BOS	28.771,60	28.771,60	28.315,60	28.166,40	30.951,10	1,84
3	Belanja Bantuan Keuangan Ke Nagari	76.266,54	100.512,58	105.094,77	104.011,63	105.472,65	8,44
4	Belanja DAK Fisik	160.048,41	137.204,22	112.246,50	149.830,72	153.471,78	(1,04)
4	Belanja DAK Non Fisik di luar Sertifikasi Guru	7.985,11	15.894,75	20.737,92	24.302,81	26.131,41	34,50
5	Belanja BPJS	19.814,86	19.999,19	19.672,45	21.361,86	21.361,86	1,90
5	Belanja DID	-	51.745,79	17.500,00	45.953,18	46.554,03	(3,46)
Jumlah		620.597,88	645.218,52	618.339,68	713.991,78	727.447,27	4,05

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya

Tabel 3-14 Prediksi Belanja Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 –2026

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	253.160,34	257.978,96	262.889,29	267.893,09	272.992,12	278.188,22
2	Belanja Sertifikasi Guru	64.127,80	65.903,19	67.727,74	69.602,79	71.529,76	73.510,07
2	Belanja BLUD RSUD dan Puskesmas	56.156,15	58.710,11	61.380,23	64.171,79	67.090,30	70.141,55
3	Belanja BOS	30.951,10	31.521,30	32.102,00	32.693,41	33.295,70	33.909,10
3	Belanja Bantuan Keuangan Ke Nagari	108.035,86	112.596,59	117.349,84	122.303,75	127.466,80	132.847,80
4	Belanja DAK Fisik	132.041,29	133.419,15	134.811,39	136.218,16	137.639,61	139.075,89
4	Belanja DAK Non Fisik di luar Sertifikasi Guru	25.869,05	27.144,00	28.481,79	29.885,52	31.358,42	32.903,92
5	Belanja BPJS	33.752,62	34.392,96	35.045,44	35.710,31	36.387,78	37.078,11
5	Belanja DID	17.000,34	17.294,69	17.594,15	17.898,78	18.208,70	18.523,97
	Jumlah	721.094,55	738.960,96	757.381,88	776.377,59	795.969,19	816.178,62

- ✓ Pelaksanaan anggaran berbasis kinerja (*performance based*), meskipun hal ini masih belum sepenuhnya dapat diterapkan, namun upaya yang dilakukan pemerintah daerah sudah diarahkan untuk itu. Sehingga belanja/ pengeluaran anggaran yang dilakukan pemerintah daerah dapat mencapai target yang telah ditetapkan.
- ✓ Pemenuhan kewajiban *mandatory spending*, *Mandatory spending* adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuan *mandatory spending* ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Adapun kewajiban yang menjadi lingkup belanja ini adalah sebagai berikut ;
 - Alokasi **anggaran pendidikan sebesar 20%** dari APBD (UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1))
 - Besar **anggaran kesehatan** pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan **minimal 10%** (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan)
 - Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit **25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah** yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah (UU APBN).
 - **Alokasi dana Desa (ADD) paling sedikit 10%** dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa)

3.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa kebijakan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam penyusunan anggaran menggunakan prinsip “anggaran berimbang”. Berdasarkan prinsip ini, maka SiLPA yang terjadi tahun sebelumnya diupayakan untuk dibelanjakan tahun berikutnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan, dan meningkatkan daya saing daerah.

Defisit riil yang terjadi ini bermakna bahwa Pemerintah Kabupaten Dharmasraya harus mencari sumber pembiayaan yang lain untuk menutupi pengeluaran tersebut. Tapi jika surplus maka dapat digunakan untuk pembiayaan tahun berikutnya. Defisit Riil terjadi tahun 2016, 2018, dan 2019, masing-masing Rp6.207,98 juta, Rp8.058,63 juta, Rp19.695,34 juta. Sedangkan tahun 2017 dan tahun 2020 terjadi Surplus Riil, masing-masing Rp9.193,89 juta dan Rp4.442,31 juta. Defisit Riil yang terjadi ditutupi dengan sumber dana Silpa tahun sebelumnya. Perkembangan Defisit Riil yang terjadi ini dapat dilihat pada Tabel 3-15.

Analisis lebih lanjut penyebab terjadinya Silpa menunjukkan bahwa penyebab utama defisit/surplus riil tersebut disebabkan adanya penghematan dan atau kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan, yaitu sebesar Rp98.340,77 juta tahun 2016 dan turun pada tahun-tahun berikutnya dan menjadi Rp31.993,49 juta tahun 2020. Penyebab lain dari Silpa tersebut adalah karena adanya pelampauan PAD dan atau beberapa realisasi pendapatan yang lebih rendah dari yang dianggarkan. Tabel 3-16 memperlihatkan perkembangan Penyebab Silpa yang terjadi.

Tabel 3-15 Realisasi Defisit Riil dan Silpa Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 s/d 2020 (Rp juta)

No	Uraian	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020
1	Realisasi Pendapatan Daerah	875.675,59	949.023,48	923.540,95	1.019.358,07	990.191,14
	Dikurangi realisasi:					
2	Belanja Daerah	881.881,59	935.591,35	931.599,59	1.036.553,41	985.750,17
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	3.716,00	-	2.500,00	-
	DEFISIT RIIL	(6.206,00)	9.716,13	(8.058,63)	(19.695,34)	4.440,97
	Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan:					
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya	26.192,16	21.931,31	31.647,42	23.588,79	3.893,45
2	Pencairan Dana Cadangan					
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan					
4	Penerimaan Pinjaman Daerah					
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah					
6	Penerimaan Piutang Daerah	479,65	-	-	-	-
	Koreksi SiLPA	1.945,16				
	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	28.616,97	21.931,31	31.647,42	23.588,79	3.893,45
	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	22.410,97	31.647,43	23.588,79	3.893,45	8.334,42

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya

Tabel 3-16 Penyebab Terjadinya Defisit Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2020 (Rp juta)

No	Uraian	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020
1	Jumlah SiLPA	22.410,97	31.647,43	23.588,79	3.893,45	8.334,42
2	Pelampauan penerimaan PAD	(13.595,28)	(9.097,27)	4.030,34	(21.287,08)	(1.303,76)
3	Pelampauan penerimaan Dana Perimbangan	(61.408,55)	(17.935,90)	(12.438,02)	(20.201,38)	(19.048,88)
4	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	(4.338,61)	(856,09)	(1.058,44)	(4.054,46)	(3.305,09)
5	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	79.342,45	27.889,25	9.466,11	45.542,92	23.657,73
6	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun					
7	Kegiatan lanjutan					

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasraya

3.3. Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/ pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 tahun ke depan serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya. Alternatif lain, analisis kerangka pendanaan juga dapat dilakukan dengan membuat proyeksi pendapatan dan proyeksi belanja sesuai dengan kondisi 5 tahun terakhir.

3.3.1. Kebijakan Pengelolaan Keuangan

3.3.1.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah yang baik dapat menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah. Upaya-upaya untuk meningkatkan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya masa datang dilakukan melalui:

- ✓ Intensifikasi sumber pendapatan daerah dan optimalisasi pengelolaan aset daerah untuk peningkatan pendapatan daerah;
- ✓ Meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
- ✓ Meminimalkan kemungkinan terjadinya kebocoran melalui pembinaan dan evaluasi pelaksanaan pemungutan pendapatan asli daerah;
- ✓ Meningkatkan kapasitas manajemen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah;
- ✓ Mendorong upaya intensifikasi pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Provinsi yang dipungut di Kabupaten Dharmasraya;
- ✓ Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan Dana Perimbangan dan Bagi Hasil.

Untuk merealisasikan rencana penerimaan pendapatan daerah (target), sesuai dengan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026, maka strategi pencapaian target tersebut dilakukan melalui;

- ✓ Pemantapan peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan pendapatan daerah;
- ✓ Pemantapan kelembagaan dan peningkatan operasional pemungutan pendapatan daerah;
- ✓ Peningkatan sarana prasarana pelayanan, penyempurnaan sistem pungutan, dan peningkatan profesionalisme pegawai dalam pemungutan pendapatan;
- ✓ Sosialisasi mengenai pungutan pajak penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;
- ✓ Pengembangan sistem operasi penagihan dan atau pemungutan atas obyek pajak daerah dan retribusi daerah, termasuk dengan memanfaatkan teknologi informasi, dan
- ✓ Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan daerah.

3.3.1.2. Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dengan memperhatikan prestasi kerja masa lalu dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Disamping itu, kebijakan belanja daerah tersebut juga memperhatikan prioritas pembangunan sesuai isu-isu strategis serta situasi dan kondisi pada tahun-tahun mendatang, artinya program dan kegiatan strategis saja yang menjadi prioritas yang dapat didanai sesuai dengan konsep money follow programme.

Kebijakan belanja daerah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya diarahkan dengan pengaturan pola yang proporsional, efisien dan efektif. Hal ini dilakukan dengan mengalokasikan belanja daerah untuk:

- ✓ Kegiatan yang berorientasi terhadap kepada kepentingan masyarakat yang memberi manfaat jangka panjang;
- ✓ Pemerataan dan berkeadilan pada berbagai wilayah di Kabupaten Dharmasraya dengan memperhatikan kondisi, permasalahan, dan kebutuhan masing-masing wilayah, dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Dharmasraya;
- ✓ Pencapaian visi, misi Kabupaten Dharmasraya yang telah disinkronisasikan dengan program strategis Pemerintah Provinsi Sumatera Barat maupun Program Pembangunan Nasional;
- ✓ Melaksanakan fungsi pendidikan, kesehatan dan infrastruktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.3.1.3. Kebijakan Pembiayaan

Kebijakan pembiayaan daerah meliputi kebijakan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Kebijakan penerimaan pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Sumber penerimaan pembiayaan terdiri dari :

- ✓ Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu;
- ✓ Transper Dana Cadangan;
- ✓ Penerimaan Pinjaman Daerah; maupun
- ✓ Penerimaan Piutang Daerah.

Sedangkan kebijakan pengeluaran pembiayaan timbul karena adanya surplus atau kelebihan anggaran. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya untuk; pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah maupun untuk pembayaran pokok utang.

Kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Dharmasraya masa datang diharapkan dapat memberikan keuntungan berupa; adanya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan; peningkatan ekonomi daerah melalui penyediaan layanan umum, serta mendapatkan bagi hasil dari penyertaan modal/investasi daerah. Kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Dharmasraya dilakukan, antara lain melalui:

- ✓ Mendapatkan pinjaman dari pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI dalam rangka pemulihan ekonomi masyarakat Kabupaten Dharmasraya.

- ✓ Meningkatkan Penyertaan Modal pada Bank Pembangunan Sumatera Barat atau BUMD lainnya guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

3.3.2. *Proyeksi Pendapatan dan Belanja*

Dalam memproyeksikan pendapatan Kabupaten Dharmasraya tahun 2021 sampai tahun 2026 digunakan beberapa asumsi. Asumsi pertama adalah APBD Kabupaten Dharmasraya tahun 2021 telah melalui analisis oleh eksekutif, sehingga dapat dijadikan tolok ukur atau standar dalam menentukan metode statistik yang sebaiknya dipakai dan atau tahun dasar yang digunakan dalam menghitung proyeksi pendapatan.

Secara umum, berbagai metode statistik dapat digunakan dalam memproyeksikan pendapatan. Metode mana yang lebih tepat dan akan dipilih, tergantung kepada trend dan atau konjungtur data-data keuangan masa lalu yang akan digunakan sebagai dasar proyeksi. Setelah dilakukan proses trial and error maka alternatif yang paling baik adalah berdasarkan tingkat pertumbuhan rata-rata tahun 2017- 2019 yang terbebas dari pengaruh penurunan kewenangan dan bebas dari pengaruh kebijakan pengurangan DAU dan refocusing anggaran..

Sebagai akibat dampak dari wabah Covid-19, maka tahun 2021 secara bertahap Dunia mulai menunjukkan pemulihan ekonomi, termasuk Indonesia. Dampak terhadap Kabupaten Dharmasraya diperkirakan realisasi pendapatan dan belanja tidak akan mengalami perubahan dari APBD tahun 2021. Selanjutnya, tahun 2022 diperkirakan kondisi ekonomi Indonesia sudah pulih sehingga capaian kinerja pendapatan dan belanja 5 tahun sebelum dapat dijadikan dasar dalam memproyeksi pendapatan dan belanja Kabupaten Dharmasraya

Hasil proyeksi menunjukkan terjadi peningkatan pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dari Rp950.959,99 juta pada tahun 2021 menjadi Rp1.105.362,03 juta pada tahun 2026. Hasil proyeksi pendapatan sebagaimana yang dijelaskan di atas dapat dilihat pada Tabel 3-17. Sedangkan pada Tabel 3-18 dapat dilihat proyeksi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya 2021-2026, yang mengalami peningkatan dari Rp966.756,78 juta tahun 2021 menjadi Rp1.107.718,76 juta pada tahun 2026.

Tabel 3-17 Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 - 2026 (Rp juta)

No	Uraian Akun	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	PENDAPATAN DAERAH	950.959,99	964.157,48	1.001.674,90	1.029.192,31	1.056.709,73	1.085.906,63
A	PENDAPATAN ASLI DAERAH	84.116,61	86.350,00	87.600,00	88.850,00	90.100,00	91.731,10
1	Pajak Daerah	18.714,13	19.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	22.907,93
2	Retribusi Daerah	3.073,47	3.250,00	3.500,00	3.750,00	4.000,00	4.272,36
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.063,75	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.109,11
4	Lain-lain PAD yang Sah	58.265,25	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.441,70
B	PENDAPATAN TRANSFER	835.392,28	846.807,48	882.574,90	908.342,31	934.109,73	960.670,33
B1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	795.317,90	805.807,48	840.574,90	865.342,31	890.109,73	915.630,25
B1.1	Dana Perimbangan	721.777,49	728.500,00	759.500,00	780.500,00	801.500,00	822.770,24
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	17.078,47	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.607,00
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	488.047,00	490.000,00	510.000,00	520.000,00	530.000,00	541.040,06
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	126.655,18	130.000,00	140.000,00	150.000,00	160.000,00	169.626,71
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	89.996,85	91.000,00	92.000,00	93.000,00	94.000,00	95.028,31
B1.2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	73.540,41	77.307,48	81.074,90	84.842,31	88.609,73	92.860,01
1	Dana Insentif Daerah	17.000,34	17.500,00	18.000,00	18.500,00	19.000,00	19.535,64
2	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	-
3	Dana Keistimewaan	-	-	-	-	-	-
4	Dana Desa	56.540,07	59.807,48	63.074,90	66.342,31	69.609,73	73.324,37
B2.1	Pendapatan Transfer Antar Daerah	40.074,38	41.000,00	42.000,00	43.000,00	44.000,00	45.040,08
1	Pendapatan Bagi Hasil	40.074,38	41.000,00	42.000,00	43.000,00	44.000,00	45.040,08
2	Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-	-
C	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	31.451,10	31.000,00	31.500,00	32.000,00	32.500,00	33.505,20
1	Pendapatan Hibah	500,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00	2.500,00	3.738,37
2	Dana Darurat	-	-	-	-	-	-
3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	30.951,10	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	29.766,83

Tabel 3-18 Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 - 2026 (Rp juta)

No	Uraian Akun	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	BELANJA DAERAH	966.756,78	976.157,48	1.011.674,90	1.037.192,31	1.063.709,73	1.091.827,12
A	BELANJA OPERASI	678.513,08	702.028,59	723.521,68	745.302,10	767.377,02	785.503,82
1	Belanja Pegawai	448.510,83	459.723,60	471.216,69	482.997,11	495.072,03	507.448,83
2	Belanja Barang dan Jasa	189.672,26	200.000,00	210.000,00	220.000,00	230.000,00	235.750,00
3	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
4	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
5	Belanja Hibah	40.304,99	40.304,99	40.304,99	40.304,99	40.304,99	40.304,99
6	Belanja Bantuan Sosial	25,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
B	BELANJA MODAL	196.338,48	156.371,41	165.028,32	164.397,90	164.472,98	168.158,12
1	Belanja Modal Tanah						
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54.237,46	58.479,15	59.271,62	54.815,03	50.014,98	49.011,76
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	94.781,01	43.479,15	43.271,62	37.815,03	32.014,98	24.406,82
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	46.794,01	53.813,11	61.885,08	71.167,84	81.843,01	94.119,47
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	526,00	600,00	600,00	600,00	600,00	620,07
C	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	Belanja Tidak Terduga	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
D	BELANJA TRANSFER	86.905,22	112.757,48	118.124,90	122.492,31	126.859,73	133.165,17
1	Belanja Bagi Hasil	2.178,76	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.587,45
2	Belanja Bantuan Keuangan	84.726,46	110.557,48	115.824,90	120.092,31	124.359,73	130.577,72

Tabel 3-19 Proyeksi Pembiayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 - 2026 (Rp juta)

No	Uraian Akun	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	PEMBIAYAAN DAERAH	15.796,80	12.000,00	10.000,00	8.000,00	7.000,00	5.920,48
A	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	15.796,80	12.000,00	10.000,00	8.000,00	7.000,00	5.920,48
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	15.796,80	12.000,00	10.000,00	8.000,00	7.000,00	5.920,48
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	-
B	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	-	-	-	-
1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
2	Penyertaan Modal Daerah	-	-	-	-	-	-
3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	-
4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-	-	-

3.3.3. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Analisis penghitungan kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Perhitungan kerangka pendanaan dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat pertumbuhan pendapatan, belanja, dan sisa lebih riil penghitungan anggaran yang dicapai Kabupaten Dharmasraya dalam periode tahun 2021 – 2026 serta perkiraan kondisi perekonomian yang mungkin dihadapi pada masa datang.

Langkah pertama adalah menentukan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pengeluaran prioritas daerah. Kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama. Dengan demikian, Kapasitas riil keuangan daerah dihitung dari hasil proyeksi Pendapatan Daerah yang dijelaskan pada Tabel 3-17 dan proyeksi pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama yang telah dijelaskan pada Tabel 3-14. Hasil perhitungan untuk memperoleh kapasitas riil kemampuan keuangan daerah diperlihatkan pada Tabel 3-20.

*Tabel 3-20 Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah
Pemerintah Kabupaten Dharmasraya tahun 2021– 2026 (Rp juta)*

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Pendapatan	950.959,99	964.157,48	1.001.674,90	1.029.192,31	1.056.709,73	1.085.906,63
2	Pencairan Dana Cadangan						
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan	15.796,80	12.000,00	10.000,00	8.000,00	7.000,00	5.920,48
	Total Penerimaan	966.756,78	976.157,48	1.011.674,90	1.037.192,31	1.063.709,73	1.091.827,12
	Dikurangi:						
4	Belanja Wajib & Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama	721.094,55	738.960,96	757.381,88	776.377,59	795.969,19	816.178,62
5	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	245.662,23	237.196,53	254.293,02	260.814,73	267.740,54	275.648,50

Berdasarkan kapasitas kemampuan keuangan daerah maka disusun rencana penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah kedalam dua prioritas berikutnya, yaitu :

- Prioritas I : dialokasi untuk pencapaian target dalam visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Dharmasraya, meliputi peningkatan pemerataan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing, peningkatan kualitas birokrasi pemerintahan, peningkatan kualitas lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan, serta peningkatan nilai-nilai agama, adat dan budaya.
- Prioritas II : dialokasikan untuk mendanai belanja selain pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan *earmark* untuk mendukung program prioritas di Kabupaten Dharmasraya.

BAB 4. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Perumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis akan menjadi salah satu dasar perumusan kebijakan pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah, yaitu tujuan dan sasaran serta perumusan program dan kegiatan pembangunan daerah di masa datang.

Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, atau kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Permasalahan pembangunan dapat juga dimaknai sebagai penyebab terjadinya kesenjangan tersebut.

Rumusan permasalahan dan isu strategis daerah didasarkan pada kondisi umum daerah dan kemampuan keuangan daerah serta masukan yang dihimpun melalui forum konsultasi publik dan Musrenbang RPJMD dan memperhatikan dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Dharmasraya

4.1. Permasalahan Pembangunan

4.1.1. Permasalahan pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup (infrastruktur)

No.	Permasalahan
1	Jalan dan jembatan, rendahnya persentase jalan mantap diantaranya disebabkan oleh ; rendahnya kualitas jalan, kurangnya bangunan kelengkapan jalan (jembatan, drainase, bahu jalan), ketidak sesuaian antara kelas jalan dengan tonase kendaraan yang melewati, dan kurangnya pemeliharaan jalan.
2	Pelayanan transportasi (rendahnya konektivitas disebabkan oleh rendahnya kualitas jalan dan aksesibilitas yang tidak didukung kelengkapan jalan yang berkeselamatan)
3	Rendahnya cakupan layanan air bersih yang layak disebabkan oleh belum meratanya pembangunan SPAM baik perkotaan maupun perdesaaan)
4	Rendahnya aksesibilitas sanitasi disebabkan oleh infrastruktur sanitasi yang belum memadai serta jangkauan pelayanan yang belum merata)
5	komunikasi dan informasi, masih adanya blankspot kawasan tertentu untuk menunjang jaringan telekomunikasi masyarakat yang disebabkan oleh kondisi geografis seperti kawasan terisolir;
6	Lingkungan Hidup dan kebencanaan: meningkatnya ali fungsi lahan, aktivitas <i>illegal mining</i> dan <i>illegal logging</i> yang mengakibatkan rendahnya kualitas air, dan meningkatnya daya rusak air terhadap kawasan pemukiman dan lahan pertanian;
7	Belum adanya ruang publik untuk interaksi sosial

4.1.2. Permasalahan pembangunan sumber daya manusia

No.	Permasalahan
1	Pendidikan a. lambatnya perkembangan harapan lama sekolah dan angka rata-rata lama sekolah dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. b. Relatif rendahnya APM/APK SMP dibandingkan APM/APK SD c. rendahnya budaya baca dan literasi
2	Kesehatan d. Rendahnya kualitas pelayanan kesehatan karena kurangnya SDM kesehatan e. Tingginya kasus penyakit menular (TBC, HIV, diare) yang disebabkan oleh buruknya sanitasi dan kualitas lingkungan, perilaku dan gaya hidup f. Tingginya kasus penyakit tidak menular (jantung, diabet, ginjal) yang disebabkan oleh perilaku dan gaya hidup

4.1.3. Permasalahan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat

No.	Permasalahan
1	Melambatnya pertumbuhan ekonomi dan relatif rendahnya PDRB perkapita dibandingkan provinsi Sumatera Barat
2	Menurunnya produktivitas komoditi tanaman perkebunan
3	Stagnannya produksi dan produktivitas tanaman pangan
4	Kurang stabilnya harga komoditi perkebunan
5	Belum optimalnya penanggulangan penyakit menular ternak
6	pengelolaan potensi peternakan kurang memperhatikan kearifan lokal
7	Belum optimalnya potensi objek wisata dan belum berkembangnya event wisata

4.1.4. Permasalahan birokrasi pemerintahan daerah (birokrasi)

No.	Permasalahan
1	Rendahnya profesionalitas aparatur pemerintah
2	Lemahnya tata kelola pemerintahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik
3	Belum optimalnya peningkatan akuntabilitas pemerintah daerah
4	Belum semua OPD memiliki perkantoran yang representatif

4.2. Isu strategis berdasarkan KLHS :

Sesuai dengan hasil konsultasi publik dalam penjaringan isu strategis untuk merumuskan isu strategis yang dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2021, maka rumusan isu strategis sebagai hasil penjaringan dengan peserta konsultasi publik pada saat itu adalah:

1. Penurunan Kualitas Air
2. Peningkatan timbulan sampah dan rendahnya kapasitas pengelolaannya
3. Rendahnya derajat kesehatan masyarakat
4. Peningkatan kasus narkoba
5. Illegal Mining
6. Rendahnya kualitas infrastruktur jalan
7. Kurangnya peluang dan informasi kerja
8. Infrastruktur jalan
9. Minimnya pengembangan perumahan
10. Masih rendahnya jumlah dan kualitas destinasi wisata
11. Alih fungsi lahan
12. Meningkatnya kenakalan remaja
13. Fasilitas sanitasi dan drainase yang minimal
14. Kurangnya aplikasi pendidikan agama dalam kehidupan masyarakat
15. Peningkatan kapasitas SDM yang minim
16. Rendahnya nilai tambah produk pertanian

Kemudian dari isu strategis hasil penjaringan pada saat konsultasi public tersebut dilakukan penapisan dengan menggunakan 5 kriteria berikut:

1. Karakteristik Wilayah
2. Tingkat Penting dan Luasnya Potensi Dampak
3. Keterkaitan antara Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan
4. Keterkaitan dengan Isu Utama RPPLH
5. Keterkaitan dengan Isu DIKPLHD

Setelah dilakukan penapisan disepakati 5 isu prioritas Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Dhamasraya yaitu:

Tabel 4-1 Isu Prioritas Kabupaten Dhamasraya

Ranking	No isu	ISU PB STRATEGIS
1	1	Penurunan Kualitas Air
2	2	Peningkatan timbulan sampah dan rendahnya kapasitas pengelolaannya
3	5	Illegal Mining
4	11	Alih fungsi lahan
5	3	Rendahnya derajat kesehatan masyarakat
6	16	Rendahnya nilai tambah produk pertanian
7	14	Kurangnya aplikasi pendidikan agama dalam kehidupan masyarakat

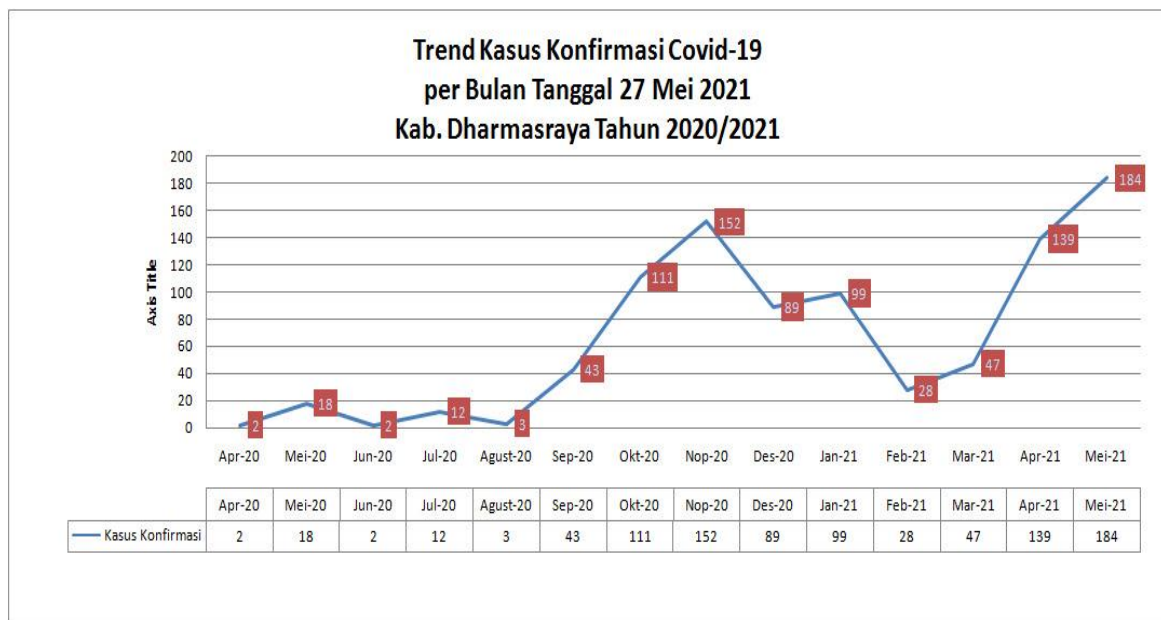
4.3. Isu Strategis Daerah

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah bagi daerah pada suatu saat, dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

4.3.1. Dampak pandemi Covid-19

dampak pandemi-19 terjadi sejak Maret 2020 dan masih berlanjut hingga 2021. Dilihat dari perkembangan hingga Bulan Mei 2021, maka kasus covid-19 masih akan berlanjut hingga tahun 2022. Dan ini berdampak pada kehidupan masyarakat dan juga mempengaruhi kebijakan pemerintah daerah .



Sejak ditetapkannya Pandemi Covid-19 di awal tahun 2020, kasus pertama di Kabupaten Dharmasraya terjadi pada bulan April 2020, kasus Covid-19 ini relatif melandai hingga bulan Agustus 2020 dan meningkat mulai bulan September 2020 hingga bulan November 2020. Selanjutnya pandemi ini masih terus terjadi hingga semester pertama tahun 2021. Lonjakan kasus kedua terjadi lagi pada bulan April 2021 menembus angka 184 kasus, diantaranya disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan.

4.3.2. Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)

TPB/SDGs merupakan penyempurnaan dari tujuan pembangunan millennium (Millenium Development Goals / MDGs) yang lebih komprehensif dengan melibatkan lebih banyak negara maju maupun berkembang, memperluas sumber pendanaan, menekankan pada hak asasi manusia, inklusif dengan pelibatan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan media, Filantropi dan Pelaku Usaha, serta Akademisi dan Pakar.

Merujuk pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, maka upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Dalam pencapaian TPB/SDGs secara global terdapat 241 indikator yang kemudian diterjemahkan dan disesuaikan dengan kondisi di Indonesia, hingga terdapat total 319 indikator yang menjadi tolok ukur ketercapaian TPB/SDGs di Indonesia. Rincian dari 319 indikator tersebut yaitu 158 indikator berupa proyeksi dari 80 indikator global, 85 indikator berupa indikator nasional yang sesuai dengan indikator global, dan 76 indikator sebagai tambahan indikator global.

Analisis pencapaian TPB/SDGs di Kabupaten Dharmasraya dilakukan dengan menyandingkan antara target indikator TPB/SDGs yang tertuang dalam Peraturan Presiden RI Nomor 59 Tahun 2017 dengan data TPB/SDGs Kabupaten Dharmasraya sehingga diperoleh klasifikasi penilaian capaian indikator TPB/SDGs yang terbagi dalam 4 (empat) kategori :

- a. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target/SS
- b. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target/SB
- c. Indikator TPB yang tidak ada/belum ada data/NA
- d. Indikator TPB yang bukan kewenangan

Berdasarkan hasil analisis capaian TPB yang sesuai dengan kewenangan kabupaten adalah 16 TPB (kecuali TPB 14, Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan (Ekosistem Lautan)).

Sedangkan jumlah indikator dari 16 TPB yang menjadi kewenangan kabupaten adalah 220 indikator. Dari 220 indikator tersebut, terdapat 8 (delapan) indikator yang bukan kewenangan (BK) Kabupaten Dharmasraya

Berdasarkan analisa capaian indikator TPB/SDGs di Kabupaten Dharmasraya isu strategis daerah terkait dengan pencapaian TPB/SDGs ini berhubungan dengan :

No	Bidang	Isu Strategis
1	Pendidikan	SPM 1. Belum banyak daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana) 2. Belum tercapainya target peningkatan proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika. 3. Belum tercapainya target peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.

No	Bidang	Isu Strategis
		4. Belum tercapainya target peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat. 5. Belum tercapainya target peningkatan Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun. 6. Belum tercapainya target peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). 7. Belum tercapainya target keseimbangan Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi. 8. Belum tercapainya target peningkatan Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun. 9. Belum tercapainya target peningkatan Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik. 10. Belum dilakukan upaya meningkatkan Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun. NON SPM 1. Belum tersedia data proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.
2.	Kesehatan	SPM 1. Belum tercapainya target peningkatan Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan. 2. Belum tercapainya target penurunan Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup. 3. Belum tercapainya target peningkatan Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi. 4. Belum tercapainya target peningkatan Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern. 5. Belum dilakukan upaya peningkatan Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan. 6. Belum dilakukan upaya penurunan Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR). NON SPM 1. Belum tercapainya target peningkatan Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan. 2. Belum tercapainya target Jumlah kecamatan dengan eliminasi Kusta. 3. Belum tercapainya target Jumlah kecamatan dengan eliminasi filariasis

No	Bidang	Isu Strategis
		4. Belum tercapainya target penurunan Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri. 5. Belum tercapainya target Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk. 6. Belum tercapainya target Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 7. Belum tercapainya target penurunan Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi). 8. Belum tercapainya target peningkatan Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern. 9. Belum dilakukan upaya penurunan Persentase merokok pada penduduk umur ≤ 18 tahun. 10. Belum dilakukan upaya penurunan Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir. 11. Belum dilakukan upaya penurunan Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun.
3	Pekerjaan Umum	SPM 1. Belum tercapainya target peningkatan Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak. 2. Belum tercapainya target peningkatan Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau. 3. Belum tercapainya target peningkatan Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak. 4. Belum dilakukan upaya peningkatan Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan. 5. Belum dilakukan upaya peningkatan Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan. 6. Belum dilakukan upaya peningkatan Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan. NON SPM 1. Belum tercapainya target Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). 2. Belum tercapainya target Jumlah kecamatan yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). 3. Belum tercapainya target Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk. 4. Belum tercapainya target Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.

No	Bidang	Isu Strategis
		5. Belum dilakukan upaya peningkatan Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air. 6. Belum dilakukan upaya peningkatan Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.
4	Perumahan Rakyat	SPM 1. Belum tercapainya target peningkatan Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. NON SPM
5	Ketenteraman, Ketertiban Umum, & Perlindungan Masyarakat	SPM 1. Belum tercapainya target Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah 2. Belum tercapainya target penyediaan Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah. 3. Belum tercapainya target penurunan Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. 4. Belum tercapainya target penurunan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI). 5. Belum tercapainya target penyediaan Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah. 6. Belum dilakukan upaya penurunan Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi. NON SPM 1. Belum tercapainya target penurunan Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir. 2. Belum tercapainya target peningkatan Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya. 3. Belum dilakukan upaya penurunan Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana. 4. Belum dilakukan upaya penurunan Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.
6	Sosial	SPM 1. Belum tercapainya target peningkatan Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas. 2. Belum tercapainya target peningkatan Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial. NON SPM 1. Belum tercapainya target peningkatan Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.

No	Bidang	Isu Strategis
		2. Belum ada upaya peningkatan Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan. 3. Belum ada data Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal. 4. Belum ada upaya penurunan Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.
7	Lingkungan Hidup (Non SPM)	1. Belum tercapainya target penyediaan Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri. 2. Belum tercapainya target jumlah Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air. 3. Belum tercapainya target peningkatan Persentase sampah perkotaan yang tertangani. 4. Belum tercapainya target Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri). 5. Belum tercapainya target peningkatan Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang. 6. Belum tercapainya target Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001. 7. Belum tercapainya target peningkatan Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister. 8. Belum tercapainya target Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister. 9. Belum tercapainya target peningkatan Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan. 10. Belum tercapainya target Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata. 11. Belum tercapainya target penyediaan dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.
8	Pemberdayaan perempuan & perlindungan anak (Non SPM)	1. Belum tercapainya target Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan. 2. Belum tercapainya target peningkatan Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun. 3. Belum tercapainya target peningkatan Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).
9	Ketenagakerjaan (Non SPM)	1. Belum tercapainya target peningkatan Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan." 2. Belum tercapainya target peningkatan Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.

No	Bidang	Isu Strategis
		3. Belum tercapainya target penurunan Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin. 4. Belum tercapainya target peningkatan Persentase tenaga kerja formal. 5. Belum tercapainya target penurunan Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur. 6. Belum tercapainya target penurunan Tingkat setengah pengangguran. 7. Belum tercapainya target penurunan Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET). 8. Belum tercapainya target peningkatan Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan. 9. Belum dilakukan upaya peningkatan Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja). 10. Belum dilakukan upaya peningkatan Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Memperhatikan isu strategis yang ada dimana Pandemi Covid-19 tak hanya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berdampak terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs). Memperhatikan capaian indikator TPB/SDGs di Kabupaten Dharmasraya perlu adanya langkah antisipatif dan penanganan khusus terhadap berbagai target yang yang belum tercapai khususnya terkait dengan Tujuan 1: Tanpa Kemiskinan karena pandemi ini menurunkan pendapatan kelompok rentan dan miskin dan Tujuan 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera. Tujuan 1 dan Tujuan 3 akan saling mempengaruhi sehingga isu kesehatan dan kemampuan ekonomi akan saling terkait sehingga perlu penekanan antisipatif dalam menyasar sektor kesehatan serta perlu pembenahan baik dari segi akses, pelayanan, dan alat kesehatan.

Selain itu sektor pendidikan juga sangat terpengaruh oleh Covid-19 yang menyebabkan perubahan pola belajar-mengajar di sekolah. Tantangan capaian Tujuan 4: Pendidikan Berkualitas perlu adanya upaya dalam meningkatkan kesiapan tenaga pengajar dalam antisipasi pola pembelajaran daring, kemampuan TIK yang optimal, dan perluasan jangkauan teknologi internet bagi keluarga miskin dan rentan. Apabila kondisi ini tidak di antisipasi maka resiko peningkatan angka tingkat drop-out akan semakin tinggi, kemampuan membaca dan berhitung bisa menurun, dan pendidikan dasar akan terganggu.

Dengan adanya Pandemi Covid-19, antisipasi akan difokuskan untuk penanganan isu terkait dengan peningkatan ekonomi, pembenahan sektor kesehatan, peningkatan kualitas pendidikan, pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat khususnya yang terkait dengan kesehatan lingkungan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup. Di samping dampak negatif yang terjadi, terdapat dampak lain pandemi, sebagai pembelajaran bersama, masyarakat belajar bahwa akan pola hidup bersih dan sehat meningkat signifikan.

4.4. Penelaahan Dokumen Perencanaan Lainnya

Untuk lebih jelasnya maka keterkaitan RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

4.4.1. RPJPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005-2025

RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun, dimana RPJPD memuat visi daerah, misi daerah, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun. Untuk Kabupaten Dharmasraya, RPJPD ini telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Adapun fungsi penting dari RPJPD yaitu menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program calon kepala daerah.

Adapun kandungan utama RPJPD Kabupaten Dharmasraya 2005-2025 adalah sebagai berikut :

4.4.1.1. Visi dan misi RPJPD 2005-2025

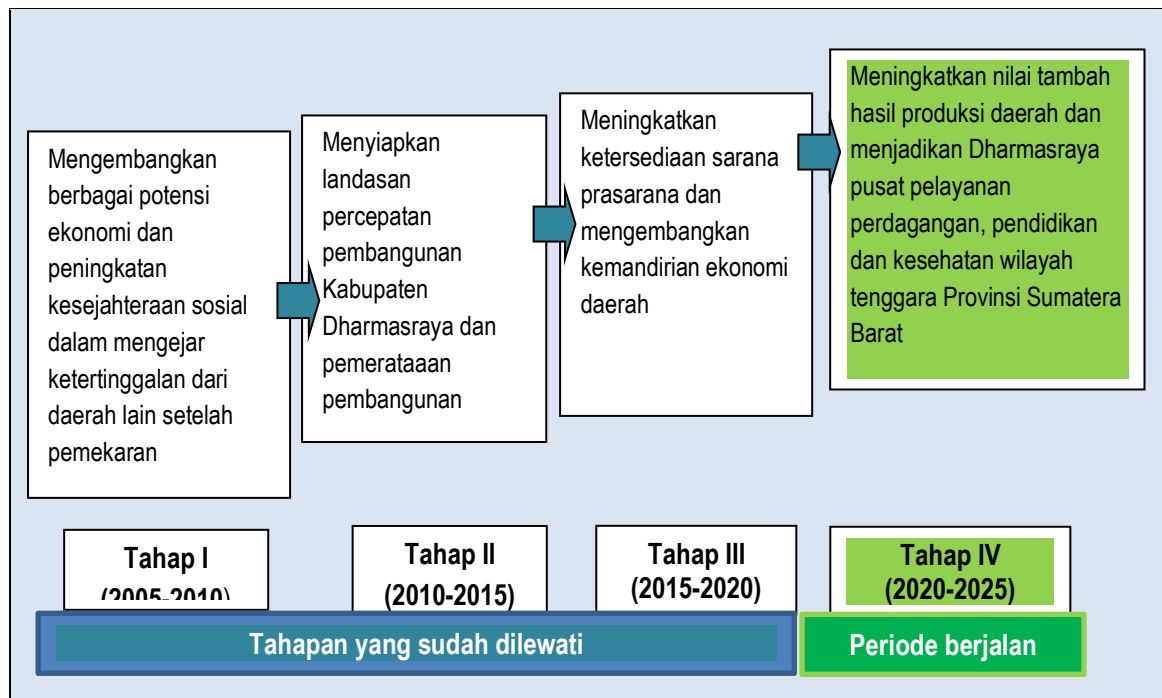
Visi Daerah/ Visi RPJPD
“Kabupaten Dharmasraya Maju dan Berbudaya”

Misi Daerah
Adapun Misi Kabupaten Dharmasraya untuk periode 2005-2025 atau untuk 20 (Dua puluh) tahun yaitu: 1. Meningkatkan kualitas manusia agar bisa membawa kemajuan daerah disegala bidang dan berkontribusi sebagai pusat pengembangan pendidikan dan kesehatan dalam wilayah tenggara Provinsi Sumatera Barat. 2. Memanfaatkan kekayaan sumber daya alam (pertanian, peternakan, perikanan, pertambangan, industri) dengan optimal dan bernilai tambah besar sebagai upaya mensejahterakan masyarakat sekaligus menjadikan Kabupaten Dharmasraya sebagai pusat pengembangan ekonomi bagian tenggara Provinsi Sumatera Barat. 3. Memelihara kualitas lingkungan Kabupaten Dharmasraya untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. 4. Memberdayakan nagari dan kelompok masyarakat (seperti kelompok tani, koperasi paguyuban, kelembagaan adat, karang taruna dan lainnya) sebagai pelaku pembangunan dalam bidang sosial dan ekonomi. 5. Menyediakan berbagai prasarana dan sarana pendukung kegiatan ekonomi dan sosial yang mampu mendorong perkembangan ekonomi dan mewujudkan pemerataan pembangunan antar kawasan. 6. Menegakkan kehidupan beragama dan beradat sebagai norma sosial dan semangat membangun serta melestarikan identitas daerah. 7. Mewujudkan tata kelola pembangunan yang andal dan maju serta melibatkan semua potensi peran kelembagaan daerah yang mampu membangun manfaat yang besar, kemandirian dan keadilan dalam pembangunan.

4.4.1.2. Tahapan dan Prioritas Pembangunan

RPJPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005-2025 sudah melewati tiga tahapan yang masing-masing tahapan tersebut terdiri dari lima tahunan, sehingga RPJMD Tahun 2021-2026 sudah berada pada tahapan keempat atau tahapan terakhir dari RPJPD. Adapun tahapan dimaksud adalah sebagai berikut :

Gambar 4-1 Tema/Agenda Tahapan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005-2025



Sesuai dengan prioritas pembangunan di tahapan keempat tersebut maka terdapat 3 (tiga) agenda pembangunan yang telah dirumuskan untuk pembangunan tahap IV yaitu :

1. Mengembangkan nilai tambah hasil pertanian dan pertambangan.
2. Mengembangkan pasar sebagai usaha mewujudkan Kabupaten Dharmasraya sebagai pusat perdagangan.
3. Mengembangkan lebih lanjut kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan wisata kabupaten sebagai pusat pertumbuhan wilayah.

4.4.1.3. Hasil telaahan :

Adapun hasil telaahan terhadap fokus pembangunan RPJMD sesuai dengan RPJPD Kabupaten Dharmasraya adalah sebagai berikut :

No.	Agenda utama Pembangunan tahap IV pada RPJPD	Hasil Telaahan Kebijakan RPJMD
a	Mengembangkan nilai tambah hasil pertanian dan pertambangan.	- peningkatan nilai tambah hasil pertanian diupayakan melalui pengadaan bibit unggul, teknologi pasca panen, fasilitasi pemasaran hasil pertanian, serta kebijakan prioritas lainnya yang akan di muat dalam strategi dan arah kebijakan RPJMD pada misi ketiga - sedangkan untuk peningkatan nilai tambah pertambangan saat ini masih diserahkan pengupayaannya pada perusahaan tambang yang ada di wilayah Kabupaten Dharmasraya
b	Mengembangkan pasar sebagai usaha mewujudkan Kabupaten Dharmasraya sebagai pusat perdagangan.	pengembangan pasar sebagai pusat aktivitas perdagangan lokal, upaya yang akan dilakukan diantaranya melanjutkan pembangunan dan penataan sarana dan prasarana pasar yang ada di Kabupaten Dharmasraya, serta pengembangan pemasaran hasil produk lokal secara regional/ nasional maupun ke mancanegara, kebijakan ini juga menjadi muatan pada strategi dan arah kebijakan pada misi pertama dan misi ketiga
c	Mengembangkan lebih lanjut kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan wisata kabupaten sebagai pusat pertumbuhan wilayah.	muatan dari agenda RPJPD ini dimuat dalam misi pertama, kedua dan ke lima dalam RPJMD, - adapun kebijakan yang akan dilaksanakan pada bidang pendidikan adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan khususnya pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal yang menjadi kewenangan kabupaten, serta memfasilitasi pengembangan pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi yang sudah ada dan akan diupayakan akan ditingkatkan lagi dari segi kualitas maupun jumlah perguruan tinggi yang akan dibangun di Kabupaten Dharmasraya - Dalam penyediaan pelayanan bidang kesehatan, pemerintah Kabupaten berkomitmen dengan memberikan pelayanan kesehatan mulai dari pelayanan kesehatan dasar hingga rujukan maupun peningkatan kualitas tenaga kesehatan yang ada. Diantara kebijakan yang telah dilakukan adalah sudah terdapatnya dua unit RSUD, yaitu beroperasinya gedung baru RSUD Sungai Dareh, dan adanya penambahan RSUD Sungai Rumbai. Dan kedepannya melalui peningkatan layanan kesehatan masih terus diupayakan melalui peningkatan sarana prasarana kesehatan maupun kualitas tenaga kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. - Pengembangan bidang wisata diarahkan kepada wisata yang berbasis pada sejarah budaya serta pengembangan objek wisata alam
d	Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana dan mengembangkan kemandirian ekonomi daerah	- Berdasarkan hasil penelaahan terhadap data capaian agenda pembangunan tahap III, terutama untuk bidang infrastruktur, sehingga masih perlu dilakukan pembangunan infrastruktur menjadi prioritas pembangunan sesuai dengan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih

4.4.2. RPJM Nasional Tahun 2020-2024

4.4.2.1. Visi, Misi dan Agenda Pembangunan Nasional

VISI PRESIDEN
Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong
9 MISI PRESIDEN (Nawacita <i>kedua</i>)
1 Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia 2 Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing 3 Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan 4 Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan 5 Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa 6 Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya 7 Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga 8 Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya 9 Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan
7 AGENDA PEMBANGUNAN / PRIORITAS NASIONAL
1 Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan 2 Pengembangan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan 3 SDM Berkualitas dan Berdaya Saing 4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan 5 Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar 6 Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim 7 Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

4.4.2.2. Hasil Telaahan RPJMD :

Penyusunan Rancangan RPJMD Kabupaten Dharmasraya 2021- 2026 dilakukan dengan penyesuaian kebijakan pembangunan nasional khususnya yang berkaitan dengan pembangunan daerah yang mempengaruhi pembangunan nasional. Telaah dilakukan terhadap isu strategis nasional yang termuat dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Selain itu target-target nasional yang dicanangkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 yang perlu mendapatkan dukungan dari Kabupaten Dharmasraya menjadi dasar dalam penentuan target dalam RPJMD Tahun 2021-2026.

Dalam pelaksanaan sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah yang didasarkan pada rumusan tujuan RPJMD pada masing-masing misi, maka 5 (lima) indikator utama pembangunan nasional dijadikan indikator pada tujuan RPJMD, yaitu Tingkat kemiskinan; Pertumbuhan ekonomi; Gini rasio; Tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan Indeks Pembangunan Manusia

4.4.3. RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

4.4.3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan

VISI RPJMD
Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan

MISI
1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing
2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan
6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan
7. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas

4.4.3.2. Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

MISI/ TUJUAN	SASARAN
Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	
Mewujudkan Sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 2. Menurunnya prevalensi stunting 3. Meningkatnya kualitas Pendidikan 4. Meningkatnya daya saing masyarakat
Misi 2 : Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah	
Mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat	1. Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK 2. Meningkatnya Budaya Literasi 3. Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Misi 3 : Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	
Meningkatkan kesejahteraan petani	1. Meningkatnya pendapatan petani pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan) 2. Meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan

MISI/ TUJUAN	SASARAN
	3. Meningkatnya pendapatan Petani Hutan
Misi 4 : Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital	
Mewujudkan perdagangan dan industri kecil/Menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing	1. Sumatera barat sebagai pusat perdagangan 2. Sumatera Barat sebagai pusat industri kecil dan menengah 3. Terwujudnya pelaku koperasi dan UKM yang sejahtera 4. Terciptanya 100.000 entrepreneur dari berbagai sektor 5. Meningkatnya pertumbuhan investasi 6. Meningkatnya peran ekonomi digital
Misi 5 : Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan	
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	1. Meningkatnya kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatera Barat 2. Meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif dalam perekonomian Sumatera Barat
Misi 6 : Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	
Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegrasi 2. Meningkatnya kesiapsiagaan menghadapi bencana 3. Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas 4. Meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian 5. Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan
Misi 7 : Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas	
Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani	1. Terwujudnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel 2. Meningkatnya kapabilitas birokrasi 3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

4.4.3.3. Hasil Telaahan

Penyusunan Rancangan RPJMD Kabupaten Dharmasraya mengacu dan berpedoman pada Rancangan Awal RPJMD Provinsi Sumatera Barat. Hal-hal yang perlu diperhatikan dari Rancangan Awal RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026 antara lain terkait dengan arah pengembangan kewilayahan, isu-isu strategis yang berkembang, dan juga indikator beserta target yang harus didukung pencapaiannya oleh Kabupaten Dharmasraya sesuai sumberdaya dan potensi yang dimiliki serta kebutuhan pembangunan daerah yang selaras dengan pembangunan Provinsi Sumatera Barat.

4.4.4. Hubungan Dokumen Perencanaan Dan Dokumen Penataan Ruang

Dilihat dari muatannya, dokumen perencanaan lebih berfungsi dalam menentukan fokus (target sektoral) pembangunan yang dilihat dari bidang kewenangan yang dilaksanakan oleh daerah, sedangkan rencana tata ruang menentukan lokus (lokasi) pembangunan yang dilakukan oleh sektor yang terlihat dari kebijakan dalam menetapkan kawasan berdasarkan pola ruang dan struktur ruang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan ruang.

Sehingga dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa fungsi dari dokumen perencanaan dan dokumen tata ruang saling melengkapi, atau dengan kata lain dokumen perencanaan mengisi keruangan yang telah ditetapkan dalam dokumen penataan ruang yaitu, RTRW, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Tata Ruang Kota (RTRK).

Berdasarkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031 yaitu: “Mengembangkan Kabupaten Dharmasraya sebagai pusat pengembangan wilayah bagian tenggara Provinsi Sumatera Barat bertumpu pada potensi sumber daya alam dan budaya”. Maka rumusan kebijakan dan program penataan ruang wilayah Kabupaten Dharmasraya yang dipedomani dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Kabupaten Dharmasraya sebagai sentra produksi dan pengolahan hasil perkebunan (terutama untuk komoditi sawit dan karet) bagian wilayah tenggara Provinsi Sumatera Barat yang ditunjang dengan sarana pendukung produksi pertanian perkebunan seperti sarana pembibitan dan sarana produksi pertanian lainnya dan mengembangkan industri pengolahan hasil perkebunan untuk meningkatkan nilai tambah komoditi.
2. Pengembangan Kabupaten Dharmasraya menjadi salah satu kawasan produksi tanaman pangan lahan basah di Provinsi Sumatera Barat dengan mengembangkan lahan sawah pada daerah pengairan irigasi Batang Hari dan intensifikasi lahan sawah pada daerah irigasi lainnya di Kabupaten Dharmasraya. Dimasa depan masih dimungkinkan ekstensifikasi lahan pertanian tanaman pangan lahan basah di Kabupaten Dharmasraya seluas hampir mencapai 5000 Ha. Sementara tanaman pangan lahan basah dengan irigasi dikelola kabupaten seluas 3.870 Ha perlu untuk dipertahankan.
3. Program pengembangan pengembangan kawasan hortikultura dan tanaman kehutanan yaitu dengan pengembangan kawasan budidaya komoditas buah-buahan khas daerah dan pengembangan lebih lanjut industri pengolahan.
4. Pengembangan Kabupaten Dharmasraya sebagai salah satu sentra budidaya perikanan darat di Provinsi Sumatera Barat dengan dilengkapi sarana pendukung budidaya seperti balai pembibitan dan born stock center. Pengembangan Kawasan Perikanan sentra budidaya perikanan darat di Kec. Pulau Punjung dan Kec. Sitiung didukung peningkatan sarana pendukung budidaya (pembibitan) dan pengembangan budidaya perikanan darat di perairan sungai, embung dan kolam yang tersebar diseluruh kecamatan.
5. Pengembangan potensi pertambangan Kabupaten Dharmasraya dengan tetap mempertahankan kualitas lingkungan dengan rehabilitasi lahan tambang sehabis masa eksploitasinya menjadi hutan restorasi.
6. Pengembangan Kabupaten Dharmasraya sebagai pusat pelayanan perdagangan dan jasa wilayah bagian tenggara Provinsi Sumatera Barat dengan mengembangkan pusat-pusat perdagangan.
7. Pemeliharaan warisan budaya kabupaten sebagai bekas kerajaan Dharmasraya dan mengembangkan potensi sebagai aset wisata.
8. Pengembangan kawasan dan objek wisata dengan pengembangan wisata budaya di kawasan Siguntur, Padang Laweh dan Koto Besar dan pengembangan objek wisata alam dalam pola klaster
9. Pemeliharaan ekosistem wilayah Kabupaten Dharmasraya sebagai bagian kawasan DAS Batang Hari.

10. Pengembangan sistem infrastruktur yang mampu mendukung pengembangan wilayah melalui peningkatan pelayanan sistem transportasi dengan mengembangkan jaringan jalan untuk memudahkan akses permukiman menuju pusat-pusat kegiatan wilayah kabupaten serta interaksi dengan wilayah tetangga; mengembangkan transportasi air Sungai Batang Hari terutama untuk mendukung kegiatan wisata; menyediakan jaringan air bersih pada kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan; menyediakan pelayanan persampahan kawasan perkotaan; menyediakan jaringan energi listrik pada seluruh kawasan permukiman; dan
11. Pengembangan struktur ruang perkotaan, dengan Pengembangan Kawasan Pulau Punjung sebagai Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp) Provinsi Sumatera Barat; Pengembangan Kawasan Sungai Rumbai sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dalam lingkup pelayanan Kabupaten Dharmasraya sekaligus berfungsi sebagai kawasan strategis gerbang timur Provinsi Sumatera Barat; Pengembangan Pusat Pelayanan Kecamatan (PPK) Kawasan Koto Baru dan Kawasan Sitiung dan Kawasan Padang Laweh. Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yang merupakan pusat pelayanan kecamatan yang meliputi: kawasan Sungai Limau di Kec. Asam Jujuhan; Kawasan Silago di Kec. IX Koto; Kawasan Pinang Makmur di Kec. Timpeh; Kawasan Koto Salak di Kec. Koto Salak; Kawasan Tiumang di Kec. Tiumang; dan Kawasan Koto Besar di Kec. Koto Besar.

BAB 5. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dinyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau disingkat dengan RPJMD merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. Dimana RPJMD tersebut merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN. Dimana tata cara dan tata laksana hingga sistematika yang digunakan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Adapun visi, misi yang dicantumkan pada RPJMD merujuk pada visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pilkada serentak Tahun 2020, sedangkan tujuan, dan sasaran dirumuskan untuk mencapai visi, misi dan program kepala daerah sesuai dengan kemampuan daerah dan dapat diukur dengan menggunakan indikator outcome dengan menggunakan metode SMART. S.M.A.R.T merupakan singkatan dari kata Specific, Measurable, Attainable, Relevant, dan Time-bound. Spesifik diartikan sebagai indikatornya jelas dan tegas, measurable diartikan bahwa kinerjanya dapat diukur, Attainable artinya dapat dicapai, relevan karena memiliki keterkaitan dengan tujuan ataupun sasaran yang dicapai, sedangkan Time-bound dimaksudkan dapat diukur secara periodik, hal ini sangat erat dengan fungsi pengendalian dan evaluasi guna mengukur ketercapaian realisasi terhadap target yang telah ditetapkan.

Selain metode SMART, penentuan indikator kinerja juga menggunakan pendekatan holistik, tematik, terintegrasi dan spasial. Sehingga dengan Metode serta pendekatan tersebut akan mampu menghasilkan perencanaan yang berkualitas dan handal.

Adapun secara skematik sesuai dengan muatan RPJMD, maka keterkaitan visi, misi, tujuan, sasaran, Strategi, arah kebijakan hingga program maupun kekuatan dapat dilihat pada gambar dibawah

Gambar 5-1 Skematik Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Arah Kebijakan dan Program / Kegiatan



Adapun Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran menjadi muatan pada bab ini, sedangkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah serta Program Perangkat daerah akan menjadi muatan pada Bab VI dan Bab VIII. Sedangkan Kegiatan dan Sub Kegiatan akan menjadi muatan pada Rencana Strategis Perangkat Daerah.

5.1. Visi RPJMD 2021-2026

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Visi dirumuskan untuk menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang akan diselesaikan dalam jangka menengah serta selaras pula dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dharmasraya 2021- 2026 menetapkan visi yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai dalam jangka menengah lima tahun sebagai berikut :

**TERWUJUDNYA KABUPATEN
DHARMASRAYA MAJU YANG MANDIRI
DAN BERBUDAYA**

Defenisi kalimat Visi RPJMD :

Maju:

Kabupaten Dharmasraya yang lebih baik sebagai pusat pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial yang berdaya saing pada wilayah bagian tenggara Provinsi Sumatera Barat

Mandiri:

Kondisi daerah yang memiliki daya tahan sosial, ekonomi dan keuangan daerah, serta pelayanan publik yang memadai dengan pengelolaan sumber daya daerah secara optimal

Berbudaya

Masyarakat yang melestarikan nilai dan tradisi multikultural dalam berkarya dan berinovasi untuk meningkatkan kesejahteraan berdasarkan Iman dan Taqwa

5.2. Misi RPJMD 2021-2026

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan guna menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Adapun misi RPJMD Kabupaten Dharmasraya 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
3. Meningkatkan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing
4. Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien
5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan
6. Meningkatkan nilai-nilai agama, adat dan budaya yang mencerminkan kepribadian daerah

5.3. Tujuan Dan Sasaran

Ditinjau secara definisi, maka **tujuan** diartikan sebagai sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sedangkan **sasaran** adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

Adapun masing-masing tujuan dan sasaran akan dikaitkan dengan misi Kepala Daerah, serta masing-masing tujuan dan sasaran tersebut memiliki indikator outcome yang digunakan sebagai target kinerjanya.

Tabel 5-1 Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Dharmasraya 2021-2026

No	Misi/Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	2020 (kondisi awal)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Misi 1 : Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur											
	Terwujudnya penyediaan infrastruktur secara merata dan berkualitas	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur			Indeks	-	-	60,50	62,7	67	70	73
			Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur	Rasio kemandapan jalan kabupaten	Persen	51,25	53	57	60	63	65	68
				Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	Persen	59	59,86	65	70	80	95	100
				Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Persen	87,25	90	92	95	97	98	100
			Meningkatnya kualitas perumahan serta prasarana dan sarana pada kawasan pemukiman	Persentase lingkungan permukiman kumuh	persen	22,7	28,89	36,14	43,04	50,67	59,15	68,66
				Rasio pemukiman layak huni	persen	85,00	85,85	88,65	91,45	94,25	97,05	100
			Meningkatnya Infrastruktur dan Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik	persen	67,36	68,20	69,10	69,75	71,30	72,80	73,50
				Persentase Pengendalian Daya Rusak Air	persen	-	28,26	28,54	28,83	29,12	31,28	32,33

No	Misi/Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	2020 (kondisi awal)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2	Misi 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia											
	Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)				71,51	71,66	71,82	71,98	72,13	72,29	72,44
			Meningkatnya Derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	tahun	71,33	71,51	71,69	71,87	72,05	72,24	72,42
			Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Angka rata-rata lama sekolah	tahun	8,47	8,48	8,48	8,49	8,49	8,50	8,50
				Harapan lama sekolah	tahun	12,43	12,44	12,44	12,45	12,45	12,46	12,46
			Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	indeks	88,31	88,83	89,00	89,17	89,34	89,50	89,67
3	Misi 3 : Meningkatkan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing											
	Meningkatnya perekonomian yang inklusif, berkualitas dan berdaya saing	Pertumbuhan PDRB			persen	-1,39	2,50	2,90	4,20	4,50	4,70	4,80
		Gini rasio			indeks	0,275	0,270	0,265	0,260	0,255	0,250	0,245
			Meningkatkan pendapatan masyarakat dan daya saing daerah	PDRB Per Kapita	Juta rupiah	40,48	42,83	43,81	44,79	45,76	46,74	47,72
				Rasio Net Ekspor terhadap PDRB	persen	3,08	3,15	3,25	3,4	3,6	3,7	3,8
			Mengurangi pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	persen	6,07	5,88	5,68	5,49	5,29	5,10	4,90
			Mengurangi kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	persen	6,21	6,14	6,08	6,02	5,97	5,92	5,87
4	Misi 4 : Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien											
	Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi			indeks	44,7	60	65	70	73	76	80
			Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Indeks perilaku antikorupsi	indeks	2,96	3,066	3,194	3,322	3,45	3,578	3,6
				Opini BPK terhadap laporan keuangan	bobot	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
				Hasil evaluasi AKIP	bobot/ indeks	B (63,44)	BB	BB	BB	BB	A	A

No	Misi/Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	2020 (kondisi awal)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
				Nilai LPPD	Skor	3,5138	3,6000	3,6500	3,7000	3,7500	3,8000	3,9000
			Birokrasi yang berkualitas	Indeks Kelembagaan	indeks	99,9						
				Indeks SPBE	indeks	1,35	1,625	1,9	2,175	2,45	2,725	3
				Indeks Profesionalisme ASN	indeks	58,04	62	65	68	71	74	77
			Pelayanan publik yang prima	Publik service indeks	indeks	2,85	2,94	3,03	3,12	3,21	3,3	3,4
				Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	79	80	81	82	83	84	85
	Meningkatnya kemampuan nagari dalam pengelolaan pemerintahan dan potensi sumber daya nagari	Persentase nagari mandiri			persen	7.69	11,53	15,38%	19,23	23,07	26,92	30,79
			Meningkatnya ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan nagari	Rata-rata Indeks Ketahanan Sosial	indeks	0,8108	0,8189	0,8195	0,8354	0,8437	0,8522	0,8607
				Rata-rata indeks ketahanan ekonomi	indeks	0,6917	0,6986	0,7056	0,7127	0,7198	0,7270	0,7343
				Rata-rata Indeks Ketahanan Ekologi / Lingkungan	indeks	0,5833	0,5891	0,5950	0,6010	0,6070	0,6131	0,6192
5	Misi 5 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan											
	Terwujudnya pembangunan berbasis lingkungan (green development)	Indeks Pembangunan berkelanjutan			indeks	-	68,78	70.21	73.68	75.80	77.80	78.20
			Optimalisasi perencanaan tata ruang dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan	Kesesuaian pemanfaatan ruang	persen	-	5	10	10	15	20	35
			Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	indeks	67,94	64,40	64,93	65,47	66,00	66,47	66,55

No	Misi/Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	2020 (kondisi awal)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
6	Misi 6 : Meningkatkan nilai-nilai agama, adat dan budaya yang mencerminkan kepribadian daerah											
	Meningkatkan pembangunan mental dan kehidupan masyarakat berdasarkan nilai nilai agama, adat, dan budaya	Jumlah nagari beradat dan berbudaya			nagari	-	1	3	6	10	13	17
			Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat	Persentase peningkatan zakat	persen	2	2	2	2	2	2	2
				Persentase MDA/TPA/TPSA yang aktif	persen	75	77	80	85	90	95	100
			Meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai nilai agaman, adat dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat	Jumlah nagari beradat dan berbudaya	nagari	-	1	3	6	10	13	17

5.4. Prioritas Pembangunan

Berdasarkan rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Dharmasraya maka dapat disarikan delapan prioritas pembangunan yang disebut dengan **astha utama kedua**, dimana prioritas pembangunan ini menjadi dasar menyusun program pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Pemerataan pembangunan infrastruktur
2. Mewujudkan ekonomi daerah yang maju
3. Memajukan pendidikan yang berkarakter
4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
6. Pembangunan yang berkelanjutan
7. Membangkitkan identitas daerah
8. Membangun berbasis nagari

BAB 6. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Dilihat dari muatan bahasan bab ini, terdapat 3 muatan yaitu strategi, arah kebijakan, serta program pembangunan daerah. dimana masing masing muatan tersebut ditinjau dari literatur aturan perencanaan pembangunan, pengertian istilah tersebut yaitu ; **Strategi** adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Pengertian dari **arah kebijakan** yaitu rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Sedangkan **Program Pembangunan Daerah** adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Ketiga muatan tersebut dirumuskan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara efektif dan efisien.

Dalam proses perumusan penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 berpedoman terhadap strategi dan arah kebijakan nasional yang tertuang dalam RPJM Nasional Tahun 2020-2024 maupun RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, Selain mempedomani kedua dokumen perencanaan tersebut, perumusan strategi dan arah kebijakan juga mempedomani aturan terkait diantaranya standar pelayanan minimal, aturan perundang-undangan terkait serta hasil pengamatan terhadap hasil tinjauan lapangan.

Tabel 6-1 Strategi, dan Arah Kebijakan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016-2021

No	Misi/Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Misi 1 : Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur			
	Meningkatnya penyediaan infrastruktur secara merata dan berkualitas	Meningkatnya Aksesibilitas dan Mobilitas menuju pusat-pusat aktifitas dan perekonomian	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan jalan dan jembatan Meningkatkan kapasitas dan kualitas jalan dan jembatan	Peningkatan kualitas perencanaan dan pengawasan pembangunan jalan dan jembatan
				pembangunan jalan dan jembatan menuju pusat-pusat aktifitas dan perekonomian
				peningkatan kualitas jalan dan jembatan
				pemeliharaan rutin jalan dan jembatan
		Meningkatnya akses layanan sumber air minum dan sanitasi layak dan berkelanjutan	Penyediaan layanan air minum dan sanitasi layak yang terintegrasi dengan penyediaan dan pengembangan perumahan	peningkatan cakupan layanan air minum dan sanitasi
				pengelolaan konservasi wilayah sungai dan perlindungan sumber air baku dalam rangka menjaga Kualitas, Kuantitas dan Kontinuitas (K3)
				peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga keberlanjutan sumberdaya air
			Meningkatkan kapasitas lembaga pengelola layanan limbah domestik	Peningkatan kapasitas institusi dalam layanan pengelolaan sanitasi
			Mendorong penguatan regulasi dalam pengelolaan dan pengolahan limbah domestik	Penguatan komitmen stakeholder dalam pelayanan sanitasi yang berkelanjutan
			Penyediaan mekanisme insentif bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran pembangunan infrastruktur sanitasi	Pengembangan pola dan pendekatan pendanaan sanitasi melalui DAK dan CSR untuk menunjang pendanaan daerah
			Meningkatkan pembangunan infrastruktur sanitasi (air limbah domestik dan sampah)	Pengembangan infrastruktur dan layanan sanitasi permukiman yang terintegrasi
			Meningkatkan peranserta masyarakat dalam mewujudkan akses sanitasi yang layak dan aman	Peningkatan perubahan perilaku masyarakat dalam mencapai akses aman sanitasi

No	Misi/Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Meningkatnya kualitas perumahan serta prasarana dan sarana pada kawasan permukiman	Mengembangkan pola penyediaan dan pendanaan infrastruktur sanitasi yang inovatif dan tepat sasaran	Peningkatan peluang kerja sama dan pendanaan dalam Penyediaan infrastruktur sanitasi
			Meningkatkan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	Peningkatan akses masyarakat terhadap hunian layak, aman dan terjangkau
			Meningkatkan (perluasan) penyediaan fasilitas pembiayaan perumahan yang terjangkau	Peningkatan penyediaan perumahan layak huni
			Meningkatkan penyediaan permukiman yang terpadu yang didukung oleh infrastruktur dasar yang sesuai tata ruang	Peningkatan penyediaan jaringan drainase
				Meningkatkan persentase jaringan jalan yang memiliki drainase
				Meningkatkan ketersediaan fasilitas umum permukiman perkotaan
			Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan permukiman	Mendorong peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan permukiman
				Pelaksanaan updating data pengawasan kawasan permukiman
		Meningkatnya Infrastruktur dan Pengelolaan Sumber Daya Air	Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana jaringan irigasi	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana irigasi
				Peningkatan kualitas pengelolaan jaringan irigasi dan bangunan perairan lainnya
				Peningkatan kinerja layanan irigasi
				Pelaksanaan updating data daerah irigasi kewenangan kabupaten
			Meningkatkan kapasitas pengelola dan pengelolaan SDA	Peningkatan upaya penataan sungai
				Peningkatan kualitas tebing sungai
				Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana sungai dan pantai
				Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan SDA
				Penyusunan profil data sumberdaya air secara regular dan berkesinambungan

No	Misi/Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
2	Misi 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia			
	Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia	Meningkatnya Derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan upaya kesehatan perorangan dan masyarakat berbasis gender	peningkatan pelayanan kesehatan dasar
				peningkatan pelayanan kesehatan rujukan
				peningkatan layanan kesehatan dalam upaya promotif dan preventif dalam pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak kenular
			Meningkatkan tata kelola upaya kesehatan	meningkatkan cakupan masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan menuju Total coverage
				peningkatan mutu sumber daya manusia
				Peningkatan dan pengendalian ketersediaan obat, vaksin dan alat kesehatan
		Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan inklusif	Peningkatan sertifikasi dan akreditasi Layanan Kesehatan
				Meningkatkan ketahanan pangan dalam rangka mendukung derajat kesehatan masyarakat
				Peningkatan pembinaan dan pengembangan pembelajaran Pendidikan formal dan non formal
			Meningkatkan upaya pengembangan pendidikan inklusif	peningkatan pemerataan kualitas layanan pendidikan di seluruh wilayah
				Peningkatan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
				Peningkatan pengelolaan data dan sistem informasi pendidikan
Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	peningkatan kualitas keluarga dalam percepatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Pengembangan dan Peningkatan pengelolaan sekolah inklusi		
		peningkatan keterlibatan masyarakat dalam proses pembelajaran		
		Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah daerah		
		Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan		

No	Misi/Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat kabupaten Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten
3	Misi 3 : Meningkatkan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing			
	Meningkatnya perekonomian yang inklusif, berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan pendapatan masyarakat	Meningkatkan pengembangan usaha-usaha ekonomi berbasis produk unggulan	peningkatan produksi, produktifitas dan kualitas produk melalui akses terhadap Teknologi peningkatkan sarana dan prasarana, dan peningkatan akses permodalan Peningkatan inovasi produk unggulan dalam meningkatkan nilai tambah produk Peningkatan efisiensi produksi melalui pemanfaatan teknologi Pengembangan Jaringan Usaha, Pemasaran dan Kemitraan Usaha Pemberdayaan pelaku usaha untuk untuk menembus pasar domestik Penguatan dan pemberdayaan kelembagaan ekonomi Peningkatan legalitas produk unggulan daerah Pemantauan distribusi barang bersubsidi Peningkatan pengawasan dan perlindungan konsumen
			Mengembangkan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif	pengembangan potensi pariwisata budaya dan alam

No	Misi/Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Mengurangi pengangguran	mendorong terbukanya lapangan kerja baru berbasis padat karya	meningkatkan kapasitas balai latihan kerja
			meningkatkan keterampilan tenaga kerja	pengembangan kualitas dan jenis pelatihan bagi pencari kerja dan/atau angkatan kerja yang belum bekerja
		Mengurangi kemiskinan	Pemenuhan layanan dasar masyarakat miskin	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat miskin
				Peningkatan Pendapatan Perkapita Masyarakat miskin
				Meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin
			Pemenuhan perlindungan sosial dan jaminan sosial masyarakat miskin	
4	Misi 4 : Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien			
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Daerah	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah	Peningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
				Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah
				Peningkatan kemampuan fiskal daerah
				Peningkatan fungsi pengawasan pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah
		Birokrasi yang berkualitas	Meningkatkan manajemen kepegawaian	Peningkatan Rekrutment ASN sesuai dengan analisis jabatan
				Peningkatan kepastian jenjang karir ASN sesuai dengan kompetensi, pengalaman dan prestasi yang dimiliki
				Peningkatan kesejahteraan ASN sesuai dengan beban kerja dan kinerja.
				Peningkatan pembinaan disiplin kerja ASN
			meningkatkan kompetensi ASN melalui pendidikan dan pelatihan	Peningkatan pelatihan ASN untuk meningkatkan kompetensi dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan publik
			Penataan kelembagaan serta pelayanan berbasis elektronik	Penataan kelembagaan untuk penciptaan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan

No	Misi/Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan				
		Pelayanan publik yang prima	Meningkatkan sarana dan prasarana, serta ketatalaksanaan pelayanan	Peningkatan sarana dan prasarana yang representatif berbasis Teknologi informasi				
				Penyempurnaan/Restrukturisasi organisasi pelayanan				
				Peningkatan sarana dan prasarana yang representatif dan berbasis Teknologi informasi				
				Penyempurnaan Sistem dan Prosedur Pelayanan				
				Pelaksanaan pelayanan publik terpadu (mall pelayanan publik)				
	Meningkatnya kemampuan nagari dalam pengelolaan pemerintahan dan potensi sumber daya nagari	Meningkatnya ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan nagari	Meningkatkan ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi/lingkungan nagari	Penguatan pemerintahan nagari dalam meningkatkan Dimensi Modal Sosial, Kesehatan, Pendidikan dan Permukiman untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs)				
				Penguatan pemerintahan nagari dalam meningkatkan ketahanan Ekonomi Nagari untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs)				
				Penguatan pemerintahan nagari dalam meningkatkan katahanan Ekologi / lingkungan untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs)				
				5 Misi 5 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan				
				Terwujudnya pembangunan berbasis lingkungan (green development)	Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup	Meningkatkan efektivitas tata kelola dalam pengelolaan lingkungan hidup	Peningkatan upaya pencegahan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup untuk mengoptimalkan pengembangan kapasitas lingkungan hidup	
Peningkatan perlindungan dan pengendalian dampak lingkungan								
Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup								
Penguatan regulasi dan pengawasan kualitas lingkungan hidup								

No	Misi/Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
6	Misi 6 : Meningkatkan nilai-nilai agama, adat dan budaya yang mencerminkan kepribadian daerah			
	Meningkatkan pembangunan mental dan kehidupan masyarakat berdasarkan nilai nilai agama, adat, dan budaya	Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat	Meningkatkan keterpaduan dalam mengerjakan pemahaman dan pengalaman nilai nilai agama	Peningkatan kapasitas dan kualitas penyuluh agama, tokoh agama dan lembaga sosial keagamaan
				Peningkatan pemahaman ajaran agama sejak usia dini
		Meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai nilai agaman, adat dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat	Peningkatan peran lembaga adat dalam kehidupan masyarakat	Peningkatan keterpaduan pemanfaatan zakat dengan program penanganan masalah sosial dan pengentasan kemiskinan
				Peningkatan peran dan kualitas pengelolaan pendidikan agama
				Pembinaan nagari beradat dan berbudaya dengan melibatkan stakeholder terkait
				Pembinaan dan peningkatan kapasitas pemangku kelembagaan adat dan pelaksanaan festival budaya daerah

Tabel 6.2. Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026

KODE	PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah penanggung jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Misi 1 : Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur					60.763.468.029		53.915.000.000		54.715.000.000		55.115.000.000		55.115.000.000		55.115.000.000	
	Tujuan : Terwujudnya penyediaan infrastruktur secara merata dan berkualitas	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur		Indeks		60.763.468.029		53.915.000.000		54.715.000.000		55.115.000.000		55.115.000.000		55.115.000.000	
	Sasaran : Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur	Rasio kemantapan jalan kabupaten	51,25	Persen	53	46.441.402.370	57	45.500.000.000	60	45.500.000.000	63	45.500.000.000	65	45.500.000.000	68	45.500.000.000	
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	59	Persen	59,86		65		70		80		95		100		
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	87,25	Persen	90		92		95		97		98		100		
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap	51,25	Persen	53	30.829.225.570	57	35.000.000.000	60	35.000.000.000	60	35.000.000.000	63	35.000.000.000	65	35.000.000.000	Dinas PUPR
		Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap	51,25	Persen	53		57		60		60		63		65		
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk yang terlayani jaringan pipa air minum	59	Persen	59,86	8.350.317.000	65	5.000.000.000	70	5.000.000.000	70	5.000.000.000	80	5.000.000.000	95	5.000.000.000	Dinas PUPR
		Persentase penduduk yang terlayani pelayanan air limbah domestik	87,25	Persen	90		92		95		95		97		98		
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase penduduk yang terlayani pelayanan air limbah domestik	87,25	Persen	90	4.469.756.000	92	4.000.000.000	95	4.000.000.000	95	4.000.000.000	97	4.000.000.000	98	4.000.000.000	Dinas PUPR
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase ketersediaan Utilitas Umum (Drainase)	-	Persen	5,35	2.792.103.800	5,56	1.500.000.000	5,77	1.500.000.000	0	1.500.000.000	5,98	1.500.000.000	6,19	1.500.000.000	Dinas PUPR
	Sasaran : Meningkatnya kualitas perumahan serta prasarana dan sarana pada kawasan pemukiman	Persentase lingkungan permukiman kumuh	22,7	persen	28,89	7.229.198.300	36,14	4.415.000.000	43,04	5.215.000.000	50,67	5.615.000.000	59,15	5.615.000.000	68,66	5.615.000.000	
		Rasio pemukiman layak huni	85,00	persen	85,85		88,65		91,45		94,25		97,05		100		
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Cakupan permukiman layak huni	85	Persen	85,85	4.109.256.700	88,65	1.215.000.000	91,45	2.015.000.000	91,45	2.415.000.000	94,25	2.415.000.000	97,05	2.415.000.000	Dinas Perkimtan
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan lingkungan permukiman sehat dan aman yang didukung dengan PSU	95,96	Persen	55,74	3.119.941.600	60,66	3.200.000.000	65,57	3.200.000.000	65,57	3.200.000.000	70,49	3.200.000.000	75,41	3.200.000.000	Dinas Perkimtan
	Sasaran : Meningkatnya Infrastruktur dan Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik	67,36	persen	68,20	7.092.867.359	69,10	4.000.000.000	69,75	4.000.000.000	71,30	4.000.000.000	72,80	4.000.000.000	73,50	4.000.000.000	
		Persentase Pengendalian Daya Rusak Air	N/A	persen	28,26		28,54		28,83		29,12		27,98		28,26		
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik	59,86	Persen	0	7.092.867.359	62	4.000.000.000	65	4.000.000.000	65	4.000.000.000	66	4.000.000.000	67	4.000.000.000	Dinas Perkimtan

KODE	PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah penanggung
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Misi 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia					169.128.030.178		154.548.953.600		166.180.464.350		181.883.404.418		191.180.683.173		208.256.661.721	
	Tujuan : Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,51		71,66	169.128.030.178	71,82	154.548.953.600	71,98	166.180.464.350	72,13	181.883.404.418	72,29	191.180.683.173	72,44	208.256.661.721	
	Sasaran : Meningkatkan Derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	71,33	tahun	71,51	89.756.962.980	71,69	118.277.876.600	71,87	126.310.000.000	72,05	138.055.000.000	72,24	143.000.000.000	72,42	155.290.000.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui JSN Bidang Kesehatan.	100	persen	38,74901	89.756.962.980	100	118.277.876.600	100	126.310.000.000	100	138.055.000.000	100	143.000.000.000	100	155.290.000.000	Dinas Kesehatan
	Sasaran : Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Angka rata-rata lama sekolah	8,47	tahun	8,48	78.611.464.698	8,48	35.716.670.000	8,49	39.288.337.000	8,49	43.217.170.700	8,50	47.538.887.770	8,50	52.292.776.547	
		Harapan lama sekolah	12,43	tahun	12,44		12,44		12,45		12,45		12,46		12,46		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	68,62	Persen	69,77	78.611.464.698	73	7.510.800.000	75,5	8.261.880.000	75,5	9.088.068.000	78	9.996.874.800	80,5	10.996.562.280	Dinas Pendidikan
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	106,94	Persen	105,94		106,94	18.434.130.000	107,94	20.277.543.000	107,94	22.305.297.300	108,94	24.535.827.030	109,94	26.989.409.733	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	103,3	Persen	104,3		105,3	9.057.620.000	106,3	9.963.382.000	106,3	10.959.720.200	107,3	12.055.692.220	108,3	13.261.261.442	
		APK Non Formal/Kesetaraan						714.120.000		785.532.000		864.085.200		950.493.720		1.045.543.092	
	Sasaran : Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	88,31	indeks	88,83	759.602.500	89,00	554.407.000	89,17	582.127.350	89,34	611.233.718	89,50	641.795.403	89,67	673.885.174	
2.08.02	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase keaktifan Focalpoint perangkat daerah	100	persen	100	711.818.500	100	54.407.000	100	57.127.350	100	59.983.718	100	62.982.903	100	66.132.049	Dinas SOS3APPKB
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA)	tidak ada penilaian	persem	Pratama	47.784.000	Pratama	500.000.000	Pratama	525.000.000	Pratama	551.250.000	Madya	578.812.500	Madya	607.753.125	Dinas SOS3APPKB
	Misi 3 : Meningkatkan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing					8.958.795.150		68.030.125.000		24.489.137.500		25.106.451.250		25.628.496.375		26.422.546.013	
	Tujuan : Meningkatnya perekonomian yang inklusif, berkualitas dan berdaya saing	Pertumbuhan PDRB	-1,39	persen	2,50	8.958.795.150	2,90	68.030.125.000	4,20	24.489.137.500	4,50	25.106.451.250	4,70	25.628.496.375	4,80	26.422.546.013	
		Gini rasio	0,275	indeks	0,27		0,265		0,26		0,255		0,25		0,275		
	Sasaran : Meningkatkan pendapatan masyarakat dan daya saing daerah	PDRB Per Kapita	40,48	Juta rupiah	42,83	8.812.226.650	43,81	65.085.125.000	44,79	21.213.137.500	45,76	21.480.451.250	46,74	21.835.496.375	47,72	22.292.546.013	
		Rasio Net Ekspor terhadap PDRB	3,08	persen	3,15		3,25		3,4		3,6		3,7		3,8		
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pasar rakyat yang telah direvitalisasi	32,43	paket	35	18.597.700	19	53.100.000.000	16	8.055.000.000	13	7.060.000.000	10	6.065.000.000	7	5.070.000.000	Dinas Kumperdag
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah Pengurus Koperasi yang telah mengikuti Pelatihan Perkoperasian	30	Orang	40	197.379.000	60	200.000.000	60	205.000.000	60	210.000.000	60	215.000.000	60	220.000.000	Dinas Kumperdag
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah Pelaku Usaha Mikro Naik Kelas	22	usaha mikro	30	240.685.000	40	255.000.000	50	260.000.000	60	270.000.000	70	275.000.000	80	280.000.000	Dinas Kumperdag
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase peningkatan omzet IKM	6,5	IKM	8	610.777.650	175	1.800.000.000	216	2.000.000.000	257	2.200.000.000	298	2.400.000.000	339	2.600.000.000	Dinas Kumperdag
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase data Informasi Industri yang ter update	-	persen	-	39.660.550	-	1.300.000.000	-	1.420.000.000	-	1.540.000.000	-	1.660.000.000	-	1.780.000.000	Dinas Kumperdag

KODE	PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah penanggung jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	persentase kelompok tani memiliki alat pertanian	60	persen	65	1.546.304.750	70	1.943.804.000	75	2.138.184.400	80	2.352.002.840	85	2.587.203.124	90	2.845.923.436	Dinas Pwernanian
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	persentase sawah terairi irigasi	70	persen	72	6.158.822.000	74	6.486.321.000	76	7.134.953.100	78	7.848.448.410	80	8.633.293.251	85	9.496.622.576	Dinas Pwernanian
	Sasaran : Mengurangi pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,07	persen	5,88	146.568.500	5,68	2.945.000.000	5,49	3.276.000.000	5,29	3.626.000.000	5,10	3.793.000.000	4,90	4.130.000.000	
	Sasaran : Mengurangi kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	6,21	persen	6,14		6,08		6,02		5,97		5,92		5,87		
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	72,72	persen	75,62	120.347.500	77,84	1.700.000.000	78,92	1.902.000.000	78,92	2.104.000.000	80,25	2.136.000.000	81,43	2.338.000.000	Dinas Nakertrans
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Lulusan Pelatihan yang ditempatkan	25,84	persen	26,32	26.221.000	27,56	1.245.000.000	29,32	1.374.000.000	29,32	1.522.000.000	30,54	1.657.000.000	32,18	1.792.000.000	Dinas Nakertrans
	Misi 4 : Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien					120.721.997.796		123.199.994.792		124.706.905.766		125.677.329.038		127.160.457.286		128.279.639.671	
	Tujuan : Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	44,7	indeks	60	119.920.128.896	65	121.909.683.292	70	123.341.328.691	73	124.243.473.109	76	125.654.908.561	80	126.698.813.509	
	Sasaran : Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Indeks perilaku antikorupsi	2,96	indeks	3,066	115.179.965.914	3,194	115.981.201.692	3,322	116.329.247.091	3,45	116.823.391.509	3,578	117.372.826.961	3,6	117.979.731.909	
		Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	bobot	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		
		Hasil evaluasi AKIP	8 (63,44)	bobot/ indeks	BB		BB		BB		BB		A		A		
		Nilai LPPD	35.138	Skor	36.000		36.500		37.000		37.500		38.000		39.000		
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian sasaran RPJMD	-	persen	90	1.340.827.750	73	925.000.000	90	943.500.000	90	962.370.000	95	981.617.400	95	1.001.249.748	Bappedda
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penyusunan anggaran tepat waktu	100	persen	100	112.976.630.730	100	113.540.000.000	100	113.739.500.000	100	113.926.475.000	100	114.122.798.750	#N/A	114.328.938.688	BKD
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase pencapaian realisasi fisik kegiatan tahunan	98	indeks	100	862.507.434	100	1.516.201.692	100	1.646.247.091	100	1.934.546.509	100	2.268.410.811	100	2.649.543.473	Setda
	Sasaran : Birokrasi yang berkualitas	Indeks Kelembagaan	99,9	indeks		885.274.600		1.615.000.000		1.677.000.000		1.726.000.000		1.783.000.000		1.835.000.000	
		Indeks SPBE	1,35	indeks	1,625		1,9		2,175		2,45		2,725		3		
		Indeks Profesionalisme ASN	58,04	indeks	62		65		68		71		74		77		
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Keuangan	0	indeks	0	584.273.600	2598	1.415.000.000	2736	1.477.000.000	2746	1.526.000.000	2766	1.583.000.000	2786	1.635.000.000	BKPSDM
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	persentase informasi pembangunan daerah yang diberikan ke masyarakat	70	persen	75	301.001.000	80	200.000.000	85	200.000.000	90	200.000.000	95	200.000.000	95	200.000.000	Dinas Kominfo
	Sasaran : Pelayanan publik yang prima	Publik service indeks	2,85	indeks	2,94	3.854.888.382	3,03	4.313.481.600	3,12	5.335.081.600	3,21	5.694.081.600	3,3	6.499.081.600	3,4	6.884.081.600	
		Indeks Kepuasan Masyarakat	79	indeks	80		81		82		83		84		85		
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Jumlah produk hukum yang difasilitasi, harmonisasi dan dievaluasi penyusunannya serta didokumentasikan dan disosialisasikan	16	indeks	20	3.854.888.382	20	4.313.481.600	20	5.335.081.600	20	5.694.081.600	20	6.499.081.600	20	6.884.081.600	Setda

KODE	PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah penanggung
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Tujuan : Meningkatkan kemampuan nagari dalam pengelolaan pemerintahan dan potensi sumber daya nagari	Persentase nagari mandiri	7,69	persen	11,53	801.868.900	15,38%	1.290.311.500	19,23	1.365.577.075	23,07	1.433.855.929	26,92	1.505.548.725	30,79	1.580.826.161	
	Sasaran : Meningkatkan ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan nagari	Rata-rata Indeks Ketahanan Sosial	0,8108	Indeks	0,8189	801.868.900	0,8195	1.290.311.500	0,8354	1.365.577.075	0,8437	1.433.855.929	0,8522	1.505.548.725	0,8607	1.580.826.161	
		Rata-rata indeks ketahanan ekonomi	0,6917	Indeks	0,6986		0,7056		0,7127		0,7198		0,7270		0,7343		
		Rata-rata Indeks Ketahanan Ekologi / Lingkungan	0,5833	indeks	0,5891		0,5950		0,6010		0,6070		0,6131		0,6192		
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Nagari (LKN) yang berperan aktif dalam pembangunan	84	persen	86	801.868.900	88	1.290.311.500	90	1.365.577.075	90	1.433.855.929	92	1.505.548.725	94	1.580.826.161	Dinas Bupdarpora
	Misi 5 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan					1.412.410.400		6.915.700.000		6.763.592.500		6.915.182.313		7.070.561.870		7.129.825.917	
	Tujuan : Terwujudnya pembangunan berbasis lingkungan (green development)	Indeks Pembangunan berkelanjutan	NA	Indeks	68,78	1.412.410.400	70,21	6.915.700.000	73,68	6.763.592.500	75,8	6.915.182.313	77,8	7.070.561.870	78,2	7.129.825.917	
	Sasaran : Optimalisasi perencanaan tata ruang dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan	Kesesuaian pemanfaatan ruang		persen		232.816.200		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase gedung perangkat daerah dalam kondisi baik	-	Persen	55	232.816.200	60	500.000.000	65	500.000.000	65	500.000.000	70	500.000.000	75	500.000.000	Dinas PUPR
	Sasaran : Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68	Indeks	71,1	1.179.594.200	71,4	6.415.700.000	71,7	6.263.592.500	72	6.415.182.313	72,3	6.570.561.870	72,6	6.629.825.917	
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1. Meningkatnya Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pengawasan yang memiliki potensi merusak lingkungan 2. Meningkatnya persentase indeks kualitas air, udara dan tutupan lahan. 3. Meningkatnya sumber daya alam yang dilindungi 4. Meningkatnya luas tutupan lahan	6	ha	6	1.179.594.200	6	6.415.700.000	6	6.263.592.500	6	6.415.182.313	6	6.570.561.870	6	6.629.825.917	DLH

KODE	PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah penanggung
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Misi 6 : Meningkatkan nilai-nilai agama, adat dan budaya yang mencerminkan kepribadian daerah					1.953.367.350		3.879.060.350		3.879.060.350		3.879.060.350		3.879.060.350		3.879.060.350	
	Tujuan : Meningkatkan pembangunan mental dan kehidupan masyarakat berdasarkan nilai nilai agama, adat, dan budaya	Jumlah nagari beradat dan berbudaya	n/a	nagari	1	1.953.367.350	3	3.879.060.350	6	3.879.060.350	10	3.879.060.350	13	3.879.060.350	17	3.879.060.350	
	Sasaran : Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat	Persentase peningkatan zakat	2	persen	2		2		2		2		2		2		
		Persentase MDA/TPA/TPSA yang aktif	75	persen	77		80		85		90		95		100		
	Sasaran : Meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai nilai agaman, adat dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat	Jumlah nagari beradat dan berbudaya	n/a	nagari	1	1.953.367.350	3	3.879.060.350	6	3.879.060.350	10	3.879.060.350	13	3.879.060.350	17	3.879.060.350	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Terlaksanananya Pengembangan kebudayaan	100	persen	100	1.953.367.350	100	3.879.060.350	100	3.879.060.350	100	3.879.060.350	100	3.879.060.350	100	3.879.060.350	Dinas Budparpora
TOTAL						362.938.068.903		410.488.833.742		380.734.160.466		398.576.427.368		410.034.259.055		429.082.733.671	

Tabel 6.2. Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026

KODE	PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah penanggung jawab
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Misi 1 : Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur					60.763.468.029		53.915.000.000		54.715.000.000		55.115.000.000		55.115.000.000		55.115.000.000	
	Tujuan : Terwujudnya penyediaan infrastruktur secara merata dan berkualitas	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur		Indeks		60.763.468.029		53.915.000.000		54.715.000.000		55.115.000.000		55.115.000.000		55.115.000.000	
	Sasaran : Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur	Rasio kemantapan jalan kabupaten	51,25	Persen	53	46.441.402.370	57	45.500.000.000	60	45.500.000.000	63	45.500.000.000	65	45.500.000.000	68	45.500.000.000	
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	59	Persen	59,86		65		70		80		95		100		
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	87,25	Persen	90		92		95		97		98		100		
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap	51,25	Persen	53	30.829.225.570	57	35.000.000.000	60	35.000.000.000	60	35.000.000.000	63	35.000.000.000	65	35.000.000.000	Dinas PUPR
		Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap	51,25	Persen	53		57		60		60		63		65		
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk yang terlayani jaringan pipa air minum	59	Persen	59,86	8.350.317.000	65	5.000.000.000	70	5.000.000.000	70	5.000.000.000	80	5.000.000.000	95	5.000.000.000	Dinas PUPR
		Persentase penduduk yang terlayani pelayanan air limbah domestik	87,25	Persen	90		92		95		95		97		98		
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase penduduk yang terlayani pelayanan air limbah domestik	87,25	Persen	90	4.469.756.000	92	4.000.000.000	95	4.000.000.000	95	4.000.000.000	97	4.000.000.000	98	4.000.000.000	Dinas PUPR
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase ketersediaan Utilitas Umum (Drainase)	-	Persen	5,35	2.792.103.800	5,56	1.500.000.000	5,77	1.500.000.000	0	1.500.000.000	5,98	1.500.000.000	6,19	1.500.000.000	Dinas PUPR
	Sasaran : Meningkatnya kualitas perumahan serta prasarana dan sarana pada kawasan pemukiman	Persentase lingkungan permukiman kumuh	22,7	persen	28,89	7.229.198.300	36,14	4.415.000.000	43,04	5.215.000.000	50,67	5.615.000.000	59,15	5.615.000.000	68,66	5.615.000.000	
		Rasio pemukiman layak huni	85,00	persen	85,85		88,65		91,45		94,25		97,05		100		
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Cakupan permukiman layak huni	85	Persen	85,85	4.109.256.700	88,65	1.215.000.000	91,45	2.015.000.000	91,45	2.415.000.000	94,25	2.415.000.000	97,05	2.415.000.000	Dinas Perkimtan
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan lingkungan permukiman sehat dan aman yang didukung dengan PSU	95,96	Persen	55,74	3.119.941.600	60,66	3.200.000.000	65,57	3.200.000.000	65,57	3.200.000.000	70,49	3.200.000.000	75,41	3.200.000.000	Dinas Perkimtan
	Sasaran : Meningkatnya Infrastruktur dan Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik	67,36	persen	68,20	7.092.867.359	69,10	4.000.000.000	69,75	4.000.000.000	71,30	4.000.000.000	72,80	4.000.000.000	73,50	4.000.000.000	
		Persentase Pengendalian Daya Rusak Air	N/A	persen	28,26		28,54		28,83		29,12		27,98		28,26		
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik	59,86	Persen	0	7.092.867.359	62	4.000.000.000	65	4.000.000.000	65	4.000.000.000	66	4.000.000.000	67	4.000.000.000	Dinas Perkimtan

KODE	PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah penanggung
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Misi 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia					169.128.030.178		154.548.953.600		166.180.464.350		181.883.404.418		191.180.683.173		208.256.661.721	
	Tujuan : Meningkatnya Kualitas Sumberdaya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,51		71,66	169.128.030.178	71,82	154.548.953.600	71,98	166.180.464.350	72,13	181.883.404.418	72,29	191.180.683.173	72,44	208.256.661.721	
	Sasaran : Meningkatkan Derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	71,33	tahun	71,51	89.756.962.980	71,69	118.277.876.600	71,87	126.310.000.000	72,05	138.055.000.000	72,24	143.000.000.000	72,42	155.290.000.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui JSN Bidang Kesehatan.	100	persen	38,74901	89.756.962.980	100	118.277.876.600	100	126.310.000.000	100	138.055.000.000	100	143.000.000.000	100	155.290.000.000	Dinas Kesehatan
	Sasaran : Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Angka rata-rata lama sekolah	8,47	tahun	8,48	78.611.464.698	8,48	35.716.670.000	8,49	39.288.337.000	8,49	43.217.170.700	8,50	47.538.887.770	8,50	52.292.776.547	
		Harapan lama sekolah	12,43	tahun	12,44		12,44		12,45		12,45		12,46		12,46		
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	68,62	Persen	69,77	78.611.464.698	73	7.510.800.000	75,5	8.261.880.000	75,5	9.088.068.000	78	9.996.874.800	80,5	10.996.562.280	Dinas Pendidikan
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	106,94	Persen	105,94		106,94	18.434.130.000	107,94	20.277.543.000	107,94	22.305.297.300	108,94	24.535.827.030	109,94	26.989.409.733	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	103,3	Persen	104,3		105,3	9.057.620.000	106,3	9.963.382.000	106,3	10.959.720.200	107,3	12.055.692.220	108,3	13.261.261.442	
		APK Non Formal/Kesetaraan						714.120.000		785.532.000		864.085.200		950.493.720		1.045.543.092	
	Sasaran : Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	88,31	indeks	88,83	759.602.500	89,00	554.407.000	89,17	582.127.350	89,34	611.233.718	89,50	641.795.403	89,67	673.885.174	
2.08.02	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase keaktifan Focalpoint perangkat daerah	100	persen	100	711.818.500	100	54.407.000	100	57.127.350	100	59.983.718	100	62.982.903	100	66.132.049	Dinas SOS3APPKB
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA)	tidak ada penilaian	persem	Pratama	47.784.000	Pratama	500.000.000	Pratama	525.000.000	Pratama	551.250.000	Madya	578.812.500	Madya	607.753.125	Dinas SOS3APPKB
	Misi 3 : Meningkatkan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing					8.958.795.150		68.030.125.000		24.489.137.500		25.106.451.250		25.628.496.375		26.422.546.013	
	Tujuan : Meningkatnya perekonomian yang inklusif, berkualitas dan berdaya saing	Pertumbuhan PDRB	-1,39	persen	2,50	8.958.795.150	2,90	68.030.125.000	4,20	24.489.137.500	4,50	25.106.451.250	4,70	25.628.496.375	4,80	26.422.546.013	
		Gini rasio	0,275	indeks	0,27		0,265		0,26		0,255		0,25		0,275		
	Sasaran : Meningkatkan pendapatan masyarakat dan daya saing daerah	PDRB Per Kapita	40,48	Juta rupiah	42,83	8.812.226.650	43,81	65.085.125.000	44,79	21.213.137.500	45,76	21.480.451.250	46,74	21.835.496.375	47,72	22.292.546.013	
		Rasio Net Ekspor terhadap PDRB	3,08	persen	3,15		3,25		3,4		3,6		3,7		3,8		
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pasar rakyat yang telah direvitalisasi	32,43	paket	35	18.597.700	19	53.100.000.000	16	8.055.000.000	13	7.060.000.000	10	6.065.000.000	7	5.070.000.000	Dinas Kumperdag
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah Pengurus Koperasi yang telah mengikuti Pelatihan Perkoperasian	30	Orang	40	197.379.000	60	200.000.000	60	205.000.000	60	210.000.000	60	215.000.000	60	220.000.000	Dinas Kumperdag
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah Pelaku Usaha Mikro Naik Kelas	22	usaha mikro	30	240.685.000	40	255.000.000	50	260.000.000	60	270.000.000	70	275.000.000	80	280.000.000	Dinas Kumperdag
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase peningkatan omzet IKM	6,5	IKM	8	610.777.650	175	1.800.000.000	216	2.000.000.000	257	2.200.000.000	298	2.400.000.000	339	2.600.000.000	Dinas Kumperdag
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase data Informasi Industri yang ter update	-	persen	-	39.660.550	-	1.300.000.000	-	1.420.000.000	-	1.540.000.000	-	1.660.000.000	-	1.780.000.000	Dinas Kumperdag

KODE	PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah penanggung
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	persentase kelompok tani memiliki alat pertanian	60	persen	65	1.546.304.750	70	1.943.804.000	75	2.138.184.400	80	2.352.002.840	85	2.587.203.124	90	2.845.923.436	Dinas Pwernanian
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	persentase sawah terairiri irigasi	70	persen	72	6.158.822.000	74	6.486.321.000	76	7.134.953.100	78	7.848.448.410	80	8.633.293.251	85	9.496.622.576	Dinas Pwernanian
	Sasaran : Mengurangi pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,07	persen	5,88	146.568.500	5,68	2.945.000.000	5,49	3.276.000.000	5,29	3.626.000.000	5,10	3.793.000.000	4,90	4.130.000.000	
	Sasaran : Mengurangi kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	6,21	persen	6,14		6,08		6,02		5,97		5,92		5,87		
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	72,72	persen	75,62	120.347.500	77,84	1.700.000.000	78,92	1.902.000.000	78,92	2.104.000.000	80,25	2.136.000.000	81,43	2.338.000.000	Dinas Nakertrans
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Lulusan Pelatihan yang ditempatkan	25,84	persen	26,32	26.221.000	27,56	1.245.000.000	29,32	1.374.000.000	29,32	1.522.000.000	30,54	1.657.000.000	32,18	1.792.000.000	Dinas Nakertrans
	Misi 4 : Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien					120.721.997.796		123.199.994.792		124.706.905.766		125.677.329.038		127.160.457.286		128.279.639.671	
	Tujuan : Mewujudkan Tata kelolaPemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	44,7	indeks	60	119.920.128.896	65	121.909.683.292	70	123.341.328.691	73	124.243.473.109	76	125.654.908.561	80	126.698.813.509	
	Sasaran : Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Indeks perilaku antikorupsi	2,96	indeks	3,066	115.179.965.914	3,194	115.981.201.692	3,322	116.329.247.091	3,45	116.823.391.509	3,578	117.372.826.961	3,6	117.979.731.909	
		Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	bobot	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		
		Hasil evaluasi AKIP	8 (63,44)	bobot/ indeks	BB		BB		BB		BB		A		A		
		Nilai LPPD	35.138	Skor	36.000		36.500		37.000		37.500		38.000		39.000		
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian sasaran RPJMD	-	persen	90	1.340.827.750	73	925.000.000	90	943.500.000	90	962.370.000	95	981.617.400	95	1.001.249.748	Bappedda
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penyusunan anggaran tepat waktu	100	persen	100	112.976.630.730	100	113.540.000.000	100	113.739.500.000	100	113.926.475.000	100	114.122.798.750	#N/A	114.328.938.688	BKD
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase pencapaian realisasi fisik kegiatan tahunan	98	indeks	100	862.507.434	100	1.516.201.692	100	1.646.247.091	100	1.934.546.509	100	2.268.410.811	100	2.649.543.473	Setda
	Sasaran : Birokrasi yang berkualitas	Indeks Kelembagaan	99,9	indeks		885.274.600		1.615.000.000		1.677.000.000		1.726.000.000		1.783.000.000		1.835.000.000	
		Indeks SPBE	1,35	indeks	1,625		1,9		2,175		2,45		2,725		3		
		Indeks Profesionalisme ASN	58,04	indeks	62		65		68		71		74		77		
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Keuangan	0	indeks	0	584.273.600	2598	1.415.000.000	2736	1.477.000.000	2746	1.526.000.000	2766	1.583.000.000	2786	1.635.000.000	BKPSDM
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	persentase informasi pembangunan daerah yang diberikan ke masyarakat	70	persen	75	301.001.000	80	200.000.000	85	200.000.000	90	200.000.000	95	200.000.000	95	200.000.000	Dinas Kominfo
	Sasaran : Pelayanan publik yang prima	Publik service indeks	2,85	Indeks	2,94	3.854.888.382	3,03	4.313.481.600	3,12	5.335.081.600	3,21	5.694.081.600	3,3	6.499.081.600	3,4	6.884.081.600	
		Indeks Kepuasan Masyarakat	79	indeks	80		81		82		83		84		85		
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Jumlah produk hukum yang difasilitasi, harmonisasi dan dievaluasi penyusunannya serta didokumentasikan dan disosialisasikan	16	indeks	20	3.854.888.382	20	4.313.481.600	20	5.335.081.600	20	5.694.081.600	20	6.499.081.600	20	6.884.081.600	Setda

KODE	PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah penanggung
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Tujuan : Meningkatkan kemampuan nagari dalam pengelolaan pemerintahan dan potensi sumber daya nagari	Persentase nagari mandiri	7,69	persen	11,53	801.868.900	15,38%	1.290.311.500	19,23	1.365.577.075	23,07	1.433.855.929	26,92	1.505.548.725	30,79	1.580.826.161	
	Sasaran : Meningkatkan ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan nagari	Rata-rata Indeks Ketahanan Sosial	0,8108	Indeks	0,8189	801.868.900	0,8195	1.290.311.500	0,8354	1.365.577.075	0,8437	1.433.855.929	0,8522	1.505.548.725	0,8607	1.580.826.161	
		Rata-rata indeks ketahanan ekonomi	0,6917	Indeks	0,6986		0,7056		0,7127		0,7198		0,7270		0,7343		
		Rata-rata Indeks Ketahanan Ekologi / Lingkungan	0,5833	indeks	0,5891		0,5950		0,6010		0,6070		0,6131		0,6192		
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Nagari (LKN) yang berperan aktif dalam pembangunan	84	persen	86	801.868.900	88	1.290.311.500	90	1.365.577.075	90	1.433.855.929	92	1.505.548.725	94	1.580.826.161	Dinas Bupdarpora
	Misi 5 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan					1.412.410.400		6.915.700.000		6.763.592.500		6.915.182.313		7.070.561.870		7.129.825.917	
	Tujuan : Terwujudnya pembangunan berbasis lingkungan (green development)	Indeks Pembangunan berkelanjutan	NA	Indeks	68,78	1.412.410.400	70,21	6.915.700.000	73,68	6.763.592.500	75,8	6.915.182.313	77,8	7.070.561.870	78,2	7.129.825.917	
	Sasaran : Optimalisasi perencanaan tata ruang dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan	Kesesuaian pemanfaatan ruang		persen		232.816.200		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000		500.000.000	
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase gedung perangkat daerah dalam kondisi baik	-	Persen	55	232.816.200	60	500.000.000	65	500.000.000	65	500.000.000	70	500.000.000	75	500.000.000	Dinas PUPR
	Sasaran : Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68	Indeks	71,1	1.179.594.200	71,4	6.415.700.000	71,7	6.263.592.500	72	6.415.182.313	72,3	6.570.561.870	72,6	6.629.825.917	
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1. Meningkatnya Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pengawasan yang memiliki potensi merusak lingkungan 2. Meningkatnya persentase indeks kualitas air, udara dan tutupan lahan. 3. Meningkatnya sumber daya alam yang dilindungi 4. Meningkatnya luas tutupan lahan	6	ha	6	1.179.594.200	6	6.415.700.000	6	6.263.592.500	6	6.415.182.313	6	6.570.561.870	6	6.629.825.917	DLH

KODE	PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah penanggung
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Misi 6 : Meningkatkan nilai-nilai agama, adat dan budaya yang mencerminkan kepribadian daerah					1.953.367.350		3.879.060.350		3.879.060.350		3.879.060.350		3.879.060.350		3.879.060.350	
	Tujuan : Meningkatkan pembangunan mental dan kehidupan masyarakat berdasarkan nilai nilai agama, adat, dan budaya	Jumlah nagari beradat dan berbudaya	n/a	nagari	1	1.953.367.350	3	3.879.060.350	6	3.879.060.350	10	3.879.060.350	13	3.879.060.350	17	3.879.060.350	
	Sasaran : Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat	Persentase peningkatan zakat	2	persen	2		2		2		2		2		2		
		Persentase MDA/TPA/TPSA yang aktif	75	persen	77		80		85		90		95		100		
	Sasaran : Meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai nilai agaman, adat dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat	Jumlah nagari beradat dan berbudaya	n/a	nagari	1	1.953.367.350	3	3.879.060.350	6	3.879.060.350	10	3.879.060.350	13	3.879.060.350	17	3.879.060.350	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Terlaksanananya Pengembangan kebudayaan	100	persen	100	1.953.367.350	100	3.879.060.350	100	3.879.060.350	100	3.879.060.350	100	3.879.060.350	100	3.879.060.350	Dinas Budparpora
TOTAL						362.938.068.903		410.488.833.742		380.734.160.466		398.576.427.368		410.034.259.055		429.082.733.671	

BAB 7. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini terdiri dari penyajian kerangka pendanaan yang akan dialokasikan untuk program pembangunan daerah yang menjadi program prioritas daerah maupun seluruh program-program yang ada di seluruh perangkat daerah. Program pembangunan daerah merupakan program-program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah tertentu yang berhubungan langsung dengan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab VI. Sedangkan program perangkat daerah merupakan seluruh program yang telah dirumuskan dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi bidang kewenangannya masing-masing.

Dalam rangka menjaga kesesuaian nomenklatur dengan kewenangan Kabupaten/kota yang dimiliki sebagaimana yang terdapat pada lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Nomenklatur program yang digunakan dalam dokumen RPJMD ini disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagaimana telah dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Dan Vaidasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah

Dalam penyajiannya, baik program pembangunan daerah maupun program perangkat daerah disusun berdasarkan urusan pemerintahan daerah yang dilengkapi dengan indikator kinerja, target kinerja, pagu indikatif, serta perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan pemerintahan daerah. Dimana pagu indikatif yang digunakan disesuaikan dengan kemampuan kapasitas riil keuangan daerah.

Adapun kerangka pendanaan yang digunakan untuk mendanai program di seluruh perangkat daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 7-1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026

No	Uraian Akun	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	BELANJA DAERAH	966.756,78	976.157,48	1.011.674,90	1.037.192,31	1.063.709,73	1.091.827,12
A	BELANJA OPERASI	678.513,08	702.028,59	723.521,68	745.302,10	767.377,02	785.503,82
1	Belanja Pegawai	448.510,83	459.723,60	471.216,69	482.997,11	495.072,03	507.448,83
2	Belanja Barang dan Jasa	189.672,26	200.000,00	210.000,00	220.000,00	230.000,00	235.750,00
3	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	
4	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	
5	Belanja Hibah	40.304,99	40.304,99	40.304,99	40.304,99	40.304,99	40.304,99
6	Belanja Bantuan Sosial	25,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
B	BELANJA MODAL	196.338,48	156.371,41	165.028,32	164.397,90	164.472,98	168.158,12
1	Belanja Modal Tanah						
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	54.237,46	58.479,15	59.271,62	54.815,03	50.014,98	49.011,76
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	94.781,01	43.479,15	43.271,62	37.815,03	32.014,98	24.406,82
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	46.794,01	53.813,11	61.885,08	71.167,84	81.843,01	94.119,47
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	526,00	600,00	600,00	600,00	600,00	620,07
C	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	Belanja Tidak Terduga	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
D	BELANJA TRANSFER	86.905,22	112.757,48	118.124,90	122.492,31	126.859,73	133.165,17
1	Belanja Bagi Hasil	2.178,76	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.587,45
2	Belanja Bantuan Keuangan	84.726,46	110.557,48	115.824,90	120.092,31	124.359,73	130.577,72

Berikutnya Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan oleh seluruh perangkat daerah dapat dilihat pada Tabel 7.2. di bawah :

Tabel 7.2. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026

KODE	PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah penanggung
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					671.848.059.146		596.486.335.515		630.828.971.397		678.174.747.496		728.082.699.006		788.346.312.792	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					314.284.432.684		276.312.726.228		303.943.998.851		334.338.398.736		367.772.238.609		404.549.462.470	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100	persen	100	235.514.069.986	100	268.204.846.228	100	295.025.330.851	100	324.527.863.936	100	356.980.650.329	100	392.678.715.362	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	68,62	Persen	69,77	78.611.464.698	73	7.510.800.000	75,5	8.261.880.000	75,5	9.088.068.000	78	9.996.874.800	80,5	10.996.562.280	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	106,94	Persen	105,94		106,94	18.434.130.000	107,94	20.277.543.000	107,94	22.305.297.300	108,94	24.535.827.030	109,94	26.989.409.733	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	103,3	Persen	104,3		105,3	9.057.620.000	106,3	9.963.382.000	106,3	10.959.720.200	107,3	12.055.692.220	108,3	13.261.261.442	
		APK Non Formal/Kesetaraan	-		-		-	714.120.000	-	785.532.000	-	864.085.200	-	950.493.720	-	1.045.543.092	
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Jumlah kurikulum muatan lokal yang dikembangkan	1	dokumen	1	28.899.000	1	171.710.000	1	188.881.000	1	207.769.100	1	228.546.010	1	251.400.611	
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase guru dan tenaga kependidikan professional	-	Persen	95	129.999.000	96	425.370.000	97	467.907.000	97	514.697.700	98	566.167.470	99	622.784.217	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					222.458.327.012		214.446.902.330		229.986.946.503		249.737.402.994		263.837.837.501		285.955.114.301	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100	persen	100	131.796.236.232	100	93.629.843.730	100	100.656.328.103	100	108.204.460.914	100	116.857.907.005	100	126.092.197.706	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SISKIN Bidang Kesehatan.	100	persen	38,75	89.756.962.980	100	118.277.876.600	100	126.310.000.000	100	138.055.000.000	100	143.000.000.000	100	155.290.000.000	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	52	persen	17	105.154.000	60	985.000.000	65	1.182.000.000	65	1.368.400.000	70	1.556.080.000	80	1.787.296.000	
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Kualitas dan kuantitas sarana farmakmin sesuai standar	100	persen	100	633.123.600	100	912.182.000	100	1.084.618.400	100	1.278.542.080	100	1.508.850.496	100	1.778.620.595	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	52	persen	53,75	166.850.200	60	642.000.000	65	754.000.000	65	831.000.000	70	915.000.000	80	1.007.000.000	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					109.003.476.401		75.818.196.587		60.976.719.536		61.137.620.329		61.300.934.634		61.466.698.653	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100	persen	100	10.412.016.342	100	10.568.196.587	100	10.726.719.536	100	10.887.620.329	100	11.050.934.634	100	11.216.698.653	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik	59,86	Persen		7.092.867.359	62	4.000.000.000	65	4.000.000.000	65	4.000.000.000	66	4.000.000.000	67	4.000.000.000	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk yang terlayani jaringan pipa air minum	59	Persen	59,86	8.350.317.000	65	5.000.000.000	70	5.000.000.000	70	5.000.000.000	80	5.000.000.000	95	5.000.000.000	
		Persentase penduduk yang terlayani pelayanan air limbah domestik	87,25	Persen	90		92		95		95		97		98		
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase penduduk yang terlayani pelayanan air limbah domestik	87,25	Persen	90	4.469.756.000	92	4.000.000.000	95	4.000.000.000	95	4.000.000.000	97	4.000.000.000	98	4.000.000.000	
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase ketersediaan Utilitas Umum (Drainase)	-	Persen	5,35	2.792.103.800	5,56	1.500.000.000	5,77	1.500.000.000		1.500.000.000	5,98	1.500.000.000	6,19	1.500.000.000	
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase gedung perangkat daerah dalam kondisi baik	-	Persen	55	44.577.589.200	60	15.000.000.000	65		65		70		75		
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap	51,25	Persen	53	30.829.225.570	57	35.000.000.000	60	35.000.000.000	60	35.000.000.000	63	35.000.000.000	65	35.000.000.000	
		Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik	35,57	Persen	40		43		47		47		50		53		

KODE	PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah penanggung
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang	-	Persen	0	246.784.930	0	250.000.000	0	250.000.000	0	250.000.000	0	250.000.000	0	250.000.000	
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase gedung perangkat daerah dalam kondisi baik	-	Persen	55	232.816.200	60	500.000.000	65	500.000.000	65	500.000.000	70	500.000.000	75	500.000.000	
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					10.861.733.010		13.639.109.000		14.314.109.000		14.914.109.000		15.439.109.000		15.439.109.000	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran		100 persen	100	3.553.660.210	100	3.774.109.000	100	3.774.109.000	100	3.774.109.000	100	3.774.109.000	100	3.774.109.000	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Cakupan permukiman layak huni		85 Persen	85,85	4.109.256.700	88,65	1.215.000.000	91,45	2.015.000.000	91,45	2.415.000.000	94,25	2.415.000.000	97,05	2.415.000.000	
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program Pemerintah	-	Persen	100	78.874.500	100	5.450.000.000	100	5.325.000.000	100	5.525.000.000	100	6.050.000.000	100	6.050.000.000	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan lingkungan permukiman sehat dan aman yang didukung dengan PSU		95,96 Persen	55,74	3.119.941.600	60,66	3.200.000.000	65,57	3.200.000.000	65,57	3.200.000.000	70,49	3.200.000.000	75,41	3.200.000.000	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					10.132.118.639		6.328.713.800		10.798.500.000		6.280.000.000		6.938.000.000		7.085.000.000	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran		100 persen	100	9.071.298.638	100	2.320.713.800	100	7.510.500.000	100	2.607.000.000	100	3.120.000.000	100	2.787.000.000	
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum		91 Persen	100	110.344.200	100	378.000.000	100	423.000.000	100	433.000.000	100	448.000.000	100	458.000.000	
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Jumlah Nagari Tangguh Bencana	-	Nagari	0	929.657.051	1	3.630.000.000	1	2.865.000.000	1	3.240.000.000	2	3.370.000.000	4	3.840.000.000	
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	persentase Inspeksi peralatan proteksi kebakaran pada instansi pemerintah dan swasta	-	Persen	-	20.818.750	80	0	90	0	90	0	100	0	100	0	
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					5.107.971.400		9.940.687.570		10.808.697.507		11.767.216.438		12.794.579.261		13.850.928.368	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran		100 persen	100	4.679.814.900	100	5.211.187.570	100	5.726.697.507	100	6.314.716.438	100	6.914.579.261	100	7.573.428.368	
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti		100 Persen	100	115.993.150	100	1.350.000.000	100	1.600.000.000	100	1.750.000.000	100	1.875.000.000	100	2.075.000.000	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Pendampingan psikososial korban bencana sosial		0 0	5000	55.781.500	5000	979.500.000	5000	1.157.000.000	5000	1.252.500.000	5000	1.380.000.000	5000	1.502.500.000	
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang tertangani		75 Persen	78	53.414.350	80	1.500.000.000	82	1.600.000.000	82	1.700.000.000	85	1.850.000.000	88	1.900.000.000	
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase daerah pasca bencana yang dipulihkan	-	Persen	75	202.967.500	75	900.000.000	75	725.000.000	75	750.000.000	75	775.000.000	75	800.000.000	

KODE	PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah penanggung
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					56.903.972.390		83.060.257.596		85.249.647.516		91.688.717.635		91.943.972.104		94.184.223.168	
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					234.315.200		3.156.000.000		3.502.000.000		3.867.000.000		4.049.000.000		4.401.000.000	
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja formal.	41,07	persen		45.934.700	42	0	42,5	0	42,5	0	43,5	0	44	0	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	72,72	persen	75,62	120.347.500	77,84	1.700.000.000	78,92	1.902.000.000	78,92	2.104.000.000	80,25	2.136.000.000	81,43	2.338.000.000	
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Lulusan Pelatihan yang ditempatkan	25,84	persen	26,32	26.221.000	27,56	1.245.000.000	29,32	1.374.000.000	29,32	1.522.000.000	30,54	1.657.000.000	32,18	1.792.000.000	
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang layak	50	persen	65	41.812.000	70	211.000.000	76	226.000.000	85	241.000.000	90	256.000.000	95	271.000.000	
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					799.678.500		854.407.000		897.127.350		941.983.718		989.082.903		1.038.537.049	
2.08.02	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase keaktifan Focalpoint perangkat daerah	100	persen	100	711.818.500	100	54.407.000	100	57.127.350	100	59.983.718	100	62.982.903	100	66.132.049	
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA)	tidak ada penilaian	persen	Pratama	47.784.000	Pratama	500.000.000	Pratama	525.000.000	Pratama	551.250.000	Madya	578.812.500	Madya	607.753.125	
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	58%	persen	60%		61%	50.000.000	63%	52.500.000	63%	55.125.000	64%	57.881.250	65%	60.775.313	
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Tingkat kategori capaian APE (Anugrah Parahita Ekapraya)	-	bobot	-	40.076.000	Pratama	250.000.000	-	262.500.000	-	275.625.000	Pratama	289.406.250	-	303.876.563	
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					4.529.992.840		4.956.000.000		5.095.000.000		5.165.100.000		5.320.000.000		5.448.500.000	
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100	persen	100	3.939.927.190	100	4.186.000.000	100	4.235.000.000	100	4.290.100.000	100	4.380.000.000	100	4.423.500.000	
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan Kalori dan Protein Perkapita/hari	2540	persen	2550	553.542.600	2555	605.000.000	2560	660.000.000	2560	675.000.000	2565	730.000.000	2570	785.000.000	
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Jumlah Nagari rawan Pangan yang tertangani	2	nagari	2	18.185.000	2	100.000.000	2	125.000.000	2	120.000.000	1	125.000.000	0	140.000.000	
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Ketersediaan Kalori dan Protein Perkapita/hari	2540	persen	2550	18.338.050	2555	65.000.000	2560	75.000.000	2560	80.000.000	2565	85.000.000	2570	100.000.000	
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					602.218.000		1.950.000.000		1.450.000.000		1.450.000.000		1.450.000.000		1.450.000.000	
2.10.02	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya di atas izin lokasi	100	persen	100		100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Jumlah kasus pertanahan milik Pemda dan masyarakat yang terfasilitasi/diselesaikan	4,166667	persen	100		100	600.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Jumlah kasus pertanahan milik Pemda dan masyarakat yang terfasilitasi/diselesaikan	4,166667	persil	100		100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Jumlah Persil tanah ulayat yang terinventarisir	-	persil	5		6	100.000.000	7	100.000.000	7	100.000.000	8	100.000.000	9	100.000.000	
2.10.07	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Jumlah Persil tanah ulayat yang terinventarisir	-	persen	5		6	450.000.000	7	450.000.000	7	450.000.000	8	450.000.000	9	450.000.000	
2.10.09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Jumlah kasus pertanahan milik Pemda dan masyarakat yang terfasilitasi/diselesaikan	20,2	persen	100	551.933.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase tanah Pemerintah Daerah yang bersertifikat		persil	1,202778	50.285.000	32,93	100.000.000	1,565278	100.000.000	1,565278	100.000.000	41,75	100.000.000	1,927778	100.000.000	

KODE	PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah penanggung	
					2021		2022		2023		2024		2025		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					6.175.437.780		14.769.950.000		14.826.448.750		15.026.672.469		15.393.339.280		15.669.172.762		
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran		100	persen	100	3.795.115.680	100	4.058.500.000	100	4.159.712.500	100	4.263.455.313	100	4.369.791.695	100	4.478.786.488	
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas terkait kebijakan tata kelola lingkungan hidup		2	dokumen	2	503.149.000	2	675.000.000	2	691.875.000	2	543.984.375	2	553.833.984	2	563.929.834	
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1. Meningkatnya Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pengawasan yang memiliki potensi merusak lingkungan 2. Meningkatnya persentase indeks kualitas air, udara dan tutupan lahan. 3. Meningkatnya sumber daya alam yang dilindungi 4. Meningkatnya luas tutupan lahan		6	ha	6	1.179.594.200	6	6.415.700.000	6	6.263.592.500	6	6.415.182.313	6	6.570.561.870	6	6.629.825.917	
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.		2	kawasan	22%	20.003.600	22%	725.750.000	22%	743.893.750	22%	762.491.094	22%	781.553.371	22%	801.092.205	
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).		29	usaha/kegiatan	10000	14.250.000	12000	30.000.000	12000	30.750.000	12000	31.518.750	13000	32.306.719	14000	33.114.387	
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.		1	perusahaan	1	46.400.100	1	165.000.000	1	169.125.000	1	173.353.125	1	177.686.953	1	182.129.127	
		Insentif penghematan air pertanian/ perkebunan dan industri.				0		0		1		1		1		1		
2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Jumlah pengakuan masyarakat hukum adat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		1	kelompok MHA	1	26.806.000	1	1.500.000.000	1	1.537.500.000	1	1.575.937.500	1	1.615.335.938	1	1.655.719.336	
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Cakupan penghargaan lingkungan		3	jenis	3	20.500.000	3	120.000.000	3	123.000.000	3	126.075.000	3	129.226.875	3	132.457.547	
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan yang tertangani		100	persen	100	9.874.600	100	25.000.000	100	25.625.000	100	26.265.625	100	26.922.266	100	27.595.322	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1. Meningkatnya Pesentase timbulan sampah yang tertangani di Kabupaten Dharmasraya		78,31	persen	80	559.744.600	82	1.055.000.000	84	1.081.375.000	86	1.108.409.375	88	1.136.119.609	90	1.164.522.600	
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					4.898.859.900		5.332.944.000		5.462.444.000		5.577.944.000		5.677.444.000		4.692.094.000		
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran		100	persen	100	3.874.963.900	100	3.929.444.000	100	3.959.944.000	100	3.979.444.000	100	3.998.944.000	100	4.026.444.000	
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase kepemilikan KTP-el			persen	100	622.042.500	100	635.650.000		642.650.000	100	665.650.000		665.650.000	100	665.650.000	
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Peningkatan Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan Dan Kualitas Data Kependudukan		99,67	persen	100	248.201.000	100	600.450.000	100	662.450.000	100	715.450.000	100	775.450.000	#N/A		
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Peningkatan Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan Dan Kualitas Data Kependudukan		99,67	persen	100	151.852.500	100	167.400.000	100	197.400.000	100	217.400.000	100	237.400.000	#N/A	0	

KODE	PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah penanggung
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					4.994.543.848		7.069.568.893		6.295.900.400		6.432.198.220		6.574.335.931		6.730.605.528	
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100	persen	100	3.421.761.470	100	3.929.444.000	100	3.959.944.000	100	3.979.444.000	100	3.998.944.000	100	4.026.444.000	
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Jumlah nagari yang melakukan kerjasama	2	nagari	2	58.921.250	2	119.837.438	2	128.700.000	2	135.135.000	2	141.891.750	2	148.986.338	
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Nagari yang difasilitasi dalam pelaksanaan pemerintahan nagari	80	persen	85	711.992.228	90	1.729.975.956	100	841.679.325	100	883.763.291	100	927.951.456	100	974.349.029	
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatn Nagari (LKN) yang berperan aktif dalam pembangunan	84	persen	86	801.868.900	88	1.290.311.500	90	1.365.577.075	90	1.433.855.929	92	1.505.548.725	94	1.580.826.161	
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					3.671.989.100		977.148.000		865.600.000		906.740.000		1.168.750.000		920.600.000	
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	persentase kelompok tribina yang aktif	100	persen	100	3.631.989.000	100	533.250.000	100	259.600.000	100	282.900.000	100	533.250.000	100	259.600.000	
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (CPR)	81,1	persen	81,15	40.000.100	81,2	443.898.000	81,25	606.000.000	81,25	623.840.000	81,3	635.500.000	81,35	661.000.000	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					6.391.694.825		13.244.322.243		14.519.552.088		18.396.084.692		15.894.785.207		16.945.104.586	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100	persen	100	5.981.422.100	100	6.047.217.743	100	6.113.737.138	100	6.180.988.247	100	6.248.979.118	100	6.317.717.888	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Perlengkapan Jalan Yang Terpasang	50	persen	60	410.272.725	70	7.197.104.500	72	8.405.814.950	70	12.215.096.445	75	9.645.806.090	80	10.627.386.698	
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					4.822.039.276		4.860.600.000		5.429.500.000		6.009.246.800		6.554.540.592		7.183.964.428	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100	persen	100	4.229.788.276	100	4.310.600.000	100	4.739.500.000	100	5.211.246.800	100	5.726.940.592	100	6.300.844.428	
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	persentase informasi pembangunan daerah yang diberikan ke masyarakat	70	persen	75	301.001.000	80	200.000.000	85	200.000.000	90	200.000.000	95	200.000.000	95	200.000.000	
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Jumlah sistem informasi dan aplikasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik	43	Aplikasi	43	291.250.000	10 Aplikasi	350.000.000	15 Aplikasi	490.000.000	20 Aplikasi	598.000.000	25 Aplikasi	627.600.000	30 Aplikasi	683.120.000	
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					4.318.035.994		5.066.500.000		5.429.925.000		5.671.596.250		5.915.351.062		6.089.543.615	
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100	persen	100	3.827.719.694	100	4.533.500.000	100	4.879.925.000	100	5.099.596.250	100	5.326.351.062	100	5.488.543.615	
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Peningkatan jumlah koperasi yang berkualitas baik	21	Koperasi	16		16	8.000.000	20	10.000.000	24	12.000.000	28	14.000.000	32	16.000.000	
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Peningkatan jumlah KSP/USP yang berkualitas baik	6	KSP/USP	15	52.252.300	25	60.000.000	30	65.000.000	35	70.000.000	40	75.000.000	40	75.000.000	
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah Pengurus Koperasi yang telah mengikuti Pelatihan Perkoperasian	30	Orang	40	197.379.000	60	200.000.000	60	205.000.000	60	210.000.000	60	215.000.000	60	220.000.000	
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Koperasi yang mengalami peningkatan produktivitas usaha	3	Koperasi	3		3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah Pelaku Usaha Mikro Naik Kelas	22	usaha mikro	30	240.685.000	40	255.000.000	50	260.000.000	60	270.000.000	70	275.000.000	80	280.000.000	
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					3.880.656.020		5.293.801.610		5.699.134.077		6.146.635.637		6.598.327.278		7.070.585.350	

KODE	PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah penanggung		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA DAERAH	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100	persen	100	2.987.170.650	100	3.886.909.805	100	4.165.594.491	100	4.466.647.330	100	4.762.645.273	100	5.062.197.215			
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase pertumbuhan Investasi	4	dok	4	100.001.800	4	335.500.000	4	369.050.000	4	405.955.000	4	446.550.500	4	491.205.550			
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Promosi dan kerjasama investasi	4	kegiatan	4	432.400.300	4	541.640.330	4	595.804.363	4	655.384.799	4	720.923.279	4	793.015.607			
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Tersedianya Pelimpahan Kewenangan Perizinan yang dikelola DPMP TSP sesuai peruntukannya	100	persen	100	35.071.250	100	180.078.375	100	198.872.969	100	220.993.711	100	247.134.889	100	278.150.636			
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Cakupan Pengendalian Penanaman Modal	80	perusahaan	100	326.012.020	130	349.673.100	160	369.812.255	190	397.654.797	220	421.073.338	250	446.016.342			
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					1.241.032.900		1.286.032.900		1.286.032.900		1.286.032.900		1.286.032.900		1.286.032.900			
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	terlaksanannya Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	1	tahun	1	155.856.500	1	200.856.500	1	200.856.500	1	200.856.500	1	200.856.500	1	200.856.500			
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	terlaksanannya Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	1	tahun	1	1.010.176.400	1	1.010.176.400	1	1.010.176.400	1	1.010.176.400	1	1.010.176.400	1	1.010.176.400			
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	terlaksanannya Pengembangan kapasitas kepramukaan	1	tahun	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000			
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					118.058.600		450.000.000		650.000.000		650.000.000		650.000.000		650.000.000			
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	100	persen	65	118.058.600	70	450.000.000	75	650.000.000	75	650.000.000	80	650.000.000	90	650.000.000			
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					74.790.000		100.000.000		100.000.000		200.000.000		250.000.000		250.000.000			
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Sertifikat Digital	2	Unit	persen	2	Unit	74.790.000	0,4	100.000.000	0,5	100.000.000	0,5	200.000.000	0,6	250.000.000	0,8	250.000.000	
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					6.173.089.950		8.343.782.950		8.343.782.950		8.343.782.950		8.343.782.950		8.343.782.950			
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA DAERAH	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100	persen	100	3.674.060.350	100	3.879.060.350	100	3.879.060.350	100	3.879.060.350	100	3.879.060.350	100	3.879.060.350			
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Terlaksanannya Pengembangan kebudayaan	100	persen	100	1.953.367.350	100	3.879.060.350	100	3.879.060.350	100	3.879.060.350	100	3.879.060.350	100	3.879.060.350			
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah jenis kesenian daerah yang dilestarikan	-	tahun	12	486.939.750	1	496.939.750	1	496.939.750	1	496.939.750	1	496.939.750	1	496.939.750			
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah cagar Budaya yang lestasri	15	unit	15	58.722.500	15	88.722.500	15	88.722.500	17	88.722.500	18	88.722.500	20	88.722.500			
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					3.917.539.657		4.689.200.000		4.737.200.000		4.957.700.000		5.169.200.000		5.354.700.000			
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA DAERAH	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100	persen	100	3.662.510.157	22	4.064.200.000	22	4.049.700.000	25	4.207.700.000	25	4.356.700.000	25	4.479.700.000			
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan	67742	perpustakaan	63000	255.029.500	20	550.000.000	20	600.000.000	20	650.000.000	20	700.000.000	20	750.000.000			
		Persentase perpustakaan yang melaksanakan manajemen perpustakaan	6%	persen	32%		39%		45%		51%		58%		64%				
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah Pelestarian Koleksi Daerah dan Naskah Kuno serta Budaya Etnis Nusantara di Kab. Dharmasraya	-	dokumen	-		10	75.000.000	16	87.500.000	22	100.000.000	28	112.500.000	34	125.000.000			

KODE	PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah penanggung
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					60.000.000		660.000.000		660.000.000		660.000.000		660.000.000		660.000.000	
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku		38 persen	47%	60.000.000	58%	385.000.000	68%	385.000.000	68%	385.000.000	79%	385.000.000	89%	385.000.000	
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Meningkatnya jumlah arsip daerah yang diselamatkan dan dilestarikan		1 persen	5		10	250.000.000	10	250.000.000	10	250.000.000	10	250.000.000	10	250.000.000	
2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Terwujudnya izin penggunaan arsip yang terkelola dengan baik sesuai dengan aturan		1 SOP	1		1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					29.127.366.783		89.598.078.500		48.147.029.700		50.814.850.520		53.606.599.572		56.729.057.130	
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					1.601.187.400		1.900.000.000		2.055.000.000		2.140.000.000		2.275.000.000		2.385.000.000	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan budidaya		21.993 ton	25.309	1.555.276.700	26.579	1.690.000.000	27.913	1.825.000.000	29.314	1.890.000.000	30.780	2.015.000.000	32.325	2.095.000.000	
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah produksi perikanan tangkap		192 ton	200	24.008.700	205	55.000.000	210	65.000.000	215	70.000.000	220	75.000.000	225	85.000.000	
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah diversifikasi olahan ikan yang berdaya saing		1 jenis	1	21.902.000	1	155.000.000	1	165.000.000	1	180.000.000	1	185.000.000	1	205.000.000	
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					296.151.150		449.711.500		449.711.500		449.711.500		449.711.500		449.711.500	
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Daya Tarik Wisata Yang Dikembangkan		1 destinasi	1	178.476.500	3	288.476.500	2	288.476.500	4	288.476.500	4	288.476.500	2	288.476.500	
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Terlaksananya Pemasaran Pariwisata		1 unit	1	86.235.000	1	106.235.000	1	106.235.000	1	106.235.000	1	106.235.000	1	106.235.000	
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah pelaku ekonomi kreatif		800 kelompok	32	31.439.650	36	55.000.000	40	55.000.000	#N/A	55.000.000	45	55.000.000	52	55.000.000	
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					23.078.188.098		25.999.062.000		28.748.968.200		31.683.865.020		34.679.751.522		38.065.226.674	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran		100 persen	100	14.758.019.030	100	16.953.896.000	100	18.799.285.600	100	20.739.214.160	100	22.640.635.576	100	24.822.199.134	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	persentase kelompok tani memiliki alat pertanian		60 persen	65	1.546.304.750	70	1.943.804.000	75	2.138.184.400	80	2.352.002.840	85	2.587.203.124	90	2.845.923.436	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	persentase sawah teraliri irigasi		70 persen	72	6.158.822.000	74	6.486.321.000	76	7.134.953.100	78	7.848.448.410	80	8.633.293.251	85	9.496.622.576	
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	persentase kelompok tani terbina		60 persen	65	52.242.850	70	52.242.000	75	57.466.200	80	63.212.820	85	69.534.102	90	76.487.512	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	persentase kelompok tani terbina		70 persen	75	562.799.468	77	562.799.000	80	619.078.900	82	680.986.790	85	749.085.469	90	823.994.016	
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					149.991.075		53.480.000.000		8.495.000.000		7.550.000.000		6.620.000.000		5.700.000.000	
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pasar rakyat yang telah direvitalisasi		32,43 paket	35	18.597.700	19	53.100.000.000	16	8.055.000.000	13	7.060.000.000	10	6.065.000.000	7	5.070.000.000	
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Koofisien Variasa Harga Barang Kebutuhan Pokok antar waktu	-	indeks	-	31.399.210	-	155.000.000	-	180.000.000	-	205.000.000	-	230.000.000	-	255.000.000	
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Alat UTTP yang Beratanda tera sah		25,13 unit	30	99.994.165	1700	225.000.000	2325	260.000.000	2600	285.000.000	2800	325.000.000	2950	375.000.000	

KODE	PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah penanggung
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					681.972.700		3.300.000.000		3.520.000.000		3.840.000.000		4.160.000.000		4.480.000.000	
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase peningkatan omzet IKM		6,5 IKM	8	610.777.650	175	1.800.000.000	216	2.000.000.000	257	2.200.000.000	298	2.400.000.000	339	2.600.000.000	
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase IKM yang memiliki legalitas sesuai standar		7,05 persen	40	31.534.500	50	200.000.000	60	100.000.000	70	100.000.000	80	100.000.000	90	100.000.000	
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase data Informasi Industri yang ter update	-	persen	-	39.660.550	-	1.300.000.000	-	1.420.000.000	-	1.540.000.000	-	1.660.000.000	-	1.780.000.000	
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					3.319.876.360		4.469.305.000		4.878.350.000		5.151.274.000		5.422.136.550		5.649.118.956	
3.32.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran		100 persen	100	3.275.183.360	100	4.469.305.000	100	4.878.350.000	100	5.151.274.000	100	5.422.136.550	100	5.649.118.956	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					73.313.990.399		89.262.778.850		79.468.355.640		81.406.384.024		84.389.457.161		92.506.176.543	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH					31.809.742.914		41.865.434.655		37.475.655.685		38.271.006.752		40.368.300.929		47.929.936.163	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran		100 persen	100	27.092.347.098	100	36.035.751.363	100	30.494.326.994	100	30.642.378.643	100	31.600.808.518	100	38.396.311.090	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Jumlah produk hukum yang difasilitasi, harmonisasi dan dievaluasi penyusunannya serta didokumentasikan dan disosialisasikan		16 indeks	20	3.854.888.382	20	4.313.481.600	20	5.335.081.600	20	5.694.081.600	20	6.499.081.600	20	6.884.081.600	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase pencapaian realisasi fisik kegiatan tahunan		98 indeks	100	862.507.434	100	1.516.201.692	100	1.646.247.091	100	1.934.546.509	100	2.268.410.811	100	2.649.543.473	
4.02	SEKRETARIAT DPRD					41.504.247.485		47.397.344.195		41.992.699.955		43.135.377.272		44.021.156.232		44.576.240.380	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran		100 persen	100	20.682.471.485	100	24.097.215.920	100	23.479.230.180	100	23.993.263.497	100	24.929.042.457	100	25.784.126.605	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase agenda DPRD yang difasilitasi	-	persen	90	20.821.776.000	90	23.300.128.275	90	18.513.469.775	90	19.142.113.775	90	19.092.113.775	90	18.792.113.775	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					162.625.618.062		166.976.464.217		171.177.122.826		173.227.746.055		176.170.340.728		179.273.535.221	
5.01	PERENCANAAN					6.056.351.000		5.734.833.715		5.849.530.389		5.966.520.997		6.085.851.417		6.207.568.445	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran		100 persen	100	4.161.719.250	100	4.244.953.635	100	4.329.852.708	100	4.416.449.762	100	4.504.778.757	100	4.594.874.332	
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian sasaran RPJMD	-	persen	90	1.340.827.750	73	925.000.000	90	943.500.000	90	962.370.000	95	981.617.400	95	1.001.249.748	
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase dokumen perencanaan yang ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku		100 persen	100	553.804.000	100	564.880.080	100	576.177.682	100	587.701.235	100	599.455.260	100	611.444.365	
5.02	KEUANGAN					148.137.394.494		151.842.563.002		156.431.520.562		158.753.096.590		161.190.751.420		163.750.288.991	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran		100 persen	100	34.220.837.164	100	35.347.563.002	100	39.589.270.562	100	41.568.734.090	100	43.647.170.795	100	45.829.529.334	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penyusunan anggaran tepat waktu		100 persen	100	112.976.630.730	100	113.540.000.000	100	113.739.500.000	100	113.926.475.000	100	114.122.798.750	#N/A	114.328.938.688	
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase barang milik daerah yang dikelola dengan baik		100 persen	100	557.165.600	100	1.060.000.000	100	1.113.000.000	100	1.168.650.000	100	1.227.082.500	#N/A	1.288.436.625	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Nilai AKIP komponen perencanaan kinerja		19,35 persen	20	382.761.000	22	1.895.000.000	23	1.989.750.000	23	2.089.237.500	24	2.193.699.375	25	2.303.384.344	

KODE	PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah penanggung
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
5.03	KEPEGAWAIAN					6.622.829.768		6.952.697.500		7.465.941.875		7.077.998.468		7.463.607.891		7.885.547.785	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100	persen	100	6.038.556.168	58	5.537.697.500	57	5.988.941.875	57	5.551.998.468	57	5.880.607.891	57	6.250.547.785	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Keuangan	0	indeks	0	584.273.600	2598	1.415.000.000	2736	1.477.000.000	2746	1.526.000.000	2766	1.583.000.000	2786	1.635.000.000	
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					1.785.393.800		2.421.370.000		1.405.130.000		1.405.130.000		1.405.130.000		1.405.130.000	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Indeks Profesionalitas ASN	0	persen	62	1.785.393.800	179	2.421.370.000	106	1.405.130.000	106	1.405.130.000	106	1.405.130.000	106	1.405.130.000	
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					23.649.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase penempatan ASN sesuai kompetensi	41,25	inovasi	42	23.649.000	45	25.000.000	47	25.000.000	47	25.000.000	50	25.000.000	52	25.000.000	
5.06	PENGLOLAAN PERBATASAN							0		0		0		0		0	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					7.809.443.402		7.821.068.402		8.268.708.852		8.448.412.852		8.636.102.212		8.863.967.852	
6.01	INSPEKTORAT DAERAH					7.809.443.402		7.821.068.402		8.268.708.852		8.448.412.852		8.636.102.212		8.863.967.852	
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100	persen	100	6.565.620.902	100	6.577.245.902	100	6.837.598.852	100	6.945.039.852	100	7.056.775.212	100	7.173.528.852	
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Tingkat maturitas implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	3	dokumen	-	883.755.000	2	883.755.000	3	1.016.826.000	3	1.068.197.000	3	1.122.164.000	3	1.210.373.000	
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	-	dokumen	0,2	360.067.500	0,2	360.067.500	0,2	414.284.000	0,2	435.176.000	0,2	457.163.000	0,2	480.066.000	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					18.345.329.422		19.112.604.373		19.390.248.439		19.672.057.166		19.958.093.023		20.248.419.418	
7.01	KECAMATAN					18.345.329.422		19.112.604.373		19.390.248.439		19.672.057.166		19.958.093.023		20.248.419.418	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100	persen	100	18.236.063.422	100	18.509.604.373	100	18.787.248.439	100	19.069.057.166	100	19.355.093.023	100	19.645.419.418	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP	-	persen	80	13.576.000	80	250.000.000	90	250.000.000	90	250.000.000	90	250.000.000	95	250.000.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	-	persen	60	75.260.000	60	100.000.000	60	100.000.000	60	100.000.000	60	100.000.000	65	100.000.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum di wilayah kecamatan yang diselesaikan	100	persen	100	4.940.000	100	165.000.000	100	165.000.000	100	165.000.000	100	165.000.000	100	165.000.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari	52	kasus	52	15.490.000	52	88.000.000	52	88.000.000	52	88.000.000	52	88.000.000	52	88.000.000	

KODE	PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah penanggung
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					2.264.840.180		3.631.968.880		3.825.326.680		4.038.020.260		4.271.983.198		4.529.342.430	
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					2.264.840.180		3.631.968.880		3.825.326.680		4.038.020.260		4.271.983.198		4.529.342.430	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	persen	100	1.181.885.100	100	1.664.160.000	100	1.740.576.000	100	1.824.633.600	100	1.917.096.960	100	2.018.806.656	
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Jumlah Konflik Sosial	-	persen	5	24.956.700	5	365.000.000	5	401.500.000	5	441.650.000	5	485.815.000	3	534.396.500	
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Pembinaan Partai Politik	-	persen	30	842.386.580	30	1.021.558.880	30	1.043.875.680	30	1.068.424.160	68,7	1.095.427.488	100	1.125.131.149	
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	-	persen	30	30.000.000	30	51.250.000	30	56.375.000	30	62.012.500	55	68.213.750	75	75.035.125	
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pembinaan LSM	-	kasus	30	85.012.750	30	130.000.000	30	143.000.000	30	157.300.000	63,6	173.030.000	75	190.333.000	
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Jumlah Penyakit Masyarakat	-	kasus	2	100.599.050	3	400.000.000	3	440.000.000	2	484.000.000	3	532.400.000	4	585.640.000	
	TOTAL BELANJA					966.756.780.000		976.157.480.000		1.011.674.900.000		1.037.192.310.000		1.063.709.730.000		1.094.050.590.000	

Tabel 7.2. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026

KODE	PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah penanggung
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					671.848.059.146		596.486.335.515		630.828.971.397		678.174.747.496		728.082.699.006		788.346.312.792	
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					314.284.432.684		276.312.726.228		303.943.998.851		334.338.398.736		367.772.238.609		404.549.462.470	
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100	persen	100	235.514.069.986	100	268.204.846.228	100	295.025.330.851	100	324.527.863.936	100	356.980.650.329	100	392.678.715.362	
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	68,62	Persen	69,77	78.611.464.698	73	7.510.800.000	75,5	8.261.880.000	75,5	9.088.068.000	78	9.996.874.800	80,5	10.996.562.280	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	106,94	Persen	105,94		106,94	18.434.130.000	107,94	20.277.543.000	107,94	22.305.297.300	108,94	24.535.827.030	109,94	26.989.409.733	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	103,3	Persen	104,3		105,3	9.057.620.000	106,3	9.963.382.000	106,3	10.959.720.200	107,3	12.055.692.220	108,3	13.261.261.442	
		APK Non Formal/Kesetaraan	-		-		-	714.120.000	-	785.532.000	-	864.085.200	-	950.493.720	-	1.045.543.092	
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Jumlah kurikulum muatan lokal yang dikembangkan	1	dokumen	1	28.899.000	1	171.710.000	1	188.881.000	1	207.769.100	1	228.546.010	1	251.400.611	
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase guru dan tenaga kependidikan professional	-	Persen	95	129.999.000	96	425.370.000	97	467.907.000	97	514.697.700	98	566.167.470	99	622.784.217	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					222.458.327.012		214.446.902.330		229.986.946.503		249.737.402.994		263.837.837.501		285.955.114.301	
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100	persen	100	131.796.236.232	100	93.629.843.730	100	100.656.328.103	100	108.204.460.914	100	116.857.907.005	100	126.092.197.706	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SISKIN Bidang Kesehatan.	100	persen	38,75	89.756.962.980	100	118.277.876.600	100	126.310.000.000	100	138.055.000.000	100	143.000.000.000	100	155.290.000.000	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	52	persen	17	105.154.000	60	985.000.000	65	1.182.000.000	65	1.368.400.000	70	1.556.080.000	80	1.787.296.000	
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Kualitas dan kuantitas sarana farmakmin sesuai standar	100	persen	100	633.123.600	100	912.182.000	100	1.084.618.400	100	1.278.542.080	100	1.508.850.496	100	1.778.620.595	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	52	persen	53,75	166.850.200	60	642.000.000	65	754.000.000	65	831.000.000	70	915.000.000	80	1.007.000.000	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					109.003.476.401		75.818.196.587		60.976.719.536		61.137.620.329		61.300.934.634		61.466.698.653	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100	persen	100	10.412.016.342	100	10.568.196.587	100	10.726.719.536	100	10.887.620.329	100	11.050.934.634	100	11.216.698.653	
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik	59,86	Persen	60	7.092.867.359	62	4.000.000.000	65	4.000.000.000	65	4.000.000.000	66	4.000.000.000	67	4.000.000.000	
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk yang terlayani jaringan pipa air minum	59	Persen	59,86	8.350.317.000	65	5.000.000.000	70	5.000.000.000	70	5.000.000.000	80	5.000.000.000	95	5.000.000.000	
		Persentase penduduk yang terlayani pelayanan air limbah domestik	87,25	Persen	90		92		95		95		97		98		
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase penduduk yang terlayani pelayanan air limbah domestik	87,25	Persen	90	4.469.756.000	92	4.000.000.000	95	4.000.000.000	95	4.000.000.000	97	4.000.000.000	98	4.000.000.000	
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase ketersediaan Utilitas Umum (Drainase)	-	Persen	5,35	2.792.103.800	5,56	1.500.000.000	5,77	1.500.000.000		1.500.000.000	5,98	1.500.000.000	6,19	1.500.000.000	
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase gedung perangkat daerah dalam kondisi baik	-	Persen	55	44.577.589.200	60	15.000.000.000	65		65		70		75		
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap	51,25	Persen	53	30.829.225.570	57	35.000.000.000	60	35.000.000.000	60	35.000.000.000	63	35.000.000.000	65	35.000.000.000	
		Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik	35,57	Persen	40		43		47		47		50		53		

KODE	PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah penanggung
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang	-	Persen	0	246.784.930	0	250.000.000	0	250.000.000	0	250.000.000	0	250.000.000	0	250.000.000	
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase gedung perangkat daerah dalam kondisi baik	-	Persen	55	232.816.200	60	500.000.000	65	500.000.000	65	500.000.000	70	500.000.000	75	500.000.000	
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					10.861.733.010		13.639.109.000		14.314.109.000		14.914.109.000		15.439.109.000		15.439.109.000	
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran		100 persen	100	3.553.660.210	100	3.774.109.000	100	3.774.109.000	100	3.774.109.000	100	3.774.109.000	100	3.774.109.000	
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Cakupan permukiman layak huni		85 Persen	85,85	4.109.256.700	88,65	1.215.000.000	91,45	2.015.000.000	91,45	2.415.000.000	94,25	2.415.000.000	97,05	2.415.000.000	
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program Pemerintah	-	Persen	100	78.874.500	100	5.450.000.000	100	5.325.000.000	100	5.525.000.000	100	6.050.000.000	100	6.050.000.000	
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan lingkungan permukiman sehat dan aman yang didukung dengan PSU		95,96 Persen	55,74	3.119.941.600	60,66	3.200.000.000	65,57	3.200.000.000	65,57	3.200.000.000	70,49	3.200.000.000	75,41	3.200.000.000	
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					10.132.118.639		6.328.713.800		10.798.500.000		6.280.000.000		6.938.000.000		7.085.000.000	
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran		100 persen	100	9.071.298.638	100	2.320.713.800	100	7.510.500.000	100	2.607.000.000	100	3.120.000.000	100	2.787.000.000	
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum		91 Persen	100	110.344.200	100	378.000.000	100	423.000.000	100	433.000.000	100	448.000.000	100	458.000.000	
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Jumlah Nagari Tangguh Bencana	-	Nagari	0	929.657.051	1	3.630.000.000	1	2.865.000.000	1	3.240.000.000	2	3.370.000.000	4	3.840.000.000	
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	persentase Inspeksi peralatan proteksi kebakaran pada instansi pemerintah dan swasta	-	Persen	-	20.818.750	80	0	90	0	90	0	100	0	100	0	
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					5.107.971.400		9.940.687.570		10.808.697.507		11.767.216.438		12.794.579.261		13.850.928.368	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran		100 persen	100	4.679.814.900	100	5.211.187.570	100	5.726.697.507	100	6.314.716.438	100	6.914.579.261	100	7.573.428.368	
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti		100 Persen	100	115.993.150	100	1.350.000.000	100	1.600.000.000	100	1.750.000.000	100	1.875.000.000	100	2.075.000.000	
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Pendampingan psikososial korban bencana sosial		0 0	5000	55.781.500	5000	979.500.000	5000	1.157.000.000	5000	1.252.500.000	5000	1.380.000.000	5000	1.502.500.000	
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang tertangani		75 Persen	78	53.414.350	80	1.500.000.000	82	1.600.000.000	82	1.700.000.000	85	1.850.000.000	88	1.900.000.000	
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase daerah pasca bencana yang dipulihkan	-	Persen	75	202.967.500	75	900.000.000	75	725.000.000	75	750.000.000	75	775.000.000	75	800.000.000	

KODE	PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah penanggung
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					56.903.972.390		83.060.257.596		85.249.647.516		91.688.717.635		91.943.972.104		94.184.223.168	
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					234.315.200		3.156.000.000		3.502.000.000		3.867.000.000		4.049.000.000		4.401.000.000	
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja formal.	41,07	persen		45.934.700	42	0	42,5	0	42,5	0	43,5	0	44	0	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	72,72	persen	75,62	120.347.500	77,84	1.700.000.000	78,92	1.902.000.000	78,92	2.104.000.000	80,25	2.136.000.000	81,43	2.338.000.000	
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Lulusan Pelatihan yang ditempatkan	25,84	persen	26,32	26.221.000	27,56	1.245.000.000	29,32	1.374.000.000	29,32	1.522.000.000	30,54	1.657.000.000	32,18	1.792.000.000	
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang layak	50	persen	65	41.812.000	70	211.000.000	76	226.000.000	85	241.000.000	90	256.000.000	95	271.000.000	
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					799.678.500		854.407.000		897.127.350		941.983.718		989.082.903		1.038.537.049	
2.08.02	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase keaktifan Focalpoint perangkat daerah	100	persen	100	711.818.500	100	54.407.000	100	57.127.350	100	59.983.718	100	62.982.903	100	66.132.049	
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA)	tidak ada penilaian	persen	Pratama	47.784.000	Pratama	500.000.000	Pratama	525.000.000	Pratama	551.250.000	Madya	578.812.500	Madya	607.753.125	
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	58%	persen	60%		61%	50.000.000	63%	52.500.000	63%	55.125.000	64%	57.881.250	65%	60.775.313	
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Tingkat kategori capaian APE (Anugrah Parahita Ekapraya)	-	bobot	-	40.076.000	Pratama	250.000.000	-	262.500.000	-	275.625.000	Pratama	289.406.250	-	303.876.563	
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					4.529.992.840		4.956.000.000		5.095.000.000		5.165.100.000		5.320.000.000		5.448.500.000	
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100	persen	100	3.939.927.190	100	4.186.000.000	100	4.235.000.000	100	4.290.100.000	100	4.380.000.000	100	4.423.500.000	
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Ketersediaan Kalori dan Protein Perkapita/hari	2540	persen	2550	553.542.600	2555	605.000.000	2560	660.000.000	2560	675.000.000	2565	730.000.000	2570	785.000.000	
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Jumlah Nagari rawan Pangan yang tertangani	2	nagari	2	18.185.000	2	100.000.000	2	125.000.000	2	120.000.000	1	125.000.000	0	140.000.000	
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Ketersediaan Kalori dan Protein Perkapita/hari	2540	persen	2550	18.338.050	2555	65.000.000	2560	75.000.000	2560	80.000.000	2565	85.000.000	2570	100.000.000	
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					602.218.000		1.950.000.000		1.450.000.000		1.450.000.000		1.450.000.000		1.450.000.000	
2.10.02	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya di atas izin lokasi	100	persen	100		100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Jumlah kasus pertanahan milik Pemda dan masyarakat yang terfasilitasi/diselesaikan	4,166667	persen	100		100	600.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Jumlah kasus pertanahan milik Pemda dan masyarakat yang terfasilitasi/diselesaikan	4,166667	persil	100		100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	100	500.000.000	
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Jumlah Persil tanah ulayat yang terinventarisir	-	persil	5		6	100.000.000	7	100.000.000	7	100.000.000	8	100.000.000	9	100.000.000	
2.10.07	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Jumlah Persil tanah ulayat yang terinventarisir	-	persen	5		6	450.000.000	7	450.000.000	7	450.000.000	8	450.000.000	9	450.000.000	
2.10.09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Jumlah kasus pertanahan milik Pemda dan masyarakat yang terfasilitasi/diselesaikan	20,2	persen	100	551.933.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase tanah Pemerintah Daerah yang bersertifikat		persil	1,202778	50.285.000	32,93	100.000.000	1,565278	100.000.000	1,565278	100.000.000	41,75	100.000.000	1,927778	100.000.000	

KODE	PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah penanggung
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					6.175.437.780		14.769.950.000		14.826.448.750		15.026.672.469		15.393.339.280		15.669.172.762	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100	persen	100	3.795.115.680	100	4.058.500.000	100	4.159.712.500	100	4.263.455.313	100	4.369.791.695	100	4.478.786.488	
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas terkait kebijakan tata kelola lingkungan hidup	2	dokumen	2	503.149.000	2	675.000.000	2	691.875.000	2	543.984.375	2	553.833.984	2	563.929.834	
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1. Meningkatnya Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pengawasan yang memiliki potensi merusak lingkungan 2. Meningkatnya persentase indeks kualitas air, udara dan tutupan lahan. 3. Meningkatnya sumber daya alam yang dilindungi 4. Meningkatnya luas tutupan lahan	6	ha	6	1.179.594.200	6	6.415.700.000	6	6.263.592.500	6	6.415.182.313	6	6.570.561.870	6	6.629.825.917	
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	2	kawasan	22%	20.003.600	22%	725.750.000	22%	743.893.750	22%	762.491.094	22%	781.553.371	22%	801.092.205	
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	29	usaha/kegiatan	10000	14.250.000	12000	30.000.000	12000	30.750.000	12000	31.518.750	13000	32.306.719	14000	33.114.387	
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	1	perusahaan	1	46.400.100	1	165.000.000	1	169.125.000	1	173.353.125	1	177.686.953	1	182.129.127	
		Insentif penghematan air pertanian/ perkebunan dan industri.			0		0		1		1		1		1		
2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Jumlah pengakuan masyarakat hukum adat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	1	kelompok MHA	1	26.806.000	1	1.500.000.000	1	1.537.500.000	1	1.575.937.500	1	1.615.335.938	1	1.655.719.336	
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Cakupan penghargaan lingkungan	3	jenis	3	20.500.000	3	120.000.000	3	123.000.000	3	126.075.000	3	129.226.875	3	132.457.547	
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan yang tertangani	100	persen	100	9.874.600	100	25.000.000	100	25.625.000	100	26.265.625	100	26.922.266	100	27.595.322	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1. Meningkatnya Pesentase timbulan sampah yang tertangani di Kabupaten Dharmasraya	78,31	persen	80	559.744.600	82	1.055.000.000	84	1.081.375.000	86	1.108.409.375	88	1.136.119.609	90	1.164.522.600	
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					4.898.859.900		5.332.944.000		5.462.444.000		5.577.944.000		5.677.444.000		4.692.094.000	
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100	persen	100	3.874.963.900	100	3.929.444.000	100	3.959.944.000	100	3.979.444.000	100	3.998.944.000	100	4.026.444.000	
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase kepemilikan KTP-el		persen	100	622.042.500	100	635.650.000		642.650.000	100	665.650.000		665.650.000	100	665.650.000	
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Peningkatan Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan Dan Kualitas Data Kependudukan	99,67	persen	100	248.201.000	100	600.450.000	100	662.450.000	100	715.450.000	100	775.450.000	#N/A		
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Peningkatan Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan Dan Kualitas Data Kependudukan	99,67	persen	100	151.852.500	100	167.400.000	100	197.400.000	100	217.400.000	100	237.400.000	#N/A	0	

KODE	PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah penanggung		
					2021		2022		2023		2024		2025			2026	
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					4.994.543.848		7.069.568.893		6.295.900.400		6.432.198.220		6.574.335.931		6.730.605.528	
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100	persen	100	3.421.761.470	100	3.929.444.000	100	3.959.944.000	100	3.979.444.000	100	3.998.944.000	100	4.026.444.000	
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Jumlah nagari yang melakukan kerjasama	2	nagari	2	58.921.250	2	119.837.438	2	128.700.000	2	135.135.000	2	141.891.750	2	148.986.338	
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Nagari yang difasilitasi dalam pelaksanaan pemerintahan nagari	80	persen	85	711.992.228	90	1.729.975.956	100	841.679.325	100	883.763.291	100	927.951.456	100	974.349.029	
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatn Nagari (LKN) yang berperan aktif dalam pembangunan	84	persen	86	801.868.900	88	1.290.311.500	90	1.365.577.075	90	1.433.855.929	92	1.505.548.725	94	1.580.826.161	
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					3.671.989.100		977.148.000		865.600.000		906.740.000		1.168.750.000		920.600.000	
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	persentase kelompok tribina yang aktif	100	persen	100	3.631.989.000	100	533.250.000	100	259.600.000	100	282.900.000	100	533.250.000	100	259.600.000	
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (CPR)	81,1	persen	81,15	40.000.100	81,2	443.898.000	81,25	606.000.000	81,25	623.840.000	81,3	635.500.000	81,35	661.000.000	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					6.391.694.825		13.244.322.243		14.519.552.088		18.396.084.692		15.894.785.207		16.945.104.586	
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100	persen	100	5.981.422.100	100	6.047.217.743	100	6.113.737.138	100	6.180.988.247	100	6.248.979.118	100	6.317.717.888	
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Perlengkapan Jalan Yang Terpasang	50	persen	60	410.272.725	70	7.197.104.500	72	8.405.814.950	70	12.215.096.445	75	9.645.806.090	80	10.627.386.698	
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					4.822.039.276		4.860.600.000		5.429.500.000		6.009.246.800		6.554.540.592		7.183.964.428	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100	persen	100	4.229.788.276	100	4.310.600.000	100	4.739.500.000	100	5.211.246.800	100	5.726.940.592	100	6.300.844.428	
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	persentase informasi pembangunan daerah yang diberikan ke masyarakat	70	persen	75	301.001.000	80	200.000.000	85	200.000.000	90	200.000.000	95	200.000.000	95	200.000.000	
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Jumlah sistem informasi dan aplikasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik	43	Aplikasi	43	291.250.000	10 Aplikasi	350.000.000	15 Aplikasi	490.000.000	20 Aplikasi	598.000.000	25 Aplikasi	627.600.000	30 Aplikasi	683.120.000	
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					4.318.035.994		5.066.500.000		5.429.925.000		5.671.596.250		5.915.351.062		6.089.543.615	
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100	persen	100	3.827.719.694	100	4.533.500.000	100	4.879.925.000	100	5.099.596.250	100	5.326.351.062	100	5.488.543.615	
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Peningkatan jumlah koperasi yang berkualitas baik	21	Koperasi	16		16	8.000.000	20	10.000.000	24	12.000.000	28	14.000.000	32	16.000.000	
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Peningkatan jumlah KSP/USP yang berkualitas baik	6	KSP/USP	15	52.252.300	25	60.000.000	30	65.000.000	35	70.000.000	40	75.000.000	40	75.000.000	
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah Pengurus Koperasi yang telah mengikuti Pelatihan Perkoperasian	30	Orang	40	197.379.000	60	200.000.000	60	205.000.000	60	210.000.000	60	215.000.000	60	220.000.000	
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Koperasi yang mengalami peningkatan produktivitas usaha	3	Koperasi	3		3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	3	10.000.000	
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah Pelaku Usaha Mikro Naik Kelas	22	usaha mikro	30	240.685.000	40	255.000.000	50	260.000.000	60	270.000.000	70	275.000.000	80	280.000.000	
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					3.880.656.020		5.293.801.610		5.699.134.077		6.146.635.637		6.598.327.278		7.070.585.350	

KODE	PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah penanggung		
					2021		2022		2023		2024		2025		2026				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA DAERAH	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100	persen	100	2.987.170.650	100	3.886.909.805	100	4.165.594.491	100	4.466.647.330	100	4.762.645.273	100	5.062.197.215			
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase pertumbuhan Investasi	4	dok	4	100.001.800	4	335.500.000	4	369.050.000	4	405.955.000	4	446.550.500	4	491.205.550			
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Promosi dan kerjasama investasi	4	kegiatan	4	432.400.300	4	541.640.330	4	595.804.363	4	655.384.799	4	720.923.279	4	793.015.607			
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Tersedianya Pelimpahan Kewenangan Perizinan yang dikelola DPMP TSP sesuai peruntukannya	100	persen	100	35.071.250	100	180.078.375	100	198.872.969	100	220.993.711	100	247.134.889	100	278.150.636			
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Cakupan Pengendalian Penanaman Modal	80	perusahaa n	100	326.012.020	130	349.673.100	160	369.812.255	190	397.654.797	220	421.073.338	250	446.016.342			
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					1.241.032.900		1.286.032.900		1.286.032.900		1.286.032.900		1.286.032.900		1.286.032.900			
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	terlaksanananya Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	1	tahun	1	155.856.500	1	200.856.500	1	200.856.500	1	200.856.500	1	200.856.500	1	200.856.500			
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	terlaksanananya Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	1	tahun	1	1.010.176.400	1	1.010.176.400	1	1.010.176.400	1	1.010.176.400	1	1.010.176.400	1	1.010.176.400			
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	terlaksanananya Pengembangan kapasitas kepramukaan	1	tahun	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000			
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					118.058.600		450.000.000		650.000.000		650.000.000		650.000.000		650.000.000			
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	100	persen	65	118.058.600	70	450.000.000	75	650.000.000	75	650.000.000	80	650.000.000	90	650.000.000			
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					74.790.000		100.000.000		100.000.000		200.000.000		250.000.000		250.000.000			
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Sertifikat Digital	2	Unit	persen	2	Unit	74.790.000	0,4	100.000.000	0,5	100.000.000	0,5	200.000.000	0,6	250.000.000	0,8	250.000.000	
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					6.173.089.950		8.343.782.950		8.343.782.950		8.343.782.950		8.343.782.950		8.343.782.950			
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA DAERAH	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100	persen	100	3.674.060.350	100	3.879.060.350	100	3.879.060.350	100	3.879.060.350	100	3.879.060.350	100	3.879.060.350			
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Terlaksanananya Pengembangan kebudayaan	100	persen	100	1.953.367.350	100	3.879.060.350	100	3.879.060.350	100	3.879.060.350	100	3.879.060.350	100	3.879.060.350			
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah jenis kesenian daerah yang dilestarikan	-	tahun	12	486.939.750	1	496.939.750	1	496.939.750	1	496.939.750	1	496.939.750	1	496.939.750			
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah cagar Budaya yang lestasri	15	unit	15	58.722.500	15	88.722.500	15	88.722.500	17	88.722.500	18	88.722.500	20	88.722.500			
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					3.917.539.657		4.689.200.000		4.737.200.000		4.957.700.000		5.169.200.000		5.354.700.000			
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA DAERAH	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100	persen	100	3.662.510.157	22	4.064.200.000	22	4.049.700.000	25	4.207.700.000	25	4.356.700.000	25	4.479.700.000			
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan	67742	perpustakaan	63000	255.029.500	20	550.000.000	20	600.000.000	20	650.000.000	20	700.000.000	20	750.000.000			
		Persentase perpustakaan yang melaksanakan manajemen perpustakaan	6%	persen	32%		39%		45%		51%		58%		64%				
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah Pelestarian Koleksi Daerah dan Naskah Kuno serta Budaya Etnis Nusantara di Kab. Dharmasraya	-	dokumen	-		10	75.000.000	16	87.500.000	22	100.000.000	28	112.500.000	34	125.000.000			

KODE	PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah penanggung
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					60.000.000		660.000.000		660.000.000		660.000.000		660.000.000		660.000.000	
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku		38 persen	47%	60.000.000	58%	385.000.000	68%	385.000.000	68%	385.000.000	79%	385.000.000	89%	385.000.000	
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Meningkatnya jumlah arsip daerah yang diselamatkan dan dilestarikan		1 persen	5		10	250.000.000	10	250.000.000	10	250.000.000	10	250.000.000	10	250.000.000	
2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Terwujudnya izin penggunaan arsip yang terkelola dengan baik sesuai dengan aturan		1 SOP	1		1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					29.127.366.783		89.598.078.500		48.147.029.700		50.814.850.520		53.606.599.572		56.729.057.130	
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					1.601.187.400		1.900.000.000		2.055.000.000		2.140.000.000		2.275.000.000		2.385.000.000	
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan budidaya		21.993 ton	25.309	1.555.276.700	26.579	1.690.000.000	27.913	1.825.000.000	29.314	1.890.000.000	30.780	2.015.000.000	32.325	2.095.000.000	
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah produksi perikanan tangkap		192 ton	200	24.008.700	205	55.000.000	210	65.000.000	215	70.000.000	220	75.000.000	225	85.000.000	
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah diversifikasi olahan ikan yang berdaya saing		1 jenis	1	21.902.000	1	155.000.000	1	165.000.000	1	180.000.000	1	185.000.000	1	205.000.000	
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					296.151.150		449.711.500		449.711.500		449.711.500		449.711.500		449.711.500	
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Daya Tarik Wisata Yang Dikembangkan		1 destinasi	1	178.476.500	3	288.476.500	2	288.476.500	4	288.476.500	4	288.476.500	2	288.476.500	
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Terlaksananya Pemasaran Pariwisata		1 unit	1	86.235.000	1	106.235.000	1	106.235.000	1	106.235.000	1	106.235.000	1	106.235.000	
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah pelaku ekonomi kreatif		800 kelompok	32	31.439.650	36	55.000.000	40	55.000.000	#N/A	55.000.000	45	55.000.000	52	55.000.000	
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					23.078.188.098		25.999.062.000		28.748.968.200		31.683.865.020		34.679.751.522		38.065.226.674	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran		100 persen	100	14.758.019.030	100	16.953.896.000	100	18.799.285.600	100	20.739.214.160	100	22.640.635.576	100	24.822.199.134	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	persentase kelompok tani memiliki alat pertanian		60 persen	65	1.546.304.750	70	1.943.804.000	75	2.138.184.400	80	2.352.002.840	85	2.587.203.124	90	2.845.923.436	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	persentase sawah teraliri irigasi		70 persen	72	6.158.822.000	74	6.486.321.000	76	7.134.953.100	78	7.848.448.410	80	8.633.293.251	85	9.496.622.576	
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	persentase kelompok tani terbina		60 persen	65	52.242.850	70	52.242.000	75	57.466.200	80	63.212.820	85	69.534.102	90	76.487.512	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	persentase kelompok tani terbina		70 persen	75	562.799.468	77	562.799.000	80	619.078.900	82	680.986.790	85	749.085.469	90	823.994.016	
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					149.991.075		53.480.000.000		8.495.000.000		7.550.000.000		6.620.000.000		5.700.000.000	
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pasar rakyat yang telah direvitalisasi		32,43 paket	35	18.597.700	19	53.100.000.000	16	8.055.000.000	13	7.060.000.000	10	6.065.000.000	7	5.070.000.000	
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Koofisien Variasa Harga Barang Kebutuhan Pokok antar waktu	-	indeks	-	31.399.210	-	155.000.000	-	180.000.000	-	205.000.000	-	230.000.000	-	255.000.000	
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Alat UTTP yang Beratanda tera sah		25,13 unit	30	99.994.165	1700	225.000.000	2325	260.000.000	2600	285.000.000	2800	325.000.000	2950	375.000.000	

KODE	PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah penanggung
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					681.972.700		3.300.000.000		3.520.000.000		3.840.000.000		4.160.000.000		4.480.000.000	
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase peningkatan omzet IKM		6,5 IKM	8	610.777.650	175	1.800.000.000	216	2.000.000.000	257	2.200.000.000	298	2.400.000.000	339	2.600.000.000	
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase IKM yang memiliki legalitas sesuai standar		7,05 persen	40	31.534.500	50	200.000.000	60	100.000.000	70	100.000.000	80	100.000.000	90	100.000.000	
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase data Informasi Industri yang ter update	-	persen	-	39.660.550	-	1.300.000.000	-	1.420.000.000	-	1.540.000.000	-	1.660.000.000	-	1.780.000.000	
3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					3.319.876.360		4.469.305.000		4.878.350.000		5.151.274.000		5.422.136.550		5.649.118.956	
3.32.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran		100 persen	100	3.275.183.360	100	4.469.305.000	100	4.878.350.000	100	5.151.274.000	100	5.422.136.550	100	5.649.118.956	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					73.313.990.399		89.262.778.850		79.468.355.640		81.406.384.024		84.389.457.161		92.506.176.543	
4.01	SEKRETARIAT DAERAH					31.809.742.914		41.865.434.655		37.475.655.685		38.271.006.752		40.368.300.929		47.929.936.163	
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran		100 persen	100	27.092.347.098	100	36.035.751.363	100	30.494.326.994	100	30.642.378.643	100	31.600.808.518	100	38.396.311.090	
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Jumlah produk hukum yang difasilitasi, harmonisasi dan dievaluasi penyusunannya serta didokumentasikan dan disosialisasikan		16 indeks	20	3.854.888.382	20	4.313.481.600	20	5.335.081.600	20	5.694.081.600	20	6.499.081.600	20	6.884.081.600	
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase pencapaian realisasi fisik kegiatan tahunan		98 indeks	100	862.507.434	100	1.516.201.692	100	1.646.247.091	100	1.934.546.509	100	2.268.410.811	100	2.649.543.473	
4.02	SEKRETARIAT DPRD					41.504.247.485		47.397.344.195		41.992.699.955		43.135.377.272		44.021.156.232		44.576.240.380	
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran		100 persen	100	20.682.471.485	100	24.097.215.920	100	23.479.230.180	100	23.993.263.497	100	24.929.042.457	100	25.784.126.605	
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase agenda DPRD yang difasilitasi	-	persen	90	20.821.776.000	90	23.300.128.275	90	18.513.469.775	90	19.142.113.775	90	19.092.113.775	90	18.792.113.775	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					162.625.618.062		166.976.464.217		171.177.122.826		173.227.746.055		176.170.340.728		179.273.535.221	
5.01	PERENCANAAN					6.056.351.000		5.734.833.715		5.849.530.389		5.966.520.997		6.085.851.417		6.207.568.445	
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran		100 persen	100	4.161.719.250	100	4.244.953.635	100	4.329.852.708	100	4.416.449.762	100	4.504.778.757	100	4.594.874.332	
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Capaian sasaran RPJMD	-	persen	90	1.340.827.750	73	925.000.000	90	943.500.000	90	962.370.000	95	981.617.400	95	1.001.249.748	
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase dokumen perencanaan yang ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku		100 persen	100	553.804.000	100	564.880.080	100	576.177.682	100	587.701.235	100	599.455.260	100	611.444.365	
5.02	KEUANGAN					148.137.394.494		151.842.563.002		156.431.520.562		158.753.096.590		161.190.751.420		163.750.288.991	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran		100 persen	100	34.220.837.164	100	35.347.563.002	100	39.589.270.562	100	41.568.734.090	100	43.647.170.795	100	45.829.529.334	
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penyusunan anggaran tepat waktu		100 persen	100	112.976.630.730	100	113.540.000.000	100	113.739.500.000	100	113.926.475.000	100	114.122.798.750	#N/A	114.328.938.688	
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase barang milik daerah yang dikelola dengan baik		100 persen	100	557.165.600	100	1.060.000.000	100	1.113.000.000	100	1.168.650.000	100	1.227.082.500	#N/A	1.288.436.625	
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Nilai AKIP komponen perencanaan kinerja		19,35 persen	20	382.761.000	22	1.895.000.000	23	1.989.750.000	23	2.089.237.500	24	2.193.699.375	25	2.303.384.344	

KODE	PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah penanggung
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
5.03	KEPEGAWAIAN					6.622.829.768		6.952.697.500		7.465.941.875		7.077.998.468		7.463.607.891		7.885.547.785	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100	persen	100	6.038.556.168	58	5.537.697.500	57	5.988.941.875	57	5.551.998.468	57	5.880.607.891	57	6.250.547.785	
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Keuangan	0	indeks	0	584.273.600	2598	1.415.000.000	2736	1.477.000.000	2746	1.526.000.000	2766	1.583.000.000	2786	1.635.000.000	
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					1.785.393.800		2.421.370.000		1.405.130.000		1.405.130.000		1.405.130.000		1.405.130.000	
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Indeks Profesionalitas ASN	0	persen	62	1.785.393.800	179	2.421.370.000	106	1.405.130.000	106	1.405.130.000	106	1.405.130.000	106	1.405.130.000	
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					23.649.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase penempatan ASN sesuai kompetensi	41,25	inovasi	42	23.649.000	45	25.000.000	47	25.000.000	47	25.000.000	50	25.000.000	52	25.000.000	
5.06	PENGELOLAAN PERBATASAN							0		0		0		0		0	
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					7.809.443.402		7.821.068.402		8.268.708.852		8.448.412.852		8.636.102.212		8.863.967.852	
6.01	INSPEKTORAT DAERAH					7.809.443.402		7.821.068.402		8.268.708.852		8.448.412.852		8.636.102.212		8.863.967.852	
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100	persen	100	6.565.620.902	100	6.577.245.902	100	6.837.598.852	100	6.945.039.852	100	7.056.775.212	100	7.173.528.852	
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Tingkat maturitas implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	3	dokumen	-	883.755.000	2	883.755.000	3	1.016.826.000	3	1.068.197.000	3	1.122.164.000	3	1.210.373.000	
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	-	dokumen	0,2	360.067.500	0,2	360.067.500	0,2	414.284.000	0,2	435.176.000	0,2	457.163.000	0,2	480.066.000	
7	UNSUR KEWILAYAHAN					18.345.329.422		19.112.604.373		19.390.248.439		19.672.057.166		19.958.093.023		20.248.419.418	
7.01	KECAMATAN					18.345.329.422		19.112.604.373		19.390.248.439		19.672.057.166		19.958.093.023		20.248.419.418	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100	persen	100	18.236.063.422	100	18.509.604.373	100	18.787.248.439	100	19.069.057.166	100	19.355.093.023	100	19.645.419.418	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP	-	persen	80	13.576.000	80	250.000.000	90	250.000.000	90	250.000.000	90	250.000.000	95	250.000.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	-	persen	60	75.260.000	60	100.000.000	60	100.000.000	60	100.000.000	60	100.000.000	65	100.000.000	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan trantibum di wilayah kecamatan yang diselesaikan	100	persen	100	4.940.000	100	165.000.000	100	165.000.000	100	165.000.000	100	165.000.000	100	165.000.000	
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	jumlah pembinaan terhadap pemerintahan nagari	52	kasus	52	15.490.000	52	88.000.000	52	88.000.000	52	88.000.000	52	88.000.000	52	88.000.000	

KODE	PROGRAM	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Tahun 2020	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah penanggung
					2021		2022		2023		2024		2025		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					2.264.840.180		3.631.968.880		3.825.326.680		4.038.020.260		4.271.983.198		4.529.342.430	
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					2.264.840.180		3.631.968.880		3.825.326.680		4.038.020.260		4.271.983.198		4.529.342.430	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	-	100 persen	100	1.181.885.100	100	1.664.160.000	100	1.740.576.000	100	1.824.633.600	100	1.917.096.960	100	2.018.806.656	
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Jumlah Konflik Sosial	-	persen	5	24.956.700	5	365.000.000	5	401.500.000	5	441.650.000	5	485.815.000	3	534.396.500	
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Pembinaan Partai Politik	-	persen	30	842.386.580	30	1.021.558.880	30	1.043.875.680	30	1.068.424.160	68,7	1.095.427.488	100	1.125.131.149	
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	-	persen	30	30.000.000	30	51.250.000	30	56.375.000	30	62.012.500	55	68.213.750	75	75.035.125	
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Pembinaan LSM	-	kasus	30	85.012.750	30	130.000.000	30	143.000.000	30	157.300.000	63,6	173.030.000	75	190.333.000	
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Jumlah Penyakit Masyarakat	-	kasus	2	100.599.050	3	400.000.000	3	440.000.000	2	484.000.000	3	532.400.000	4	585.640.000	
	TOTAL BELANJA					966.756.780.000		976.157.480.000		1.011.674.900.000		1.037.192.310.000		1.063.709.730.000		1.094.050.590.000	

BAB 8. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Untuk mengukur keberhasilan pembangunan di daerah, maka ditetapkan indikator kinerja beserta target kinerja yang akan dicapai hingga akhir periode pelaksanaan RPJMD. Adapun indikator kinerja tersebut akan ditampilkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu Indikator Kinerja Utama Pemerintah daerah Kabupaten Dharmasraya (IKU Daerah) yang menggambarkan keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan yang kedua adalah Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU Perangkat daerah) yang disajikan berdasarkan urusan pemerintahan yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan berdasarkan urusan yang akan dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah berdasarkan tujuan dan sasaran yang rumuskan sesuai dengan kewenangannya.

Baik IKU Daerah maupun IKU Perangkat daerah menggambarkan tingkat pencapaian kinerja hasil/outcome yang dilaksanakan melalui berbagai program maupun kegiatan/ sub kegiatan oleh perangkat daerah.

Pengukuran kinerja pembangunan mengukur kinerja daerah secara berkelanjutan sebagai umpan balik untuk mencapai target kinerja di masa mendatang. Dengan adanya informasi terukur pencapaian kinerja maka pemerintah daerah dapat mengukur kinerjanya secara obyektif dalam periode waktu tertentu sebagai hasil langsung atau tidak langsung dari serangkaian program dan kegiatan pembangunan yang dijalankan.

8.1. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah (IKU Daerah)

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dapat dilihat pada tabel 8.1

Tabel 8-1 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah (IKU Daerah) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026

No	Indikator Sasaran	Satuan	2020 (kondisi awal)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Misi 1 : Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur								
	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Indeks	-	-	60,50	62,7	67	70	73
	Rasio kemantapan jalan kabupaten	Persen	51,25	53	57	60	63	65	68
	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	Persen	59	59,86	65	70	80	95	100
	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Persen	87,25	90	92	95	97	98	100
	Persentase lingkungan permukiman kumuh	persen	87,2	76,30	58,75	41,13	23,03	12,90	7,22
	Rasio pemukiman layak huni	persen	85,00	85,85	88,65	91,45	94,25	97,05	100
	Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik	persen	67,36	68,20	69,10	69,75	71,30	72,80	73,50
	Persentase Pengendalian Daya Rusak Air	persen	-	28,26	28,54	28,83	29,12	27,98	28,26
2	Misi 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia								
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		71,51	71,66	71,82	71,98	72,13	72,29	72,44
	Angka Harapan Hidup	tahun	71,33	71,51	71,69	71,87	72,05	72,24	72,42
	Angka rata-rata lama sekolah	tahun	8,47	8,48	8,48	8,49	8,49	8,50	8,50
	Harapan lama sekolah	tahun	12,43	12,44	12,44	12,45	12,45	12,46	12,46
	Indeks Pembangunan Gender	indeks	88,31	88,83	89,00	89,17	89,34	89,50	89,67
3	Misi 3 : Meningkatkan potensi ekonomi daerah yang berdaya saing								
	Pertumbuhan PDRB	persen	-1,39	2,50	2,90	4,20	4,50	4,70	4,80
	Gini rasio	indeks	0,275	0,270	0,265	0,260	0,255	0,250	0,245
	PDRB Per Kapita	Juta rupiah	40,48	42,83	43,81	44,79	45,76	46,74	47,72
	Rasio Net Ekspor terhadap PDRB	persen	3,08	3,15	3,25	3,4	3,6	3,7	3,8
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	persen	6,07	5,88	5,68	5,49	5,29	5,10	4,90
	Tingkat Kemiskinan	persen	6,21	6,14	6,08	6,02	5,97	5,92	5,87
4	Misi 4 : Meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang efektif dan efisien								
	Indeks Reformasi Birokrasi	indeks	44,7	60	65	70	73	76	80
	Indeks perilaku antikorupsi	indeks	2,96	3,066	3,194	3,322	3,45	3,578	3,6

No	Indikator Sasaran	Satuan	2020 (kondisi awal)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Opini BPK terhadap laporan keuangan	bobot	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Hasil evaluasi AKIP	bobot/ indeks	B (63,44)	BB	BB	BB	BB	A	A
	Nilai LPPD	Skor	3,5138	3,6000	3,6500	3,7000	3,7500	3,8000	3,9000
	Indeks Kelembagaan	indeks	99,9						
	Indeks SPBE	indeks	1,35	1,625	1,9	2,175	2,45	2,725	3
	Indeks Profesionalisme ASN	indeks	58,04	62	65	68	71	74	77
	Publik service indeks	indeks	2,85	2,94	3,03	3,12	3,21	3,3	3,4
	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	79	80	81	82	83	84	85
	Persentase nagari mandiri	persen	7.69	11,53	15,38%	19,23	23,07	26,92	30,79
	Rata-rata Indeks Ketahanan Sosial	indeks	0,8108	0,8189	0,8195	0,8354	0,8437	0,8522	0,8607
	Rata-rata indeks ketahanan ekonomi	indeks	0,6917	0,6986	0,7056	0,7127	0,7198	0,7270	0,7343
	Rata-rata Indeks Ketahanan Ekologi / Lingkungan	indeks	0,5833	0,5891	0,5950	0,6010	0,6070	0,6131	0,6192
5	Misi 5 : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan								
	Indeks Pembangunan berkelanjutan	indeks	-	68,78	70.21	73.68	75.80	77.80	78.20
	Kesesuaian pemanfaatan ruang	persen	-	5	10	10	15	20	35
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	indeks	67,94	64,40	64,93	65,47	66,00	66,47	66,55
6	Misi 6 : Meningkatkan nilai-nilai agama, adat dan budaya yang mencerminkan kepribadian daerah								
	Jumlah nagari beradat dan berbudaya	nagari	-	1	3	6	10	13	17
	Persentase peningkatan zakat	persen	2	2	2	2	2	2	2
	Persentase MDA/TPA/TPSA yang aktif	persen	75	77	80	85	90	95	100
	Jumlah nagari beradat dan berbudaya	nagari	-	1	3	6	10	13	17

8.2. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU PD)

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah/ IKU Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel 8.2.

Tabel 8-2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU PD) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026

No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Kondisi Awal 2020	Satuan	target					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
01.01	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan								
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	68,62	Persen	69,77	73	75,5	78	80,5	83
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	106,94	Persen	105,94	106,94	107,94	108,94	109,94	110,94
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	103,3	Persen	104,3	105,3	106,3	107,3	108,3	109,3
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/Mi	103,3	Persen	99,39	99,47	99,55	99,63	99,71	99,79
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/Mts	93,13	Persen	94,13	95,13	96,13	97,13	98,13	99,13
6	Jumlh anak usia 7-15 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar	468	Orang	428	388	348	308	268	228
7	Jumlah anak 5-6 tahun yang sedang belajar di satuan PAUD	7614	orang	7758	7809	7828	7983	7874	7898
8	Persentase guru dan tenaga kependidikan professional	-	Persen	95	96	97	98	99	100
01.02	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan								
1	Angka kematian bayi (AKB)	9	per 1.000 kelahiran hidup	19,5	18,6	17,6	16	15	14
2	Angka Kematian Ibu melahirkan (AKI)	3	per 100,000 kelahiran hidup	112	110	108	105	103	100
4	Prevalensi Stunting	12,8	indeks	12.42	12.03	11.65	11.27	10.88	12.42
3	Prevalensi Malnutrisi	25,3	Persen	25	22,15	19,65	17,5	17,5	17
4	Persentase Rumah Tangga PHBS	27,5	Persen	29	31	33	35	37	40
5	Meningkatnya Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	39	Persen	41	45	50	60	65	70

No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Kondisi Awal 2020	Satuan	target					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
6	Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) yang ditangani ≤24 jam	100	Persen	100	100	100	100	100	100
7	Cakupan Pencegahan dan pengendalian penyakit menular	100	Persen	100	100	100	100	100	100
8	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit Tidak Menular	100	Persen	100	100	100	100	100	100
9	Visite Rate	3,8	/ Jumlah Penduduk	4	4,5	5	5	5	5,5
10	Persentase Puskesmas Terakreditasi Utama	21,4	Persen	35,7	42,8	50	64,2	78,5	100
11	Persentase UPT RSUD Terakreditasi	50	Persen	100	100	100	100	100	100
01.03 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang									
1	Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap	51,25	Persen	53	57	60	63	65	68
2	Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik	35,57	Persen	40	43	47	50	53	57
3	Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Kondisi Baik	59,86	Persen	60	62	65	66	67	69
4	Persentase penduduk yang terlayani jaringan pipa air minum	59	Persen	59,86	65	70	80	95	100
5	Persentase penduduk yang terlayani pelayanan air limbah domestik	87,25	Persen	90	92	95	97	98	100
6	Persentase ketersediaan Utilitas Umum (Drainase)	-	Persen	5,35	5,56	5,77	5,98	6,19	6,19
7	Persentase gedung perangkat daerah dalam kondisi baik	-	Persen	55	60	65	70	75	80
8	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang	-	Persen	5	10	10	15	20	35
9	Persentase Pelaku Jasa Konstruksi yang Memenuhi Standar Kompetensi	-	Persen	5	5	10	15	20	25
01.04 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman									
1	Cakupan permukiman layak huni	85	Persen	85,85	88,65	91,45	94,25	97,05	100
2	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	88,73	Persen	88	90,4	92,8	95,2	97,6	100

No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Kondisi Awal 2020	Satuan	target					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi korban bencana	-	Persen	100	100	100	100	100	100
4	Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena relokasi program Pemerintah	-	Persen	100	100	100	100	100	100
5	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 hektar yang ditangani	87.2	Persen	76.30	58.75	41.13	23.03	12.90	7.22
6	Cakupan lingkungan permukiman sehat dan aman yang didukung dengan PSU	95,96	Persen	55,74	60,66	65,57	70,49	75,41	80,33
7	Cakupan rumah layak huni yang terjangkau	8,52	Persen	-	10,01	11,12	12,51	14,3	16,68
01.05	Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat								
1	Persentase Penyelesaian kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	91	Persen	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Penegakan Perda dan Perkada yang memuat sanksi	1	Persen	100	100	100	100	100	100
3	persentase Inspeksi peralatan proteksi kebakaran pada instansi pemerintah dan swasta	-	Persen	-	80	90	100	100	100
4	Persentase respontime 15 menit pada lokasi kebakaran	9	Persen	100	100	100	100	100	100
5	Jumlah Nagari Tangguh Bencana	-	Nagari	0	1	1	2	4	3
6	Persentase korban bencana yang diselamatkan dan dievakuasi	-	Persen	100	100	100	100	100	100
7	Persentase daerah pasca bencana yang dipulihkan	-	Persen	75	75	75	75	75	75
01.06	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial								
1	Persentase PPKS yang tertangani	75	Persen	78	80	82	85	88	90
2	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	Persen	100	100	100	100	100	100

No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Kondisi Awal 2020	Satuan	target					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
3	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota	100	Persen	100	100	100	100	100	100
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
02.07 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja									
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	72,72	Persen	75,62	77,84	78,92	80,25	81,43	82,23
2	Persentase Lulusan Pelatihan yang ditempatkan	25,84	Persen	26,32	27,56	29,32	30,54	32,18	33,2
3	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan	41,36	Persen	42,56	43,19	44,36	45,12	46,32	47,08
4	Persentase Kasus - Kasus Ketenagakerjaan yang terselesaikan	100	Persen	100	100	100	100	100	100
02.08 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak									
1	Persentase keaktifan Focalpoint perangkat daerah	100	Persen	100	100	100	100	100	100
2	persentase Organisasi perempuan yang aktif	95,23	Persen	95,23	96	98	100	100	100
3	Tingkat kategori capaian APE (Anugrah Parahita Ekapraya)	-	Predikat/ Nilai	-	Pratama	-	Pratama	-	Madya
4	Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA)	tidak ada penilaian	Predikat/ Nilai	Pratama	Pratama	Pratama	Madya	Madya	Madya
5	rasio perempuan korban kekerasan yang tertangani	100	Persen	100	100	100	100	100	100
6	Rasio KDRT	0,002	Persen	0,002	0,002	0,001	0,001	0,001	0,001
02.09 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan									
1	Persentase cadangan pangan terhadap kebutuhan pangan daerah	27,75	Persen	33	43	53	63	73	83
2	Ketersediaan Kalori dan Protein Perkapita/hari	2.540	K.Kal/kap/hr	2.550	2.555	2.560	2.565	2.570	2.575
3	Skor Pola Pangan Harapan	85,6	indeks	87	87,5	88	88,5	89	89,5

No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Kondisi Awal 2020	Satuan	target					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
02.10	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan								
1	Persentase tanah Pemerintah Daerah yang bersertifikat	23.52	Persen	28.52.00	32.93	37.34.00	41.75	46.16.00	50.57.00
2	Jumlah kasus pertanahan milik Pemda dan masyarakat yang terfasilitasi/diselesaikan	100.00.00	Persen	100	100	100	100	100	100
3	Jumlah Persil tanah ulayat yang terinventarisir	-	Persil	5	6	7	8	9	10
02.11	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup								
1	Jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas terkait kebijakan tata kelola lingkungan hidup	-	dokumen	2	2	2	2	2	2
2	indeks kualitas air	70	indeks	70,5	71	71	71,5	71,5	72
3	indeks kualitas udara	86,11	indeks	86,5	86,5	87	87	87,5	88
4	indeks kualitas tutupan lahan	40,95	indeks	41	41	41	41,5	41,5	42
5	Cakupan Sumber Daya Alam yang terlindungi	6 Ha	Ha/Kawasan	Kawasan Lahan: 5 Kawasan Air: 5	Kawasan Lahan: 5 Kawasan Air: 5	Kawasan Lahan: 2 Kawasan Air: 2	Kawasan Lahan: 2 Kawasan Air: 2	Kawasan Lahan: 2 Kawasan Air: 2	Kawasan Lahan: 1 Kawasan Air: 1
6	Meningkatnya luas tutupan lahan/Menurunnya lahan kritis	6	Ha	5	5	2	2	2	1
7	Pengurangan Sampah (Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali)	8,92%	persen	10%	12%	14	16%	18%	18%
	Penanganan Sampah (Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota)	6,72%	persen	9%	12%	15%	18%	21,0%	24%
8	Cakupan ketaatan usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	29	usaha/kegiatan	31	33	35	37	39	40
02.12	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil								
1	Persentase kepemilikan KTP-el	97,74	Persen	100	100	100	100	100	100

No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Kondisi Awal 2020	Satuan	target					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
2	Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	35,55	Persen	70	80	90	100	100	100
3	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran pada Penduduk Usia 0-17 Tahun	87,17	Persen	92	95	97	100	100	100
4	Cakupan Akta Kematian dari Peristiwa Kematian yang dilaporkan	100	Persen	100	100	100	100	100	100
5	Cakupan Kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	-	Persen	85	87	90	93	95	100
6	Cakupan Kepemilikan Akta Perceraian pada semua individu yang perceraianannya dilaporkan	-	Persen	85	87	90	93	95	100
7	Jumlah Lembaga Pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan	4	unit	10	12	15	17	20	25
8	Jumlah Lembaga Pengguna yang memberikan data balikan atas pemanfaatan data kependudukan	4	unit	10	12	15	17	20	25
02.13 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa									
1	Persentase nagari yang sudah menyusun RPJM/RKP Nagari berbasis IDM	0	Persen	0	11,59	17,31	76,92	86,54	100
2	Persentase APB nagari berbasis IDM	0	Persen	0	0	11,58	17,31	76,92	86,54
3	Persentase Keuangan nagari berbasis Siskeudes Online		Persen	50	57,69	67,31	76,92	86,59	100
4	Persentase nagari memiliki bumrag berkembang	21,15	Persen	23,08	25	26,92	28,85	32,69	34,62
5	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Nagari (LKN) yang berperan aktif dalam pembangunan	84	Persen	86	88	90	92	94	96
6	Jumlah Bumrag Bersama	0	unit	0	1	2	3	4	5
7	Jumlah realisasi kerjasama antar nagari dan atau dengan pihak ketiga	0	nagari	0	2	4	4	6	6
02.14 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana									

No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Kondisi Awal 2020	Satuan	target					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Angka kelahiran total	2,71	Persen	2,69	2,66	2,64	2,62	2,59	2,56
2	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (CPR)	81,1	Persen	81,15	81,2	81,25	81,3	81,35	81,4
3	Persentase kebutuhan ber-KB (unmet-Need)	10,29	Persen	10,27	10,25	10,23	10,21	10,18	10,16
4	persentase kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) aktif	100	Persen	100	100	100	100	100	100
5	persentase kelompok tribina yang aktif	100	Persen	100	100	100	100	100	100
02.15 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan									
1	Persentase ruas jalan kabupaten yang dilengkapi perlengkapan jalan	-	Persen	60	61	62	64	65	67
2	V/C (volume capacti Ratio)	-	indeks	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
3	jumlah penambahan trayek angkutan umum	0	trayek	0	1	0	0	2	3
4	persentase angkutan orang dan barang yang melakukan uji KIR.	80	Persen	85	87	87	88	88	90
5	akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB)	-	bobot	B	B	A	A	A	A
02.16 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika									
1	Persentase sarana pemerintahan yang memiliki telekomunikasi terintegrasi	38 OPD		38 OPD	38 OPD	38 OPD	38 OPD	38 OPD	38 OPD
		1 Nagari		1 Nagari	10 Nagari	20 Nagari	30 Nagari	40 Nagari	52 Nagari
					10 SMP	20 SMP	25 SMP	25 SMP	33 SMP
					10 SD	20 SD	30 SD	40 SD	50 SD
		1 Puskesmas		1 Puskesmas	5 Puskesmas	8 Puskesmas	11 Puskesmas	13 Puskesmas	13 Puskesmas
2	Jumlah sistem informasi dan aplikasi dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik	43	aplikasi	43	10	15	20	25	30
3	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	11 Klp	aplikasi	11 Klp	65%	70%	75%	80%	85%
02.17 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah									
1	peesentase Koperasi Sehat	25	Koperasi	30	35	40	45	50	55

No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Kondisi Awal 2020	Satuan	target					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
2	Jumlah Pelaku Usaha Mikro Naik Kelas	22	Usaha mikro	30	40	50	60	70	80
02.18	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal								
1	Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal	130.026	miliar rupiah	148.463	163.308	179.639	197.639	197.602	239.099
2	Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi Penanaman Modal	3	Persen	3	3,2	3,3	3,4	3,5	4
02.19	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga								
1	Jumlah cabang olahraga yang aktif	33	cabor	15	20	25	28	30	33
2	Jumlah cabang olahraga yang berprestasi di tingkat provinsi	-	cabor	19	20	23	26	29	32
3	Jumlah cabang olahraga yang berprestasi di tingkat nasional	-	cabor	3	4	5	6	7	8
4	Jumlah organisasi pemuda yang aktif	-	unit	7	8	9	10	11	12
5	Jumlah pemuda dan kepemudaan berprestasi	-	Orang	1	2	3	4	5	6
6	Jumlah organisasi pramuka yang aktif	-	unit	15	16	17	18	20	22
7	Jumlah pelatih bersertifikat	-	Orang	-	5	5	5	5	5
02.20	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik								
1	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	100	Persen	55	60	70	80	90	100
2	Jumlah Nagari Statistik	1	Nagari	1	20	30	40	52	52
3	Jumlah Kecamatan Statistik	-	kecamatan		2	4	6	9	11
02.21	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian								
1	Aplikasi yang dilakukan asesment	21 web, 4 Aplikasi	web, aplikasi	21 web, 4 Aplikasi	5 Aplikasi	10 Aplikasi	15 Aplikasi	20 Aplikasi	25 Aplikasi
2	Persentase Jumlah Perangkat Daerah yang Menggunakan Sertifikat Digital	2 Unit	Persen	2 Unit	40%	50%	60%	80%	100%
02.22	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan								
1	Jumlah group kesenian daerah yang dilestarikan	30	Grup	30	60	90	120	150	172
2	Jumlah jenis kesenian daerah yang dilestarikan	-	Jenis	12	14	16	18	20	22

No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Kondisi Awal 2020	Satuan	target					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
3	Persentase lembaga adat yang aktif	100	Persen	75	80	85	90	95	100
4	Jumlah cagar budaya yang ditetapkan	26	unit	25	25	23	20	25	25
5	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	-	Unit	10	65	100	120	150	180
02.23 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan									
1	Jumlah pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan	67.742	orang	63.000	73.500	84.000	94.500	105.500	131.000
2	Persentase perpustakaan yang melaksanakan manajemen perpustakaan	6,25%	Persen	32,39%	38,68%	44,97%	51,26%	57,55%	63,84%
02.24 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan									
1	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	39,47%	Persen	47,37%	57,89%	68,42%	78,95%	89,47%	100,00%
2	Persentase Nagari yang mengelola arsip secara baku	17,31%	Persen	23,08%	30,77%	38,46%	46,15%	53,85%	61,54%
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
03.25 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan									
1	Produksi Perikanan	22.185	Ton	25.509	26.784	28.123	29.529	31.000	32.550
03.26 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata									
1	Jumlah kunjungan wisatawan	6.164	Orang	9164	36830	37567	38318	39084	39867
2	Tingkat hunian akomodasi	-	Persen	6,548	20,091	20,493	20,903	21,321	21,745
3	Jumlah pelaku ekonomi kreatif	800	Unit	32	36	40	45	52	60
4	Jumlah Lembaga Pada Daya Tarik Pariwisata yang dibina		lembaga	13	21	29	37	45	57
03.27 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian									
1	Produksi Padi	66.664	ton	67.000	67.000	67.500	67.500	67.500	67.500
2	Produksi Jagung	4.069	ton	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3	Produksi Kelapa sawit	104.992	ton	100.000	103.000	103.000	103.500	103.500	104.000

No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Kondisi Awal 2020	Satuan	target					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
4	Produksi karet	29.689	ton	30.500	30.000	30.200	30.500	31.000	31.200
5	Produksi Daging	6.340	ton	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6	Populasi Ternak (Sapi/Kerbau)	49.043	ekor	42.000	42.025	42.100	42.200	42.250	42.300
3.30	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan								
1	Persentase Pasar rakyat yang telah direvitalisasi	32,43	%	35	37	39	41	43	45
2	Alat UTTP yang Beratanda tera sah	25,13	Unit	30	35	40	45	50	55
03.31	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian								
1	Persentase peningkatan omzet IKM	6,5	Persen	8	8,1	8,2	8,3	8,4	8,5
2	Persentase IKM yang memiliki legalitas sesuai standar	7,05	Persen	40	60	80	90	100	100
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
04.01	Sekretariat Daerah								
1	Jumlah produk hukum yang difasilitasi, harmonisasi dan dievaluasi penyusunannya serta didokumentasikan dan disosialisasikan	16	Dokumen	20	20	20	20	20	20
2	Jumlah penyelesaian permasalahan hukum daerah	5	Kasus	5	10	10	10	10	10
3	Jumlah zakat yang dikumpulkan oleh BAZNAS	4.680	Juta Rupiah	5.148	5.620	7.025	7.500	8.000	8.500
4	Persentase pencapaian realisasi fisik kegiatan tahunan	98	Persen	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Jumlah pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dengan metode kompetitif	27	Persen	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Barang Subsidi yang diawasi	100	Persen	100	100	100	100	100	100
7	Jumlah Kawasan Pertanian Tanaman Pangan yang dialiri irigasi	2	Kawasan	2	3	3	4	4	5
8	Nilai Sakip komponen pelaporan	11,27	Bobot	11,62	11,97	12,32	12,67	13,02	13,37
9	Persentase OPD dengan nilai IKM lebih besar dan sama B (75)	91	Persen	92	93	94	95	96	97

No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Kondisi Awal 2020	Satuan	target					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
10	Persentase peningkatan kinerja kedinasan KDH dan WKDH	99	Persen	99	99	99	99	99	99
04.02	Sekretariat DPRD								
	Kinerja DPRD (sebagai indikator tujuan)								
1	Persentase Peraturan Daerah (Perda) yang ditetapkan berdasarkan program rancangan peraturan daerah (Prompemperda)	30	Persen	75	80	85	85	90	90
2	Persentase ditetapkanya Perda APBD dan APBD-P	100	Persen	100	100	100	100	100	100
3	Persentase rekomendasi DPRD terhadap pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	-	persen	100	100	100	100	100	100
	Kinerja Sekretariat DPRD (sebagai indikator sasaran)								
1	Persentase agenda DPRD yang difasilitasi		Persen	90	90	90	90	90	90
2	Persentase tercapainya Fasilitasi hubungan Kerjasama antara DPRD dan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Fungsi DPRD		persen	90	90	90	90	90	90
05	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
05.01	Perencanaan								
1	Capaian sasaran RPJMD	-	Persen	90	90	90	95	95	95
2	Rata-rata capaian sasaran Renstra PD		Persen	90	90	90	95	95	95
3	Rata-rata capaian Kegiatan/sub kegiatan		persen	90	90	90	95	95	95
4	Nilai AKIP komponen perencanaan kinerja	19,35	Bobot	20	22	23	24	25	26
5	Nilai AKIP komponen pengukuran kinerja	16,48	Bobot	18	19	20	21	22	23
6	Nilai AKIP komponen capaian kinerja	10,56	Bobot	12	13	14	15	16	17
05.02	Keuangan								
1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	persen	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Rata-rata ketergantungan dana transfer	90	persen	90	90	90	90	90	90

No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Kondisi Awal 2020	Satuan	target					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
3	Persentase SILPA terhadap APBD	0,3	persen	0,3	0,275	0,25	0,2	0,2	0,2
05.03	Kepegawaian								
1	Indeks Profesionalitas ASN		Persen	62	65	68	71	74	77
2	Persentase ASN yang menyusun SKP tepat waktu	99,35	persen	94	95	96	97	98	99
3	Persentase penempatan ASN sesuai kompetensi	41,25		42	45	47	50	52	55
4	Persentase kasus ASN yang tertangani	100	Persen	100	100	100	100	100	100
05.04	Pendidikan Dan Pelatihan								
1	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	33,63	persen	11	13	15	17	19	21
05.05	Penelitian Dan Pengembangan								
1	Jumlah Inovasi Daerah	1	dokumen	1	1	1	1	1	1
05.06	Pengelolaan Perbatasan								
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN								
06.01	Inspektorat Daerah								
1	Tingkat Kapabilitas APIP	3	Bobot	2	3 DC	3 DC	3 DC	3	3
2	Tingkat maturitas implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	3	Bobot	-	2	3	3	3	3
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
07.01	Kecamatan								
1	Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP	-	persen	80	80	90	90	95	95
2	persentase hasil musrenbang kecamatan yang ditampung dalam RKPD	-	persen	60	60	60	60	65	65
3	Jumlah gangguan trantibum yang di wilayah kecamatan	-	Kasus	2	3	3	3	4	4

No	Urusan/ Bidang/ Indikator	Kondisi Awal 2020	Satuan	target					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM								
08.01	Kesatuan Bangsa Dan Politik								
1	Persentase Pembinaan Partai Politik	-	Persen	30	30	30	68,7	100	100
2	Persentase Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	-	Persen	30	30	30	55	75	85
3	Persentase Pembinaan LSM	-	Persen	30	30	30	63,6	75	85
4	Jumlah Konflik Sosial	-	Kejadian	5	5	5	5	3	3
5	Jumlah Penyakit Masyarakat	-	kasus	2	3	3	2	3	3

BAB 9. PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki peran strategis dalam pembangunan sebuah daerah. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2005-2025, RPJMD Provinsi Sumatera Barat dan RPJMN Tahun 2020-2024 serta muatannya juga telah menelaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011-2031.

9.1. Kaidah Pelaksanaan

Dokumen RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Strageis Perangkat daerah (Renstra PD) Tahun 2021-2026, dan Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) sampai dengan Tahun 2026..

Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah Kabupaten Dharmasraya berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026.
2. Dalam rangka menjamin tercapainya target indikator kinerja daerah dalam RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021-2026 diperlukan langkah-langkah optimalisasi pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah setiap tahunnya,
3. Perangkat Daerah Kabupaten Dharmasraya berkewajiban menyempurnakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026, yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

9.2. Pedoman Transisi

Berbeda dengan RPJMD yang berlaku di periode sebelumnya, bahwa saat ini terdapat perbedaan antara waktu menjabat Bupati/ Wakil Bupati Tahun 2021-2024, sedangkan Periode RPJMD ditentukan berdasarkan masa jabatan kepala daerah yaitu tahun 2021-2026. Oleh sebab itu untuk penyusunan RKPD tahun 2025 dan RKPD tahun 2026 tetap dilaksanakan sesuai dengan RPJMD ini sampai ditetapkannya RPJMD periode berikutnya. Hal ini mengingat RPJMD ini merupakan tahap keempat dari perodesasi RPJPD yang memuat cita-cita daerah sesuai dengan visi dan misi daerah yang telah disepakati, sehingga target pembangunan hingga tahun 2026 dapat tuntas demi **“TERWUJUDNYA KABUPATEN DHARMASRAYA MAJU YANG MANDIRI DAN BERBUDAYA”**.

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKHA